

PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED 2025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Jalan Jend. Sudirman Km. 5,5 Kel. Sijambi
Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai disusun untuk memenuhi mandat dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/ Walikota/ Bupati untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD berupa Laporan Keuangan pada setiap Tahunnya. Lebih lanjut Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 mensyaratkan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada Tahun 2015 telah terjadi perubahan pelaporan dari Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yaitu dari Basis Kas menuju Akrual menjadi Basis Akrual. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku dengan menyelenggarakan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Basis Akrual. Perubahan basis tersebut berdampak pada penambahan jumlah Laporan Keuangan yaitu dari 4 (empat) yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi 7 (tujuh) Laporan dengan penambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sehubungan dengan perubahan tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan penyusunan 7 (tujuh) Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 disusun dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai Laporan Keuangan Audited Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan keuangan ini masih terdapat kekurangan, baik dari sisi penyajian maupun pengungkapan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan keuangan ini, baik dari perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami berharap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 ini dapat

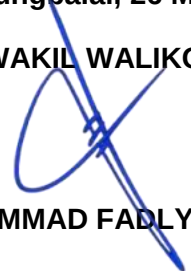
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Realisasi Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tanjungbalai, 26 Mei 2026

WAKIL WALIKOTA



MUHAMMAD FADLY ABDINA

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Pernyataaan Tanggungjawab	xv
Laporan Realisasi Anggaran	xvi
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	xviii
Neraca	xix
Laporan Operasional	xxi
Laporan Arus Kas	xxiii
Laporan Perubahan Ekuitas	xxvii
 Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan	9
1.4 Sumber dan Jumlah Dana yang Dikelola	10
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	11
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN DAN TARGET KINERJA APBD	 13
2.1 Ekonomi Makro	13
2.1.1 Penduduk	13
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	18
2.1.3 Ketenagakerjaan	22
2.1.4 Kesehatan	28
2.1.5 Stunting	30
2.1.6 Agama dan Sosial Lainnya	36
2.1.7 Pembangunan Manusia	36

2.1.8	Pertanian	38
2.1.9	Pertambangan dan Energi	39
2.1.10	Industri Pengolahan	39
2.1.11	Konstruksi	39
2.1.12	Transportasi dan Komunikasi	40
2.1.13	Perbankan dan Koperasi	40
2.1.14	Pengeluaran Penduduk	40
2.1.15	Perdagangan	41
2.1.16	Hotel dan Pariwisata	41
2.1.17	Badan Usaha Milik Daerah	42
2.1.18	Perbandingan Regional	43
2.1.19	Belanja Standart Pelayanan Minimal	45
2.2	Kebijakan Keuangan	52
2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	54
2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	55
2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	55
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	57
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	58
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	58
3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah	58
3.3	Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah	58
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	65
4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	65
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	66
4.3	Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan	69
BAB V	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	107
5.1	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	107
5.1.1	Pendapatan Daerah.....	107
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	108
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	124
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	132
5.1.2	Belanja Daerah	134
5.2.2.1	Belanja Operasi	135
5.2.2.2	Belanja Modal	146
5.2.2.3	Belanja Tidak Terduga	150

5.1.3	Surplus / (Defisit)	150
5.1.4	Pembiayaan Daerah	150
5.2.4.1	Penerimaan Pembiayaan	151
5.2.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	151
5.1.5	Pembiayaan Netto	151
5.1.6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	152
5.2	Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	152
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal.....	152
5.2.2	Penggunaan SAL (Saldo Anggaran Lebih)	153
5.2.3	SILPA	153
5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	153
5.3	Penjelasan Neraca	153
5.3.1	Aset	153
5.3.1.1	Aset Lancar	154
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	178
5.3.1.3	Aset Tetap	180
5.3.1.4	Aset Lainnya	190
5.3.1.5	Properti Investasi	194
5.3.2	Kewajiban	195
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	195
5.3.3	Ekuitas	197
5.4	Penjelasan Laporan Operasional	197
5.4.1	Pendapatan – LO.....	197
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	197
5.4.1.2	Pendapatan Transfer – LO.....	201
5.4.1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	204
5.4.2	Beban	206
5.4.2.1	Beban Operasi	207
5.4.2.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	216
5.4.2.3	Beban Tidak Terduga	221
5.4.3	Surplus / Defisit Dari Operasi	221
5.4.4	Surplus / Defisit – LO	221
5.5	Penjelasan Laporan Perubahan Kas	221
5.5.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	222
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivasi Investasi	222
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	223
5.5.4	Kenaikan/ Penurunan Kas	223
5.5.5	Saldo Awal Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran Dan	

Bendahara Penerimaan	223
5.5.6 Saldo Akhir Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan	224
5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	224
5.6.1 Ekuitas Awal	224
5.6.2 Surplus/ (Defisit) – LO	225
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	225
5.6.4 Ekuitas Akhir	225
BAB VI PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	226
6.1 Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai	226
6.2 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	227
6.3 Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kota Tanjungbalai	229
BAB VII PENUTUP	230

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2025	15
Tabel 2.2 Jumlah Global Penduduk dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024 dan 2025	16
Tabel 2.3 Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024 dan 2025	17
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai Tahun 2020 – 2024.....	20
Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai Tahun 2020 – 2024.....	21
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai tahun 2024	23
Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir di Kota Tanjung Balai, 2024.....	23
Tabel 2.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024	24
Tabel 2.9 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022-2024	25
Tabel 2.10 Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022-2024.....	25
Tabel 2.11 Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Menurut Kejuruan di Kota Tanjungbalai, 2024	26
Tabel 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota (persen), 2022 – 2024	27
Tabel 2.13 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2024.....	29

Tabel 2.14	Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2022-2024	29
Tabel 2.15	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Tanjungbalai, 2021-2024	30
Tabel 2.16	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bayi Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2021-2024	30
Tabel 2.17	Data Stunting Kota Tanjungbalai (SSGI 2024)	31
Tabel 2.18	Laporan Tematik pencegahan dan percepatan penurunan stunting Kota Tanjungbalai 2025	31
Tabel 2.19	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi, Ubi dan Jagung Kota Tanjungbalai Tahun 2024	38
Tabel 2.20	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022-2024	43
Tabel 2.21	Perhitungan Belanja SPM Bidang Pendidikan	45
Tabel 2.22	Perhitungan Belanja SPM Bidang Kesehatan	46
Tabel 2.23	Perhitungan Belanja SPM Bidang PUPR	46
Tabel 2.24	Perhitungan Belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	48
Tabel 2.25	Perhitungan Belanja SPM Bidang Sosial	48
Tabel 2.26	Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan	50
Tabel 2.27	Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	51
Tabel 2.28	Rincian APBD TA. 2025 Sebelum dan Setelah Perubahan	57
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025	58
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah TA 2025	59
Tabel 4.1	Klasifikasi Kualitas Piutang dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungbalai	83
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024	
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024	108
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024	108
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun Anggaran 2025	108
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024	113
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	113
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dan 2024	116
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024	119
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024	120

Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024	125
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024	125
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024	126
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024	127
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024	128
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024	128
Tabel 5.16	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan 2024	129
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024	129
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024	130
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024	131
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAD Yang Sah TA 2025 dan 2024	132
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Per Puskesmas TA 2025 dan 2024	132
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024	135
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024	135
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	135
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024	136
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024	136
Tabel 5.27	Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024	137
Tabel 5.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	138
Tabel 5.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024	138
Tabel 5.30	Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024	136
Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024	136
Tabel 5.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	140
Tabel 5.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024	140
Tabel 5.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024	141
Tabel 5.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	141
Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024	142
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk di berikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Pihak Masyarakat TA 2025 dan 2024	142

Tabel 5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024	143
Tabel 5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024	143
Tabel 5.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024	143
Tabel 5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024	144
Tabel 5.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024	145
Tabel 5.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024	146
Tabel 5.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024	146
Tabel 5.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024	147
Tabel 5.46	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024	148
Tabel 5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi TA 2025 dan 2024	149
Tabel 5.48	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024	149
Tabel 5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024....	150
Tabel 5.50	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak terduga TA 2025 dan 2024	150
Tabel 5.51	Surplus/ Defisit TA 2025 dan 2024	150
Tabel 5.52	Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024	151
Tabel 5.53	Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024	151
Tabel 5.54	Pembiayaan Netto TA 2025 dan 2024	151
Tabel 5.55	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024	152
Tabel 5.56	Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dan 2024	152
Tabel 5.57	Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024	153
Tabel 5.58	Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	154
Tabel 5.59	Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	154
Tabel 5.60	Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	154
Tabel 5.61	Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024	157
Tabel 5.62	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024	158
Tabel 5.63	Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	159
Tabel 5.64	Rincian Piutang Pajak Hotel 31 Desember 2025 dan 2024	160
Tabel 5.65	Rincian Piutang Pajak Restoran 31 Desember 2025 dan 2024	161
Tabel 5.66	Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025 dan 2024	163
Tabel 5.67	Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024	163
Tabel 5.68	Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 dan 2024	164

Tabel 5.69	Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024	165
Tabel 5.70	Rincian Piutang PBBP2 per 31 Desember 2025 dan 2024	166
Tabel 5.71	Rincian Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 dan 2024	168
Tabel 5.72	Rincian Piutang Pajak PBJT per 31 Desember 2025 dan 2024	169
Tabel 5.73	Rincian Piutang Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	169
Tabel 5.74	Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024.....	171
Tabel 5.75	Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum Per 31 Desember 2025 dan 2024	172
Tabel 5.76	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan yang Belum Disetorkan ke Kas Daerah oleh PDAM Tirta Kualo TA 2025 dan 2024	173
Tabel 5.77	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024	173
Tabel 5.78	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 dan 2024.....	1174
Tabel 5.79	Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah TA 2025 dan 2024	175
Tabel 5.80	Piutang Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024	175
Tabel 5.81	Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024.....	176
Tabel 5.82	Persediaan TA 2025 dan 2024	177
Tabel 5.83	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2025 dan 2024	179
Tabel 5.84	Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank SUMUT TA 2025 dan 2024	179
Tabel 5.85	Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Kualo per 31 Desember 2025	179
Tabel 5.86	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025	181
Tabel 5.87	Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025.....	182
Tabel 5.88	Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025.....	184
Tabel 5.89	Rekapitulasi Jumlah Sekolah Penerima Hibah Peralatan Digitalisasi dari Kemendikdasmen per 31 desember 2025	185
Tabel 5.90	Perhitungan Mutasi gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025.....	186
Tabel 5.91	Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025	187
Tabel 5.92	Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025.....	188
Tabel 5.93	Perhitungan Mutasi KDP Per 31 Desember 2025	188
Tabel 5.94	Rincian KDP Pemerintah Kota Tanjungbalai Per 31 Desember 2025.....	189
Tabel 5.95	Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025.....	190
Tabel 5.96	Saldo Aset Lainnya TA 2025 dan 2024.....	191
Tabel 5.97	Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan 2024.....	191
Tabel 5.98	Saldo Aset Lain Lain TA 2025 dan 2024.....	192
Tabel 5.99	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	193
Tabel 5.100	Properti Investasi	195
Tabel 5.101	Properti Investasi Tanah.....	195

Tabel 5.102	Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024	196
Tabel 5.104	Utang Belanja TA 2025 dan 2024	196
Tabel 5.105	Rincian Pendapatan – LO TA 2025 dan 2024	198
Tabel 5.106	Rincian PAD– LO TA 2025 dan 2024.....	181
Tabel 5.107	Rincian selisih PAD– LO dengan LRA per 31 Desember 2025.....	202
Tabel 5.108	Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan 2024	202
Tabel 5.109	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2025 dan 2024	183
Tabel 5.110	Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan 2024	205
Tabel 5.111	Rincian Beban-LO TA 2025 dan 2024	206
Tabel 5.112	Rincian Beban Operasi TA 2025 dan 2024.....	207
Tabel 5.113	Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024	207
Tabel 5.114	Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	209
Tabel 5.115	Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024	213
Tabel 5.116	Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....	214
Tabel 5.117	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	214
Tabel 5.118	Rincian Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024.....	217
Tabel 5.119	Rincian Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024	217
Tabel 5.120	Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	219
Tabel 5.121	Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024	219
Tabel 5.122	Rincian Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 dan 2024	220
Tabel 6.1.	Daftar Kecamatan di Kota Tanjungbalai.....	226
Tabel 6.2	Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Menurut Golongan Dan Jabatan Tahun 2025	228
Tabel 6.3	Daftar Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025	229

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 2.1. Grafik Luas Wilayah Kota Tanjungbalai	15
Grafik 2.2. Grafik Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai	16
Grafik 2.3. Perkembangan Umur Harapan Hidup Tanjungbalai Tahun 2023 Kota Tanjungbalai	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	DAFTAR PENERIMA HIBAH TA 2025
Lampiran 2	:	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
Lampiran 3	:	KAS DI BLUD
Lampiran 4	:	KAS DANA KAPITASI PADA FKTP
Lampiran 5	:	KAS DANA BOSP
Lampiran 6	:	KAS DANA BOK PUSKESMAS
Lampiran 7	:	PIUTANG PAJAK DAERAH - AIR TANAH
Lampiran 8	:	PIUTANG PBJT - MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN
Lampiran 9	:	PIUTANG PBJT - PERHOTELAN
Lampiran 10	:	PIUTANG PBJT - PARKIR
Lampiran 11	:	PIUTANG PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN
Lampiran 12	:	1. PIUTANG HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN 2. PIUTANG HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR 3. PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN TGR DAERAH 4. PIUTANG PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH 5. PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN
Lampiran 13	:	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH
Lampiran 14	:	1. PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH 2. PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI 3. PENYISIHAN PIUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH 4. PENYISIHAN BAG. LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN 5. PENYISIHAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Lampiran 15	:	PERSEDIAAN
Lampiran 16	:	ASET TETAP TANAH
Lampiran 17	:	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
Lampiran 18	:	DAFTAR HIBAH PERALATAN DIGITALISASI DARI KEMENDIKDASMEN
Lampiran 19	:	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
Lampiran 20	:	ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
Lampiran 21	:	ASET TETAP LAINNYA
Lampiran 22	:	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
Lampiran 23	:	AKUMULASI PENYUSUTAN
Lampiran 24	:	ASET TIDAK BERWUJUD
Lampiran 25	:	ASET LAIN LAIN - ASET RUSAK BERAT/ USANG
Lampiran 26	:	AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
Lampiran 27	:	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN - ASET RUSAK BERAT/ USANG
Lampiran 28	:	ASET PROPERTI INVESTASI
Lampiran 29	:	UTANG BELANJA
Lampiran 30	:	MUTASI TAMBAH DAN KURANG BEBAN BARANG (LO)
Lampiran 31	:	MUTASI TAMBAH DAN KURANG BEBAN JASA (LO)



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

anjungbalai, 26 Mei 2026

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA

Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara
Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 93791



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KONSOLIDASI)



TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	Reff CALK	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	677.634.621.894,00	663.101.840.879,57	97,85	651.320.368.865,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	92.332.114.500,00	102.482.768.484,57	110,99	78.493.779.012,02
4.1.01	Pajak Daerah	5.1.1.1.a	31.770.000.000,00	34.904.580.493,60	109,86	22.526.900.770,40
4.1.02	Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	4.848.565.000,00	4.402.402.302,00	90,79	3.778.910.999,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	7.775.808.733,00	7.775.808.733,00	100,00	7.419.378.335,10
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	47.937.740.767,00	55.399.976.955,97	115,56	44.768.588.907,52
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	92.332.114.500,00	102.482.768.484,57	110,99	78.493.779.012,02
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	573.002.507.394,00	552.138.638.319,00	96,35	564.730.491.453,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.a	533.805.269.000,00	512.134.857.122,00	95,94	532.343.272.928,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.b	39.197.238.394,00	40.003.781.197,00	102,05	32.387.218.525,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	-	573.002.507.394,00	552.138.638.319,00	96,35	564.730.491.453,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.2	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94	8.096.098.400,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94	8.096.098.400,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94	8.096.098.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	-	677.634.621.894,00	663.101.840.879,57	97,85	651.320.368.865,02
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	681.283.418.477,91	634.674.775.719,90	93,15	663.417.790.308,93
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	615.231.429.880,53	572.780.567.538,84	93,10	596.195.040.569,84
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	332.446.624.761,07	308.708.683.131,53	92,85	296.679.870.905,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	267.081.581.145,46	248.936.767.817,31	93,20	263.725.524.265,88
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	11.804.023.974,00	11.503.716.590,00	97,45	32.850.295.398,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	3.899.200.000,00	3.631.400.000,00	93,13	2.939.350.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	-	615.231.429.880,53	572.780.567.538,84	93,10	596.195.040.569,84
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	64.851.988.597,38	61.886.590.721,06	95,42	66.570.230.739,09
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	28.743.021.183,00	26.797.925.710,00	93,23	22.467.197.465,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	7.030.354.360,82	6.810.459.595,46	96,87	14.150.367.006,32
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.d	21.150.120.755,56	20.530.710.985,60	97,07	26.975.520.604,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	3.143.540.300,00	2.962.742.432,00	94,24	2.977.145.663,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	84.951.998,00	84.751.998,00	99,76	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	-	64.851.988.597,38	61.886.590.721,06	95,42	66.570.230.739,09
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.3	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63	652.519.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63	652.519.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	-	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63	652.519.000,00

Kode Rekening	URAIAN	Reff CALK	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH BELANJA	-	681.283.418.477,91	634.674.775.719,90	93,15	663.417.790.308,93
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.4	(3.648.796.583,91)	28.427.065.159,67	(779,08)	(12.097.421.443,91)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.5	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	2.448.796.583,91	2.462.024.137,92	100,54	14.559.445.581,83
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.6	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.7	0,00	30.889.089.297,59	0,00	2.462.024.137,92

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



URAIAN	Reff CALK	2025	2024
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	2.462.024.137,92	14.559.445.581,83
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	5.2.2	2.462.024.137,92	14.559.445.581,83
SUBTOTAL (1-2)	-	0,00	0,00
SILPA/(SIKPA)	5.2.3	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92
SUBTOTAL (3+4)	-	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	-	0,00	0,00
LAIN-LAIN	-	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	5.2.4	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	Reff CALK	2025	2024
1	ASET	5.3.1	1.255.567.208.208,46	1.454.776.717.087,05
1.1	ASET LANCAR	5.3.1.1	49.947.569.996,91	47.358.673.040,18
1.1.01	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	30.886.610.798,58	2.462.024.137,92
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a.1	21.569.182.724,90	387.099.781,70
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.a.2	110.232.779,00	105.504.638,00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	5.3.1.1.a.3	8.645.231.076,38	1.013.820.739,53
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.a.4	128.479.790,76	112.353.061,76
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.a.5	50.100.037,54	36.434.956,93
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.a.6	383.384.390,00	806.810.960,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.b	34.316.839.065,00	31.225.384.713,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.c	2.741.504.000,00	2.427.708.500,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.d	22.084.164.386,79	15.617.038.445,46
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.e	18.730.787.227,00	28.552.134.349,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.f	(67.690.633.674,69)	(43.382.255.200,17)
1.1.12	Persediaan	5.3.1.1.g	8.878.298.194,23	10.456.638.094,97
	JUMLAH ASET LANCAR	-	49.947.569.996,91	47.358.673.040,18
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	41.710.868.666,84	43.405.419.545,02
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	-	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.a,b	41.710.868.666,84	43.405.419.545,02
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	-	41.710.868.666,84	43.405.419.545,02
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	41.710.868.666,84	43.405.419.545,02
1.3	ASET TETAP	5.3.1.3	1.118.072.806.888,18	1.325.444.610.837,14
1.3.01	Tanah	5.3.1.3.a	537.986.192.948,42	532.984.158.310,42
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	321.600.356.928,52	318.517.049.673,36
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	523.368.947.887,92	519.159.295.303,89
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	1.211.576.548.435,77	1.175.765.373.057,50
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	63.671.163.883,48	62.837.770.426,83
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	15.248.372.228,90	27.510.608.123,69
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(1.555.378.775.424,83)	(1.311.329.644.058,55)
	JUMLAH ASET TETAP	-	1.118.072.806.888,18	1.325.444.610.837,14
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Reff CALK	2025	2024
1.5	ASET LAINNYA	5.3.1.4	36.495.537.656,53	38.568.013.664,71
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.a	28.055.480.469,95	28.207.625.860,25
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.b	2.621.503.482,00	5.028.565.443,00
1.5.04	Aset Lain-lain	5.3.1.4.c	144.654.693.892,08	130.163.641.707,57
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.d	(2.284.089.349,63)	(4.445.276.342,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.e	(136.552.050.837,87)	(120.744.673.004,11)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.f	0,00	358.130.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		36.495.537.656,53	38.568.013.664,71
1.6	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.5	9.340.425.000,00	0,00
1.6.01	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.a	9.340.425.000,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	-	9.340.425.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	-	1.255.567.208.208,46	1.454.776.717.087,05
2	KEWAJIBAN	5.3.2	40.082.979.504,23	52.364.843.878,61
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	40.082.979.504,23	52.364.843.878,61
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.a	1.629.024.281,12	1.369.746.521,12
2.1.06	Utang Belanja	5.3.2.1.b	38.453.955.223,11	50.995.097.357,49
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	40.082.979.504,23	52.364.843.878,61
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	40.082.979.504,23	52.364.843.878,61
3	EKUITAS	5.3.3	1.215.484.228.704,23	1.402.411.873.208,44
3.1	EKUITAS	-	1.215.484.228.704,23	1.402.411.873.208,44
	JUMLAH EKUITAS	-	1.215.484.228.704,23	1.402.411.873.208,44
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	-	1.255.567.208.208,46	1.454.776.717.087,05

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	Reff CALK	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Laporan Operasional						
7	PENDAPATAN	5.4.1	671.971.589.880,28	638.300.742.686,30	33.670.847.193,98	5,28
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	111.602.867.412,11	57.505.244.354,30	54.097.623.057,81	94,07
7.1.01	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.a	37.736.409.335,60	25.456.050.040,40	12.280.359.295,20	48,24
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.b	4.716.717.802,00	3.968.826.999,00	747.890.803,00	18,84
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.c	7.775.808.733,00	7.419.378.335,10	356.430.397,90	4,80
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.d	61.373.931.541,51	20.660.988.979,80	40.712.942.561,71	197,05
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	-	111.602.867.412,11	57.505.244.354,30	54.097.623.057,81	94,07
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	541.959.161.197,00	572.699.399.932,00	(30.740.238.735,00)	(5,37)
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	-				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.a	511.776.727.122,00	532.701.402.928,00	(20.924.675.806,00)	(3,93)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.b	30.182.434.075,00	39.997.997.004,00	(9.815.562.929,00)	(24,54)
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	-	541.959.161.197,00	572.699.399.932,00	(30.740.238.735,00)	(5,37)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	18.409.561.271,17	8.096.098.400,00	10.313.462.871,17	127,39
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.a	9.929.127.195,17	0,00	9.929.127.195,17	100,00
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.b	8.480.434.076,00	8.096.098.400,00	384.335.676,00	4,75
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	18.409.561.271,17	8.096.098.400,00	10.313.462.871,17	127,39
	JUMLAH PENDAPATAN	-	671.971.589.880,28	638.300.742.686,30	33.670.847.193,98	5,28
8	BEBAN	5.4.2	680.279.944.694,98	642.902.982.963,52	37.376.961.731,46	5,81
8.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	569.960.415.851,18	594.454.997.729,76	(24.494.581.878,58)	(4,12)
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1.a	303.721.220.475,53	301.515.718.144,96	2.205.502.330,57	0,73
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.b	243.277.583.691,54	251.173.272.223,36	(7.895.688.531,82)	(3,14)
8.1.05	Beban Hibah	5.4.2.1.c	13.032.646.312,00	32.850.295.398,00	(19.817.649.086,00)	(60,33)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.d	3.631.400.000,00	2.939.350.000,00	692.050.000,00	23,54
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.e	6.297.565.372,11	5.976.361.963,44	321.203.408,67	5,37
	JUMLAH BEBAN OPERASI	-	569.960.415.851,18	594.454.997.729,76	(24.494.581.878,58)	(4,12)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.e	110.311.911.383,80	47.795.466.233,76	62.516.445.150,04	130,80
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	110.311.911.383,80	47.795.466.233,76	62.516.445.150,04	130,80
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA	5.4.3	7.617.460,00	652.519.000,00	(644.901.540,00)	(98,83)

Kode Rekening	Uraian	Reff CALK	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.2.01	Beban Tidak Terduga	-	7.617.460,00	652.519.000,00	(644.901.540,00)	(98,83)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	-	7.617.460,00	652.519.000,00	(644.901.540,00)	(98,83)
	JUMLAH BEBAN	-	680.279.944.694,98	642.902.982.963,52	37.376.961.731,46	5,81
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-	(8.308.354.814,70)	(4.602.240.277,22)	(3.706.114.537,48)	80,53
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL						
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	(8.308.354.814,70)	(4.602.240.277,22)	(3.706.114.537,48)	80,53
Pos Luar Biasa						
8.5	BEBAN LUAR BIASA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.4	(8.308.354.814,70)	(4.602.240.277,22)	(3.706.114.537,48)	80,53

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Uraian	Reff CALK	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	-		
Penerimaan Pajak Daerah	-	34.904.232.743,60	22.526.900.770,40
Penerimaan Retribusi Daerah	-	4.402.402.302,00	3.778.910.999,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	7.775.808.733,00	7.419.378.335,10
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	-	55.270.264.264,97	44.547.466.407,52
Penerimaan Dana Bagi Hasil	-	0,00	16.673.418.080,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	0,00	420.334.460.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	-	0,00	34.863.740.727,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	-	0,00	60.471.654.121,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	-	18.245.283.384,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	-	420.280.906.403,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	-	2.202.807.760,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	-	64.266.450.575,00	0,00
Penerimaan Hibah kepada Daerah	-	0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif	-	0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan	-	0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	-	0,00	0,00
Penerimaan Insentif Fiskal	-	7.139.409.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	-	40.003.781.197,00	32.387.218.525,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	-	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	-	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	-	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	8.480.434.076,00	8.096.098.400,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	-	662.971.780.438,57	651.099.246.365,02
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI	-		
Pembayaran Pegawai	-	308.708.683.131,53	296.679.870.905,96
Pembayaran Barang dan Jasa	-	248.936.767.817,31	263.725.524.265,88
Pembayaran Bunga	-	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	-	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	-	11.503.716.590,00	32.850.295.398,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	-	3.631.400.000,00	2.939.350.000,00
Pembayaran Tak Terduga	-	7.617.460,00	652.519.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	0,00	0,00

Uraian	Reff CALK	2025	2024
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	-	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	-	572.788.184.998,84	596.847.559.569,84
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	90.183.595.439,73	54.251.686.795,18
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-		
Pencairan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	-	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	-	0,00	0,00
Penjualan Aset Lain-Lain	-	130.060.441,00	221.122.500,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	-	130.060.441,00	221.122.500,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	-		
Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
Perolehan Tanah	-	4.700.000.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	-	26.797.925.710,00	22.467.197.465,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	-	6.810.459.595,46	14.150.367.006,32
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	20.530.710.985,60	26.975.520.604,77
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	2.962.742.432,00	2.977.145.663,00
Perolehan Aset Lainnya	-	84.751.998,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	0,00	0,00
	-		
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		61.886.590.721,06	66.570.230.739,09
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	-	(61.756.530.280,06)	(66.349.108.239,09)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	0,00	0,00

Uraian	Reff CALK	2025	2024
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	-	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN	-		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	-	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-	0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	19.603.296.281,86	21.777.981.079,28
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	-	19.603.296.281,86	21.777.981.079,28
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS	-		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	19.603.296.281,86	21.791.154.980,28
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	-	19.603.296.281,86	21.791.154.980,28
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.3	0,00	(13.173.901,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.4	28.427.065.159,67	(12.110.595.344,91)
Saldo Awal Kas	5.5.5	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83
Koreksi SiLPA	-	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	-	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83
Saldo Akhir Kas	-	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92
Kas di Kas Daerah	-	21.569.182.724,90	387.099.781,69
Kas di Bendahara Penerimaan	-	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	110.232.779,00	105.504.638,00

Uraian	Reff CALK	2025	2024
Kas di BLUD	-	8.645.231.076,38	1.013.820.739,53
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	128.479.790,76	112.353.061,76
Kas Dana BOSP	-	50.100.037,54	36.434.956,93
Kas Dana BOK Puskesmas	-	383.384.390,00	806.810.960,00
Kas Lainnya	-	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.6	30.886.610.798,58	2.462.024.137,92

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



URAIAN	Reff	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.402.411.873.208,44	1.280.339.684.859,57
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	5.6.2	(8.308.354.814,70)	(4.602.240.277,22)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.6.3	(130.900.000,00)	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN	5.6.3	(178.488.389.689,51)	126.674.428.626,09
EKUITAS AKHIR	5.6.4	1.215.484.228.704,23	1.402.411.873.208,44

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara, Pemerintah Kota Tanjungbalai wajib untuk mempertanggungjawabkan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahunnya dengan melakukan Penyusunan Laporan Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/ Walikota/ Bupati untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan pada setiap Tahunnya. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 mensyaratkan bahwa bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada Tahun 2021 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku dengan menyelenggarakan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Basis Akrual. Adapun jumlah Laporan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) Laporan Keuangan yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis Akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit) LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menggambarkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas menggambarkan informasi tentang Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar pada Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas pertanggal laporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO pada periode bersangkutan, Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti : koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap, dan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis dan daftar terperinci atas suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, juga disertai dengan surat pernyataan kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang menjadi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya laporan keuangan daerah diharapkan akan terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat diharapkan akan semakin partisipatif didalam mendukung jalannya pemerintahan sebagaimana diharapkan dalam konsep Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai selama satu periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menerangkan dan menjelaskan kinerja berkenaan dengan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam merealisasikan target/rencana yang telah ditetapkan. Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer
- d. Surplus/(Defisit)-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

3. Neraca;

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/ (Defisit)-LO.

5. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah menyajikan pos-pos :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/(Defisit)-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

1. Koreksi kesalahan mendasar dari Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi Aset Tetap.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan Keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan;
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai ini didasarkan pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
24. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
33. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Tanjungbalai;
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2022 - 2026;
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

36. Peraturan Daerah Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan dan Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 2015 Pedoman Kapitalisasi, Pencatatan dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Tanjungbalai;
38. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
39. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
40. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungbalai;
42. Berbagai peraturan teknis lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan

Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Undang-undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kota Tanjungbalai dipimpin oleh Walikota, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Walikota dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

- a. 2 (Dua) Sekretariat, yaitu :
 1. Sekretariat Daerah; dan
 2. Sekretariat DPRD.
- b. 1 (Satu) Inspektorat Kota
- c. 19 (Sembilan Belas) Dinas, yaitu:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Ketenagakerjaan;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Dinas Pangan dan Pertanian;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Koperasi dan UKM;
15. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- d. 5 (Lima) Badan, yaitu:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. 1 (Satu) Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. 6. (Enam) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Datuk Bandar;
 2. Kecamatan Datuk Bandar Timur;
 3. Kecamatan Sei Tualang Raso;
 4. Kecamatan Teluk Nibung;
 5. Kecamatan Tanjungbalai Utara;
 6. Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

1.4 Sumber dan Jumlah Dana yang Dikelola

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah Kota Tanjungbalai selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Sumber dana dan jumlah APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendapatan

1	Pendapatan Asli Daerah	92.332.114.500,00
2	Pendapatan Transfer	573.002.507.394,00
3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.300.000.000,00
Jumlah :		677.634.621.894,00

Belanja

1	Belanja Operasi	615.231.429.880,53
2	Belanja Modal	64.851.988.597,38
3	Belanja Tak Terduga	1.200.000.000,00
Jumlah :		681.283.418.477,91

Pembiayaan

1	Penerimaan Pembiayaan	3.648.796.583,91
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Jumlah :		3.648.796.583,91

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan APBD Kota Tanjungbalai disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan
- 1.4 Sumber Dana dan Jumlah yang dikelola
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator Pencapaian Dan Target Kinerja APBD

- 2.1 Kondisi Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
- 3.2 Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Neraca
- 5.2 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.6 Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai
- 6.2 Letak, Luas dan Penduduk
- 6.3 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, INDIKATOR PENCAPAIAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tanjungbalai di kelilingi oleh Kabupaten Asahan. Dimana, Tanjungbalai terletak di kawasan pantai timur Pulau Sumatera, dan wilayahnya merupakan bagian hilir dari Sungai Asahan. Berjarak $\pm$ 186 kilometer dari Kota Medan. Biasanya dapat ditempuh dalam waktu 4,5 jam perjalanan darat. Seluruh wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan dengan wilayah Kabupaten Asahan. Wilayah Kota Tanjungbalai di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai – Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat – Kabupaten Asahan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang – Kabupaten Asahan. Dan secara astronomisnya Kota Tanjungbalai terletak terletak antara 2o 58' 15" - 3o 01' 32" Lintang Utara dan antara 99o 48' 00" – 99o 50' 16" Bujur Timur.

Kota Tanjungbalai menempati area seluas 60,52 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 22,49 km² atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 0,84 km² atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Seluruh kelurahan termasuk dalam kategori kelurahan swasembada. Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Walikota. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain: penduduk, ketenagakerjaan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.1 Penduduk

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi pendudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2024 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2024 (pertengahan tahun/Juni).

Kota Tanjungbalai menempati area seluas 60,52 km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan, Tanjungbalai Utara, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Datuk Bandar dengan luas wilayah 22,49 km² atau sekitar 37,16 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara dengan luas 0,84 km² atau sekitar 1,39 persen dari luas Kota Tanjungbalai. Seluruh kelurahan termasuk dalam kategori kelurahan swasembada. Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Walikota. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain: penduduk, ketenagakerjaan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

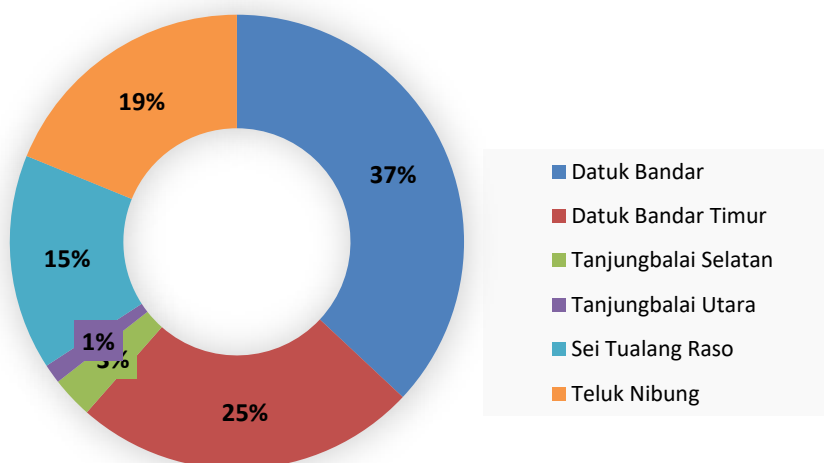
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Long Form 2020 Tahun 2025, Penduduk Kota Tanjungbalai berjumlah 185.647 jiwa dengan jumlah laki-laki 93.932 jiwa dan perempuan 91.715 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbesar di Kota Tanjungbalai adalah kecamatan Datuk Bandar dan terkecil kecamatan Tanjungbalai Utara dengan masing masing penduduk sebesar 45.017 jiwa dan 16.313 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 1,41 persen dimana kecamatan yang memiliki laju terbesar adalah kecamatan Datuk Bandar sebesar 2,10 persen. Kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai adalah sebesar 3.090,51 jiwa per kilometer persegi dimana kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Tanjungbalai Utara yaitu 19.654,22 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2025

Kecamatan	Keterangan Umum		
	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Datuk Bandar	5	22,21	36,97
2. Datuk Bandar Timur	5	14,73	24,52
3. Tanjungbalai Selatan	6	1,77	2,95
4. Tanjungbalai Utara	5	0,834	1,38
5. Sei Tualang Raso	5	9,22	15,35
6. Teluk Nibung	5	11,31	18,83
Tanjungbalai	31	60,07	100

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.1
Grafik Luas Wilayah Kota Tanjungbalai





PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

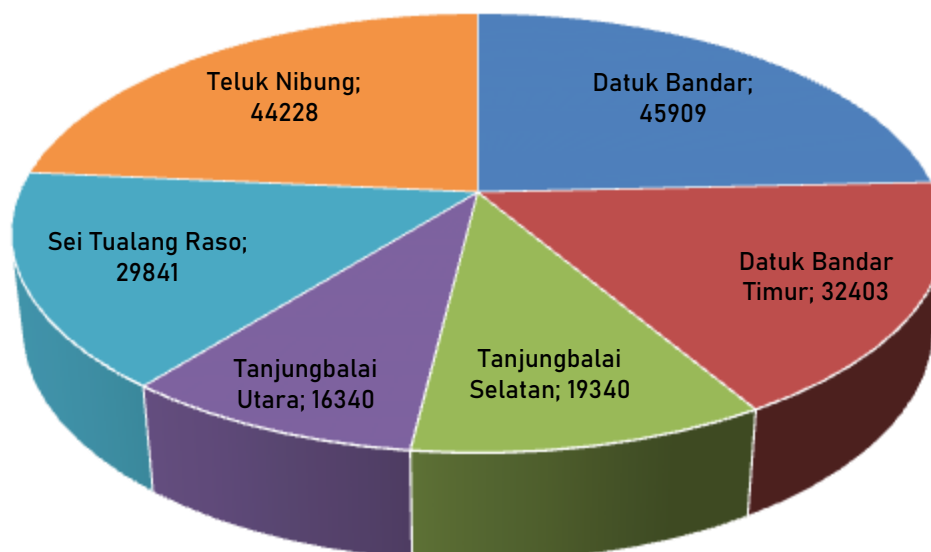
Kecamatan dengan penduduk terbesar di Kota Tanjungbalai adalah kecamatan Datuk Bandar dan terkecil kecamatan Tanjungbalai Utara dengan masingmasing penduduk sebesar 45.909 jiwa dan 16.340 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 1,39 persen dimana kecamatan yang memiliki laju terbesar adalah kecamatan Datuk Bandar sebesar 2,08 persen. Kepadatan penduduk Kota Tanjungbalai adalah sebesar 3.130,73 jiwa per kilometer persegi dimana kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah Tanjungbalai Utara yaitu 19.686,75 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2
Jumlah Global Penduduk dan Laju Pertumbuhan Berdasarkan Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2024 dan 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Tahun 2024-2025 (%)
	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Datuk Bandar	45.017	45.909	2,08
2. Datuk Bandar Timur	32.024	32.403	1,28
3. Tanjungbalai Selatan	19.337	19.342	0,12
4. Tanjungbalai Utara	16.313	16.340	0,26
5. Sei Tualang Raso	29.322	29.841	1,87
6. Teluk Nibung	43.634	44.228	1,46
Tanjungbalai	175.536	188.063	1,39

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.2
Grafik Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai





PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Tabel 2.3
Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk,
Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai,
2024 dan 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Tahun 2024-2025	Persentase Penduduk	
		2024	2025	(%)	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Datuk Bandar	45.017	45.909	2,08	24,25	24,41
2	Datuk Bandar Timur	32.024	32.403	1,28	17,25	17,23
3	Tanjungbalai Selatan	19.337	19.342	0,12	10,42	10,28
4	Tanjungbalai Utara	16.313	16.340	0,26	8,79	8,69
5	Sei Tualang Raso	29.322	29.841	1,87	15,79	15,87
6	Teluk Nibung	43.634	44.228	1,46	23,50	23,52
Tanjungbalai		175.536	188.063	1,39	100	100

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Sambungan Tabel 2.3

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk		Rasio Jenis Kelamin Penduduk	
		2024	2025	2024	2025
8	9	10	11	12	13
1	Datuk Bandar	2.026,88	2.067,04	101,00	100,70
2	Datuk Bandar Timur	2.174,07	2.199,80	102,89	103,12
3	Tanjungbalai Selatan	10.924,86	10.927,68	95,76	95,12
4	Tanjungbalai Utara	19.654,22	19.686,75	101,67	101,38
5	Sei Tualang Raso	3.180,26	3.136,55	104,35	104,38
6	Teluk Nibung	3.858,00	3.910,52	105,65	105,85
Tanjungbalai		3.090,51	3.130,73	102,42	102,35

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai



2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Kota Tanjungbalai tahun 2024 atas dasar harga berlaku yaitu Rp.12.207,74 Miliar Rupiah. Sementara atas dasar harga konstan yaitu Rp.6.744,35 Miliar Rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yaitu 51,09 juta Rupiah, dan atas dasar harga konstan yaitu 33,05 juta Rupiah.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah

- a) ScarMunicipality, yaitu ada kelangkaan/ keterbatasan dalam jumlah;
- b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga);
- c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/ puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri
 - a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut;
 - b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapa pun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkut. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan” Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai
Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.476,57	1.488,62	1.561,92	1.643,94	1.673,21
B. Pertambangan dan Penggalian	166,87	172,79	182,50	192,09	200,17
C. Industri Pengolahan	1.798,54	2.000,08	2.145,83	2.293,76	2.560,33
D. Pengadaan Listrik dan Gas	62,31	67,29	73,12	74,44	77,19
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,06	15,10	15,39	16,04	17,17
F. Konstruksi	1.428,58	1.491,62	1.608,38	1.712,51	1.877,18
G. Perdagangan Besar dan Eceran	2.071	2.185,01	2.519,70	2.700,38	2.985,87



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H. Transportasi dan Pergudangan	522,06	536,4	602,28	685,36	749,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,65	194,79	210,06	231,27	251,98
J. Informasi dan Komunikasi	80,14	87,93	94,54	100,85	109,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	154,71	164,46	181,58	195,82	203,65
L. Real Estat	295,36	305,03	321,04	336,61	360,80
M.N Jasa Perusahaan	27,20	27,91	31,16	34,17	36,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	579,72	578,67	573,59	648,84	695,76
P. Jasa Pendidikan	129,91	134,30	142,68	152,66	164,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,19	78,54	85,84	91,28	101,81
R.S.TU Jasa lainnya	102,67	104,19	115,99	129,49	143,36
PDRB	9.180,54	9.632,70	10.466,14	11.209,49	12.207,74

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai
Tahun 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	946,42	948,74	968,26	996,31	996,20
B. Pertambangan dan Penggalian	123,97	126,23	129,28	133,65	137,67
C. Industri Pengolahan	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24	1.365,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	40,25	43,13	45,92	46,42	48,84
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,44	10,34	10,46	10,77	11,19
F. Konstruksi	839,51	851,48	866,87	907,46	958,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72	1.588,42
H. Transportasi dan Pergudangan	352,51	355,24	379,15	401,34	421,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	139,98	141,16	149,40	161,36	169,60
J. Informasi dan Komunikasi	71,24	76,33	80,29	84,29	88,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	102,78	105,41	109,37	115,00	117,05
L. Real Estat	188,51	189,71	195,44	202,54	208,85
M.N Jasa Perusahaan	18,18	18,34	19,66	20,60	21,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	333,22	332,78	326,79	359,14	370,43
P. Jasa Pendidikan	94,71	97,49	103,19	109,42	113,28



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44,83	45,10	47,42	48,83	51,94
R.S.TU Jasa lainnya	60,48	61,12	65,04	70,30	75,08
PDRB	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77	6.744,35

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025 – BPS Kota Tanjungbalai

2.1.3 Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja Kota Tanjungbalai tahun 2024 berjumlah 93.286 jiwa dari 134.096 jiwa penduduk 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja 89.481 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 69,57 persen. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,08 persen. Jumlah penduduk Angkatan Kerja terbanyak menurut pendidikan adalah Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan tertinggi ditamatkan berasal dari Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 30.848 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari Diploma I/II/III sejumlah 1.047 jiwa.

Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 di Kota Tanjungbalai secara berurutan adalah sejumlah 133, 106 dan 57 orang. Jumlah peserta pelatihan kerja menurut kejuruan tahun 2022, 2023 dan 2024 di Kota Tanjungbalai secara berurutan sejumlah 15, 75, dan 30 orang.

Penduduk memiliki peranan penting sekaligus merupakan modal besar pembangunan apabila sumber data yang dimiliki dapat dimanfaatkan serta diberdayakan secara optimal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk jumlah penduduk usia kerja pun semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak pada kelompok angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Angkatan kerja Kota Tanjungbalai tahun 2024 berjumlah 93.286 jiwa dari 134.096 jiwa penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja 89.481 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 69,57 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2024 TPT di Kota Tanjungbalai mencapai 4,08 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 4 hingga 5 orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Pasar tenaga kerja Tanjungbalai juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

kerja yang bekerja sebesar 95,92 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat pengangguran di Tanjungbalai mengalami kenaikan 0,39 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Jumlah penduduk Angkatan Kerja terbanyak menurut pendidikan adalah Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan tertinggi ditamatkan berasal dari Sekolah Menengah Atas dengan jumlah 30.848 jiwa dan yang paling sedikit berasal dari Diploma I/II/ III sejumlah 1.047 jiwa. Jumlah pencari kerja ditempatkan menurut tingkat pendidikan tertinggi ditamatkan pada tahun 2022, 2023 dan 2024 di Kota Tanjungbalai secara berurutan adalah sejumlah 133, 106 dan 57 orang. Jumlah peserta pelatihan kerja menurut kejuruan tahun 2022, 2023 dan 2024 di Kota Tanjungbalai secara berurutan sejumlah 15, 75, dan 30 orang.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin
di Kota Tanjungbalai tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin / Sex		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	57.118	36.168	93.286
1. Bekerja	54.989	34.492	89.481
2. Pengangguran Terbuka	2.129	1.676	3.805
II. Bukan Angkatan Kerja	10.678	30.132	40.810
1. Sekolah	3.957	3.586	7.543
2. Mengurus Rumah Tangga	4.138	25.553	29.691
3. Lainnya	2.583	993	3.576
Jumlah/Total	67.796	66.300	134.096

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.7
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama
Seminggu Terakhir di Kota Tanjung Balai, 2024

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran*	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/Sekolah Dasar	25.186	937	26.123	96,41
2	Sekolah Menengah Pertama	15.018	848	15.866	94,66
3	Sekolah Menengah Atas	29.172	1.676	30.848	94,57



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran*	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
1	2	3	4	5	6
4	Sekolah Menengah Kejuruan	8.979	159	9.138	98,26
5	Diploma I/II/III/Akademi	1.047	0	1.047	100,00
6	Diploma IV/Universitas	10.079	185	10.264	98,20
Jumlah		89.481	3.805	93.286	95,92

Sambungan Tabel 2.7

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
1	2	7	8	9
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/Sekolah Dasar	12.862	38.985	67,01
2	Sekolah Menengah Pertama	10.292	26.158	60,65
3	Sekolah Menengah Atas	12.667	43.515	70,89
4	Sekolah Menengah Kejuruan	2.665	11.803	77,42
5	Diploma I/II/III/Akademi	460	1.507	69,,48
6	Diploma IV/Universitas	1.864	12.128	84,63
Jumlah		40.81	134.096	69,57

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

- Catatan : *
1. Mencari pekerjaan
 2. Mempersiapkan usaha
 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	8.885	7.759	16.644
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	2.253	4.633	6.886
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2.745	389	3.134
Buruh/Karyawam/Pegawai	36.114	16.015	52.129



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pekerja Bebas di Pertanian	1.111	91	1.202
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1.419	82	1.501
Pekerja keluarga/Pekerja tak Dibayar	2.462	5.523	7.985
Tanjungbalai	54.989	34.492	89.481

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.9
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin (tahun 2022)		Jenis Kelamin (tahun 2023)				Jenis Kelamin (tahun 2024)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar Sederajat	4	1	5	4	2	6	4	3	7
Sekolah Menengah Pertama (Umum)	6	12	18	10	2	12	7	2	9
Sekolah Menengah Pertama Lainnya	5	4	9	1	-	1	-	-	-
Sekolah Menengah Atas (Umum)	42	98	140	37	72	109	42	33	75
Sekolah Menengah Atas Lainnya	5	9	14	6	11	17	25	9	34
Paket C	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	30	25	55	19	17	36	38	17	55
Diploma I / II / III	2	3	5	1	1	2	8	2	10
Universitas	3	3	6	4	7	11	18	22	40
Tanjungbalai	97	155	252	84	112	196	142	88	230

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.10
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2022-2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin (tahun 2022)		Jenis Kelamin (tahun 2023)				Jenis Kelamin (tahun 2024)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar Sederajat	3	1	4	4	2	6	3	3	6



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin (tahun 2022)		Jenis Kelamin (tahun 2023)				Jenis Kelamin (tahun 2024)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Menengah Pertama Umum	4	7	11	10	1	11	7	2	9
Sekolah Menengah Pertama Lainnya	2	3	5	1	-	1	-	-	-
Sekolah Menengah Atas Umum	8	68	76	11	46	57	8	8	16
Sekolah Menengah Atas Lainnya	2	6	8	3	6	9	7	1	8
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	7	19	26	8	11	19	8	5	13
Diploma I/ II / III	-	2	2	-	1	1	-	-	-
Universitas	-	1	1	1	1	2	3	2	5
Tanjungbalai	26	107	133	38	68	106	36	21	57

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.11
Jumlah Peserta Pelatihan Kerja Menurut Kejuruan di Kota Tanjungbalai, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Design Grafis	-	-	-
Reparasi Smartphone	-	-	-
Reparasi AC	-	-	-
Mekanik Junior	-	-	-
Reparasi Audio Video	-	-	-
Administrasi Perkantoran	-	-	-
Komputer	-	-	-
Magang Luar Negeri	-	-	-
Bahasa Jepang	15	-	15
Bahasa Inggris	-	20	20
Digital Marketing	-	20	20
Barista	-	10	10
Barbershop	-	10	10
Tata Kecantikan	-	15	15
Tanjungbalai	15	75	90

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025, BPS Kota Tanjungbalai



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/ Kota (persen), 2022 – 2024

No	Kabupaten / Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
1	Nias	2,81	2,31	2,10
2	Mandailing Natal	7,64	7,45	7,22
3	Tapanuli Selatan	3,65	3,49	3,41
4	Tapanuli Tengah	7,97	7,81	7,45
5	Tapanuli Utara	1,07	1,03	1,21
6	Toba Samosir	1,39	1,30	1,09
7	Labuhan Batu	6,90	5,99	5,90
8	Asahan	6,26	6,12	5,94
9	Simalungun	5,51	5,35	5,17
10	Dairi	0,88	1,23	1,43
11	Karo	2,71	2,63	2,40
12	Deli Serdang	8,79	8,62	8,02
13	Langkat	6,88	6,33	6,08
14	Nias Selatan	3,69	3,48	3,03
15	Humbang Hasundutan	-	0,84	0,92
16	Pakpak Bharat	-	0,45	0,97
17	Samosir	1,16	1,03	0,89
18	Serdang Bedagai	4,98	4,97	4,88
19	Batu Bara	6,21	5,88	5,75
20	Padang Lawas Utara	4,31	4,42	3,99
21	Padang Lawas	5,90	5,75	5,47
22	Labuhanbatu Selatan	3,15	3,43	3,24
23	Labuhanbatu Utara	3,75	4,84	4,60
24	Nias Utara	2,59	2,57	2,82
25	Nias Barat	-	0,80	1,00
26	Sibolga	7,05	6,79	6,52
27	Tanjungbalai	4,62	4,47	4,08
28	Pematang Siantar	9,36	8,62	8,00
29	Tebing Tinggi	6,39	6,24	6,18
30	Medan	8,89	8,67	8,13
31	Binjai	6,36	6,10	5,44



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
32	Padangsidempuan	7,76	7,57	7,17
33	Gunung Sitoli	3,65	3,67	3,30
34	Sumatera Utara	6,16	5,89	5,60

Sumber : : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara

2.1.4 Kesehatan

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, balai pengobatan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Disamping itu tenaga kesehatan juga sangat diperlukan dalam hal pencapaian kualitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Tanjungbalai tahun 2022 yaitu 2 rumah sakit, 8 puskesmas, 117 posyandu, 18 polindes, 6 balai pengobatan, 21 prakter dokter, 5 dokter gigi, 14 dokter ahli, 11 apotik dan 29 praktek bidan. Jumlah fasilitas kesehatan yang diakses dan jumlah peserta BPJS tahun 2022 adalah 17 fasilitas dan 105.113 peserta.

Kelahiran anak di Tanjungbalai dari tahun 2016-2022 secara keseluruhan ditangani oleh tenaga kesehatan yaitu Dokter Kandungan dan Bidan. Persentase ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 sekitar 87,95 kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan selebihnya ditolong oleh dukun anak/paraji. Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 mencapai usia 63,87 tahun meningkat 0,43 tahun dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur bidang kesehatan telah mampu menaikkan usia harapan hidup.

Tabel 2.3
Grafik Peningkatan Usia Harapan Hidup





PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.13
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2024

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sintasi	Kesehatan Masyarakat
Datuk Bandar	4	22	34	2	2	-	1	4
Datuk Bandar Timur	3	27	30	2	2	-	1	3
Tanjungbalai Selatan	4	30	21	2	1	-	-	5
Tanjungbalai Utara	6	40	22	1	5	-	1	2
Sei Tualang Raso	5	27	22	-	1	-	1	9
Teluk Nibung	8	50	50	3	2	-	3	4
Tanjungbalai	30	196	179	10	13	-	7	27

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.14
Jumlah Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kota Tanjungbalai, 2022-2024

Kecamatan	Rumah Sakit Umum			Rumah Sakit Bersalin		
	2022	2023	2024	2022	2021	2024
Datuk Bandar	0	0	0	0	0	0
Datuk Bandar Timur	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai Selatan	2	2	2	0	0	0
Tanjungbalai Utara	0	0	0	0	0	0
Sei Tualang Raso	0	0	0	0	0	0
Teluk Nibung	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai	2	2	2	0	0	0

Lanjutan Tabel 2.14

Kecamatan	Poliklinik			Puskesmas		
	2020	2021	2024	2020	2021	2024
Datuk Bandar	2	2	2	1	1	1
Datuk Bandar Timur	-	-	-	1	1	1
Tanjungbalai Selatan	1	1	1	1	1	1
Tanjungbalai Utara	-	-	-	2	2	2
Sei Tualang Raso	-	1	1	1	1	1
Teluk Nibung	1	3	2	2	2	2
Tanjungbalai	4	7	6	8	8	8

Lanjutan Tabel 2.14

Kecamatan	Puskesmas Pembantu			Apotek		
	2020	2021	2024	2020	2021	2024
Datuk Bandar	2	1	3	3	3	4



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Kecamatan	Puskesmas Pembantu			Apotek		
Datuk Bandar Timur	4	4	4	-	-	1
Tanjungbalai Selatan	-	-	1	6	5	5
Tanjungbalai Utara	-	-	-	1	1	1
Sei Tualang Raso	2	1	2	1	1	2
Teluk Nibung	4	4	4	-	1	3
Tanjungbalai	12	10	14	11	11	16

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.15
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
di Kota Tanjungbalai, 2021-2024

Jenis Pelayanan	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Kehamilan	4.627	2.586	2.686	3.499
Pelayanan Kesehatan Bayi	3.281	3.021	31.021	3.017
Pelayanan Kesehatan Anak	17.061	8.006	9.006	9.060
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	24.969	13.613	42.713	15.576
Pelayanan Persalinan	2.606	2.685	1.057	3.112

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Tabel 2.16
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk,
dan Bayi Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2021-2024

Jumlah Bayi	2021	2022	2023	2024
Bayi Lahir	2.596	2.668	145	1.778
BBLR	25	26	-	39
BBLR yang Dirujuk	25	26	-	39
Gizi Buruk	3	39	7	25

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

2.1.5 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 21,5%. Pencapaian ini merupakan momen pertama kalinya prevalensi stunting nasional berada di bawah ambang batas 20%. Meski demikian, angka tersebut masih belum mencapai target nasional sebesar 14% yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2024 %.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Berdasarkan hasil **SSGI 2024**, Kota Tanjungbalai mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi wilayah dengan prevalensi stunting **terendah di Provinsi Sumatera Utara**. Berikut adalah tabel data stunting untuk Kota Tanjungbalai:

Tabel 2.17
Data Stunting Kota Tanjungbalai (SSGI 2024)

Indikator	Capaian	Keterangan
Prevalensi Stunting 2024	5,6%	Turun dari 5,7% (2023)
Status di Sumatera Utara	Terendah	Peringkat 1 prevalensi terendah se Sumatera Utara
Peringkat Nasional	Peringkat 2	Salah satu kota dengan penurunan prevalensi stunting terbaik di Indonesia
Prevalensi Wasting	20,0%	Mengalami kenaikan dan menjadi fokus intervensi baru

Penurunan Drastis: Kota Tanjungbalai berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dari sebelumnya 26,9% hingga kini mencapai angka satu digit. Fokus 2025 Pemerintah Kota kini menargetkan status Zero Stunting dan memberikan perhatian khusus pada peningkatan angka wasting (balita kurus) yang berisiko menjadi stunting jika tidak ditangani melalui pemberian makanan tambahan (PMT) lokal.

Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebesar Rp108.641.073.375,00.

Tabel 2.18
Laporan Tematik pencegahan dan percepatan penurunan stunting
Kota Tanjungbalai 2025

No	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SUB KEGIATAN (Rp)	REALISASI SUB KEGIATAN (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.979.147.125,00	2.674.310.053,58	67,21
2	Dinas Kesehatan	84.683.361.150,00	79.076.420.058,15	93,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.173.590.862,00	1.124.559.856,33	95,82
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.058.402.680,00	2.041.766.248,00	99,19
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.750.000,00	45.712.540,00	99,92
6	Satuan Polisi Pamong Praja	106.362.000,00	106.165.211,00	99,81
7	Dinas Sosial	819.328.898,00	786.920.338,00	96,04
8	Dinas Ketenagakerjaan	155.874.000,00	154.741.209,00	99,27
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	1.148.071.360,00	1.139.958.750,00	99,29



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SUB KEGIATAN (Rp)	REALISASI SUB KEGIATAN (Rp)	(%)
	Pemberdayaan Masyarakat			
10	Dinas Pangan dan Pertanian	48.955.000,00	48.951.957,00	99,99
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.615.075.100,00	1.546.697.086,13	95,77
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.163.000,00	99.700.293,00	99,54
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	599.786.750,00	474.247.714,00	79,07
14	Dinas Perhubungan	57.171.200,00	57.165.740,00	99,99
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.207.621.200,00	1.177.463.829,00	97,50
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	202.141.600,00	199.490.038,00	98,69
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47.047.000,00	46.110.278,00	98,01
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	211.333.000,00	211.014.426,00	99,85
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	159.474.000,00	159.311.900,00	99,90
20	Dinas Perikanan	70.968.000,00	47.113.200,00	66,39
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	196.612.800,00	192.661.555,00	97,99
22	Sekretariat Daerah	1.986.770.000,00	1.986.390.586,00	99,98
23	Sekretariat DPRD	979.468.000,00	972.582.480,00	99,30
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	404.230.000,00	377.144.989,00	93,30
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	301.900.000,00	298.433.921,00	98,85
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	260.292.600,00	259.464.115,00	99,68
27	Inspektorat	248.599.000,00	226.499.372,00	91,11
28	Kecamatan Datuk Bandar	1.031.423.000,00	932.379.000,00	90,40
29	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	869.358.600,00	808.324.000,00	92,98
30	Kecamatan Tanjungbalai Utara	772.703.000,00	734.094.000,00	95,00
31	Kecamatan Teluk Nibung	860.131.000,00	815.127.000,00	94,77
32	Kecamatan Datuk Bandar Timur	1.134.383.900,00	1.079.344.400,00	95,15
33	Kecamatan Sei Tualang Raso	949.771.850,00	891.541.843,00	93,87
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	155.805.700,00	155.664.210,00	99,91
	TOTAL	108.641.073.375,00	100.947.472.196,19	92,92

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Lanjutan Tabel 2.18

No	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
1	Dinas Pendidikan	1.109.911.580,00	779.716.734,60	70,25
2	Dinas Kesehatan	47.155.094.211,90	43.632.957.238,73	92,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	285.048.315,50	273.756.789,28	96,04
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	506.134.320,00	501.993.360,15	99,18
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.150.000,00	9.142.508,00	99,92
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.272.400,00	21.233.042,20	99,81
7	Dinas Sosial	333.035.156,50	311.878.994,50	93,65
8	Dinas Ketenagakerjaan	31.174.800,00	30.948.241,80	99,27
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	145.204.125,87	143.784.897,99	99,02
10	Dinas Pangan dan Pertanian	9.791.000,00	9.790.391,40	99,99
11	Dinas Lingkungan Hidup	169.942.670,00	163.022.508,61	95,93
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.032.600,00	19.940.058,60	99,54
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	254.645.575,00	196.816.497,80	77,29
14	Dinas Perhubungan	11.434.240,00	11.433.148,00	99,99
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	92.908.640,00	91.079.265,80	98,03
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40.428.320,00	39.898.007,60	98,69
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.409.400,00	9.222.055,60	98,01
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	42.266.600,00	42.202.885,20	99,85
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	31.894.800,00	31.862.380,00	99,90
20	Dinas Perikanan	24.813.600,00	12.977.640,00	52,30
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	39.322.560,00	38.532.311,00	97,99
22	Sekretariat Daerah	397.354.000,00	397.278.117,20	99,98
23	Sekretariat DPRD	195.893.600,00	194.516.496,00	99,30
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	80.846.000,00	75.428.997,80	93,30
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	60.380.000,00	59.686.784,20	98,85
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.058.520,00	51.892.823,00	99,68



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERHITUNGAN BOBOT SUB KEGIATAN	(%)
27	Inspektorat	49.719.800,00	45.299.874,40	91,11
28	Kecamatan Datuk Bandar	471.390.300,00	436.640.000,00	92,63
29	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	418.646.720,00	391.339.400,00	93,48
30	Kecamatan Tanjungbalai Utara	363.255.500,00	344.000.700,00	94,70
31	Kecamatan Teluk Nibung	417.974.700,00	395.492.500,00	94,62
32	Kecamatan Datuk Bandar Timur	541.909.550,00	518.455.500,00	95,67
33	Kecamatan Sei Tualang Raso	399.410.445,00	374.664.539,30	93,80
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.161.140,00	31.132.842,00	99,91
	TOTAL	53.822.915.189,77	49.688.017.530,76	92,32

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025

Rencana dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai terjadi peningkatan prevalensi angka stunting menjadi 5,70% dari sebelumnya sebesar 5,60%. Untuk mengejar target penurunan stunting di Kota Tanjungbalai dikisaran 5,70-5,50 dan atau mempertahankannya, yang ditargetkan kembali dari sebelumnya di angka 18,00 14,00 pada tahun 2024 ini, merupakan kerja berat Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Tanjungbalai bersama Forkopimda dan OPD pengampuh untuk menurunkan kembali target stunting tersebut, dalam hal melaksanakan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Tanjungbalai baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitive.

Dari hasil tersebut Pemerintah Kota Tanjungbalai mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam kategori Penurunan Prevalensi Stunting Terbanyak di Indonesia. Beberapa rencana dan strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Wilayah Kerja Pemerintah Kota Tanjungbalai.

1. Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama FORKOPIMDA dan Stakeholder terkait berkomitmen untuk terus bersinergi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama pada Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota pada tanggal 2 Juli 2025 yang



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- sebelumnya telah dilaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan (6 Kecamatan) dan Tingkat Kelurahan (31 Kelurahan).
2. Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada bulan Pebruari 2025 disertai dengan pemberian makanan tambahan kepada anak beresiko stunting, Rembuk Stunting bertujuan untuk menyusun program penanggulangan stunting. Rembuk Stunting ini merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah di tingkat kecamatan/kelurahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan juga menjadi amanat Pemerintah Pusat dan Kabupaten/kota terhadap pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk pencegahan dan penanganan stunting.
 3. Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama FORKOPIMDA dan Stakeholder melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai terkait Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2025.
 4. Pemerintah Kota bersama Organisasi Perangkat Daerah (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas PP dan KB, Dinas P3A dan PM, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas) melaksanakan Rapat Percepatan Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai terkait Pengukuran dan Intervensi Serentak Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2025.
 5. Updating data Balita beresiko Stunting terus dilakukan dengan langsung medatangi rumah/keluarga oleh Pihak Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Puskesmas bersama Kader Posyandu baik penimbangan, pengukuran dan Memberikan edukasi pencegahan stunting kepada keluarga dan memberikan pendampingan bagi keluarga beresiko stunting
 6. Optimalisasi Pelaksanaan Posyandu setiap bulannya disetiap kelurahan merupakan suatu kegiatan rutin yang dsertai dengan kegiatan penyuluhan memberikan edukasi kepada keluarga terutama orangtua bagaimana cara pencegahan stunting diiringi dengan pemberian makanan tambahan oleh posyandu.
 7. Pembekalan bagi Calon Pengantin untuk mengikuti Program Pembinaan Keluarga Sejahtera dalam bentuk Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan yang merupakan syarat untuk mendapatkan surat NA atau surat keterangan kawin/belum kawin. Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BNN, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, Tim Penggerak PKK dan Tim



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendamping Keluarga yang dilakukan setiap hari Selasa di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Dinas PPKB Kota Tanjungbalai dengan memberikan penyuluhan kesehatan, konseling pra nikah, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan narkoba, HIV dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam upaya peningkatan kesehatan dan Upaya penurunan resiko stunting bagi calon pengantin.

2.1.6 Agama dan Sosial Lainnya

Jumlah penduduk Kota Tanjungbalai menurut agama tahun 2024 yaitu 165.035 jiwa beragama Islam, 13.067 jiwa beragama Kristen Protestan, 1.459 jiwa beragama Katolik, 33 jiwa beragama Hindu, 8.303 jiwa beragama Budha, dan 44 jiwa beragama lainnya (termasuk Konghucu dan Aliran Kepercayaan). Sepanjang tahun 2022, terjadi 2 kejadian banjir dan 10 kejadian kebakaran. Jumlah fasilitas kesehatan yang diakses dan jumlah peserta BPJS tahun 2022 adalah 17 fasilitas dan 105.113 peserta.

2.1.7 Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Angka IPM dapat dijadikan pembandingan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan menyusun suatu peringkat kemajuan pembangunan manusia. Pada tahun 2024 nilai IPM Kota Tanjungbalai mencapai 75,95 (termasuk kategori "sedang") lebih tinggi dibanding Kabupaten Asahan yang wilayahnya berada paling dekat dengan Kota Tanjung Balai, yaitu 74,17. IPM Kota Tanjung Balai menduduki peringkat ke-12 dari 33 Kabupaten/Kota dan peringkat ke-7 dari 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup Kota Tanjung Balai tahun 2024 yaitu 74,18 tahun, berada di atas angka Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90 tahun dan Kabupaten Asahan sebagai tetangganya yang mencapai 73,65 tahun.

Umur harapan hidup tertinggi berada di Kota Medan yang mencapai 75,09 tahun dan disusul oleh Kota Pematang Siantar yang mencapai 75,03 tahun. UHH Kota Tanjung Balai berada di urutan ke-16 dari 33 Kabupaten/Kota. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Berdasarkan hasil pendataan SP2020-LF, UHH terendah berada di Kabupaten Padang Lawas, yaitu 71,67 tahun. Diharapkan umur harapan hidup Kota



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tanjung Balai dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. UHH Kota Tanjung Balai berada pada urutan ke 7 dari 8 Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah Kota Tanjung Balai pada tahun 2024 mencapai 13,15 tahun. HLS perlu terus ditingkatkan, harapan lama sekolah di Kota Tanjung Balai diharapkan dapat mendekati angka Provinsi dengan HLS sebesar 13,49 tahun. HLS Kota Tanjung Balai berada pada peringkat ke-26 dari 33 Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya.

Angka ini memang mengalami peningkatan sebanyak 0,01 tahun dibandingkan dengan HLS tahun 2023, yaitu 13,14. Harapan Lama Sekolah tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu mencapai 14,79 tahun adalah Kota Medan, yang disusul oleh Kota Pematang Siantar dengan HLS 14,62 tahun, sedangkan HLS terendah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,65 tahun adalah Kabupaten Serdang Bedagai dan Asahan dengan angka yang sama. Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Tanjung Balai telah bersekolah selama 9,69 tahun atau mencapai SMU kelas I. Pada tahun 2023 lalu RLS Kota Tanjung Balai juga berada di bawah angka RLS Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,68 tahun. Tahun 2024, RLS Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebanyak 0,11 tahun, sehingga di tahun ini RLS Provinsi Sumatera utara adalah 9,93 tahun.

Tahun 2024, RLS Kota Tanjung Balai berada di urutan ke-16 dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. RLS tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 11,82 tahun yaitu Kota Pematang Siantar, sedangkan RLS terendah adalah Kabupaten Nias dengan RLS 6,40 tahun.

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator ratarata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Di tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Kota Tanjung Balai sebesar 12,26 juta rupiah per tahun. Angka ini cukup tinggi dan masih tetap berada diatas angka PPP Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 11,46 juta rupiah.

PPP di Kota Tanjung Balai berada di urutan menengah yaitu urutan ke-12 dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, peringkat ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Medan yaitu mencapai 16,07 juta rupiah per tahun, disusul oleh Kota Tebing Tinggi yang mencapai 13,90 juta rupiah dan Kota Pematang Siantar pada peringkat ke 3 dengan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

PPP mencapai 13,35 juta rupiah. Sedangkan PPP terendah adalah di Kabupaten Nias Barat sebesar 6,74 juta rupiah per kapita per tahun.

2.1.8 Pertanian

Luas panen dan produksi tanaman sayuran terbesar di tahun 2024 adalah tanaman ketimun yaitu sebesar 26 ha dan 3.219 kuintal. Luas panen dan produksi tanaman biofarmaka terbesar di tahun 2024 adalah tanaman serai dengan 1.157 m² dan 10.657 kg.

Luas panen, produktifitas dan produksi padi sawah sepanjang 2024 yang terhitung menurut Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai hanya ada di Kecamatan Datuk Bandar yaitu masing-masing sebesar 134 ha; 6,2 ton per ha; dan 830,8 ton. Panen padi sawah terjadi pada bulan Februari, Maret, September dan Oktober dengan nilai Produktivitas yang sama yaitu

Tabel 2.19
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi, Ubi dan Jagung
Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024
Padi	
Luas Panen (ha)	134,00
Produksi	830,80
Produktivitas	62,00
Ubi	
Luas Panen (ha)	36,00
Produksi	715,00
Produktivitas	19,86
Jagung	
Luas Panen (ha)	37,00
Produksi	157,50
Produktivitas	4,25

Sumber : BPS, Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2025

Walaupun Tanjungbalai tidak memiliki daerah pantai, namun Tanjungbalai merupakan daerah penghasil ikan yang cukup besar. Pada tahun 2024 produksi perikanan asal tangkapan dari budidaya, perairan umum dan laut Kota Tanjungbalai mencapai 12.150,51 ton, angka ini meningkat 1.398,99 ton dari tahun 2023. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di tahun 2024 sebanyak 1.027 unit dengan 79 unit perahu tanpa motor, 730 kapal motor, 218 perahu motor. Dari 730 kapal motor, kapal motor terbanyak menggunakan tenaga mesin 21-30 Gt yaitu sebanyak 407 unit.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2.1.9 Pertambangan dan Energi

Listrik dan air bersih merupakan energi yang menunjang seluruh aktivitas ekonomi serta kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Energi, meliputi listrik, air, dan gas memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kekurangan pasokan energi kerap menjadi masalah yang mesti segera diatasi. Sebagai sumber penerangan dan energi lain baik untuk rumah tangga maupun industri listrik memegang peranan yang sangat penting. PLN ULP Tanjungbalai pada tahun 2024 menjual listrik sebanyak 10.005.614 kWh. Rumah tangga merupakan kelompok pelanggan yang paling dominan mengonsumsi Listrik yaitu sebanyak 4.532.767 kWh. Jumlah pelanggan Listrik tahun 2024 sebanyak 29.749 pelanggan.

Pelanggan air pada PDAM Tirta Kualo tahun 2024 sebanyak 28.077 pelanggan. Jumlah air bersih yang disalurkan kepada pelanggan sebanyak 518.988 m³. Kelompok pelanggan rumah tangga konsumen terbesar dibandingkan kelompok pelanggan yang lain yaitu sebesar 1.567 milyar rupiah dari total 2.079 milyar.

2.1.10 Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang potensial dalam perekonomian Kota Tanjungbalai. Industri pengolahan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total PDRB Kota Tanjungbalai tahun 2024 (20,97 persen) setelah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (24,46 persen). Sektor ini juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan mendorong produktivitas tenaga kerja.

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sektor industri pengolahan yang didalamnya mencakup 16 subsektor industri menghasilkan nilai tambah lebih dari dua triliun rupiah pada tahun 2024. Besaran PDRB ADHB dan ADHK industri pengolahan sama-sama mengalami kenaikan selama periode 2020-2024.

2.1.11 Konstruksi

Pada tahun 2024 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tanjungbalai adalah sebesar Rp12.207,74 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah Rp11.209,49 miliar. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Tanjungbalai adalah sektor perdagangan Besar; eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dengan besar kontribusi sebesar Rp2.985,87 miliar, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp2.560,33 miliar dan sektor Konstruksi sebesar Rp1.877,18 miliar.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2.1.12 Transportasi dan Komunikasi

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah. Pada tahun 2024, pertumbuhan komponen konsumsi Rumah tangga terhadap Transportasi dan Komunikasi menurun sebesar 0,06 persen dari tahun 2023, dimana tahun 2024 sebanyak 22,64 persen dan tahun 2023 sebesar 22,70 persen.

Pada tahun 2024, terdapat 234.931 penumpang Kereta Api Indonesia dengan nilai karcis sebesar 6.061 milyar rupiah. Arus lalu lintas kapal dan penumpang di pelabuhan Tanjungbalai Asahan dengan rincian 8.960 tiba dalam negeri dan 47.236 berangkat dalam negeri. Terdapat 3 kantor pos pembantu di Kota Tanjungbalai yang tersebar di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Sei Tualang raso dan Teluk Nibung. Seluruh Kecamatan di Kota Tanjungbalai telah mendapatkan penerimaan sinyal SG/4G/LTE.

2.1.13 Perbankan dan Koperasi

Pada tahun 2024 di Kota Tanjungbalai terdapat 8.957 penduduk wajib pajak yang wajib lapor SPT, 7.677 penduduk wajib pajak yang wajib lapor SPT sudah lapor, dan 1.280 penduduk wajib pajak yang wajib lapor SPT tidak lapor. Sepanjang tahun 2024, target realisasi pajak sebesar Rp.137.311.246.594 menurut Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai.

Jumlah Koperasi di Kota Tanjungbalai ada sebanyak 118 koperasi yang terdiri dari 43 koperasi di Kecamatan Datuk Bandar, 6 di Kecamatan Datuk Bandar Timur, 39 koperasi di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, 7 di Kecamatan Tanjungbalai Utara, 5 di Kecamatan Sei Tualang Raso, dan 18 di Kecamatan Teluk Nibung.

2.1.14 Pengeluaran Penduduk

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relative sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS di Kota Tanjungbalai, rata-rata pengeluaran per kapita pada Maret 2024 sebesar Rp.1.322.453,00, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan yaitu Rp.787.697,00 dan untuk bukan makanan yaitu Rp.534.756,00. Pengeluaran untuk makanan masih dominan dengan porsi 59,56 persen dari total pengeluaran.

Berdasarkan Kelompok Komoditas, Komoditas tertinggi dalam rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan komoditas Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga yaitu sebesar 20,57 persen, kemudian disusul oleh Makanan dan Minuman Jadi sebesar 18,39 persen. Indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk lainnya yaitu jumlah konsumsi kalori dan protein atau dari AKG yang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Pada tahun 2024 rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari adalah sebesar Rp.2.065,30 kalori dengan komoditas terbesar berasal dari makanan padi-padian sebesar 37,34 persen, sedangkan untuk konsumsi protein per kapita sehari adalah sebesar 66,48 gram dengan komoditas terbesar dari makanan ikan sebesar 30,23 persen.

2.1.15 Perdagangan

Volume dan nilai ekspor di Pelabuhan Tanjungbalai Asahan tahun 2024 adalah 44.158,28 ton dengan nilai sebesar 22,50 juta dolar. Volume dan Nilai kegiatan ekspor dan domestik komoditas karantina perikanan yang melalui Stasiun Karantina Perikanan Tanjungbalai Asahan tahun 2024 terdiri dari 88.172 ekor ikan hidup, 3.598.004 ton ikan mati dengan nilai 89.479,35 miliar rupiah.

Negara tujuan dengan nilai ekspor komoditas perikanan yang melalui stasiun perikanan yang melalui stasiun karantina perikanan Tanjungbalai Asahan terbesar tahun 2024 adalah negara China dengan 6.021 ton ikan mati dengan nilai 338.006,6 miliar rupiah.

2.1.16 Hotel dan Pariwisata

Sebagai kota kecil, Tanjungbalai hanya memiliki 20 buah hotel. Dari 20 hotel tersebut, satu diantaranya merupakan hotel bintang 3, sedangkan sisanya



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

merupakan hotel kelas melati (nonbintang). Hotel di Tanjungbalai memiliki jumlah kamar sebanyak 470 kamar dengan tempat tidur sebanyak 617 buah di tahun 2024. Tarif kamar per malam di hotel bintang berkisar antara 149.000 sampai 440.000 rupiah.

Kegiatan pelayanan dan pengawasan WNI dan WNA di Kota Tanjungbalai menurut Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Asahan tahun 2024 adalah sejumlah 40.746 pengawasan WNI dan 248 pelayanan dan pengawasan WNA

2.1.17 Badan Usaha Milik Daerah

Sistem manajemen pemerintah yang telah berubah dari sentralistik menjadi desentralistik memberikan peluang kepada pemerintah Kota Tanjungbalai untuk dengan cermat dan leluasa menentukan arah pengembangan ekonomi dan pengembangan Kota itu sendiri. Secara spesifik pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dengan kreatif menjalin kerjasama dengan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan kegiatan investasi di Kota Tanjungbalai dan atau pemerintah daerah dengan aset yang dimiliki dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemicu bergerakaknya aliran investasi.

Kota Tanjungbalai sampai dengan tahun 2025 memiliki 2 (dua) BUMD yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo dan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai. PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai merupakan badan usaha milik daerah dalam bidang sistem penyediaan air minum, untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tanggal 18 Nopember 1988 tentang Pendirian Air Minum Kotamadya Tanjungbalai.

Tahun 2024 PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai memiliki modal sebesar Rp40.756.599.949,00 terdiri atas :

1. Penyertaan Modal Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp3.940.034.327;
2. Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp36.813.918.622,00; dan
3. Modal hibah sebesar Rp2.647.000,00

Untuk tahun 2025 dan 2024 PDAM Tirta Kualo berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP mengalami rugi berurutan sebesar Rp1.875.955.804,00 dan Rp5.009.336.614,00.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Tanjungbalai dalam peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang diusahakan dengan memanfaatkan segala peluang dan potensi daerah. Dalam pembetulan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai, telah dilaksanakan pengangkatan direktur sebanyak 2 (dua) kali yakni tahun 2017 berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 552.3/179/K/2017 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai masa jabatan 2017-2021 yakni Bapak Muas Lubis dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 552.3/218/K/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (PUD) Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai masa jabatan 2023 – 2028 yakni Bapak Dani Rahman Sitorus, S.TP.

2.1.18 Perbandingan Regional

Perbandingan beberapa indikator terpilih seperti laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Labuhan Batu sebesar 4,80 persen. Sedangkan jika melihat angka IPM maka yang tertinggi adalah Kota Medan yaitu 81,21. Pada tahun 2022 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai menempati urutan ke enam dari delapan kota yang ada di Sumatera Utara.

Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/
Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2022-2024

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
1	Nias	64,30	65,15	66,13
2	Mandailing Natal	72,17	72,65	73,44
3	Tapanuli Selatan	73,96	74,58	75,18
4	Tapanuli Tengah	72,18	72,77	73,34
5	Tapanuli Utara	76,43	76,86	77,48
6	Toba Samosir	77,58	77,83	78,44
7	Labuhan Batu	73,96	74,70	75,20
8	Asahan	73,18	73,59	74,17
9	Simalungun	74,68	75,17	75,88
10	Dairi	74,60	75,18	75,88
11	Karo	76,37	76,88	77,49
12	Deli Serdang	76,86	77,16	77,56
13	Langkat	74,03	74,33	74,85



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
14	Nias Selatan	64,05	64,98	65,87
15	Humbang Hasundutan	72,05	72,49	73,33
16	Pakpak Bharat	71,57	72,30	73,09
17	Samosir	72,57	72,93	73,77
18	Serdang Bedagai	72,89	73,40	74,15
19	Batu Bara	71,75	72,56	73,14
20	Padang Lawas Utara	72,77	73,45	74,16
21	Padang Lawas	71,41	72,16	73,10
22	Labuhanbatu Selatan	73,59	74,23	75,11
23	Labuhanbatu Utara	74,61	75,45	76,20
24	Nias Utara	64,55	65,44	66,42
25	Nias Barat	63,96	64,68	65,66
26	Sibolga	76,69	77,07	77,52
27	Tanjungbalai	74,73	75,42	75,95
28	Pematang Siantar	79,71	80,46	81,17
29	Tebing Tinggi	77,39	78,17	78,68
30	Medan	82,13	82,61	83,23
31	Binjai	77,50	78,11	78,67
32	Padangsidempuan	77,73	78,10	78,61
33	Gunung Sitoli	71,11	71,55	72,30
34	Sumatera Utara	74,51	75,13	75,76

Sumber : Tanjungbalai Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara tahun 2024, IPM Kota Tanjungbalai pada tahun 2024 sebesar 75,95 lebih tinggi dibanding Kabupaten Asahan yang wilayahnya berada paling dekat dengan Kota Tanjungbalai, yaitu 74,17. IPM Kota Tanjung Balai berada pada posisi ke 12 dari 33 Kabupaten/Kota dan rangking ke-7 dari 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara. IPM Kota Tanjung Balai mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan Kota Padangsidempuan yaitu 0,65 persen dalam setahun, sedangkan Kota Tanjung Balai meningkat 0,70 persen dalam setahun.

Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia di Kota Medan telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Disusul oleh Kota Pematang Siantar yang juga masuk pada kategori “sangat tinggi” dan Kota Tebing Tinggi masuk pada kategori “tinggi”. Ketiga kota inilah yang menduduki peringkat 1, 2 dan 3 IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Sementara itu, Nias Barat, Nias Selatan dan Nias berada pada peringkat IPM 3 paling rendah, diikuti dengan dan Nias Utara yang berada pada satu wilayah pulau yang sama memiliki IPM dengan kategori “sedang”. Tahun 2024 terdapat empat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan kategori IPM “sedang”, sebagai kategori terendah dan dua Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mampu mencapai posisi pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kota Tanjungbalai mencapai 11,97 persen atau sekitar 22,25 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp.592.573/kapita/bulan. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dimana persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 12,21 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,45 ribu jiwa.

2.1.19 Belanja Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh secara minimal. Ini mencakup 6 bidang utama: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, dan sosial. Untuk Kota Tanjungbalai dalam pencapaian realisasi Belanja Standart Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2025 cukup baik kecuali bidang kesehatan. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi lebih dari 90% dari anggaran yang telah di tentukan.

a. Belanja Standart Pelayanan Minimal bidang Pendidikan

Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah pengeluaran wajib APBD untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan bagi warga wnegara, mencakup PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan.

Tabel 2.21
Perhitungan Belanja SPM Bidang Pendidikan

No	SKPD/ Unit SKPD	Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Sub Kegiatan	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	Kekhususan PAUD	317.020.000,00	306.788.293,00	96.77
TOTAL			317.020.000,00	306.788.293,00	96.77

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

b. Belanja Standart Pelayanan Minimal bidang Kesehatan

Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah prioritas pengeluaran APBD/APBN untuk 12 jenis pelayanan dasar (seperti ibu hamil, bersalin, balita, hipertensi, dll) guna mencapai target kinerja 100%.

Tabel 2.22
Perhitungan Belanja SPM Bidang Kesehatan

No	SKPD/Unit SKPD	Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Sub Kegiatan	Persentase (%)
1	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	63.800.000,00	6.062.000,00	9.50
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	139.500.000,00	0,00	0,00
3	Puskesmas Datuk Bandar	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.970.000,00	111.105.000,00	92.61
4	Puskesmas Semula Jadi	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	150.080.000,00	135.630.000,00	90.37
5	Puskesmas MU. Damanik	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	117.168.000,00	71.546.000,00	61.06
6	Puskesmas Kampung Baru	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	143.988.000,00	131.064.000,00	91.02
7	Puskesmas Kampung Persatuan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.913.000,00	141.682.908,00	118.15
8	Puskesmas Sei Tualang Raso	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.940.000,00	150.955.000,00	125.86
9	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.972.000,00	148.502.784,00	123.78
10	Puskesmas Teluk Nibung	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.970.000,00	124.645.200,00	103.90
11	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	51.520.000,00	32.353.000,00	62.80
12	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	82.760.000,00	76.942.980,00	92.97
13	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	51.284.000,00	25.390.000,00	49.51
14	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	20.100.000,00	6.360.000,00	31.64
15	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	27.960.000,00	0,00	0,00
16	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.612.000,00	2.280.000,00	4.50
TOTAL			1.498.537.000,00	1.164.518.872,00	77.71

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

c. Belanja Standart Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah prioritas anggaran APBD untuk menyediakan layanan dasar wajib meliputi penyediaan air baku, jaringan irigasi, infrastruktur jalan, drainase kota, dan penataan permukiman kumuh. Penganggaran ini wajib memenuhi mutu pelayanan dasar secara minimal.

Tabel 2.23
Perhitungan Belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	SKPD/Unit SKPD	Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Sub Kegiatan	Persentase (%)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	640.019.280,00	635.189.280,00	99.25
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.006.602.862,00	976.896.360,33	97.05
TOTAL			1.646.622.142,00	1.612.085.640,33	97.90

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025

d. Belanja Standart Pelayanan Minimal bidang Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah anggaran wajib daerah untuk menyediakan rumah layak huni, sehat, aman, serta sarana-prasarana (PSU) yang terjangkau. Fokus belanja ini meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana dasar bagi korban bencana, dan pemenuhan standar kualitas perumahan sesuai peraturan. Untuk Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak ada menganggarkan untuk bidang ini, sehingga realisasi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 %.

e. Belanja Standart Pelayanan Minimal bidang Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah pengeluaran wajib pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara terkait keamanan, ketertiban umum, dan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

perlindungan masyarakat, termasuk sub-urusan kebakaran dan bencana. Belanja ini diprioritaskan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar (SOP, sarana, kompetensi SDM) dan wajib dianggarkan untuk menjamin pelayanan prima.

Tabel 2.24
Perhitungan Belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	SKPD/Unit SKPD	Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Sub Kegiatan	Persentase (%)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	605.190.000,00	605.190.000,00	100,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	591.442.500,00	571.411.151,00	96,61
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6.465.000,00	6.215.000,00	96,13
TOTAL			1.203.097.500,00	1.182.816.151	98,31

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025

f. Belanja Standart Pelayanan Minimal bidang Bidang Sosial

Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial adalah anggaran wajib APBD untuk pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara, mencakup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, serta korban bencana.

Tabel 2.25
Perhitungan Belanja SPM Bidang Sosial

No	SKPD/ Unit SKPD	Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran Sub Kegiatan	Persentase (%)
1	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	235.942.400,00	211.640.200,00	89.70
TOTAL			235.942.400,00	211.640.200,00	89.70

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025

2.1.20 Mandatory Spending

Mandatory spending daerah adalah belanja atau pengeluaran daerah yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan tersebut antara lain berupa batas minimal atau maksimal anggaran belanja/pengeluaran yang masuk dalam mandatory



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

spending yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD.)

Tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah serta mendorong kinerja sektor tertentu. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

1. FUNGSI PENDIDIKAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 81 ayat (1) mengamanatkan bahwa Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk urusan bidang Pendidikan sebesar Rp 148.419.111.522,00. Jika dihitung belanja pendidikan dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp 681.283.418.477,91, rasio anggaran Pendidikan tercatat sebesar 21.79 %. Adapun rincian alokasi Fungsi kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut :



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 2.26
Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Perangkat daerah	Total (rp.)	Persentase (%)	Realisasi	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	143.694.998.572,00	21,09%	104.765.509.025,03	72,91
2	Dinas Kesehatan	263.744.000,00	0,04%	203.917.600,00	77,32
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	81.852.000,00	0,01%	73.510.545,00	89,81
4	Dinas Ketenagakerjaan	175.889.900,00	0,03%	169.086.754,00	96,13
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	734.992.600,00	0,11%	732.402.200,00	99,65
6	Dinas Lingkungan Hidup	230.560.000,00	0,03%	230.189.900,00	99,84
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	330.041.600,00	0,05%	322.244.973,00	97,64
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.015.900,00	0,01%	44.728.008,00	99,36
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.061.917.150,00	0,30%	1.998.392.464,00	96,92
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	118.256.800,00	0,02%	39.719.570,00	33,59
11	Dinas Perikanan	96.459.000,00	0,01%	92.308.000,00	95,70
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	585.384.000,00	0,09%	582.656.750,00	99,53
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (Rp.)		148.419.111.522,00		109.254.665.789,03	73,61
TOTAL BELANJA DAERAH (Rp.)		681.283.418.477,91			
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING FUNGSI PENDIDIKAN (MINIMAL 20%)			21.79 %		

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025

2. FUNGSI INFRASTRUKTUR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 147 ayat (1) mengamanatkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp 224.207.753.848,84 atau 32.91 % dari jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan yaitu sebesar Rp 681.283.418.477,91 Untuk alokasi dana tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27
Perhitungan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	PERANGKAT DAERAH	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)	REALISASI	(%)
1	Dinas Pendidikan	13.170.897.375,00	1,93%	12.220.073.199,64	92,78
2	Dinas Kesehatan	8.275.967.386,00	1,21%	7.492.793.107,00	90,54
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	48.785.234.418,00	7,16%	45.789.242.119,15	93,86
4	Puskesmas Datuk Bandar	2.471.502.600,00	0,36%	1.845.851.772,00	74,69
5	Puskesmas Semula Jadi	2.262.309.600,00	0,33%	1.520.307.533,00	67,20
6	Puskesmas MU. Damanik	1.158.979.650,00	0,17%	871.175.380,00	75,17
7	Puskesmas Kampung Baru	710.401.500,00	0,10%	663.247.849,00	93,36
8	Puskesmas Kampung Persatuan	836.356.000,00	0,12%	518.864.399,00	62,04
9	Puskesmas Sei Tualang Raso	2.288.474.700,00	0,34%	1.350.117.492,00	59,00
10	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.091.954.000,00	0,16%	1.298.605.245,00	118,92
11	Puskesmas Teluk Nibung	1.485.681.400,00	0,22%	1.107.088.437,00	74,52
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	44.953.384.462,00	6,60%	43.443.843.739,06	96,64
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.165.766.099,00	3,25%	21.270.651.937,00	95,96
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.409.455.411,00	0,21%	1.379.506.890,00	97,88
15	Satuan Polisi Pamong Praja	7.540.181.842,00	1,11%	7.448.976.263,00	98,79
16	Dinas Sosial	970.919.220,00	0,14%	904.371.063,00	93,15
17	Dinas Ketenagakerjaan	648.188.131,00	0,10%	601.209.237,00	92,75
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	694.889.625,00	0,10%	683.827.737,00	98,41
19	Dinas Pangan dan Pertanian	862.154.600,00	0,13%	506.995.157,00	58,81
20	Dinas Lingkungan Hidup	19.646.480.726,00	2,88%	19.247.261.629,13	97,97
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.764.937.415,20	0,41%	2.668.556.463,00	96,51



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	PERANGKAT DAERAH	TOTAL (Rp.)	PERSENTASE (%)	REALISASI	(%)
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	792.144.301,00	0,12%	761.133.251,00	96,09
23	Dinas Perhubungan	2.447.459.468,00	0,36%	2.362.384.441,00	
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.580.954.170,00	0,23%	1.496.830.140,00	94,68
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	233.428.664,00	0,03%	228.251.821,00	97,78
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.067.596.400,00	0,16%	984.851.140,00	92,25
27	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.079.242.412,00	0,31%	2.048.349.775,00	98,51
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	989.795.712,00	0,15%	944.265.364,00	95,40
29	Dinas Perikanan	642.243.850,00	0,09%	573.141.867,00	89,24
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.667.916.500,00	0,24%	1.590.654.093,00	95,37
31	Sekretariat Daerah	12.547.179.284,00	1,84%	11.382.867.294,00	90,72
32	Sekretariat DPRD	5.003.900.240,00	0,73%	4.770.554.226,00	95,34
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.691.526.700,00	0,25%	1.508.094.975,00	89,16
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.853.143.275,00	0,42%	2.724.477.706,00	95,49
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	449.063.900,00	0,07%	411.887.527,00	91,72
36	Inspektorat	963.728.196,00	0,14%	853.497.493,00	88,56
37	Kecamatan Datuk Bandar	735.265.860,00	0,11%	545.727.338,00	74,22
38	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	796.654.402,64	0,12%	682.619.320,00	85,69
39	Kecamatan Tanjungbalai Utara	815.107.551,00	0,12%	798.274.551,00	97,93
40	Kecamatan Teluk Nibung	558.796.720,00	0,08%	516.747.496,0	92,48
41	Kecamatan Datuk Bandar Timur	654.251.536,00	0,10%	595.157.429,00	90,97
42	Kecamatan Sei Tualang Raso	796.555.188,00	0,12%	754.575.206,00	94,73
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	647.683.359,00	0,10%	616.050.073,00	95,12
TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)		224.207.753.848,84		209.982.959.173,98	93,66
TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA TRANSFER(Rp.)		681.283.418.477,91			
PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)			32.91 %		

Sumber : SIPD RI Kota Tanjungbalai TA. 2025

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai Dokumen Rencana Kerja Tahunan Daerah, RKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas arah Pembangunan Daerah dituangkan dalam rangkaian dokumen perencanaan tersebut, kemudian program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah dijabarkan serta direalisasikan melalui APBD yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah serta kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah Daerah, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengaturan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam proses Keuangan Daerah secara keseluruhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya Anggaran Daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Beberapa kebijakan terutama kebijakan tentang anggaran pendapatan sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kapasitas pendapatan daerah.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, dilakukan analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah dimasa mendatang diarahkan pada:

- a. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepetingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten, serta POLRI.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- f. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
- g. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- h. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

- a. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- a. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6 persen dari total APBD.
- c. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
- d. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup antara lain : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada :

- a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
- b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan dana bergulir (Kredit Program)



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun berjalan sebagai berikut:

- Kebijakan fiskal/keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah dengan menetapkan beberapa Peraturan Walikota yang terkait dengan pendapatan dan belanja.
- Penjelasan Perubahan APBD Kota Tanjungbalai TA.2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2025 dan dijabarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2025. Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2025 sebagai berikut:

Tabel 2.28
Rincian APBD TA. 2025 Sebelum dan Setelah Perubahan

No	Uraian	APBD Sebelum Perubahan (Rp)	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	710.748.717.835,00	677.634.621.894,00	33.114.095.941,00	0,95
2	Belanja Daerah	717.948.717.835,00	681.283.418.477,91	36.665.299.357,09	0,95
3	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Surplus/(Defisit) (1–2–3)	(7.200.000.000,00)	(3.648.796.583,91)	(3.551.203.416,09)	0,51
5	Penerimaan Pembiayaan	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	3.551.203.416,09	0,51
6	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pembiayaan Netto (5–6)	7.200.000.000,00	3.648.796.583,91	3.551.203.416,09	0,51
8	Sisa Lebih Pembiayaan Angg (SiLPA) (4 + 7)	0,00	(0,00)	0,00	0,00

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan Perubahan APBD sehubungan dengan adanya:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- Adanya pelaksanaan Pilkada yang dananya bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai.
- Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun anggaran berjalan;



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2025 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dan bagian integral dari kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan.

3.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Anggaran dan Realisasi pendapatan Kota Tanjungbalai dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.332.114.500,00	102.482.768.484,57	110,99
2	Pendapatan Transfer	573.002.507.394,00	552.138.638.319,00	96,35
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94
	Jumlah	677.634.621.894,00	663.101.840.879,57	97,85

Target pendapatan dalam APBD Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp677.634.621.894,00 dengan realisasi sebesar Rp663.101.840.879,57 atau dengan capaian realisasi sebesar 97,85%. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp102.482.768.484,57 atau mencapai 110,99% dari target anggaran sebesar Rp92.332.114.500,00

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp552.138.638.319,00 atau mencapai 96,35% dari target anggaran sebesar Rp573.002.507.394,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.480.434.076,00 atau 68,94% mencapai dari target anggaran sebesar Rp12.300.000.000,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target anggaran pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja keuangan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 97,85% termasuk dalam kategori baik.

3.3. Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah

Rincian Belanja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

berikut:

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	332.446.624.761,07	308.708.683.131,53	92,85
2	Belanja Barang dan Jasa	267.081.581.145,46	248.936.767.817,31	93,20
3	Belanja Hibah	11.804.023.974,00	11.503.716.590,00	97,45
4	Belanja Bantuan Sosial	3.899.200.000,00	3.631.400.000,00	93,13
	Jumlah Belanja Operasi	615.231.429.880,53	572.780.567.538,84	93,10
1	Belanja Modal Tanah	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	100
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.743.021.183,00	26.797.925.710,00	93,23
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.030.354.360,82	6.810.459.595,46	96,87
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.150.120.755,56	20.530.710.985,60	97,07
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.143.540.300,00	2.962.742.432,00	94,24
6	Belanja Modal Aset Lainnya	84.951.998,00	84.751.998,00	99,76
	Jumlah Belanja Modal	64.851.988.597,38	61.886.590.721,06	95,42
1	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63
	Total Keseluruhan	681.283.418.477,91	634.674.775.719,90	93,16

APBD Kota Tanjungbalai TA. 2025 menetapkan jumlah anggaran belanja daerah sebesar Rp681.283.418.477,91 dengan realisasi sebesar Rp634.674.775.719,90 atau mencapai 93,16% dari anggaran. Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp572.780.567.538,84 atau mencapai 93,10% dari anggaran sebesar Rp615.231.429.880,53

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.886.590.721,06 atau mencapai 95,42% dari anggaran sebesar Rp64.851.988.597,38 sedangkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.617.460,00 atau mencapai 0,63% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00;

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja dan transfer sebagai skala pengukuran kinerja keuangan belanja daerah dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja TA. 2025 dari penyerapan belanja dan transfer yang mencapai sebesar 93,16%.

Anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar Rp2.448.796.583,91. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00,- atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

3.4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1. Permasalahan

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaian sudah optimal terutama pada pajak daerah yang terealisasi 109,86% melebihi target, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat pada komponen tertentu seperti pada retribusi daerah yang belum maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

- 1) Pembayaran retribusi hampir seluruhnya dilakukan secara tunai, sehingga rawan kebocoran;
- 2) Pengelolaan sumber-sumber retribusi belum optimal dan efisien;
- 3) Rantai birokrasi retribusi dari wajib retribusi sampai ke RKUD masih relatif panjang sehingga tidak efisien;
- 4) Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi secara efektif dimana sistem pemungutan yang belum sepenuhnya digital/terintegrasi.
- 5) Kepatuhan wajib retribusi yang masih rendah.

Selain itu, belum ada regulasi yang disertai imbalan serta sanksi yang jelas (stick and carrot strategy) atas pencapaian pendapatan baik pajak maupun retribusi daerah juga menjadi kendala dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada komponen lain-lain PAD yang sah, masih ada item yang jauh dibawah target yakni tuntutan ganti kerugian daerah hanya 4,33% dan hasil penjualan BMD hanya 65,03%. Hal ini menjadi kendala karena :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- 1) Proses hukum/administrasi TGR yang panjang dan sulit direalisasikan;
- 2) Aset daerah belum siap jual seperti masih adanya kendala dalam aspek legalitas aset, penilaian (valuasi), maupun rendahnya minat pasar terhadap aset yang ditawarkan;
- 3) Perencanaan target kurang realistis untuk jenis pendapatan yang tidak rutin.

Kendala lain yang juga berpengaruh adalah belum optimalnya pengelolaan basis data pajak dan retribusi, serta keterbatasan integrasi sistem antar perangkat daerah. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya identifikasi potensi pendapatan serta kurang efektifnya pengawasan di lapangan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi turut memengaruhi capaian penerimaan daerah.

b) Pendapatan Transfer

- 1) Adanya pengalihan jenis pendapatan transfer menjadi transfer earmark (*specific grand*), Dimana syarat penyaluran dan realisasinya diatur secara spesifik, sehingga hal tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam merealisasikan dan pendapatan dan belanjanya.
- 2) Ada salah satu pendapatan transfer yang penetapan alokasi nya didasarkan pada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sebagai contoh insentif fiskal, sehingga realisasi pendapatannya tergantung pada seberapa banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tahun 2025 sebesar Rp8.480.434.076,00 dari target Rp12.300.000.000,00 menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan dana kapitasi belum optimal sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Kendala ini berkaitan dengan administrasi dan kepatuhan pelaporan layanan. Dalam skema JKN, pencairan dana kapitasi juga



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

dipengaruhi oleh kinerja pelayanan dan kelengkapan administrasi yang dilaporkan kepada BPJS Kesehatan. Keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan dapat menghambat proses pencairan dana. Dimana data yang disalurkan akan berpengaruh jika masih ada sisa dana pada kas kapitasi JKN.

2. Solusi

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Tanjungbalai berusaha meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

- Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Walikota Tanjungbalai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
- Meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
- Meningkatkan pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparansi;
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan konsep pelayanan berbasis IT;
- Penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberi alternatif model pembayaran kepada masyarakat;
- Mengkaji sistem administrasi dan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2) Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

- Perluasan cakupan pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan menambah jenis/obyek sumber penerimaan.
- Mengembangkan pengelolaan aset dengan merubah beberapa obyek tanah/bangunan dari retribusi daerah menjadi sewa.
- Peningkatan kualitas layanan publik untuk mendorong peningkatan penerimaan retribusi.

b) Pendapatan Transfer

Optimalisasi pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah dilakukan dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait perhitungan, pemenuhan persyaratan, dan penyaluran dana transfer terkait serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan untuk memenuhi persyaratan penyaluran dana pusat secara tepat waktu.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Optimalisasi pengelolaan dana kapitasi JKN melalui peningkatan akurasi data layanan dan percepatan klaim serta pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

B. BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
2. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

3. Adanya kebijakan efisiensi belanja menyebabkan tidak seluruh anggaran terealisasi, terutama pada belanja barang dan jasa.
4. Terdapat jenis belanja tertentu yang realisasinya relatif rendah, seperti belanja tidak terduga yang penggunaannya bersifat insidentil dan hanya digunakan dalam kondisi darurat

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dengan menetapkan skala prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja utama untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisiensi
2. Melaksanakan koordinasi lebih intensif dengan entitas pengadaan barang dan jasa dalam rangka pendampingan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
3. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu dengan melakukan penajaman prioritas belanja pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
4. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pada aspek pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan kembali pinjaman daerah sesuai rencana, yang menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan dan pengendalian piutang daerah.

Dalam pengelolaan pembiayaan daerah, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan penagihan secara aktif terhadap pengembalian pinjaman daerah.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian pinjaman daerah guna meningkatkan kehati-hatian dan efektivitas.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk mendukung pembiayaan program prioritas.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan organisasi di Pemerintah Kota Tanjungbalai disebut juga dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan sehingga dapat disebut sebagai entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

1. **Entitas Akuntansi** adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seluruh Kota Tanjungbalai yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan pada masing-masing OPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan OPD terdiri dari 5 (lima) jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

2. **Entitas Pelaporan** adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan di Pemerintah Kota Tanjungbalai diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah).

Laporan Keuangan pada entitas pelaporan terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai mengacu pada 8 (delapan) prinsip yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Prinsip Nilai Perolehan
3. Prinsip Realisasi
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas
5. Prinsip Periodisitas
6. Prinsip Konsistensi
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
8. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada Tahun 2018 telah terjadi perubahan basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yaitu dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dengan menyelenggarakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai basis akrual.

Perubahan basis tersebut berdampak pada penambahan jumlah Laporan Keuangan yaitu dari 4 (empat) laporan keuangan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi 7 (tujuh) Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2018 dengan penambahan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dalam basis akrual sesuai SAP, basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah basis kas sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Perhitungan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di dalam Laporan Operasional (LO).

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan Perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

2. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost)

Pemerintah Kota Tanjungbalai menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kota Tanjungbalai dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3. Realisasi (Realization)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Tanjungbalai masih diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

4. Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Periodisitas (Periodicity)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan penjabarannya, semester untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (PPKD) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Konsistensi (Consistency)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai diperlukan ketika menghadapi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau belanja tidak dinyatakan terlalu rendah pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. .

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3. Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan

1. Pendapatan LRA dan LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- f. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pengukuran pendapatan-LRA adalah:

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah baik dihasilkan dari transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran pendapatan-LO adalah:

- a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Belanja dan Beban LO

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitif oleh fungsi BUD.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja dan beban diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur sesuai dengan pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pada saat Penyusunan Laporan Keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) **Beban Pegawai**, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- 2) **Beban Barang dan Jasa**, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) **Beban Penyusutan dan amortisasi**, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) **Beban Penyisihan Piutang**, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) **Beban Bunga**, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) **Beban Transfer**, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- 7) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, **beban** diakui dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan Laporan Keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D.

Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui pada saat:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pembiayaan diukur sesuai dengan:

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- c. Pengukuran pembiayaan dengan menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengakuan dan pengukuran Aset adalah sebagai berikut :

- a. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan ke dalam :

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran serta seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam Neraca.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan, oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Pengukuran Kas dan Setara Kas diuraikan sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).
- b. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian Kualitas Piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, ***commitment fee*** dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Kualitas Piutang dalam kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Tanjungbalai

No	Umur Piutang Pajak	Umur Piutang Retribusi	Kualitas	% Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 Tahun	0 - 1 Tahun	Lancar	0,50%
2	> 1 s.d. 2 Tahun	> 1 s.d. 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 2 s.d. 5 Tahun	> 2 s.d. 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	> 5 Tahun	Macet	100%

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Nilai persediaan diakui pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventaris fisik (**stock opname**) persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/Daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk kepentingan lainnya.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi non permanent lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi Pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan Usaha/Hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (***aging schedule***).

Penggunaan metode penilaian Investasi Pemerintah di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

6) Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari aset tersebut manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) Nilai rupiah atas pembelian barang material tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila aset tetap berasal dari pihak ketiga (Lembaga/Pemerintah Lainnya), aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset daerah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara Hukum, misalnya Sertifikat Tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara Hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dan diukur sesuai dengan:

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangunsendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- c) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi;

- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

7) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	Sewa Kerja sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>franchise</i>
Aset Tidak Berwujud	Hak Cipta
	Paten
	Aset tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset lain-lain

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan yaitu sebagai berikut:

a) Tagihan Jangka Panjang

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah.

(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Kemitraan ini dapat berupa:

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

(2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

(3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih Perusahaan.

(2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta, hak paten, atau hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau Perusahaan lain.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

(4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* suatu komputer.

Software ini dapat digunakan pada komputer lain dan diakui sebagai ATB karena memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa atas *software* tersebut.

(5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya diuraikan sebagai berikut:

(1) Tagihan Jangka Panjang

- a.** Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- b.** Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- a. Sewa, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*), dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

(3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud dikemudian hari.
- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(4) Aset Lain-lain

Adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal), dan aset tetap yang hilang disebabkan pencurian/tidak ditemukan keberadaannya dan /atau hilang karena bencana alam (kebakaran, banjir dan bencana lain).

8) Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- (a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- (b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- (a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini:

- (a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- (c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

- (a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) properti investasi;



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- (b) metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- (d) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - (1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - (2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - (3) pelepasan;
 - (4) penyusutan;
 - (5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - (6) perubahan lain.
- (e) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - (1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - (2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - (3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - (4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - (5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - (6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- (f) metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen.
- (g) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- (1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
- (2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
- (3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

9) Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan kewajiban berdasarkan jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Daerah.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- b) Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- c) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- d) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- e) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- f) Utang Beban, diakui pada saat:
 - (1) Beban secara Peraturan Perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- g) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- h) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - i) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - j) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - k) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- l) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- m) Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pemerintah Pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh Peraturan dan Hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah dan Lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali Pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang Hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah karena Pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non Pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Dengan kata lain Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada Utang kepada pihak ketiga ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut.

Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

5. Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Laporan Perubahan SAL,
- c. Neraca,
- d. Laporan Operasional,
- e. Laporan Perubahan Ekuitas,
- f. Laporan Arus Kas, dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

Dalam kebijakan akuntansi ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan, yang meliputi laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas,
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap laporan keuangan dengan format pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan TA 2025 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai dengan TA 2025 yang terdiri :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan;

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Tanjungbalai.

5.1.1 Pendapatan Daerah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp677.634.621.894,00	Rp663.101.840.879,57	Rp651.320.368.865,02

Pada TA 2025 realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp663.101.840.879,57 atau 97,85% dari anggaran sebesar Rp677.634.621.894,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.781.472.014,55 atau 1,81% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92.332.114.500,00	102.482.768.484,57	110,99	78.493.779.012,02
2	Pendapatan Transfer	573.002.507.394,00	552.138.638.319,00	96,35	564.730.491.453,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94	8.096.098.400,00
	Jumlah	677.634.621.894,00	663.101.840.879,57	97,85	651.320.368.865,02

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp92.332.114.500,00 **Rp102.482.768.484,57** **Rp78.493.779.012,02**

Pada TA 2025 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp102.482.768.484,57 atau 110,99% dari anggaran sebesar Rp92.332.114.500,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.988.989.472,55 atau 30,56% dari realisasi tahun sebelumnya. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Daerah	31.770.000.000,00	34.904.580.493,60	109,86	22.526.900.770,40
2	Retribusi Daerah	4.848.565.000,00	4.402.402.302,00	90,79	3.778.910.999,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.775.808.733,00	7.775.808.733,00	100,00	7.419.378.335,10
4	Lain-lain PAD yang Sah	47.937.740.767,00	55.399.976.955,97	115,56	44.768.588.907,52
	Jumlah	92.332.114.500,00	102.482.768.484,57	110,99	78.493.779.012,02

a. Pajak Daerah

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp31.770.000.000,00 **Rp34.904.580.493,60** **Rp22.526.900.770,40**

Pada TA 2025 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp34.904.580.493,60 atau 109,86% dari anggaran sebesar Rp31.770.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.377.679.723,20 atau 54,95% dari realisasi tahun sebelumnya. Terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	838.352.100,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	903.826.060,00
3	Pajak Hiburan	10.000.000,00	8.400.000,00	84,00	80.043.500,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4	Pajak Reklame	700.000.000,00	728.008.140,00	104,00	462.952.237,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	12.745.620.217,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	75.678.272,00
7	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	191.699.000,00	127,79	202.238.114,40
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.200.000.000,00	4.446.543.660,00	105,87	3.981.272.270,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.500.000.000,00	3.579.200.854,00	102,26	3.236.918.000,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.010.000.000,00	14.338.673.432,60	102,34	0,00
11	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.000.000.000,00	6.655.503.776,00	133,11	0,00
12	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.200.000.000,00	4.956.551.631,00	118,01	0,00
	Jumlah	31.770.000.000,00	34.904.580.493,60	109,87	22.526.900.770,40

Dari tabel diatas realisasi pendapatan pajak terbesar secara berurutan berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen PKB, Opsen BBNKB Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan di tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, mulai diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 dan yang telah diturunkan kedalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2024, untuk beberapa Objek Pajak berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sehingga pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Akun yang tidak terealisasi tetapi di Tahun Anggaran 2024 terealisasi.

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Parkir di Tahun Anggaran 2025 menjadi PBJT.

1. **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)** adalah pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi lima jenis jasa/barang tertentu: makanan/minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, dan kesenian/hiburan.

Pajak ini dibayar oleh konsumen akhir dan dipungut oleh pelaku usaha (wajib pajak) dengan tarif umum 5%-10%, kecuali tenaga listrik (umumnya 8%) dan hiburan khusus (bisa 40%).

Untuk rincian Anggaran dan Realisasi PBJT adalah sebagaimana berikut :

Tabel 5.4
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan
Jasa Tertentu TA 2025**

No.	Jenis PBJT	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	600.000.000,00	1.126.736.245,60	187,7894
2	PBJT-Tenaga Listrik	12.500.000.000,00	12.290.764.369,00	98,32611
3	PBJT-Jasa Perhotelan	600.000.000,00	611.009.000,00	101,8348



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No.	Jenis PBJT	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	PBJT-Jasa Parkir	120.000.000,00	138.632.318,00	115,5269
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	190.000.000,00	171.531.500,00	90,27974
	Jumlah	14.010.000.000,00	14.338.673.432,60	102,35

- a) **PBJT-Makanan dan/atau minuman** merupakan Pengenaan Pajak terhadap Restoran, Rumah makan, café ataupun dari Catering. Baik yang dibayarkan masyarakat kepada para wajib pajak pada saat mengkonsumsi Makanan dan/atau minuman ataupun dipungut dan disetorkan oleh OPD pada saat pembelian untuk pelaksanaan kegiatan. PBJT makanan dan/atau minuman terealisasi sebesar Rp1.126.736.245,60 atau 187,79% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00
- b) **PBJT Tenaga Listrik**, merupakan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Tarif yang berlaku dari penggunaan/konsumsi Daya Listrik baik Pasca bayar maupun Pra Bayar. Pada Tahun Anggaran 2025, PBJT tenaga Listrik yang sebelumnya disebut sebagai Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp12.290.764.369,00 atau 98,33% dari anggaran dalam APND sebesar Rp12.500.000.000,00. Menurunnya realisasi ini dari Tahun Anggaran 2024 yang sebutannya masih Pajak Penerangan Jalan disebabkan Adalah stimulus berupa Diskon pembayaran sebanyak 50% yang diberikan oleh PLN baik untuk pemakaian tenaga Listrik Pasca Bayar maupun Pra Bayar.
- c) **PBJT Jasa Perhotelan** merupakan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota dari Hotel ataupun penginapan yang di Kota Tanjungbalai. Realisasi untuk akun ini adalah sebesar Rp611.009.000,00 atau 101,09 % dari anggaran yang tersedia yakni sebesar Rp600.000.000,00.
- d) **PBJT Jasa Parkir** diperoleh dari tempat Penyimpanan/Parkir kendaraan yang disediakan oleh Pengusaha/ Wajib Pajak sebagai sebuah fasilitas layanan kepada Pengguna. Baik dari Toko/Gerai maupun tempat yang khusus digunakan untuk penyimpanan sementara kendaraan. Realisasi untuk PBJT ini adalah Rp138.632.318,00 atau 115,52% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- e) **PBJT-Kesenian dan Hiburan** diperoleh Pemerintah Kota dari Tempat Olahraga, tempat rekreasi maupun Hiburan yang ada di Kota Tanjungbalai. Baik yang menetap maupun yang temporer. Untuk PBJT-Kesenian dan Hiburan terealisasi sebesar Rp171.531.500,00 atau 90,27%
2. **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)** merupakan pengalihan nama dan perubahan nomerInklatur maupun teknis pembagian dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya merupakan Bagian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi. Pada awal Tahun Anggaran 2025 telah diterapkan Opsen PKB maupun Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBN-KB). Pembagian persentase untuk daerah terdaftar Kendaraan bermotor atas Pajak yang dikutip adalah 66% dan merupakan ketentuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Untuk realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mengalami peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 dimana sebelumnya PKB dan BBN-KB masih merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.
- Realisasi Opsen PKB sebesar Rp6.655.503.776,00 atau 133,11% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00
- Realisasi Opsen BBN-KB sebesar Rp4.956.551.631,00 atau 118,01% dari anggaran sebesar Rp4.200.000.000,00
3. **Realisasi Pajak bumi dan Bangunan** pada Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp465.271.390,00 atau sekitar 11,69% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Realisasi Rp4.446.543.660,00 merupakan nilai realisasi pokok PBB, baik PBB Tahun 2025 maupun piutang tahun sebelumnya yang dibayar oleh Wajib Pajak di Tahun 2025.
4. **Realisasi untuk Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)** mengalami peningkatan sebesar 10,57 % atau sebesar Rp342.282.854,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini juga dipengaruhi Pembangunan oleh Pengembang perumahan sebagai bagian dampak dari insentif yang diberikan pemerintah terhadap Program Nasional 3 juta rumah yang membebaskan Retribusi Perizinan Bangunan dan Gedung. Dan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

bebas BPHTB diberikan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau yang memiliki penghasilan dibawah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Ada beberapa Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk melakukan Intentifikasi dan Ekstensifikasi dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menaikkan realisasi pajak daerah, diantaranya :

- Melakukan pemuktahiran objek pajak;
- Melakukan penagihan secara aktif kepada wajib pajak;
- Mendorong pelaksanaan digitalisasi penerimaan pajak daerah;
- Melakukan diseminasi dan informasi pajak kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial
- Adanya relaksasi/diskon bagi Wajib Pajak
- Melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pertukaran informasi dan data wajib pajak

Namun terdapat pula faktor penyebab turunnya realisasi pajak daerah, khususnya PBJT jasa kesenian dan hiburan, pbjt- tenaga listrik dan pajak air tanah, antara lain:

- Wajib pajak tidak memberitahu omset yang sebesar-besarnya;
- Adanya relaksasi/diskon bagi Wajib Pajak
- Rendahnya kesadaran wajib pajak;
- Masih lemahnya penegakan sanksi bagi yang melanggar pajak.

b. Retribusi Daerah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp4.848.565.000,00	Rp4.402.402.302,00	Rp3.778.910.999,00

Pendapatan dari Retribusi Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.402.402.302,00 atau sebesar 90,79% dari pagu anggaran sebesar Rp4.848.565.000,00. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp623.491.303,00 atau 16,50% dari Tahun sebelumnya.

Walaupun belum mencapai target yang dicantumkan dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025, secara umum setiap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi mengalami peningkatan realisasi dari Tahun Anggaran sebelumnya (2024). Pendapatan dari Retribusi Daerah terdiri



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	3.727.565.000,00	3.657.468.000,00	98,11	3.159.551.188,00
2	Retribusi Jasa Usaha	771.000.000,00	414.210.400,00	53,72	358.066.800,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	330.723.902,00	94,49	261.293.011,00
	Jumlah	4.848.565.000,00	4.402.402.302,00	90,79	3.778.910.999,00

Retribusi ini merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang diampu oleh masing-masing OPD Teknis sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnnya.

Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	167.296.000,00	83,64	194.366.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.367.000.000,00	2.509.915.000,00	106,03	2.123.820.688,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	230.000.000,00	158.867.000,00	69,07	100.200.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	900.565.000,00	792.190.000,00	87,96	712.564.500,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	29.200.000,00	97,33	28.600.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	548.000.000,00	293.362.400,00	53,53	279.264.800,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	11.815.000,00	47,26	0,00
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	19.150.000,00	38,30	28.850.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	31.145.000,00	38,93	29.552.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	10.940.000,00	36,46	10.600.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.000.000,00	10.008.000,00	55,60	0,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	37.790.000,00	188,95	9.800.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	330.723.902,00	94,49	261.293.011,00
	Jumlah	4.848.565.000,00	4.402.402.302,00	90,79	3.778.910.999,00

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan ini bersifat non-komersial, bertujuan meringankan beban pemerintah



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

dalam penyediaan layanan dasar, serta wajib dibayar oleh pengguna jasa tersebut. Retribusi Jasa Umum di Pemerintah Kota Tanjungbalai ini terdiri dari:

- a) **Pelayanan Kesehatan:** Layanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu).

Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, mengalami penurunan realisasi dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.070.000,00 atau sekitar 16,18%. Hal ini disebabkan Pelayanan di Pusat Kesehatan tergantung dari jumlah Pasien Umum yang melakukan Rawat Jalan secara mandiri (tidak menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional). Kota Tanjungbalai sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga hampir seluruh penduduk Kota Tanjungbalai sudah menggunakan JKN. Baik JKN dengan sumber Dana APBD Kota Tanjungbalai, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN. Tingkat cakupan kepesertaan JKN Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2025 berkisar di angka 99,01%. Retribusi ini dikutip oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

- b) **Kebersihan/ Persampahan:** Pengambilan atau pengangkutan sampah oleh dinas terkait. Untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan realisasi dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp386.094.312,00 atau 15,38%. Peningkatan dipicu dari Inovasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam menambah Wajib Retribusi, yakni dengan menyasar Masyarakat yang selama ini bukan pelanggan PDAM. Karena sebelumnya hanya pelanggan PDAM yang dikenakan Retribusi Kebersihan/Persampahan. Hal ini menambah potensi PAD dari Retribusi tersebut mengalami peningkatan dan diharapkan pula pada tahun-tahun berikutnya dengan menambah armada pengangkutan sampah, maka pelanggan akan semakin bertambah pula karena adanya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Retribusi ini dikutip oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

- c) **Pelayanan Parkir di tepi jalan umum:** Pelayanan parkir di tepi jalan umum. Realisasi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum mengalami peningkatan juga sebesar Rp58.667.000,00 atau meningkat 36,93 % dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

bertambahnya potensi untuk Pelayanan Parkir dengan digelarnya acara Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan. Retribusi ini dikutip oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

d) **Pelayanan Pasar:** berupa pelayanan penyediaan tempat berdagang di Pasar Tradisional. Mengalami peningkatan realisasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp79.625.500,00 atau sebesar 10,05% dari Tahun Anggaran 2024. Namun hal ini belum melampaui Target yang diberikan dan tercantum dalam APBD akibat banyaknya Sarana dan Prasarana di lingkungan Pasar yang membutuhkan penanganan perbaikan. Pada tahun berikutnya diharapkan target dapat dicapai dan menambah realisasi PAD Kota Tanjungbalai karena akan direlokasinya para pedagang dipinggir jalan kebangunan-bangunan pasar yang ada setelah sebelumnya diperbaiki dan dengan demikian dapat dikutip retribusinya. Retribusi ini dikutip oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai.

e) **Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus:** Penyediaan Jasa/layanan atas penyedotan Kakus yang diminta oleh Masyarakat. Realisasi atas pelayanan jasa ini sebesar Rp29.200.000,00 atau 97,33%. Mengalami peningkatan realisasi dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.000,00 atau sebesar 2,05%. Realisasi Retribusi ini akan berfluktuasi setiap tahunnya tergantung dari permintaan Masyarakat atas pelayanan retribusi tersebut. Retribusi ini dikutip oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai.

2. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan Retribusi yang di pungut daerah sebagai pembayaran atas pelayanan komersial yang disediakan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang wajar karena layanan tersebut dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Tahun 2025, Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp414.210.400,00 atau 53,72% dari anggaran sebesar Rp771.000.000,00. Walau mengalami peningkatan realisasi dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.097.600,00 atau 4,81%, namun belum mencapai target/pagu yang diberikan dan tercantum dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2025. Di Kota Tanjungbalai, Retribusi Jasa Usaha terbagi atas beberapa jasa, seperti:

- a) **Pemakaian Kekayaan Daerah:** Sewa gedung, alat berat, atau tanah milik Pemerintah Kota Tanjungbalai. Realisasi untuk jenis Retribusi ini sebesar Rp293.362.400,00 atau 53,53% dari anggaran sebesar Rp548.000.000,00. Mengalami peningkatan realisasi dari Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp14.097.600,00 atau 5,05%.

Retribusi ini diperoleh dari beberapa jenis pemakaian kekayaan daerah, sebagai mana berikut ini :

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	210.000.000,00	54.696.400,00	26,04	67.476.800,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	263.000.000,00	218.066.000,00	82,91	181.888.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	20.600.000,00	27,46	29.900.000,00
	Jumlah	548.000.000,00	293.362.400,00	53,53	279.264.800,00

Dari data diatas, terlihat bahwa :

- 1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp12.780.400,00 atau 18,94%. Retribusi ini di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai
- 2) Retribusi Penyewaan Bangunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp36.178.000,00 atau 19,89%. Dimana, retribusi ini atas Penyewaan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Kota Tanjungbalai. Retribusi ini di ampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai.
- 3) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan realisasi sebesar Rp9.300.000,00 atau sebesar 31,10% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Retribusi ini di ampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai dan Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- b) **Tempat Parkir Khusus:** Parkir di pelataran atau gedung yang dikelola Pemerintah Kota Tanjungbalai. Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan melakukan pengelolaan terhadap Lapangan Parkir di RSUD Kota Tanjungbalai. Walau RSUD telah melakukan PPK BLUD, namun karena kekurangan Sumber Daya Pengelolaan Aset, maka Pihak RSUD meminta kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai Cq. Dinas Perhubungan untuk melakukan Pengelolaan Lahan Parkir tersebut sampai Pihak BLUD RSUD siap untuk melakukan pengelolaan sendiri sebagai bagian dari pendapatan BLUD.

Realisasi atas pendapatan retribusi ini bertambah di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.815.00,00 atau 100%, Dimana sebelumnya pada Tahun Anggaran 2024, retribusi ini tidak ada sama sekali. Realisasi ini hanya tercapai 47,26% dari target sebesar Rp25.000.000,00. Hal ini disebabkan banyaknya Lahan Parkir yang dikelola secara mandiri oleh kelompok Masyarakat sendiri dan lahan Parkir RSUD yang terbatas.

- c) **Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa,** merupakan Retribusi dari Penyewaan Mess Pemerintah Kota Tanjungbalai yang terletak di Jalan Eka Rasmi Johor Medan. Dari tahun ke tahun realisasi untuk retribusi ini semakin menurun. Hal ini lebih disebabkan kepada kurangnya SDM pengelola yang memadai dan sarana prasarana yang harus diperbaiki disamping pula Lokasi mess sendiri kurang mendukung untuk pelaksanaan tugas kedinasan dibandingkan dengan menjamurnya penginapan-penginapan murah dan berfasilitas lengkap disekitar Kota Medan. Retribusi ini di ampu oleh Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa hanya di angka Rp19.158.000,00 atau 38,30% dari pagu sebesar Rp50.000.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp9.700.000,00 atau 33,62% dari Tahun Anggaran 2024.

- d) **Rumah Potong Hewan (RPH):** Pelayanan penyembelihan ternak. Realisasi untuk retribusi ini hanya dikisaran 38,93% atau sebesar Rp31.145.000,00 mengalami peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp1.593.000,00 atau 5,39%. Hal ini juga disebabkan kurangnya tenaga pengelola RPH yang tersertifikasi, sarana dan prasarana yang perlu dilakukan pembaharuan untuk RPH tersebut. Retribusi ini diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- e) **Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga:** Tiket masuk objek wisata daerah atau stadion, atau pemakaian stadion oleh Pihak ketiga.

Retribusi ini terealisasi sebesar Rp10.940.000,00 atau 36,46% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Walau belum mencapai target yang dicantumkan dalam APBD, tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp340.000,00 atau 3,21% dari tahun sebelumnya. Retribusi ini di ampu oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai.

- f) **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:** merupakan retribusi dari hasil usaha produksi daerah berupa bibit ikan atau benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai.

Realisasi untuk retribusi ini adalah Rp10.080.000,00 atau 55,60% dari anggaran Rp18.000.000,00. Di Tahun Anggaran 2024, retribusi ini tidak terealisasi sama sekali. Kecilnya realisasi juga disebabkan sarana dan prasarana berupa kolam pembibitan beserta kelengkapannya untuk upaya pembibitan ikan.

- g) **Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah:** berupa retribusi atas pemanfaatan Aset untuk kemudian dijadikan penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai. Retribusi ini di ampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai.

Realisasi untuk Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp37.790.000,00 atau 188,95% dari anggaran Rp20.000.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp27.990.000,00 atau 35,01% dibandingkan Tahun sebelumnya.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu: berupa retribusi yang dipungut kepada pengguna jasa pelayanan pembuatan izin-izin tertentu. Di Kota Tanjungbalai, perizinan tersebut hanya dari Pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).

Tahun 2025, realisasi untuk retribusi ini berada di angka Rp330.723.902,00 atau 94,49% dari target anggaran yang ada sebesar Rp350.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp69.430.891,00 atau 26,57% dari realisasi tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan realisasi retribusi daerah diantaranya :

- Meningkatkan pengawasan terhadap retribusi daerah
- Melakukan pemuktahiran objek retribusi;
- Mendorong pelaksanaan digitalisasi penerimaan retribusi daerah;
- Melakukan diseminasi dan informasi retribusi kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial
- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat.

Selain ada upaya untuk meningkatkan retribusi daerah, ada juga penyebab turunnya retribusi, diantaranya :

- Kurang baiknya sarana dan prasarana pendukung terkait pengutipan retribusi daerah;
- Masih lemahnya integritas pemungut Retribusi.
- Pengelolaan retribusi masih belum terdigitalisasi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp7.775.808.733,00	Rp7.775.808.733,00	Rp7.419.378.335,10

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut pada tahun buku 2024, sesuai dengan hasil RUPS Bank Sumut. Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki 1,24% bagian saham dari 100% kepemilikan PT. Bank Sumut dengan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp31.000.000.000,00 atau 124.000.000 lembar saham.

Pada TA 2025 realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp7.775.808.733,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp7.775.808.733,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp356.430.397,90 atau 4,80% dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya Laba PT. Bank Sumut Tahun Buku 2024 dan tidak adanya Penambahan Modal Disetor oleh para Pemegang saham lainnya pada tahun buku tersebut. Yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	7.775.808.733,00	7.775.808.733,00	100	7.419.378.335,10



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
	Jumlah	7.775.808.733,00	7.775.808.733,00	100	7.419.378.335,10

d. Lain – Lain PAD Yang Sah

Anggaran 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024
Rp47.937.740.767,00 Rp55.399.976.955,97 Rp44.768.588.907,52

Pada TA 2025 realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp55.399.976.955,97 atau 115,56% dari anggaran sebesar Rp47.937.740.767,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10.631.735.798,45 atau 23,75% dari realisasi tahun sebelumnya.

Rincian dari Lain-lain PAD yang Sah diperlihatkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	130.060.441,00	65,03	221.122.500,00
2	Jasa Giro	400.000.000,00	663.491.702,94	165,87	335.478.863,62
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.300.000.000,00	1.177.953.894,71	90,61	1.788.200.864,09
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	379.000.000,00	241.341.712,81	63,67	380.109.630,72
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000,00	183.964.583,00	122,64	128.855.382,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	7.308.740.767,00	7.967.908.976,95	109,01	2.212.006.491,03
7	Pendapatan BLUD	38.000.000.000,00	44.769.986.353,00	117,81	39.476.312.315,00
8	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	200.000.000,00	265.269.291,56	132,63	226.502.861,06
	Jumlah	47.937.740.767,00	55.399.976.955,97	115,56	44.768.588.907,52

1. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, merupakan penerimaan daerah dari penjualan aset tetap/berjalan yang telah dihapus, seperti kendaraan, mesin, atau bongkaran gedung secara tunai/angsuran.

Penjualan dilakukan secara Open Bidding (Lelang Terbuka) oleh Kementerian Keuangan cq. KPKNL Kisaran dan Pemerintah Kota Tanjungbalai setelah sebelumnya dilakukan Penilaian atas Aset-aset tersebut;

Untuk Tahun Anggaran 2025, Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp130.060441,00 atau 65,03% dari anggaran Rp200.000.000,00. dan mengalami peningkatan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp91.062.059 atau 41,18%;

2. Jasa Giro. Pendapatan jasa giro adalah bunga yang diperoleh dari saldo rekening giro di bank, biasanya berkisar antara 0,1% hingga 5,5% per tahun tergantung saldo. Jasa giro pada rekening bendahara pemerintah atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) wajib disetorkan ke Kas Negara/ Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2025, dengan anggaran Rp400.000.000,00, realisasi mencapai Rp663.491.702,94 atau 165,87% dan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp325.028.175,02 atau 96,97%.

Jasa Giro terbanyak ada di Kas Daerah yaitu sebesar Rp660.198.070,94, dan selebihnya adalah Jasa Giro pada Kas di Bendahara;

3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah adalah sebuah proses pemulihan kerugian daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian bendahara/ pegawai negeri. Penerimaan ini didasarkan pada keputusan final (seperti SK BPK/PP) dan disetorkan langsung ke kas daerah untuk memulihkan keuangan daerah akibat kerugian tersebut.

Untuk Tahun Anggaran 2025, realisasi hanya tercapai 90,61% atau sebesar Rp1.177.953.894,71 dari anggaran Rp1.300.000.000,00. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terbagi atas:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara realisasi sebesar Rp0,00
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain realisasi sebesar Rp1.177.953.894,71
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan adalah penerimaan daerah dari denda penyedia jasa akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak. Besaran denda umumnya 1‰ (satu permil) per hari dari nilai kontrak/bagian kontrak. Denda diatur dalam kontrak, dan penyedia jasa harus menyetorkan denda tersebut ke kas negara/daerah, didukung dengan bukti setor.

Untuk Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan, Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp241.341.712,81 dari anggaran sebesar



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Rp379.000.000,00 atau 63,67% dan mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp138.767.917,91 atau 63,49%;

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah adalah penerimaan dari sanksi administratif berupa denda akibat keterlambatan atau pelanggaran kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Denda ini umumnya ditetapkan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang belum dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran atau ditentukan lain pada aturan yang mengaturnya.

Pendapatan Denda Pajak Daerah ini terealisasi sebesar Rp183.964.583,00 dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau sebesar 122,64% dengan rincian:

- a. Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) realisasi sebesar Rp93.117.698,00 atau 62,07% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini juga dapat disebabkan adanya insentif/relaksasi/penghapusan denda sebagai bagian dari program Pemerintah Kota untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertunggak.
 - b. Denda Opsen PKB, merupakan denda atas Pajak Kendaraan bermotor sebelum menjadi Opsen. Realisasi sebesar Rp90.783.956,00. Tidak ada anggaran untuk pendapatan ini karena tidak ada data yang valid untuk jumlah tunggakan maupun pembagian denda tunggakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Upt. Samsat Kota Tanjungbalai.
 - c. Denda Opsen BBN-KB. Sama halnya dengan Denda Opsen PKB, Denda Opsen BBN-KB merupakan denda atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebelum menjadi Opsen BBN-KB. Dan tidak ada anggaran untuk realisasi ini. Realisasi atas Denda ini sebesar Rp62.929,00.
6. Pendapatan dari Pengembalian adalah penerimaan kembali atas kelebihan setoran atau koreksi atas penerimaan kas yang telah tercatat pada periode sebelumnya, seringkali akibat kesalahan administratif atau kelebihan setoran.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, terealisasi sebesar Rp631.671.494,30 atau 252,66% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp202.686.329,78 atau 57,91% dari anggaran Rp350.000.000,00.
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan realisasi sebesar Rp22.472.500,00 atau 44,94% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN realisasi sebesar Rp193.513.224,00 atau 193,51% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, merupakan pengembalian Sisa Dana Hibah Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024. Realisasi pengembalian sebesar Rp6.656.990.629,00 atau 101,49% dari anggaran sebesar Rp6.558.740.767,00
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, realisasi sebesar Rp893.149,00
 - f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya terealisasi sebesar Rp233.175.702,87.
 - g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp9.331.000,00
7. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menurut Permendagri 79 tahun 2018 bersumber dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan ini dikelola langsung untuk operasional dan tidak wajib disetor ke Kas Daerah, memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan layanan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai, yang menerapkan PPK BLUD baru RSUD T.Mansyur.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Jenis Pendapatan BLUD terdiri dari

- Jasa Layanan: Penerimaan dari penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
- Hibah: Penerimaan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- Hasil Kerja Sama: Pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga, seperti bagi hasil.
- APBD: Anggaran dari Pemerintah Daerah.
- Lain-lain Pendapatan yang Sah: Meliputi jasa giro, bunga, keuntungan selisih nilai tukar, serta komisi atau potongan dari pengadaan barang/jasa.

Pendapatan BLUD dikelola sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan Kesehatan. Realisasi atas Pendapatan BLUD sebesar Rp44.769.986.353,00 atau 117,81% dari anggaran Rp38.000.000.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp5.293.674.038,00 atau 13,41% dari Tahun Anggaran 2024

8. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan dana yang dipinjamkan atau disalurkan kembali kepada masyarakat, kelompok usaha, koperasi, UMKM, atau pihak lainnya secara bergulir sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp265.269.291,56 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau 132,63%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp38.766.430,50 atau 17,12% dari tahun anggaran 2024.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp573.002.507.394,00	Rp552.138.638.319,00	Rp564.730.491.453,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi (APBD Provinsi) dengan persentase atau pembagian tertentu. Pada TA. 2025 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp573.002.507.394,00 dengan realisasi sebesar Rp552.138.638.319,00 atau 96,35% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi TA 2024 realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp12.591.853.134,00 atau 2,23%. Berikut ini adalah rincian pendapatan transfer:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	533.805.269.000,00	512.134.857.122,00	95,94	532.343.272.928,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.197.238.394,00	40.003.781.197,00	102,05	32.387.218.525,00
	Jumlah	573.002.507.394,00	552.138.638.319,00	96,35	564.730.491.453,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp533.805.269.000,00 **Rp512.134.857.122,00** **Rp532.343.272.928,00**

Transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam, dan alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Dana perimbangan tersebut selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Pada TA 2025 pendapatan transfer pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp533.805.269.000,00 dengan realisasi sebesar Rp512.134.857.122,00 atau 95,94% dari yang dianggarkan.

Jika dibanding dengan realisasi TA 2024 realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp20.208.415.806,00 atau 3,80% dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	532.343.272.928,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	18.637.177.000,00	18.245.283.384,00	97,89	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	436.535.309.000,00	420.280.906.403,00	96,27	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	71.493.374.000,00	66.469.258.335,00	92,97	0,00
5	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.139.409.000,00	7.139.409.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	533.805.269.000,00	512.134.857.122,00	115,56	532.343.272.928,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

1) Dana Perimbangan

Anggaran 2025
Rp0,00

Realisasi 2025
Rp0,00

Realisasi 2024
Rp532.343272.928,00

Pada TA 2025, dana perimbangan terjadi perubahan kelompok rekening. Dimana, rekening Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik tidak lagi diklasifikasikan ke dalam kelompok rekening Dana Perimbangan, melainkan telah dikelompokkan pada jenis pendapatan transfer pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan pada TA 2024 Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik masih tercatat sebagai saldo.

Rincian dari dana perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	16.673.418.080,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	420.334.460.000,00
3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	34.863.740.727,00
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	60.471.654.121,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	532.343.272.928,00

2) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran 2025
Rp18.637.177.000,00

Realisasi 2025
Rp18.245.283.384,00

Realisasi 2024
0,00

Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal). Persentase dana bagi hasil (DBH) pajak untuk setiap sumber dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp18.637.177.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.245.283.384,00 atau 97,89 % dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.571.865.304,00 atau 9,43% Jika dibandingkan dengan realisasi



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

TA 2024, maka Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 mengalami peningkatan. Perlu dijelaskan bahwa di TA 2025 terjadi perubahan pengelompokan rekening yaitu DBH menjadi 3 kelompok rekening yaitu DBH pajak, DBH SDA, dan DBH lainnya seperti tabel berikut ini

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH Pajak				
	DBH PBB	3.708.313.000,00	3.581.678.384,00	96,58	0,00
	DBH PPh Pasal 21	7.877.132.000,00	7.173.032.400,00	91,06	0,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	962.052.000,00	877.239.600,00	91,18	0,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.427.000,00	334.524.000,00	3.208,24	0,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)				
	DBH SDA Minyak Bumi	11.050.000,00	12.080.000,00	109,32	0,00
	DBH SDA Gas Bumi	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	125.336.000,00	131.263.000,00	104,72	0,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara - Landrent	5.111.000,00	0,00	0,00	0,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara - Royalty	3.923.229.000,00	4.110.180.000,00	104,76	0,00
	DBH SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	69.142.000,00	80.930.000,00	117,04	0,00
	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	0,00
3	DBH Lainnya				
	DBH Sawit	1.110.551.000,00	1.110.551.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	18.637.177.000,00	18.245.283.384,00	95,94	0,00

3) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp436.535.309.000,00	Rp420.280.906.403,00	Rp0,00

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah bertujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing.

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp436.535.309.000,00 dengan realisasi sebesar Rp420.280.906.403,00 atau 96,27% dari anggaran. Realisasi dana transfer DAU TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp53.553.597,00 atau 0,01% dari TA 2024. Dijelaskan bahwa di TA 2025 DAU menjadi 2 kelompok rekening yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya seperti tabel berikut ini



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya				
	DAU	350.343.099.000,00	350.080.854.525,00	99,92	0,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya				
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.200.000.000,00	3.100.000.000,00	50,00	0,00
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	5.854.307.000,00	2.585.734.878,00	44,16	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	38.494.339.000,00	28.870.753.000,00	74,99	0,00
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.643.564.000,00	35.643.564.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	436.535.309.000,00	420.280.906.403,00	95,94	0,00

4) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp71.493.374.000,00	Rp66.469.258.335,00	Rp0,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian target nasional di bidang tertentu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp71.493.374.000,00 dengan realisasi sebesar Rp66.469.258.335,00 atau 92,97%. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp28.866.136.513,00 atau 30,28%.

Dana Alokasi Khusus (DAK) ini terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang memiliki masing-masing pagu dan realisasi. Rincian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik	2.752.711.000,00	2.202.807.760,00	80,02	0,00
2	DAK Non Fisik	68.740.663.000,00	64.266.450.575,00	93,49	0,00
	Jumlah	71.493.374.000,00	66.469.258.335,00	92,97	0,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025 dianggarkan sebesar Rp2.752.711.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.202.807.760,00 atau 80,02% dari anggaran. Realisasi dana transfer DAK Fisik TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp32.660.932.967,00 atau 93,68% dari TA 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	277.711.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.475.000.000,00	2.202.807.760,00	89,00	0,00
	Jumlah	2.752.711.000,00	2.202.807.760,00	92,97	0,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2025 dianggarkan sebesar Rp68.740.663.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.266.450.575,00 atau 93,49% dari anggaran. Realisasi dana transfer DAK Non Fisik TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.794.796.454,00 atau 6,28% dari TA 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik
TA 2025 dan 2024**

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.144.800.000,00	21.107.825.970,00	99,82	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	586.000.000,00	586.000.000,00	100	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	33.959.725.000,00	33.210.644.400,00	97,79	0,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	106.000.000,00	72.000.000,00	67,92	0,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.306.800.000,00	1.291.266.120,00	98,81	0,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
6	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.352.931.000,00	1.997.982.208,00	84,91	0,00
7	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	505.690.000,00	100	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	27.360.000,00	27.360.000,00	100	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	936.700.000,00	936.700.000,00	100	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.578.705.000,00	2.173.445.822,00	47,46	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	131.684.000,00	65.842.000,00	50	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.014.268.000,00	2.201.694.055,00	73,04	0,00
	Jumlah	68.740.663.000,00	64.266.450.575,00	93,49	0,00

5) Dana Transfer Khusus - Dana Insentif Fiskal

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp7.139.409.000,00	Rp7.139.409.000,00	Rp0,00

Dana Insentif Fiskal (IF) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tertentu, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Dana Transfer Khusus - Dana Insentif Fiskal (IF) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.139.409.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.139.409.000,00 atau 100% dari anggaran. Realisasi dana transfer Insentif Fiskal TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.139.409.000,00 dari TA 2024.

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.139.409.000,00	7.139.409.000,00	100	0,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp39.197.238.394,00	Rp40.003.781.197,00	Rp32.387.218.525,00

Pendapatan transfer antar daerah merupakan Pendapatan bagi hasil pajak. dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dimana pada TA 2025 terealisasi 102,05%. Dimana anggaran pendapatan bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp39.197.238.394,00 dan terealisasi sebesar Rp40.003.781.197,00 atau



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

102,05%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.616.562.672,00 atau 23,52%. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.19
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.255.591.576,00	5.304.462.220,00	422,46	3.494.499.297,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.766.774.728,00	3.821.415.204,00	101,45	2.940.075.907,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.265.045.055,00	19.607.236.900,00	137,44	9.824.327.381,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	209.456.505,00	319.020.025,00	152,30	209.456.505,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.700.370.530,00	10.951.646.848,00	55,59	15.918.859.435,00
	Jumlah	39.197.238.394,00	40.003.781.197,00	102,05	32.387.218.525,00

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Pada TA 2025 realisasi anggaran pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp5.304.462.220,00 atau 422,46% dari anggaran sebesar Rp1.255.591.576,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.809.962.923,00 atau 51,79% dari TA 2024.

2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada TA 2025 realisasi anggaran pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp3.821.415.204,00 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp3.766.774.728,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp881.339.297,00 atau 29,98% dari TA 2024.

3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pada TA 2025 realisasi anggaran pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp19.607.236.900,00 atau 137,44% dari anggaran sebesar Rp14.265.045.055,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp9.782.909.519,00 atau 99,58% dari TA 2024.

4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Pada TA 2025 realisasi anggaran pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp319.020.025,00 atau 152,30% dari anggaran



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

sebesar Rp209.456.505,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp109.563.520,00 atau 52,31% dari TA 2024.

5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

Pada TA 2025 realisasi anggaran pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp10.951.646.848,00 atau 55,59% dari anggaran sebesar Rp19.700.370.530,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.967.212.587,00 atau 52,31% dari TA 2024.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp12.300.000.000,00	Rp8.480.434.076,00	Rp8.096.098.400,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan daerah lainnya, seperti pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak digunakan lagi, pendapatan dari penyewaan aset daerah, pendapatan dari hasil lelang aset daerah, pendapatan dari bantuan atau hibah dari pihak lain dan pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.

Pada TA 2025 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP yang dianggarkan sebesar Rp12.300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.480.434.076,00 atau 68,94% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp384.335.676,00 atau 4,75% Berikut ini adalah rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Lain Lain PAD Yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN) pada FKTP	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94	8.096.098.400,00
	Jumlah	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,94	8.096.098.400,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang rincian dari total realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP dari masing masing puskesmas berikut ini,

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Per Puskesmas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Puskesmas Datuk Bandar	2.500.000.000,00	1.930.025.769,00	77,20	1.757.524.232,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
2	Puskesmas Semula Jadi	2.250.000.000,00	1.383.788.684,00	61,50	1.218.728.869,00
3	Puskesmas MU. Damanik	1.100.000.000,00	853.674.596,00	77,61	756.608.183,00
4	Puskesmas Kampung Baru	800.000.000,00	696.613.257,00	87,08	642.043.522,00
5	Puskesmas Kampung Persatuan	800.000.000,00	519.059.514,00	64,88	476.198.991,00
6	Puskesmas Sei Tualang Raso	2.250.000.000,00	1.257.854.530,00	55,90	1.229.878.529,00
7	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.100.000.000,00	827.071.956,00	75,19	812.153.264,00
8	Puskesmas Teluk Nibung	1.500.000.000,00	1.012.345.770,00	67,49	1.202.962.810,00
	Jumlah	12.300.000.000,00	8.480.434.076,00	68,95	8.096.098.400,00

a. Puskesmas Datuk Bandar

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas Datuk Bandar TA 2025 sebesar Rp1.930.025.769,00 dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 77,20%.

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp172.501.537,00 atau 9,82% dari TA 2024

b. Puskesmas Semula Jadi

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas Semula Jadi TA 2025 sebesar Rp1.383.788.684,00 dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 61,50%.

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp165.059.815,00 atau 13,54% dari TA 2024

c. Puskesmas MU Damanik

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas MU Damanik TA 2025 sebesar Rp853.674.596,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 77,61%

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp97.066.413,00 atau 12,83% dari TA 2024.

d. Puskesmas Kampung Baru

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas Kampung Baru TA 2025 sebesar Rp696.613.257,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau 87,08%.

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp54.569.735,00 atau 8,50% dari TA 2024



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

e. Puskesmas Kampung Persatuan

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas Kampung Persatuan TA 2025 sebesar Rp519.059.514,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau 64,88%.

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp42.860.523,00 atau 9,00% dari TA 2024

f. Puskesmas Sei Tualang Raso

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas Sei Tualang Raso TA 2025 sebesar Rp1.257.854.530,00 dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 55,90%.

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp27.976.001,00 atau 2,27% dari TA 2024

g. Puskesmas Rawat Inap Sipori Pori

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP pada Puskesmas Rawat Inap Sipori Pori TA 2025 sebesar Rp827.071.956,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 75,19%.

Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp14.918.692,00 atau 1,84% dari TA 2024

h. Puskesmas Teluk Nibung

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Teluk Nibung TA 2025 sebesar Rp1.012.345.770,00 dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 67,49%.

Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp190.617.040,00 atau 15,85% dari TA 2024.

5.1.2 Belanja Daerah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp681.283.418.477,91	Rp634.674.775.719,90	Rp663.417.790.308,93

Pada TA 2025 realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp634.674.775.719,90 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp681.283.418.477,91. Realisasi ini terdiri dari belanja operasi sebesar Rp572.780.567.538,84 belanja modal sebesar Rp61.886.590.721,06 dan belanja tak terduga sebesar Rp7.617.460,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.727.691.656,03 atau 4,33% dari realisasi tahun sebelumnya. Rincian tabel berikut ini :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	615.231.429.880,53	572.780.567.538,84	93,1	596.195.040.569,84
2	Belanja Modal	64.851.988.597,38	61.886.590.721,06	95,42	66.570.230.739,09
3	Belanja Tak Terduga	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63	652.519.000,00
	Jumlah	681.283.418.477,91	634.674.775.719,90	93,16	663.417.790.308,93

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp615.231.429.880,53 **Rp572.780.567.538,84** **Rp596.195.040.569,84**

Pada TA 2025 realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp572.780.567.538,84 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp615.231.429.880,53. Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai Rp308.708.683.131,53 belanja barang dan jasa sebesar Rp248.936.767.817,31 belanja hibah Rp11.503.716.590,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp3.631.400.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.414.473.031,00 atau 3,93% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.23
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	332.446.624.761,07	308.708.683.131,53	92,85	296.679.870.905,96
2	Belanja Barang dan Jasa	267.081.581.145,46	248.936.767.817,31	93,20	263.725.524.265,88
3	Belanja Hibah	11.804.023.974,00	11.503.716.590,00	97,45	32.850.295.398,00
4	Belanja Bantuan Sosial	3.899.200.000,00	3.631.400.000,00	93,13	2.939.350.000,00
	Jumlah	615.231.429.880,53	572.780.567.538,84	93,10	596.195.040.569,84

a. Belanja Pegawai

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp332.446.624.761,07 **Rp308.708.683.131,53** **Rp296.679.870.905,96**

Pada TA 2025 realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp308.708.683.131,53 atau 92,85% dari anggaran sebesar Rp332.446.624.761,07. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.028.812.225,57 atau 4,05% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	196.772.974.799,07	182.728.538.154,00	92,86	176.171.185.584,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	125.069.172.857,00	115.916.674.333,53	92,68	81.642.688.911,96



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	29.030.842.523,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.095.667.010,00	9.053.036.912,00	99,53	9.155.203.041,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	629.530.095,00	315.575.381,00	50,12	121.740.846,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	460.880.000,00	384.958.351,00	83,52	263.160.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	418.400.000,00	309.900.000,00	74,06	295.050.000,00
	Jumlah	332.446.624.761,07	308.708.683.131,53	92,85	296.679.870.905,96

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Pegawai didominasi dengan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp182.728.538.154,00 atau sebesar 92,86 % dari anggaran sebesar Rp196.772.974.799,07. Mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.557.352.570,00 atau 3,72%. Berikut ini adalah rincian dari belanja gaji dan tunjangan ASN yaitu :

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	146.017.517.497,21	134.547.300.367,00	92,14	134.389.830.409,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.367.267.594,48	12.775.436.522,00	95,57	12.644.820.157,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.148.325.388,50	5.550.397.577,00	90,27	5.692.573.625,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.718.314.148,00	7.215.581.160,00	93,48	7.281.636.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.153.394.167,00	1.953.451.463,00	90,71	1.992.343.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.719.309.263,75	7.398.897.930,00	95,84	7.333.249.200,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	212.905.515,07	166.432.262,00	78,17	161.586.413,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.790.166,06	1.774.268,00	63,59	1.747.064,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.185.643.274,00	12.015.896.293,00	98,6	5.583.905.985,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	311.876.946,00	275.858.470,00	88,45	272.276.870,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	935.630.839,00	827.511.842,00	88,44	817.216.861,00
	Jumlah	196.772.974.799,07	182.728.538.154,00	92,86	176.171.185.584,00

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp115.916.674.333,53 atau sebesar 92,68 % dari anggaran sebesar Rp125.069.172.857,00 Mengalami kenaikan dari Tahun



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Anggaran 2024 sebesar Rp34.273.985.421,57 atau 41,98% Berikut ini adalah rincian dari belanja tambahan penghasilan ASN yaitu :

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	81.799.632.917,00	75.207.728.622,53	91,94	76.070.732.330,96
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.812.495.785,00	6.491.828.020,00	95,29	5.571.956.581,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.457.044.155,00	34.217.117.691,00	93,86	0
	Jumlah	125.069.172.857,00	115.916.674.333,53	92,68	81.642.688.911,96

3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Pada TA 2025, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN pagu dan realisasi terjadi perpindahan kelompok rekening menjadi kelompok rekening tambahan penghasilan ASN. Dimana saldo TA 2024 masih tercatat direkening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN ini. Berikut ini adalah rincian dari tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yaitu :

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	270.180.800,00
2	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	26.135.634.700,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	307.500.000,00
4	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	97.642.823,00
5	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.180.112.000,00
6	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	476.272.200,00
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	563.500.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	29.030.842.523,00

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp9.053.036.912,00 atau sebesar 99,53% dari anggaran sebesar



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Rp9.095.667.010,00 dan mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.166.129,00 atau 1,12%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja gaji dan tunjangan DPRD yaitu :

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	559.335.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.713.704,00	51.713.700,00	99,99	45.952.200,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.985.480,00	71.985.480,00	100,00	55.922.762,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00	100,00	47.911.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	810.789.053,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.098.850,00	82.032.300,00	80,34	84.292.574,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.890.000.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00	130.077.635,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.400.000,00	0,00	0,00	196.319,00
10	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.967.241.976,00	1.963.878.432,00	99,82	1.977.115.998,00
11	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.415.500.000,00	3.404.000.000,00	99,66	3.335.000.000,00
12	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000,00	0,00	0,00	218.610.000,00
	Jumlah	9.095.667.010,00	9.053.036.912,00	99,53	9.155.203.041,00

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp315.575.381,00 atau sebesar 50,13% dari anggaran sebesar Rp629.530.095,00 dan Mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp193.834.535,00 atau 159,22% Berikut ini adalah rincian dari Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH yaitu :

Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	140.000.000,00	49.200.000,00	35,14	29.400.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	70.000.000,00	6.006.000,00	8,58	0
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	210.000.000,00	88.560.000,00	42,17	52.920.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	28.000.000,00	6.590.220,00	23,53	1.013.880,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.200.000,00	311.680,00	7,42	633.126,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400.000,00	1.080,00	0,07	1.120,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	5.056.800,00	84,28	1.881.600,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.960,00	120.960,00	100	35.280,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	362.880,00	331.340,00	91,3	105.840,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	144.895.000,00	144.895.000,00	100	35.750.000,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	24.551.255,00	14.502.301,00	59,06	0
	Jumlah	629.530.095,00	315.575.381,00	50,13	121.740.846,00

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp384.958.351,00 atau sebesar 83,53% dari anggaran sebesar Rp460.880.000,00 dan Mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp121.798.351,00 atau 46,28%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH yaitu :

Tabel 5.30
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	83.160.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00	274.078.351,00	78,31	180.000.000,00
	Jumlah	460.880.000,00	384.958.351,00	83,53	263.160.000,00

7) Belanja Pegawai BLUD

Belanja pegawai BLUD pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp309.900.000,00 atau sebesar 98,3% dari anggaran sebesar Rp418.400.000,00 dan Mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp14.850.000,00 atau 5,03% Berikut ini adalah rincian dari Belanja pegawai BLUD yaitu :

Tabel 5.31
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	418.400.000,00	309.900.000,00	74,1	295.050.000,00
	Jumlah	418.400.000,00	309.900.000,00	98,3	295.050.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp267.081.581.145,46	Rp248.936.767.817,31	Rp263.725.524.265,88



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pada TA 2025 realisasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp248.936.767.817,31 atau 93,20% dari anggaran sebesar Rp267.081.581.145,46. Realisasi ini terdiri dari belanja barang Rp39.842.965.653,33 belanja jasa Rp108.738.377.900,00 belanja pemeliharaan Rp19.843.280.921,44 Belanja Perjalanan Dinas Rp28.587.458.690,00 belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat Rp2.037.299.000,00 belanja barang dan jasa BOSP Rp13.158.292.666,39 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp36.729.092.986,15.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.788.756.448,57 atau 5,61% dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut ini adalah rincian tabel :

Tabel 5.32
Anggaran dan Realisasi Belanja barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

NO	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	44.431.572.010,54	39.842.965.653,33	89,67	46.794.485.709,25
2	Belanja Jasa	118.430.302.195,92	108.738.377.900,00	91,81	101.601.358.902,00
3	Belanja Pemeliharaan	21.080.596.715,00	19.843.280.921,44	94,13	13.208.513.762,52
4	Belanja Perjalanan Dinas	30.331.091.000,00	28.587.458.690,00	94,25	44.413.872.082,00
5	Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	2.238.631.600,00	2.037.299.000,00	91,00	2.756.214.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	13.567.202.092,36
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	13.187.787.624,00	13.158.292.666,39	99,77	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.381.600.000,00	36.729.092.986,15	98,25	41.383.877.717,75
	Jumlah	267.081.581.145,46	248.936.767.817,31	93,20	263.725.524.265,88

1) Belanja Barang

Belanja barang pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp39.842.965.653,33 atau sebesar 98,30% dari anggaran sebesar Rp44.431.572.010,54 dan Mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp6.951.520.055,92 atau 14,86% Berikut ini adalah rincian dari Belanja barang yaitu :

Tabel 5.33
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	44.431.447.010,54	39.842.841.333,33	89,67	46.794.485.709,25
2	Belanja Barang Tak Pakai	125.000,00	124.320,00	99,45	0,00
	Jumlah	44.431.572.010,54	39.842.965.653,33	98,30	46.794.485.709,25



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2) Belanja Jasa

Belanja jasa pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp108.738.377.900,00 atau sebesar 91,81% dari anggaran sebesar Rp118.430.302.195,92 dan mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp7.137.018.998,00 atau 7,02% Berikut ini adalah rincian dari Belanja jasa yaitu :

Tabel 5.34
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	92.586.803.840,92	84.464.376.164,00	91,22	80.745.704.086,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.920.404.870,00	17.817.279.402,00	99,42	14.792.464.684,00
3	Belanja Sewa Tanah	11.800.000,00	11.800.000,00	100	11.800.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.268.875.750,00	1.970.746.190,00	60,28	2.426.641.037,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	237.988.000,00	189.466.000,00	79,61	768.519.555,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0	2.000.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.506.418.185,00	3.416.353.430,00	97,43	2.313.660.340,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	139.000.000,00	137.872.250,00	99,18	0
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	138.184.000,00	110.780.000,00	80,16	100.000.000,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	323.327.550,00	322.204.464,00	99,65	148.569.200,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	201.500.000,00	201.500.000,00	100	220.000.000,00
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	96.000.000,00	96.000.000,00	100	72.000.000,00
	Jumlah	118.430.302.195,92	108.738.377.900,00	91,82	101.601.358.902,00

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp19.843.280.921,44 atau sebesar 94,13% dari anggaran sebesar Rp21.080.596.715,00 dan mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp6.634.767.158,92 atau 50,23%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja pemeliharaan yaitu :

Tabel 5.35
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	549.750.000,00	549.529.200,00	99,95	294.407.774,02
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.348.052.033,00	10.306.203.970,00	90,81	7.806.964.489,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.814.991.146,00	3.702.496.556,00	97,05	2.189.164.794,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.366.985.536,00	5.285.051.195,44	98,47	2.917.976.705,50
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	818.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	21.080.596.715,00	19.843.280.921,44	94,13	13.208.513.762,52

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan biasa pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp28.587.458.690,00 atau sebesar 94,25% dari anggaran sebesar Rp30.331.091.000,00 dan Mengalami kenaikan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp15.826.413.392,00 atau 35,63%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja perjalanan dinas yaitu :

Tabel 5.36
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.331.091.000,00	28.587.458.690,00	94,25	44.413.872.082,00
	Jumlah	30.331.091.000,00	28.587.458.690,00	94,25	44.413.872.082,00

5) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.037.299.000,00 atau sebesar 91,00% dari anggaran sebesar Rp2.238.631.600,00 dan Mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp718.915.000,00 atau 26,08%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat yaitu :

Tabel 5.37
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	626.700.000,00	574.648.000,00	91,69	1.653.495.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.611.931.600,00	1.462.651.000,00	90,73	1.102.719.000,00
	Jumlah	2.238.631.600,00	2.037.299.000,00	91,00	2.756.214.000,00

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Pada TA 2025, belanja barang dan jasa BOS pagu dan realisasi terjadi perubahan rekening belanja menjadi belanja barang dan jasa BOSP.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Dimana saldo TA 2024 masih tercatat direkening belanja barang dan jasa BOS. Berikut ini adalah rincian dari belanja barang dan jasa BOS yaitu :

Tabel 5.38
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	13.567.202.092,36
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	13.567.202.092,36

7) Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp13.158.292.666,39 atau sebesar 99,77% dari anggaran sebesar Rp13.187.787.624,00 dan belum memiliki saldo awal Tahun Anggaran 2024. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa BOSP yaitu :

Tabel 5.39
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	13.097.787.624,00	13.068.292.666,39	99,77	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	13.187.787.624,00	13.158.292.666,39	99,77	0,00

8) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp36.729.092.986,15 atau sebesar 25,98% dari anggaran sebesar Rp37.381.600.000,00 dan Mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2024 yang terealisasi sebesar Rp4.654.784.731,6 atau 11,25%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa BLUD yaitu :

Tabel 5.40
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.381.600.000,00	36.729.092.986,15	98,25	41.383.877.717,75
	Jumlah	37.381.600.000,00	36.729.092.986,15	98,25	41.383.877.717,75

c. Belanja Hibah

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp11.804.023.974,00 **Rp11.503.716.590,00** **Rp32.850.295.398,00**

Realisasi anggaran belanja hibah TA 2025 Rp11.503.716.590,00 atau 97,45% dari anggaran sebesar Rp11.804.023.974,00 jika dibandingkan dengan tahun



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

sebelumnya, realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.346.578.808,00 atau 64,98%. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.41
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	19.861.904.000,00
2	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.940.000.000,00	3.655.894.390,00	92,78	6.090.619.798,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	709.423.974,00	709.295.133,00	99,98	649.932.533,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	5.954.600.000,00	5.938.527.067,00	99,73	6.197.839.067,00
	Jumlah	11.804.023.974,00	11.503.716.590,00	97,45	32.850.295.398,00

Rincian penerima belanja hibah TA 2025 dapat di jelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dengan pagu belanja hibah Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi Rp1.200.000.000,00 atau 100%.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a. Dinas Pendidikan dengan pagu belanja hibah Rp2.570.000.000,00 dengan realisasi Rp2.340.321.390,00 atau 91,06%
 - b. Dinas Kesehatan dengan pagu belanja hibah Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp50.000.000,00 atau 100%
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu belanja hibah Rp150.000.000,00 dengan realisasi Rp150.000.000,00 atau 100%
 - d. Badan Kesatuan Bangsa Politik dengan pagu belanja hibah Rp20.000.000,00 dengan realisasi Rp20.000.000,00 atau 100%.
3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dengan pagu belanja hibah Rp709.423.974,00 dengan realisasi Rp709.295.133,00 atau 99,98%.
4. Belanja Hibah Dana BOSP
 - a. Dinas Pendidikan dengan pagu belanja hibah Rp5.954.600.000,00 dengan realisasi Rp5.938.527.067,00 atau 99,73%.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Selain rincian diatas, dapat dijelaskan juga daftar penerima hibah berdasarkan OPD TA 2025 dapat yang dapat dilihat pada **Lampiran 1**

d. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp3.899.200.000,00 **Rp3.631.400.000,00** **Rp2.939.350.000,00**

Pada TA 2025 realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp3.631.400.000,00 atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp3.899.200.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp692.050.000,00 atau 23,54% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.42
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.699.200.000,00	2.465.400.000,00	91,33	1.489.350.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	166.000.000,00	83,00	250.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	Jumlah	3.899.200.000,00	3.631.400.000,00	93,13	2.939.350.000,00

Rincian penerima belanja bantuan sosial TA 2025 dapat di jelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan pagu belanja bantuan sosial Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp60.000.000,00 atau 30%
 - b. Badan Kesatuan Bangsa Politik dengan pagu belanja bantuan sosial Rp49.200.000,00 dengan realisasi Rp48.400.000,00 atau 98,37%
 - c. Sekretariat Daerah dengan pagu belanja bantuan sosial Rp2.450.000.000,00 dengan realisasi Rp2.357.000.000,00 dengan realisasi atau 96,20%
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pagu belanja bantuan sosial Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi Rp1.000.000.000,00 atau 100%
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
 - a. Sekretariat Daerah dengan pagu belanja bantuan sosial Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp166.000.000,00 dengan realisasi atau 83,00%



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

5.1.2.2 Belanja Modal

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp64.851.988.597,38	Rp61.886.590.721,06	Rp66.570.230.739,09

Pada TA 2025 realisasi belanja modal sebesar Rp61.886.590.721,06 atau 95,42 % dari anggaran sebesar Rp64.851.988.597,38. Realisasi ini terdiri dari belanja modal tanah Rp4.700.000.000,00 belanja modal peralatan dan mesin Rp26.797.925.710,00 belanja modal gedung dan bangunan Rp6.810.459.595,46 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp20.530.710.985,60 belanja modal aset tetap lainnya Rp2.962.742.432,00 dan belanja modal aset lainnya Rp84.751.998,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.683.640.018,03 atau 7,04% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.43
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.743.021.183,00	26.797.925.710,00	93,23	22.467.197.465,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.030.354.360,82	6.810.459.595,46	96,87	14.150.367.006,32
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.150.120.755,56	20.530.710.985,60	97,07	26.975.520.604,77
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.143.540.300,00	2.962.742.432,00	94,24	2.977.145.663,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	84.951.998,00	84.751.998,00	99,76	0,00
	Jumlah	64.851.988.597,38	61.886.590.721,06	95,42	66.570.230.739,09

a. Belanja Modal Tanah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp4.700.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	Rp0,00

Pada TA 2025 belanja modal tanah memiliki anggaran Rp4.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.700.000.000,00 yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai. Belanja tersebut merupakan ganti rugi atas aset tanah yang sudah tercatat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ganti rugi aset tanah GOR, kantor Camat Datuk Bandar dan Rumah Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp8.454.000.000,00 dan sudah dibayarkan di TA 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00
2. Ganti rugi aset tanah halaman kantor Walikota Tanjungbalai sebesar Rp700.000.000,00 yang sudah dibayar lunas pada TA 2025.

Pada TA 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak memiliki realisasi belanja modal tanah.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.44
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	100,00	0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024
Rp28.743.021.183,00 Rp26.797.925.710,00 Rp22.467.197.465,00

Pada TA 2025 realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.797.925.710,00 atau 93,23% dari anggaran sebesar Rp28.743.021.183,00. Realisasi ini terdiri dari belanja modal alat besar Rp7.555.778.601,00 belanja modal alat angkutan Rp2.071.832.000,00 belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp48.840.000,00 belanja modal alat pertanian Rp3.108.000,00 belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp4.526.958.830,00 belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp707.270.046,00 belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp6.105.754.065,00 belanja modal alat laboratorium Rp11.690.000,00 belanja modal computer Rp3.537.627.062,00 belanja modal alat eksplorasi Rp18.810.000,00 belanja modal alat peraga Rp1.002.000,00 belanja modal peralatan olahraga Rp36.630.000,00 belanja modal peralatan dan mesin BOSP Rp2.073.042.076,00 belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp99.583.030,00

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.330.728.245,00 atau 19,28% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.45
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	7.759.277.000,00	7.555.778.601,00	97,37	25.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.125.000.000,00	2.071.832.000,00	97,49	5.181.580.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	61.550.640,00	48.840.000,00	79,34	172.575.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	3.160.000,00	3.108.000,00	98,35	5.600.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.158.571.200,00	4.526.958.830,00	87,75	5.858.550.609,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	734.036.416,00	707.270.046,00	96,35	424.659.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.599.046.550,00	6.105.754.065,00	92,52	3.428.537.756,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.690.000,00	11.690.000,00	100,00	28.000.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
9	Belanja Modal Komputer	3.953.985.301,00	3.537.627.062,00	89,46	4.674.281.700,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	18.810.000,00	18.810.000,00	100,00	149.348.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	1.002.000,00	1.002.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	198.942.850,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	36.750.000,00	36.630.000,00	99,67	192.793.800,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	1.579.333.750,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.080.142.076,00	2.073.042.076,00	99,65	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	200.000.000,00	99.583.030,00	49,79	542.235.000,00
	Jumlah	28.743.021.183,00	26.797.925.710,00	93,23	22.467.197.465,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024
Rp7.030.354.360,82 Rp6.810.459.595,46 Rp14.150.367.006,32

Pada TA 2025 realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp6.810.459.595,46 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp7.030.354.360,82. Realisasi ini terdiri dari belanja modal bangunan gedung Rp6.546.709.595,46 dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp263.750.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.339.907.410,86 atau 51,87% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.46
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.760.442.553,70	6.546.709.595,46	96,83	13.712.729.234,22
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	269.911.807,12	263.750.000,00	97,71	246.048.772,10
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	191.589.000,00
	Jumlah	7.030.354.360,82	6.810.459.595,46	96,87	14.150.367.006,32

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran 2025 Realisasi 2025 Realisasi 2024
Rp21.150.120.755,56 Rp20.530.710.985,60 Rp26.975.520.604,77

Pada TA 2025 realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp20.530.710.985,60 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp21.150.120.755,56. Realisasi ini terdiri dari belanja modal jalan dan jembatan Rp17.259.785.325,17



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

belanja modal bangunan air Rp2.537.820.439,07 belanja modal instalasi Rp247.362.867,00 dan belanja modal jaringan Rp485.742.354,36.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.444.809.619,17 atau 23,89% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.47
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.513.669.368,14	17.259.785.325,17	98,55	19.947.646.739,81
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.598.016.983,06	2.537.820.439,07	97,68	5.378.927.303,79
3	Belanja Modal Instalasi	312.532.050,00	247.362.867,00	79,14	216.295.950,00
4	Belanja Modal Jaringan	725.902.354,36	485.742.354,36	66,91	1.432.650.611,17
	Jumlah	21.150.120.755,56	20.530.710.985,60	97,07	26.975.520.604,77

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp3.143.540.300,00 **Rp2.962.742.432,00** **Rp2.977.145.663,00**

Pada TA 2025 realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.962.742.432,00 atau 94,24% dari anggaran sebesar Rp3.143.540.300,00. Realisasi ini terdiri dari belanja modal bahan perpustakaan Rp24.475.000,00 belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga Rp96.593.332,00 belanja modal barang koleksi non budaya Rp13.308.900,00 dan belanja modal aset tetap lainnya BOSP Rp2.828.365.200,00

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.403.231,00 atau 0,48% dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.48
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	190.853.000,00	24.475.000,00	12,82	114.673.968,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	96.952.000,00	96.593.332,00	99,63	0,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	6.772.495,00
4	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	13.965.000,00	13.308.900,00	95,30	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.841.770.300,00	2.828.365.200,00	99,52	0,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	2.855.699.200,00
	Jumlah	3.143.540.300,00	2.962.742.432,00	94,24	2.977.145.663,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp84.951.998,00 **Rp84.751.998,00** **Rp0,00**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pada TA 2025 realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp84.751.998,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp84.951.998,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp84.751.998,00 dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.49
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	84.951.998,00	84.951.998,00	99,76	0,00
	Jumlah	84.951.998,00	84.951.998,00	99,76	0,00

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp1.200.000.000,00	Rp7.617.460,00	Rp652.519.000,00

Pada TA 2025 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp7.617.460,00 atau 0,63% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp644.901.540,00 atau 98,83%Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.50
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak terduga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63	652.519.000,00
	Jumlah	1.200.000.000,00	7.617.460,00	0,63	652.519.000,00

5.1.4 Surplus / (Defisit)

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
(Rp3.648.796.583,91)	Rp28.427.065.159,67	(Rp12.097.421.443,91)

Pada TA 2025 surplus/ defisit Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp28.427.065.159,67 dengan perhitungan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.51
Surplus/ Defisit TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	677.634.621.894,00	663.101.840.879,57	97,85	651.320.368.865,02
2	Belanja Daerah	681.283.418.477,91	634.674.775.719,90	93,16	663.417.790.308,93
	Jumlah	(3.648.796.583,91)	28.427.065.159,67	(779,0)	(12.097.421.443,91)

5.1.5 Pembiayaan Daerah

<u>Anggaran 2025</u>	<u>Realisasi 2025</u>	<u>Realisasi 2024</u>
Rp3.648.796.583,91	Rp2.462.024.137,92	Rp14.559.445.581,83



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 5.52
Pembiayaan Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp3.648.796.583,91 **Rp2.462.024.137,92** **Rp14.559.445.581,83**

Pada TA 2025 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.462.024.137,92 atau 67,47% dari anggaran sebesar Rp3.648.796.583,91. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.097.421.443,91 dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.53
Penerimaan Pembiayaan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.448.796.583,91	2.462.024.137,92	100,54	14.559.445.581,83
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	100,54	14.559.445.581,83

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp0,00 **Rp0,00** **Rp0,00**

Pada TA 2025 pengeluaran pembiayaan tidak memiliki pagu dan realisasi.

5.1.6 Pembiayaan Netto

Anggaran 2025 **Realisasi 2025** **Realisasi 2024**
Rp3.648.796.583,91 **Rp2.462.024.137,92** **Rp14.559.445.581,83**

Pada TA 2025 realisasi pembiayaan netto sebesar Rp2.462.024.137,92 atau 67,47% dari anggaran sebesar Rp3.648.796.583,91. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.097.421.443,91 dari realisasi tahun sebelumnya. Perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 5.54
Pembiayaan Netto TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Jumlah	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83

5.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2025
Rp0,00

Realisasi 2025
Rp30.889.089.297,59

Realisasi 2024
Rp2.462.024.137,92

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2025 adalah sebesar Rp30.889.089.297,59 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Surplus/ Defisit	(3.648.796.583,91)	28.427.065.159,67	(779,08)	(12.097.421.443,91)
2	Pembiayaan Netto	3.648.796.583,91	2.462.024.137,92	67,47	14.559.445.581,83
	Jumlah	0,00	30.889.089.297,59		2.462.024.137,92

5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode pelaporan. SAL adalah akumulasi dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berjalan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih akhir TA 2025 adalah sebesar Rp30.889.089.297,59

Tabel 5.56
Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
1) Sisa Anggaran Lebih Awal	2.462.024.137,92	14.559.445.581,83
2) Penggunaan SAL	2.462.024.137,92	14.559.445.581,83
Jumlah	0,00	0,00
3) SiLPA	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92
Jumlah	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00
5) Lain-Lain	0,00	0,00
SAL Akhir	30.889.089.297,59	2.462.024.137,92

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2025
Rp2.462.024.137,92

Tahun 2024
Rp14.559.445.581,83

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.462.024.137,92 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun Anggaran 2024.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

5.2.2 Penggunaan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp2.462.024.137,92	Rp14.559.445.581,83

Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.462.024.137,92 digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai kegiatan prioritas daerah.

5.2.3 SILPA/(SIKPA)

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp30.889.089.297,59	Rp2.462.024.137,92

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp30.889.089.297,59 yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp30.889.089.297,59	Rp2.462.024.137,92

Saldo anggaran lebih akhir TA 2025 sebesar Rp30.889.089.297,59

5.3. Penjelasan Neraca

Penjelasan akun-akun neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kota Tanjungbalai.

5.3.1 Aset

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp1.255.567.208.208,46	Rp1.454.776.717.087,05

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/ sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun rincian dari aset pada neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

Tabel 5.57
Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	ASET LANCAR	49.947.569.996,91	47.358.673.040,18	2.588.896.956,73
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	41.710.868.666,84	43.405.419.545,02	(1.694.550.878,18)
3	ASET TETAP	1.118.072.806.888,18	1.325.444.610.837,14	(207.371.803.948,96)
4	ASET LAINNYA	36.495.537.656,53	38.568.013.664,71	(2.072.476.008,18)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
5	PROPERTI INVESTASI	9.340.425.000,00	0,00	9.340.425.000,00
	Jumlah	1.255.567.208.208,46	1.454.776.717.087,05	(199.209.508.878,59)

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025
Rp49.947.569.996,91

31 Desember 2024
Rp47.358.673.040,18

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian aset lancar dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.58
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Kas dan Setara Kas	30.886.610.798,58	2.462.024.137,92	28.424.586.660,66
2	Piutang Pajak Daerah	34.316.839.065,00	31.225.384.713,00	3.091.454.352,00
3	Piutang Retribusi Daerah	2.741.504.000,00	2.427.708.500,00	313.795.500,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	22.084.164.386,79	15.617.038.445,46	6.467.125.941,33
5	Piutang Transfer Antar Daerah	18.730.787.227,00	28.552.134.349,00	(9.821.347.122,00)
6	Penyisihan Piutang	(67.690.633.674,69)	(43.382.255.200,17)	(24.308.378.474,52)
7	Persediaan	8.878.298.194,23	10.456.638.094,97	(1.578.339.900,74)
	Jumlah	49.947.569.996,91	47.358.673.040,18	2.588.896.956,73

Berikut ini beberapa rincian di aset lancar tahun 2025, yaitu:

a. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2025
Rp30.886.610.798,58

31 Desember 2024
Rp2.462.024.137,92

Berikut ini adalah tabel dari kas dan setara kas TA 2025 dan 2024 yang terdiri dari beberapa item yaitu:

Tabel 5.59
Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Kas di Kas Daerah	21.569.182.724,90	387.099.781,70	21.182.082.943,20
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	110.232.779,00	105.504.638,00	4.728.141,00
3	Kas di BLUD	8.645.231.076,38	1.013.820.739,53	7.631.410.336,85
4	Kas Dana BOSP	128.479.790,76	112.353.061,76	16.126.729,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	50.100.037,54	36.434.956,93	13.665.080,61
6	Kas Dana BOK Puskesmas	383.384.390,00	806.810.960,00	(423.426.570,00)
	Jumlah	30.886.610.798,58	2.462.024.137,92	28.424.586.660,66



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Terdapat selisih antara saldo Kas dan Setara Kas dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Berjalan dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas dan Setara Kas per akhir periode pelaporan adalah sebesar Rp30.886.610.798,58, sedangkan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran tercatat sebesar Rp30.889.089.297,59. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp2.478.497,01. Selisih tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat double pemotongan pajak yang belum dipulihkan dan dicatat sebagai piutang pajak sebesar Rp2.578.497,00.
2. Terdapat koreksi penambahan saldo awal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk TK Negeri sebesar Rp100.000,00.
3. Terdapat pembulatan angka pada saldo awal kas di Kas Daerah sebesar Rp0,01.

Terkait dengan adanya piutang pajak akibat double pemotongan sebesar Rp2.578.497,00, pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi atas kejadian double pemotongan pajak.
- b. Mengupayakan proses pemulihan/pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku dengan melaporkan dan bersurat kepada KPP pratama untuk segera dilakukan pengembalian atas kelebihan pemotongan pajak.
- c. Mencatat sebagai piutang sampai dengan realisasi pengembalian diterima.

1. Kas di Kas Daerah

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp21.569.182.724,90	Rp387.099.781,70

Kas di kas daerah merupakan kas yang berasal dari rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2025 sebesar Rp21.569.182.724,90 dan pada tahun 2024 sebesar Rp387.099.781,70.

Adapun beberapa penjelasan terkait Kas di Kas Daerah, yaitu :

- a. Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.569.182.724,90 yang merupakan akumulasi dari seluruh saldo-saldo kas di Bendahara Umum Daerah (BUD), Sedangkan Saldo Kas



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

di RKUD (Bank SUMUT Rek. No 3300102000010) per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.567.451.124,90

- b. Terdapat selisih antara Saldo kas di kas daerah dengan Saldo Kas di RKUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.731.600,00, dimana nilai tersebut merupakan double debet SP2D pembayaran Internet Dinas Koperasi dan UKM dengan nomor 12.74/ 04.0/ 000004/ LS/ 2.17.0.00.0.00.01.0000/ P1/ 2/ 2025 tanggal 11 Februari 2025 telah dipulihkan tanggal 30 Januari 2026.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025
Rp110.232.779,00

31 Desember 2024
Rp105.504.638,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp110.232.779,00 yang merupakan sisa dana Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjungbalai yang telah dikembalikan pada tahun 2026.

Adapun rincian dari kas dibendahara pengeluaran sebagai berikut ini:

Tabel 5.60
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025

No	Nominal (Rp)	Keterangan
1	1.288.000,00	Nilai tersebut merupakan pengembalian kelebihan belanja obat-obatan KB dana ganti uang (GU-3) yang dikembalikan pada tanggal 2 Januari 2026
2	95.504.700,00	Nilai tersebut merupakan pengembalian TU 7 DAK NF-pengendalian dan pendistribusian yang disetorkan pada tanggal 5 Januari 2026
3	1.489.700,00	Nilai tersebut merupakan pengembalian TU 8 DAKNF pemanduan dan sinkronisasi kebijakan yang disetorkan pada tanggal 5 Januari 2026
4	300.000,00	Nilai tersebut merupakan pengembalian TU 9 kegiatan pendayagunaan tenaga penyuluh KB yang disetorkan pada tanggal 5 Januari 2026
5	10.206.770,00	Nilai tersebut merupakan pengembalian dana GU-3 yang disetorkan pada tanggal 6 Januari 2026
6	1.443.609,00	Nilai tersebut merupakan pengembalian dana GU-3. Adapun pada bukti setor pengembalian tercantum nilai Rp2.166.808,00 yang mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kelebihan pengembalian sebesar Rp723.199,00 pada tanggal 7 Januari 2026
	110.232.779,00	

Adapun rincian dari kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2**

3. Kas di BLUD

31 Desember 2025
Rp8.645.231.076,38

31 Desember 2024
Rp1.013.820.739,53



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD yang ada pada Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

Kas di BLUD pada Pemerintah Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.645.231.076,38 dimana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. Mansyur mengelola langsung pendapatan dan belanja yang diterima.

Adapun rincian Kas di BLUD berupa pendapatan dan pengeluaran berdasarkan SP2B dan SPB dapat dilihat di **Lampiran 3**

4. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp128.479.790,76	Rp112.353.061,76

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah sisa dana dari pengelolaan JKN Puskesmas yang terdapat pada masing-masing pengelola JKN Puskesmas se-Kota Tanjungbalai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp128.479.790,76 yang merupakan saldo kas JKN Puskemas se-Kota Tanjungbalai.

Adapun rincian kas dana Kapitasi pada FKTP sebagai berikut :

Tabel 5.61
Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2025 dan 2024

No	Nama Puskesmas	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Puskesmas Datuk Bandar	45.964,00	258.587,00
2	Puskesmas Semula Jadi	21.442,00	22.063,00
3	Puskesmas Kampung Persatuan	563.173,00	358,00
4	Puskesmas Kampung Baru	60.808.718,76	916.314,76
5	Puskesmas Teluk Nibung	22.814.307,00	100.800.908,00
6	Puskesmas Sipori-Pori	309.407,00	31.344,00
7	Puskesmas Sei Tualang Raso	22.445.005,00	1.612.343,00
8	Puskesmas MU Damanik	21.471.774,00	8.711.144,00
	JUMLAH	128.479.790,76	112.353.061,76

Adapun rincian dari pendapatan dan belanja dana JKN Puskesmas per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 4**

5. Kas Dana BOSP

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp50.100.037,54	Rp36.434.956,93



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Kas Dana BOSP adalah sisa dana bantuan operasional baik itu BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP PAUD, dan BOP Kesenjangan dari sekolah PAUD, TK, SD dan SMP Negeri yang terdapat pada masing-masing Bendahara BOSP.

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.100.037,54
Jika dibandingkan dengan TA 2024, kas BOSP mengalami peningkatan sebesar Rp13.665.080,61 atau 37,50%

Adapun rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 5**

6. Kas Dana BOK Puskesmas

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp383.384.390,00	Rp806.810.960,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp383.384.390,00 yang merupakan saldo kas BOK Puskesmas se-Kota Tanjungbalai. Sedangkan pada tahun 2024 saldo kas dana BOK Puskesmas sebesar Rp806.810.960,00.

Adapun saldo kas Dana BOK Puskesmas berikut ini :

Tabel 5.62
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	Nama Puskesmas	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Puskesmas Datuk Bandar	37.602.675,00	8.298.700,00
2	Puskesmas Semula Jadi	13.265.965,00	99.743.087,00
3	Puskesmas Kampung Persatuan	35.555.986,00	146.990.722,00
4	Puskesmas Kampung Baru	86.958.848,00	3.587.500,00
5	Puskesmas Teluk Nibung	12.545.910,00	142.549.271,00
6	Puskesmas Sipori-Pori	45.772.572,00	179.109.522,00
7	Puskesmas Sei Tualang Raso	33.044.289,00	105.937.108,00
8	Puskesmas MU Damanik	118.638.145,00	120.595.050,00
	JUMLAH	383.384.390,00	806.810.960,00

Adapun rincian dari pendapatan dan belanja dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 6**

b. Piutang Pajak Daerah

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp34.316.839.065,00	Rp31.225.384.713,00

Piutang Pajak Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

Tabel 5.63
Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	77.601.481,00	(77.601.481,00)
2	Piutang Pajak Restoran	0,00	26.482.242,00	(26.482.242,00)
3	Piutang Pajak Hiburan	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Parkir	0,00	31.300.000,00	(31.300.000,00)
6	Piutang Pajak Air Tanah	18.155.000,00	8.841.000,00	9.314.000,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.674.376.798,00	30.999.921.311,00	2.674.455.487,00
8	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	76.708.679,00	76.708.679,00	0,00
9	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	541.768.588,00	0,00	541.768.588,00
	Jumlah	34.316.839.065,00	31.225.384.713,00	3.091.454.352,00

Berdasarkan rincian piutang pajak daerah yang tercantum pada tabel, diketahui bahwa saldo awal piutang pajak daerah tercatat sebesar Rp31.225.384.713,00 Saldo awal tersebut merupakan jumlah keseluruhan piutang pajak daerah yang masih harus ditagih kepada wajib pajak pada awal periode pelaporan.

Ada beberapa piutang pajak yang di reklas ke Piutang Pajak Barang dan Jasa seperti piutang pajak hotel, piutang pajak restoran dan piutang pajak parkir. Sehingga direkening tersebut tidak ada piutang pajak yang ditagihkan.

Kemudian, pada TA 2025 masih ada nilai tagihan sebesar Rp34.316.839.065,00 mencerminkan kewajiban perpajakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak dari periode sebelumnya, sehingga masih tercatat sebagai piutang yang menjadi hak pemerintah daerah untuk ditagihkan dan diterima sebagai pendapatan daerah.

Oleh karena itu, pengelolaan dan penagihan piutang pajak daerah perlu terus ditingkatkan agar penerimaan daerah dapat lebih optimal pada periode berikutnya.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

1. Piutang Pajak Hotel

31 Desember 2025
Rp0,00

31 Desember 2024
Rp77.601.481,00

Piutang pajak hotel adalah Jumlah pajak hotel yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Dalam rekening piutang pajak hotel telah di reklas menjadi rekening PBJT, sehingga direkening ini tidak memiliki tagihan.

Berikut ini adalah tabel rincian piutang pajak hotel per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.64
Rincian Piutang Pajak Hotel 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Hotel Bengawan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Hayani	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ananda	241.481,00	0,00	0,00	0,00
4	Wisma Al Karim	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Penginapan Azizi	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Hotel Tresya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Hotel Suranta	3.986.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Hotel Assyifa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Hotel Malahayati	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Hotel Wisata	500.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Hotel Asahan	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Hotel Jaya	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Losmen Amanda	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Grand Singgie Hotel	48.884.000,00	0,00	0,00	0,00
15	KM. 7 Hotel	930.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Mussafa Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Penginapana dsitinjak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	77.601.481,00	0,00	0,00	0,00

2. Piutang Pajak Restoran

31 Desember 2025
Rp0,00

31 Desember 2024
Rp26.482.242,00

Piutang pajak restoran adalah Jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh restoran atas pelayanan yang diberikannya. Piutang pajak ini timbul karena kewajiban pajak yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.

Dalam rekening piutang pajak restoran telah di reklas menjadi rekening PBJT, sehingga direkening ini tidak memiliki tagihan.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Berikut ini adalah tabel rincian piutang pajak restoran per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.65
Rincian Piutang Pajak Restoran 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Taufiq	475.000,00	0,00	0,00	0,00
2	B. Sihalo	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Tina	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Kang Le	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Razi Kesuma	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Hj. Delima	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Tanth	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Haidir	424.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Amiruddin	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Ayen	440.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Aulia	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Syahroni	175.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Azhar	840.100,00	0,00	0,00	0,00
14	Tuminah	210.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakir Zein	60.000,00	0,00	0,00	0,00
16	T. Pancong	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17	K. Zufa	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Ame	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Seri	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Halimah	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Riduan Mrp	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Izah	70.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Bengawan	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Azhar/RM. Azhar	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	PT. Singgie Rekreasi	13.564.000,00	0,00	0,00	0,00
26	RM. Holat	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	D'Mango	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	RM. Haidir	400.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Resto Tresya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	RM. Hasan	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Point Coffee	5.539.142,00	0,00	0,00	0,00
32	Arteri garden swimming	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ayam bakar maksei	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ayam penyet pakde	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ayam presto cabe ijo	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Bakso bengawan solo	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Bakso mekar sari	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bakso rahayu	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
39	Captain fried chicken	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Janji jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kafe aini	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Mie gacoan	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Mie pangsit aseng	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Mixue ice cream	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Momoyo ice cream	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Nadyne cafe	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Rm cap go can	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Rm gaok	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Rm mie aceh cita rasa i	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Rm sederhana	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Rm selera kita	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rm soto nirwana	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rm warung steak	0,00	0,00	0,00	0,00
54	S&G cafe	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SS fried chicken	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Strong cafe bilyard	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Teras atok	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Titik tuju	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Warkop agam cabang medan	0,00	0,00	0,00	0,00
60	WBF(warung buk fenny)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Toko kopi soeaka	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	26.482.242,00	0,00	0,00	0,00

3. Piutang Pajak Hiburan

31 Desember 2025
Rp1.300.000,00

31 Desember 2024
Rp0,00

Piutang Pajak Hiburan adalah hak pemerintah daerah untuk menagih pajak dari penyelenggara hiburan yang belum dibayar sampai dengan tanggal tertentu.

Jumlah wajib pajak yang tercatat dalam tabel ini adalah 2 wajib pajak dan menunjukkan bahwa ada tidak ada tagihan nilai pajak pada Tahun 2025. Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp1.300.000,00 yang berasal dari 2 (dua) wajib pajak. Nilai tersebut merupakan piutang yang muncul pada Tahun 2025 dan belum terdapat realisasi pembayaran, sehingga masih menjadi piutang pajak daerah yang perlu dilakukan penagihan.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Berikut ini adalah tabel rincian piutang hiburan per 31 Desember 2025 dan 2024 :

Tabel 5.66
Rincian Piutang Pajak Hiburan 31 Desember 2025 dan 2024

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Strong Cafe	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Dwoop	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Jumlah	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

4. Piutang Pajak Reklame

31 Desember 2025
Rp4.530.000,00

31 Desember 2024
Rp4.530.000,00

Piutang Pajak Reklame adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran pajak reklame yang belum dibayarkan oleh wajib pajak.

Berikut ini adalah tabel rincian piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 :

Tabel 5.67
Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	PT Indofood Sukses Makmur	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2	PT BNI Cabang Tanjungbalai	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00
3	Alfamart	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00

Tabel tersebut memuat data Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 yang terdiri dari beberapa wajib pajak yang memasang atau menyelenggarakan reklame. Data yang disajikan meliputi jumlah pajak tahun 2025, pembayaran yang dilakukan pada tahun 2025, penambahan pada tahun 2025, serta perbandingan dengan pajak tahun 2024.

Jumlah wajib pajak yang tercatat dalam tabel ini adalah 3 wajib pajak dan menunjukkan bahwa nilai pajak pada Tahun 2025 sama dengan Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp4.530.000 yang berasal dari tiga wajib pajak. Nilai tersebut merupakan piutang yang masih tersisa dari Tahun 2024 dan hingga Tahun 2025 belum terdapat realisasi pembayaran,



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

sehingga masih menjadi piutang pajak daerah yang perlu dilakukan penagihan.

5. Piutang Pajak Parkir

31 Desember 2025
Rp0,00

31 Desember 2024
Rp31.300.000,00

Piutang pajak parkir adalah pajak parkir yang belum dibayarkan oleh konsumen. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Dalam rekening piutang pajak parkir telah di reklas menjadi rekening PBJT, sehingga direkening ini tidak memiliki tagihan.

Berikut ini adalah tabel rincian piutang pajak parkir per 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.68
Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Zulfikar Hasril	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Kerpai Singh	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Parkir Family	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pt midi utama Indonesia tbk	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Agusmen sufrandy sitorus	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bank bca cabang tanjungbalai	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bank bsi tanjungbalai	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bank sumut	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Doorsmeer family	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Doorsmeer pelangi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Yonanta kusuma	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bank bri cabang tanjungbalai	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Parkir mie gacoan	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Parkir pt kai	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ud yenni	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pt astha beribis grafika	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00

6. Piutang Pajak Air Tanah

31 Desember 2025
Rp18.155.000,00

31 Desember 2024
Rp8.841.000,00

Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah hak tagih Pemerintah Daerah atas pembayaran pajak air bawah tanah yang belum dibayarkan oleh



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

wajib pajak. Berikut ini adalah tabel rincian piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 :

Tabel 5.69
Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	PT. Gunung Salju	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	PT. Sumatra Baru	800.000,00	800.000,00	0,00	1.600.000,00
3	PT. IJS Syndicaat	4.041.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	4.041.000,00
4	PT. Salju Asahan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5	PT Asa	0,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
6	Kilang Minyak Pelita	0,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
7	CV Putra Harapan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
8	CV Indah Sari	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9	Agusmen Sufrandy Sitorus	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10	Negoland Waterpark	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11	PT. Halindo Berjaya Mandiri	0,00	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00
	Jumlah	8.841.000,00	14.380.000,00	5.066.000,00	18.155.000,00

Tabel ini memuat data wajib pajak beserta jumlah pajak Tahun 2025, pembayaran yang telah dilakukan pada Tahun 2025, penambahan pajak pada Tahun 2025, serta perbandingan dengan pajak Tahun 2024. Jumlah wajib pajak yang tercatat dalam tabel ini adalah 11 wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, total pajak pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.314.000,00. Secara keseluruhan, jumlah pajak pada Tahun 2025 mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh penambahan beberapa wajib pajak baru.

Dari total pajak Tahun 2025 sebesar Rp23.221.000, telah terealisasi pembayaran sebesar Rp5.066.000, sementara sisanya masih menjadi potensi penerimaan yang perlu ditagihkan. Untuk tagihan dari piutang ini dapat dilihat pada **Lampiran 7**

7. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

31 Desember 2025
Rp33.674.376.798

31 Desember 2024
Rp30.999.921.311,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disebut juga dengan Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Berikut ini adalah tabel PBB-P2 per 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.70
Rincian Piutang PBBP2 per 31 Desember 2025 dan 2024

TAHUN	JUMLAH KETETAPAN/ POKOK PBB	Tahun 2024 (Rp)	REALISASI 2025			Tahun 2025 (Rp)
			POKOK	DENDA	TOTAL BAYAR	
1996	1.902.202	1.683.696	-	-	-	1.683.696
1997	273.571.137	175.675.054	65.828	14	65.842	175.609.226
1998	332.436.603	116.944.141	28.390	14	28.404	116.915.751
1999	431.884.944	123.002.539	-	-	-	123.002.539
2000	657.673.862	273.428.119	40.810	907	41.717	273.387.309
2001	803.076.135	543.621.070	184.938	-	184.938	543.436.132
2002	918.777.126	259.937.420	82.140	-	82.140	259.855.280
2003	1.125.102.632	529.195.229	118.306	2.659	120.965	529.076.923
2004	1.141.741.377	290.745.299	6.838	-	6.838	290.738.461
2005	1.340.306.011	430.718.083	392.778	99.249	492.027	430.325.305
2006	1.461.543.041	327.803.273	78.027	-	78.027	327.725.246
2007	1.539.590.887	184.363.263	-	-	-	184.363.263
2008	1.902.111.776	890.984.193	175.790	5.717	181.507	890.808.403
2009	2.002.613.744	639.685.507	180.417	4.277	184.694	639.505.090
2010	2.422.350.365	646.504.502	75.318	-	75.318	646.429.184
2011	2.415.750.600	581.519.149	29.060	2.400	31.460	581.490.089
2012	2.666.446.129	675.682.917	116.010	-	116.010	675.566.907
2013	2.652.339.888	954.794.704	134.756	2.400	137.156	954.659.948
2014	4.492.232.676	1.236.818.010	41.955.645	2.531.651	44.487.296	1.194.862.365
2015	4.574.730.735	1.347.979.333	42.094.499	1.876.007	43.970.506	1.305.884.834
2016	4.657.820.707	1.366.338.804	50.946.517	6.048.517	56.995.034	1.315.392.287
2017	4.938.456.364	1.486.949.613	55.374.424	7.686.912	63.061.336	1.431.575.189
2018	5.122.826.228	1.722.408.132	64.314.323	7.631.924	71.946.247	1.658.093.809
2019	5.226.228.882	2.028.925.955	69.834.628	5.852.789	75.687.417	1.959.091.327
2020	5.334.837.463	2.507.536.607	88.774.391	5.814.438	94.588.829	2.418.762.216
2021	5.491.107.412	2.343.182.054	83.365.248	5.735.006	89.100.254	2.259.816.806
2022	5.583.846.827	2.485.226.060	120.766.663	9.262.724	130.029.387	2.364.459.397
2023	5.918.668.338	2.836.131.445	210.217.008	12.074.641	222.291.649	2.625.914.437
2024	6.935.143.209	3.992.137.140	345.255.953	27.702.656	372.958.609	3.646.881.187
2025	7.119.834.413	-	3.271.934.955	782.796	3.272.717.751	3.849.064.192
JUMLAH		30.999.921.311	4.446.543.660	93.117.698	4.539.661.358	33.674.376.798

Berdasarkan data pada tabel, dapat dijelaskan bahwa akumulasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berasal dari periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan adanya saldo awal sebesar Rp30.999.921.311,00.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Saldo awal tersebut merupakan total piutang yang masih tercatat dan belum dilunasi oleh wajib pajak hingga akhir periode tahun 2024. Nilai ini mencerminkan kewajiban pembayaran PBB-P2 yang masih harus diselesaikan oleh para wajib pajak dari berbagai tahun ketetapan dalam rentang waktu tersebut.

Selanjutnya, dalam periode yang sama terdapat penambahan jumlah ketetapan atau pokok PBB sebesar Rp7.119.834.413,00. Penambahan ini berasal dari penerbitan ketetapan pajak baru ataupun penyesuaian nilai ketetapan atas objek pajak yang tercatat pada tahun-tahun tersebut.

Dengan demikian, jumlah piutang PBB-P2 mengalami peningkatan karena adanya tambahan kewajiban pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku.

Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan pada posisi piutang PBB-P2 akibat adanya aktivitas pembayaran dari wajib pajak. Pada tahun tersebut, wajib pajak melakukan pelunasan terhadap sebagian pokok piutang dengan total pembayaran sebesar Rp1.174.608.705,00.

Pelunasan ini menunjukkan adanya upaya dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah piutang PBB-P2 yang tercatat pada pemerintah daerah.

Namun demikian, pada tahun berjalan 2025 juga terdapat penambahan piutang PBB-P2 baru sebesar Rp3.849.064.192,00. Penambahan ini disebabkan oleh adanya sisa pelunasan atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru untuk Tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan jumlah piutang tetap mengalami peningkatan meskipun telah terjadi pembayaran dari wajib pajak pada tahun yang sama.

Dengan mempertimbangkan saldo awal, penambahan ketetapan, serta pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak selama tahun 2025, maka posisi akhir piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp33.674.376.798. Nilai tersebut menggambarkan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

total kewajiban PBB-P2 yang masih harus ditagih dan diselesaikan oleh wajib pajak hingga akhir tahun anggaran 2025.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penagihan dan pengelolaan piutang yang efektif agar penerimaan pajak daerah dapat terus dioptimalkan pada periode berikutnya.

8. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

31 Desember 2025
Rp76.708.679,00

31 Desember 2024
Rp76.708.679,00

BPHTB adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Berikut ini adalah tabel rincian piutang BPHTB per 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.71
Rincian Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Datuk Bandar	25.593.385,00	0,00	0,00	25.593.385,00
2	Datuk Bandar Timur	7.956.204,00	0,00	0,00	7.956.204,00
3	Tanjungbalai Selatan	32.812.636,00	0,00	0,00	32.812.636,00
4	Tanjungbalai Utara	6.790.122,00	0,00	0,00	6.790.122,00
5	Sei Tualang Raso	1.635.684,00	0,00	0,00	1.635.684,00
6	Teluk Nibung	1.920.648,00	0,00	0,00	1.920.648,00
	Jumlah	76.708.679,00	0,00	0,00	76.708.679,00

Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2025 Sebesar Rp76.708.679,00 sama dengan ditahun sebelumnya belum ada pembayaran piutang.

Piutang BPHTB di tahun 2025 sebesar Rp76.708.679,00 sama seperti piutang tahun sebelumnya yang merupakan piutang berasal dari penyerahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 yang menyerahkan kewenangan pemungutan BPHTB kepada pemerintah daerah.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Saldo piutang BPHTB tersebut merupakan saldo sejak tahun 2013 (tahun penyerahan piutang) dan keseluruhan piutang memiliki tanggal jatuh tempo 19 September 2010 atau umur piutang telah lebih dari 5 tahun per tanggal neraca 31 Desember 2025.

9. Piutang PBJT

31 Desember 2025
Rp541.768.588,00

31 Desember 2024
Rp0,00

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah piutang daerah yang timbul dari pajak atas konsumsi makanan/minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, serta kesenian/hiburan yang belum dilunasi oleh wajib pajak (individu/badan) hingga jatuh tempo.

Ada beberapa rekening di TA 2025, seperti piutang pajak hotel, piutang pajak restoran dan piutang pajak parkir direklas di rekening PBJT ini.

Berikut ini adalah rincian dari piutang PBJT per 31 Desember 2025

Tabel 5.72
Rincian Piutang Pajak PBJT per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Piutang PBJT-Makanan dan/ atau Minuman	0,00	182.368.067,00	22.703.142,00	159.664.925,00
2	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	126.647.481,00	60.060.000,00	66.587.481,00
3	Piutang PBJT-Jasa Parkir	0,00	56.913.182,00	0,00	56.913.182,00
4	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	258.603.000,00	0,00	258.603.000,00
	Jumlah	0,00	624.531.730,00	82.763.142,00	541.768.588,00

Piutang PBJT-Makanan dan/ atau Minuman

Rekening Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman ini adalah reklas dari rekening piutang pajak restoran. Dimana penambahan piutang yang ada ditabel diatas merupakan nilai reklas saldo awal dari rekening pajak restoran sebesar Rp26.482.242,00 ditambah dengan penambahan TA 2025 sebesar Rp155.885.825,00 yang mana totalnya menjadi Rp182.368.067,00

Kemudian ada pelunasan di TA 2025 sebesar Rp22.703.142,00 sehingga sisa piutang yang akan ditagihkan di tahun berikutnya sebesar Rp159.664.925,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8**



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Piutang PBJT-Jasa Perhotelan

Rekening Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa Perhotelan ini adalah reklas dari rekening piutang pajak hotel. Dimana penambahan piutang yang ada ditabel diatas merupakan nilai reklas saldo awal dari rekening pajak restoran sebesar Rp77.601.281,00 ditambah dengan penambahan TA 2025 sebesar Rp49.046.000,00 yang mana totalnya menjadi Rp182.368.067,00

Kemudian ada pelunasan di TA 2025 sebesar Rp60.060.000,00, sehingga sisa piutang yang akan ditagihkan di tahun berikutnya sebesar Rp66.587.481,00 Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 9**

Piutang PBJT-Jasa Parkir

Rekening Piutang Pajak Rekening Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir ini adalah reklas dari rekening piutang pajak parkir. Dimana penambahan piutang yang ada ditabel diatas merupakan nilai reklas saldo awal dari rekening pajak parkir sebesar Rp31.300.000,00 ditambah dengan penambahan TA 2025 sebesar Rp25.613.182,00 yang mana totalnya menjadi Rp56.913.182,00

Kemudian karena tidak ada pelunasan di TA 2025. sebesar, sehingga sisa piutang yang akan ditagihkan di tahun berikutnya sebesar Rp56.913.182,00 Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 10**

Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Rekening Piutang Pajak Rekening Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan ini adalah reklas dari rekening piutang pajak hiburan. Dimana penambahan piutang yang ada ditabel diatas merupakan nilai reklas saldo awal dari rekening pajak parkir sebesar Rp258.603.000,00 dan belum ada penambahan.

Kemudian karena tidak ada ada pelunasan di TA 2025. sebesar, sehingga sisa piutang yang akan ditagihkan di tahun berikutnya sebesar Rp258.603.000,00 Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**

Tabel 5.73
Rincian Piutang Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Wajib Pajak	Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025
1	Arteri Garden		500.000	0	500.000



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	Tahun 2024	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025
2	Galaxy Hall	0	125.234.000,00	0	125.234.000,00
3	Lucky Gym	0	500.000,00	0	500.000,00
4	Mahkota Hall	0	18.750.000	0	18.750.000
5	Nadyne Gym	0	1.685.000	0	1.685.000
6	Nego Land Waterpark	0	500.000	0	500.000
7	Planet Ktv	0	111.434.000	0	111.434.000
	Jumlah	0	258.603.000,00	0	258.603.000,00

Tabel tersebut memuat data Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 yang terdiri dari beberapa wajib pajak usaha hiburan seperti kolam renang, gym, hall, waterpark, dan karaoke. Data yang disajikan meliputi jumlah pajak tahun 2025, pembayaran yang telah dilakukan pada tahun 2025, penambahan pada tahun 2025, serta perbandingan dengan tahun 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, total Piutang PBJT sektor Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp258.603.000 yang berasal dari 6 wajib pajak usaha hiburan. Hingga saat ini belum terdapat realisasi pembayaran, sehingga seluruh nilai tersebut masih menjadi piutang pajak daerah yang perlu dilakukan penagihan oleh pemerintah daerah. Perlu dijelaskan bahwa rekening PBJT ini baru ada di TA 2025.

c. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2025
Rp2.741.504.000,00

31 Desember 2024
Rp2.427.708.500,00

Piutang Retribusi Daerah adalah hak tagih Pemerintah Daerah atas pembayaran retribusi daerah yang belum dibayarkan oleh masyarakat atau pelanggan jasa pelayanan publik. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74
Saldo Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.280.866.000,00	1.163.416.500,00	117.449.500,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.460.638.000,00	1.264.292.000,00	196.346.000,00
	Jumlah	2.741.504.000,00	2.427.708.500,00	313.795.500,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

1. Piutang Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2025
Rp1.280.866.000,00

31 Desember 2024
Rp1.163.416.500,00

Jenis-jenis dari piutang retribusi jasa umum di Kota Tanjungbalai terdiri dari piutang retribusi pelayanan persampahan dan piutang retribusi pelayanan pasar yaitu kios pasar. Berikut ini adalah penjelasan saldo piutang retribusi jasa umum

Tabel 5.75
Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	733.000,00	15.640.000,00	733.000,00	15.640.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.162.683.500,00	102.542.500,00	-	1.265.226.000,00
	JUMLAH	1.163.416.500,00	118.182.500,00	733.000,00	1.280.866.000,00

Berdasarkan tabel tersebut, total piutang Retribusi Jasa Umum pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.280.866.000,00 yang terdiri dari piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi piutang pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp117.449.500,00 (Rp118.182.500,00 - Rp733.000,00)

Untuk pengelola piutang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai sedangkan pengelola piutang retribusi pelayanan pasar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

31 Desember 2025
Rp15.640.000,00

31 Desember 2024
Rp733.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan oleh masyarakat atau pelanggan jasa persampahan/kebersihan.

Berikut ini adalah tabel rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan per 31 Desember 2025 dan 2024 :



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.76
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan yang Belum
Disetorkan ke Kas Daerah oleh PDAM Tirta Kualo
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	PDAM	733.000,00	15.640.000,00	733.000,00	15.640.000,00
	Jumlah	733.000,00	15.640.000,00	733.000,00	15.640.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

31 Desember 2025
Rp1.265.226.000,00

31 Desember 2024
Rp1.162.683.500,00

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran retribusi pelayanan pasar yang belum dibayarkan oleh pengguna jasa pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai merupakan pengelola piutang retribusi pelayanan pasar. Per 31 Desember 2025, memiliki penambahan piutang sebesar Rp102.542.000,00. Berikut ini adalah tabel rincian piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2025 dan 2024 :

Tabel 5.77
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Jenis	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Pasar Bengawan	Kios	30.201.000,00	7.762.500,00	0,00	37.963.500,00
2	Pasar meja Babi	Meja	1.467.000,00	6.917.500,00	0,00	8.384.500,00
3	Pasar Bahagia	Kios	28.651.000,00	0,00	0,00	28.651.000,00
4	Pasar Bahagia	Meja	14.687.500,00	1.201.500,00	0,00	15.889.000,00
5	Pasar Bahagia	Meja Ikan	3.494.000,00	0,00	0,00	3.494.000,00
6	Pasar Merdeka	Kios	76.870.500,00	20.310.000,00	0,00	97.180.500,00
7	Pasar Deli	Kios	9.807.500,00	1.825.000,00	0,00	11.632.500,00
8	Pasar Kawat I	Kios	90.177.500,00	10.987.500,00	0,00	101.165.000,00
9	Pasar Kawat II	Kios	88.738.500,00	2.990.000,00	0,00	91.728.500,00
10	Pasar Kawat III	Kios	60.637.000,00	6.387.500,00	0,00	67.024.500,00
11	Pasar Suprpto	Kios Lantai 1	24.435.500,00	17.800.000,00	0,00	42.235.500,00
12	Pasar Suprpto	Kios Unggas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
13	Pasar Suprpto	Kios Pemanen	3.668.000,00	0,00	0,00	3.668.000,00
14	Pasar Suprpto	Meja Daging	2.895.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00
15	Pasar Suprpto	Meja Ikan	5.569.500,00	810.000,00	0,00	6.379.500,00
16	Pasar Suprpto	Gelaran	18.380.000,00	12.815.000,00	0,00	31.195.000,00
17	Pasar TPO	Gelaran	541.924.000,00	0,00	0,00	541.924.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Jenis	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
18	Pasar Beringin	Kios	156.232.000,00	1.975.000,00	0,00	158.207.000,00
19	Pasar Sejahtera	Gelaran	4.701.000,00	8.233.500,00	0,00	12.934.500,00
20	Depan SMA Negeri 2	Kios	0,00	1.992.500,00	0,00	1.992.500,00
21	Jalan Masjid	Kios	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
	Jumlah		1.162.683.500,00	102.542.500,00	0,00	1.265.226.000,00

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2025
Rp1.460.638.000,00

31 Desember 2024
Rp1.264.292.000,00

Jenis-jenis dari piutang retribusi jasa usaha di Kota Tanjungbalai adalah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu rusunawa.

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

31 Desember 2025
Rp1.460.638.000,00

31 Desember 2024
Rp1.264.292.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu jenis piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang timbul dari hak tagih atas pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan oleh pihak yang menggunakan kekayaan daerah tersebut.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai merupakan pengelola piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini adalah rusunawa.

Per 31 Desember 2025, sebagian rusunawa telah melakukan pembayaran piutang sebesar Rp37.389.000,00. Dan memiliki penambahan piutang sebesar Rp234.255.000,00 di tahun 2025. Berikut ini adalah tabel rincian piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2025 dan 2024 :

Tabel 5.78
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 dan 2024

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal 2024	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
1	Rusunawa I	231.770.000,00	0,00	41.925.000,00	12.795.000,00	260.900.000,00
2	Rusunawa II	236.295.000,00	0,00	32.545.000,00	4.835.000,00	264.005.000,00
3	Rusunawa III	338.705.000,00	0,00	45.346.000,00	1.895.000,00	382.156.000,00
4	Rusunawa IV	255.652.000,00	0,00	34.026.000,00	6.145.000,00	283.533.000,00
5	Rusunawa V	178.710.000,00	0,00	36.733.000,00	4.319.000,00	211.124.000,00
6	Rusunawa VI	23.160.000,00	520.000,00	43.680.000,00	7.400.000,00	58.920.000,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Wajib Pajak	Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal 2024	Penambahan di Tahun 2025	Pembayaran di Tahun 2025	Tahun 2025 (Rp)
	Jumlah	1.264.292.000,00	520.000,00	234.255.000,00	37.389.000,00	1.460.638.000,00

d. Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah

31 Desember 2025
Rp22.084.164.386,79

31 Desember 2024
Rp15.617.038.445,46

Tabel berikut ini adalah rincian dari piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2025:

Tabel 5.79
Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	153.645.340,00	153.645.340,00	0,00
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.535.097.889,00	3.656.077.106,00	(120.979.217,00)
3	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	338.795.218,49	0,00	338.795.218,49
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	13.076.210.447,30	11.509.923.939,46	1.566.286.507,84
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	299.970.557,00	297.392.060,00	2.578.497,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	4.680.444.935,00	0,00	4.680.444.935,00
	Jumlah	22.084.164.386,79	15.617.038.445,46	6.467.125.941,33

Untuk melihat rincian Piutang Lain Lain PAD yang sah dapat dilihat dari **Lampiran 12**

e. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025
Rp18.730.787.227,00

31 Desember 2024
Rp28.552.134.349,00

Piutang transfer antar daerah adalah hak pemerintah daerah untuk menerima dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan, khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Piutang Transfer Antar Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/231/KPTS/2026.

Tabel berikut ini adalah rincian dari transfer antar daerah per 31 Desember 2025:

Tabel 5.80
Piutang Transfer Antar Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.088.510,00	5.304.462.220,00	(5.282.373.710,00)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.485.888,00	3.821.415.204,00	(3.797.929.316,00)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.675.031.832,00	19.107.236.900,00	(1.432.205.068,00)



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.010.180.997,00	319.020.025,00	691.160.972,00
	Jumlah	18.730.787.227,00	28.552.134.349,00	(9.821.347.122,00)

Adapun rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13**

f. Penyisihan Piutang

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(Rp67.690.633.674,69) **(Rp43.382.255.200,17)**

Tabel berikut ini adalah rincian dari penyisihan piutang per 31 Desember 2025 :

Tabel 5.81
Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(23.080.324.478,70)	(19.606.275.178,55)	(3.474.049.300,15)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.975.143.987,50)	0,00	(1.975.143.987,50)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(14.769.771.453,14)	(13.251.712.065,86)	(1.518.059.387,28)
4	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(120.687.400,00)	(120.687.400,00)	0,00
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(27.744.706.355,35)	(10.403.580.555,76)	(17.341.125.799,59)
	Jumlah	(67.690.633.674,69)	(43.382.255.200,17)	(24.308.378.474,52)

Adapun rincian Piutang pendapatan dan Piutang lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 14**

g. Persediaan

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp8.878.298.194,23 **Rp10.456.638.094,97**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan (stock opname) per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.878.298.194,23 yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) OPD dan 81 (delapan puluh satu) Sekolah SD dan SMP Negeri Se-kota Tanjungbalai.

Saldo persediaan (stock opname) per 31 Desember 2025 sudah termasuk didalamnya nilai persediaan dari BLUD dan dari APBD sebesar Rp3.115.150.862,47



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.82 Persediaan TA 2025 dan 2024

No	Jenis Persediaan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2025 (Rp)
	Persediaan Bahan Pakai Habis		
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	965.143.889,01	1.402.528.740,61
2	Persediaan Kertas dan Cover	111.660.565,00	94.522.491,00
3	Persediaan Bahan Cetak	293.187.350,00	
4	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	
5	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	117.448.880,00	22.824.856,00
6	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	1.920.000,00
7	Persediaan Bahan Komputer	543.732.760,00	426.513.443,00
8	Persediaan Peralatan Perabot Kantor	471.537.200,00	124.766.252,00
9	Persediaan Perlengkapan Dinas	90.993.674,00	22.610.120,00
10	Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	77.830.000,00	125.000,00
11	Persediaan Isi Tabung Gas	787.238,00	787.238,00
12	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	688.400,00	1.438.600,00
13	Persediaan Bahan Kuasi (Karcis) Lainnya		
	Persediaan Bahan/Material		
1	Persediaan Bahan Baku Bangunan		
2	Persediaan Bibit Tanaman		38.167.300,00
3	Persediaan Bibit Ternak	47.466.300,00	
4	Persediaan Bahan Lainnya	192.488.325,00	285.623.989,00
5	Persediaan Suku Cadang Laboratorium	116.160,00	29.040,00
6	Persediaan Bahan obat-obatan	6.996.317.607,96	5.417.522.381,41
7	Persediaan Bahan Obat Lainnya	357.665.778,00	278.931.384,00
8	Persediaan Bahan Kimia	6.003.168,00	5.161.834,00
9	Persediaan Souvenir Cendramata	1.400.000,00	
10	Persediaan Natura	-	560.000,00
11	Persediaan Bahan Natura dan Pakan Lainnya	21.911.000,00	
	Persediaan Barang Lainnya		
1	Barang diserahkan kepada Pihak ketiga/masyarakat	159.839.800,00	196.566.407,63
2	Barang Yang Diserahkan Kepada Lainnya	-	557.699.117,58
	Jumlah	10.456.638.094,97	8.878.298.194,23

Berdasarkan hasil stock opname yang tercantum dalam tabel, total nilai persediaan pada Tahun 2025 sebesar Rp8.878.298.194,23, sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp10.456.638.094,97.

Dengan demikian, terjadi penurunan nilai persediaan sebesar Rp1.275.521.170,35 pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian persediaan telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Persediaan tersebut terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu Persediaan Bahan Pakai Habis, Persediaan Bahan/Material, dan Persediaan Barang Lainnya. Pada kelompok Persediaan Bahan Pakai Habis, beberapa jenis persediaan yang memiliki nilai cukup besar antara lain persediaan alat tulis kantor, bahan komputer, peralatan perabot kantor, serta kertas dan cover. Beberapa jenis persediaan mengalami penurunan nilai pada Tahun 2025, seperti persediaan bahan komputer, peralatan perabot kantor, dan perlengkapan dinas, yang menunjukkan adanya pemakaian dalam kegiatan operasional perkantoran.

Pada kelompok Persediaan Bahan/Material, nilai persediaan terbesar terdapat pada persediaan bahan obat-obatan, yang pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp5.480.472.299,80, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Selain itu terdapat juga persediaan bahan obat lainnya, bahan kimia, bahan lainnya, serta beberapa jenis persediaan baru seperti bibit tanaman dan persediaan natura pada Tahun 2025.

Sementara itu, pada kelompok Persediaan Barang Lainnya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat serta barang yang diserahkan kepada pihak lainnya, yang juga mengalami perubahan nilai pada Tahun 2025.

Jadi, perubahan nilai persediaan ini mencerminkan dinamika penggunaan dan pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Adapun rincian total persediaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat di **Lampiran 15**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp41.710.868.666,84	Rp43.405.419.545,02

Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai berbentuk investasi permanen yang berupa penyertaan modal. Saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar sebesar Rp41.710.868.666,84 sementara pada tahun 2024 sebesar Rp43.405.419.545,02 hal ini terjadi penurunan sebesar Rp1.694.550.877,75.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai berupa penyertaan modal kepada PT Bank Sumut dan Perumda Air Minum Tirta Kualo. Berikut ini adalah tabel rincian penyertaan modal yang merupakan investasi jangka panjang :

Tabel 5.83
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	31.310.230.000,00	31.310.230.000,00	0,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Kualo	10.400.638.666,84	12.095.189.545,02	1.694.550.877,75
	Jumlah	41.710.868.666,84	43.405.419.545,02	1.694.550.877,75

a. Penyertaan Modal Pada Bank Sumut

Penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai pada PT Bank SUMUT dinilai dengan metode biaya, karena kepemilikan saham Pemko Tanjungbalai pada PT Bank SUMUT tidak mencapai 20% saham.

Nilai penyertaan modal pada PT Bank SUMUT sebesar Rp31.310.230.000,00 merupakan setoran dana Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada PT Bank SUMUT masih sama dengan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 5.84
Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank SUMUT
TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Penyertaan Modal pada PT Bank SUMUT	31.310.230.000,00	31.310.230.000,00
2	Laba ditahan	-	-
	Jumlah	31.310.230.000,00	31.310.230.000,00

b. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Kualo

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai merupakan investasi permanen Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dinilai dengan metode ekuitas karena porsi kepemilikan Pemko Tanjungbalai atas PDAM adalah sebesar 90,33% dari keseluruhan kepemilikan PDAM.

Tabel 5.85
Rincian Perhitungan Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Kualo
per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo Ekuitas TA 2024	Saldo Ekuitas TA 2025
Modal		
Modal Eks Pemerintah Pusat	3.940.034.327,00	3.940.034.327,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Saldo Ekuitas TA 2024	Saldo Ekuitas TA 2025
Modal Pemerintah Kota Tanjungbalai	36.813.918.622,00	36.813.918.622,00
Modal Hibah	2.647.000,00	2.647.000,00
	40.756.599.949,00	40.756.599.949,00
Akumulasi Laba Rugi		
- Laba (Rugi) ditahan	(22.357.260.518,00)	(27.366.597.132,00)
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(5.009.336.614,00)	(1.875.955.804,00)
Jumlah Laba (rugi)	(27.366.597.132,00)	(29.242.552.936,00)
Jumlah Ekuitas	13.390.002.817,00	11.514.047.013,00
	90,33%	90,33%
	12.095.189.545,02	10.400.638.666,84

Nilai saldo penyertaan modal tersebut di atas merupakan nilai awal penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada PDAM Tirta Kualo dan belum memperhitungkan posisi ekuitas PDAM Tirta Kualo per 31 Desember 2025 yang disebabkan kerugian operasional perusahaan. Berdasarkan SAP, dimana penyertaan modal melebihi 20% akan menggunakan metode ekuitas dimana penyertaan modal Kota Tanjungbalai sebesar 90,33% dan langsung mempengaruhi keuntungan maupun kerugian terhadap nilai buku penyertaan modal Kota Tanjungbalai.

Sesuai dengan LK PDAM Tirta Kualo Tahun 2025 (audited), diketahui kerugian kumulatif PDAM adalah sebesar Rp29.242.552.936,00 terdiri atas kerugian ditahan sebesar Rp27.366.597.132,00 dan kerugian tahun berjalan Rp1.875.955.804,00. Dikarenakan PDAM Tirta Kualo mengalami kerugian, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai juga mengurangi nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp1.694.550.878,18 (Rp12.095.189.545,02-Rp10.400.638.666,84)

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp1.118.072.806.888,18 **Rp1.325.444.610.837,14**

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai, aset tetap terdiri atas: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kota Tanjungbalai, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan.

Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Tanjungbalai disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap.

Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.325.444.610.837,14 dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.118.072.806.888,18 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.86
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2025	Reklas ke PI	Tahun 2025 Setelah Reklas
1	Tanah	532,984,158,310.42	22,393,983,360.00	8,051,523,722.00	547,326,617,948.42	9,340,425,000.00	537,986,192,948.42
2	Peralatan dan Mesin	318,517,049,673.36	32,858,313,491.99	29,775,006,236.83	321,600,356,928.52	00.00	321,600,356,928.52
3	Gedung dan Bangunan	519,159,295,303.89	12,313,289,330.09	8,103,636,746.06	523,368,947,887.92	00.00	523,368,947,887.92
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,175,765,373,057.50	41,081,640,552.82	5,270,465,174.55	1,211,576,548,435.77	00.00	1,211,576,548,435.77
5	Aset Tetap Lainnya	62,837,770,426.83	3,012,662,432.00	2,179,268,975.35	63,671,163,883.48	00.00	63,671,163,883.48
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27,510,608,123.69	452,077,628.90	12,714,313,523.69	15,248,372,228.90	00.00	15,248,372,228.90
	JUMLAH	2,636,774,254,895.69	112,111,966,795.80	66,094,214,378.48	2,682,792,007,313.01	9,340,425,000.00	2,673,451,582,313.01
7	Akumulasi Penyusutan	(1,311,329,644,058.55)	(247,479,189,906.38)	3,430,058,540.10	(1,555,378,775,424.83)	00.00	(1,555,378,775,424.83)
	JUMLAH	1,325,444,610,837.14	(135,367,223,110.58)	69,524,272,918.58	1,127,413,231,888.18	9,340,425,000.00	1,118,072,806,888.18

a. Tanah

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp537.986.192.948,42 **Rp 532.984.158.310,42**

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Aset tetap tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp537.986.192.948,42 dan Rp532.984.158.310,42. Ada penambahan



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

sebesar Rp22.393.983.360,00 dan pengurangan sebesar Rp17.391.948.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87
Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025

Saldo Awal 2025	532.984.158.310,42
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo setelah koreksi	532.984.158.310,42
Mutasi tambah :	
Belanja Modal	4.700.000.000,00
Reklas Belanja Modal	
Biaya Perolehan Belanja Modal	
Aset dari Utang Pihak Ketiga	4.454.000.000,00
Biaya perolehan barang dan jasa	
kurang catat	5.592.399.000,00
Hibah (Masuk)	2.947.584.360,00
Mutasi antar OPD	4.700.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	22.393.983.360,00
Mutasi kurang :	
Reklas Belanja Modal	
Mutasi antar OPD	4.700.000.000,00
Reklas ke Properti Investasi Tanah	9.340.425.000,00
Hibah (Kurang)	1.528.929.722,00
Penghapusan	1.822.594.000,00
Rusak Berat	
Aset Tidak Berwujud	
Lebih Catat	
Jumlah Mutasi Kurang	17.391.948.722,00
Saldo akhir 2025	537.986.192.948,42

Rincian aset tanah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**

Dari tabel diatas, perlu dijelaskan tentang aset dari utang pihak ketiga (ganti rugi). Berikut penjelasannya :

Pada tanggal 23 Desember 2025, Kota Tanjungbalai telah melakukan perdamaian dengan Ny. IR dalam hal Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 1356 PK/ PDT/ 2024 jo. Nomor : 2825 K/ Pdt/ 2014 jo. Nomor 148/ Pdt/ 2014/ PT MDN jo. Nomor : 03/ Pdt.G/ 2013/ PN TB terkait



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

tanah yang diperuntukkan sebagai Gedung Olahraga (GOR), Kantor Camat Datuk Bandar dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini berdasarkan Penunjukan Dan Penetapan Tim Penilai Publik (Appraisal) oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 1/ Pen.Ap.Pdt/ 2025/ PN Tjb tanggal 03 Desember 2025 telah dilakukan penilaian oleh tim Appraisal dan berdasarkan penilaian terhadap objek perkara diketahui nilai objek tersebut adalah senilai Rp9.551.300.000,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Untuk menjalankan putusan perkara tersebut, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Ny. IR sepakat menyelesaikan persengketaan dan secara sukarela dengan pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan memperhatikan persetujuan DPRD Kota Tanjungbalai sebesar Rp8.454.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pembayaran ganti rugi dilakukan secara bertahap, dimana pembayaran tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan untuk tahap kedua melalui penganggaran kedalam Perubahan APBD TA 2026 Kota Tanjungbalai dengan nilai Rp4.454.000.000,00 (empat milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah).

b. Peralatan dan Mesin

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp321.600.356.928,52	Rp318.517.049.673,36

Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp321.600.356.928,52 dan Rp318.517.049.673,36 Untuk nilai Aset Peralatan dan Mesin terdapat penambahan sebesar Rp32.858.313.491,99 dan pengurangan sebesar Rp29.775.006.236,83 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.88
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

Saldo awal per 1 Januari 2025	318.517.049.673,36
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo awal setelah koreksi	318.517.049.673,36
Mutasi tambah :	
Belanja Modal	24.122.501.754,00
Reklas antar belanja modal	137.597.600,00
Biaya perolehan belanja modal	6.200.600,00
Pengadaan JKN	602.381.880,00
Aset dari Belanja BOS	2.073.042.076,00
Reklas Belanja BOS	3.800.000,00
Aset dari belanja barang dan jasa	43.110.000,00
kurang catat	25.141.042,00
Hibah (masuk)	862.041.981,00
Mutasi antar OPD	4.982.496.558,99
Jumlah Mutasi Tambah	32.858.313.491,99
Mutasi kurang :	
Reklas kurang Belanja BOS	49.920.000,00
Mutasi antar OPD Berkurang	4.982.496.558,99
Penghapusan	651.663.535,71
Belanja modal yg tidak jadi aset	1.794.024.950,00
Extracomtable	1.876.641.018,50
Penambahan rusak berat	20.420.260.173,63
Jumlah Mutasi Kurang	29.775.006.236,83
Saldo akhir 2025	321.600.356.928,52

Aset peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**

Disamping itu, ada peralatan dan mesin yang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap, yaitu hibah peralatan digitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, pada TA 2025, aset tersebut belum dapat dicatat sebagai Aset Tetap karena nilai barang belum tercantum dalam BAST.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi untuk jumlah sekolah yang menerima hibah peralatan digitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.89
Rekapitulasi Jumlah Sekolah Penerima Hibah Peralatan
Digitalisasi dari Kemendikdasmen
Per 31 Desember 2025

No	Sekolah	BAST Tahun 2025		
		Jumlah Sekolah	Smartboard IFP	Bracket TV
1	SD Negeri	67	67	67
2	SD Swasta	13	14	14
3	SMP Negeri	14	14	14
4	SMP Swasta	8	8	8
Jumlah		102	103	103

Berdasarkan informasi yang diperoleh, nilai tersebut belum dicantumkan karena pihak kementerian belum sepenuhnya menyerahkan barang hibah kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Adapun rincian dari hibah peralatan digitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat dilihat pada **Lampiran 18**

c. Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp523.368.947.887,92	Rp519.159.295.303,89

Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp523.368.947.887,92 dan Rp519.159.295.303,89.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2025 terdapat kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp10.489.715,24 telah dilakukan pemulihan dengan menyetorkan ke kas daerah pada tahun 2026.

Untuk nilai Aset Gedung dan Bangunan terdapat penambahan sebesar Rp12.313.289.330,09 pengurangan sebesar Rp8.103.636.746,06 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.90
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

Saldo awal per 1 Januari 2025	519.159.295.303,89
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo awal setelah koreksi	519.159.295.303,89
Mutasi tambah :	
Belanja modal gedung dan bangunan	6.800.742.988,09
Reklas Belanja Modal bertambah	79.132.600,00
Biaya perolehan belanja modal	396.413.392,00
Aset dari belanja barang dan jasa	62.300.000,00
Hibah (Masuk)	798.484.938,00
Mutasi antar OPD	4.176.215.412,00
Jumlah Mutasi Tambah	12.313.289.330,09
Mutasi kurang :	
Reklas kurang belanja gedung dan bangunan	560.381.413,94
Mutasi antar OPD	4.176.215.412,00
Mutasi Barang antar KIB	345.418.564,52
Belanja modal yang tidak jadi aset	669.711.154,03
Extracomtable	27.438.000,00
Penambahan rusak berat	2.324.472.201,57
Jumlah Mutasi Kurang	8.103.636.746,06
Saldo akhir 2025	523.368.947.887,92

Rincian aset gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada
Lampiran 19

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp1.211.576.548.435,77	Rp1.175.765.373.057,50

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.211.576.548.435,77 dan Rp1.175.765.373.057,50.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2025 terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp328.305.503,37 telah dilakukan pemulihan dengan menyetorkan ke kas daerah pada tahun 2026.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Untuk nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat penambahan sebesar Rp41.081.640.552,82 dan pengurangan sebesar Rp5.270.465.174,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2025

Saldo awal per 1 Januari 2025	1.175.765.373.057,50
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo awal setelah koreksi	1.175.765.373.057,50
Mutasi tambah :	
Belanja modal	20.201.632.374,48
Reklas antar belanja modal	502.881.413,94
Biaya perolehan belanja modal	1.566.597.882,00
Reklas tambah Belanja BOS	25.000.000,00
Aset dari belanja Utang Pihak Ketiga	99.128.442,54
Mutasi antar KIB	12.714.313.523,69
Hibah (masuk)	5.972.086.916,17
Jumlah Mutasi Tambah	41.081.640.552,82
Mutasi kurang :	
Reklas kurang belanja modal	79.132.600,00
Mutasi Antar KIB	106.659.064,38
Belanja modal yang tidak jadi aset	5.489.681.750,17
Penghapusan	137.920.153,00
Penambahan rusak berat	(542.928.393,00)
Jumlah Mutasi Kurang	5.270.465.174,55
Saldo akhir 2025	1.211.576.548.435,77

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025
Rp63.671.163.883,48

31 Desember 2024
Rp62.837.770.426,83

Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp63.671.163.883,48 dan Rp62.837.770.426,83 Untuk nilai Aset Tetap



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Lainnya terdapat penambahan sebesar Rp3.012.662.432,00 dan pengurangan sebesar Rp2.179.268.975,35 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.92
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025

Saldo awal per 1 Januari 2025	62,837,770,426.83
Koreksi saldo awal (tambah)	-
Koreksi saldo awal (kurang)	-
Saldo awal setelah koreksi	62,837,770,426.83
Mutasi tambah :	
Belanja modal	134,377,232.00
Aset dari Belanja BOS	2,828,365,200.00
Reklas Belanja BOS bertambah	49,920,000.00
Jumlah Mutasi Tambah	3,012,662,432.00
Mutasi kurang :	
Reklas Kurang Belanja Modal	80,097,600.00
Reklas kurang Belanja BOS	28,800,000.00
Penghapusan	2,070,371,375.35
Jumlah Mutasi Kurang	2,179,268,975.35
Saldo akhir 2025	63,671,163,883.48

Rincian aset tetap tetap lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp15.248.372.228,90 **Rp27.510.608.123,69**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang masih dalam tahap pembangunan atau pengerjaan, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan tersebut, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead.

Nilai Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp15.248.372.228,90 dan Rp27.510.608.123,69 Untuk nilai Aset KDP terdapat penambahan sebesar Rp452.875.389,38 dan pengurangan sebesar Rp12.714.313.523,38 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.93
Perhitungan Mutasi KDP Per 31 Desember 2025

Saldo awal per 1 Januari 2025	27.510.608.123,69
Mutasi tambah :	



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Reklas antar belanja modal	452.077.628,90
Biaya umum	
Jumlah Mutasi Tambah	452.077.628,90
Mutasi kurang :	
Reklas antar KIB	12.714.313.523,69
Jumlah Mutasi Tambah	12.714.313.523,69
Saldo akhir 2025	15.248.372.228,90

Tabel 5.94
Rincian KDP Pemerintah Kota Tanjungbalai
Per 31 Desember 2025

Uraian	Tanggal Dokumen	Nilai
Bangunan Rumah Sakit Umum Type C	29/12/2003	293.686.050,00
Bangunan Rumah Sakit Umum Type C	29/12/2003	4.826.894.000,00
Bangunan Rumah Sakit Umum/ Type C	29/12/2003	7.239.658.500,00
Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Type C Kota Tanjungbalai	-	2.436.056.050,00
Reklas antar belanja modal	-	452.077.628,90
Jumlah		15.248.372.228,90

Penjelasan :

1. Reklas antar belanja modal Rp452.077.628,90 terdiri dari 2 program dan kegiatan yang berbeda di TA 2025, dimana rinciannya sebagai berikut :

Program : Penataaan Bangunan Gedung

Kegiatan : Pembangunan Balairung Pedagang
 dilokasi Eks Damkar Kota Tanjungbalai

Nominal : 346.216.325,00

Kontrak : 050/1689/SPK/PBG-
 PUTR/P.APBD/2025

Tgl. Kontrak : 14 November 2025

Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan : Rehabilitasi Saluran Drainase di Jalan
 Mekar I Perumnas Kelurahan Sijambi
 Kecamatan Datuk Bandar Kota
 Tanjungbalai

Nominal : 106.659.064,38

Kontrak : 050/1764/SPK/PPSD-
 PUTR/P.APBD/2025



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tgl. Kontrak : 26 November 2025

Rincian Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 22**

g. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(Rp1.555.378.775.424,83) **(Rp1.311.329.644.058,55)**

Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.555.378.775.424,83 mengalami peningkatan sebesar Rp244.049.131.366,28 dibandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp1.311.329.644.058,55 yang terdapat Koreksi saldo awal sebesar Rp158.890.380.420,42

Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (Straight Line Method). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pembulatan tahun keatas. Penetapan nilai penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 dimana perhitungan penyusutan untuk pertama kali pada saat neraca awal yaitu Tahun 2005.

Tabel 5.95
Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Saldo 2024	Koreksi	Saldo Setelah Koreksi	Kenaikan / (Penurunan)	Saldo 2025
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(262,575,258,621.87)	2,650,451,869.01	(259,924,806,752.86)	779,606,671.09	(259,145,200,081.77)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(198,989,332,228.92)	(90,393,219,099.34)	(289,382,551,328.26)	(21,065,081,850.87)	(310,447,633,179.13)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan dan Jaringan	(849,765,053,207.70)	(71,147,613,190.09)	(920,912,666,397.85)	(64,873,275,766.08)	(985,785,942,163.93)
	JUMLAH	(1,311,329,644,058.55)	(158,890,380,420.42)	(1,470,220,024,478.97)	(85,158,750,945.86)	(1,555,378,775,424.83)

Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 23**

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp36.495.537.656,53 **Rp38.568.013.664,71**

Aset lainnya adalah aset non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.495.537.656,53. Berikut ini adalah rincian aset lainnya:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.96
Saldo Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	28.055.480.469,95	28.207.625.860,25	(152.145.390,30)
2	Aset Tidak Berwujud	2.621.503.482,00	5.028.565.443,00	(2.407.061.961,00)
3	Aset Lain-lain	144.654.693.892,08	130.163.641.707,57	14.491.052.184,51
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.284.089.349,63)	(4.445.276.342,00)	2.161.186.992,37
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(136.552.050.837,87)	(120.744.673.004,11)	(15.807.377.833,76)
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	358.130.000,00	(358.130.000,00)
	Jumlah	36.495.537.656,53	38.568.013.664,71	(2.072.476.008,18)

a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp28.055.480.469,95 **Rp28.207.625.860,25**

Salah satu tagihan jangka panjang ini adalah tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat Lain. Per 31 Desember 2024 Laporan Keuangan Audited Pemerintah Kota Tanjungbalai mencatatkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp28.207.625.860,25

Dari resume hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah s.d Semester II Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan hasil pemantauan menunjukkan bahwa kerugian daerah sebesar Rp50.845.395.404,30, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp49.695.051.662,92 sehingga terdapat penambahan kerugian daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1.150.343.741,38. Dikarenakan pada saat koreksi adanya temuan BPK tahun 2024 sebesar Rp124.535.236,97, maka dilakukan pencatatan penambahan kerugian daerah sebesar Rp1.025.808.504,41 (Rp1.150.343.741,38 – Rp124.535.236,97).

Dari jumlah kerugian daerah tersebut, telah dipulihkan (dilakukan pelunasan) sebesar Rp1.177.953.894,71, sehingga sisa kerugian daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.055.480.469,95

b. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp2.621.503.482,00 **Rp5.028.565.443,00**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Saldo ATB per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.621.503.482,00 mengalami penurunan tahun sebelumnya per 31 Desember 2024 Rp5.028.565.443,00 .

Tabel 5.97
Aset Tidak BerwujudTA 2025 dan 2024

Saldo akhir per 31 Desember 2024	5.028.565.443,00
Mutasi tambah :	
Aset Tidak Berwujud	84.751.998,00
Jumlah	84.751.998,00
Mutasi kurang :	
Aset Tidak Berwujud (penghapusan)	2.491.813.959,00
Jumlah	2.491.813.959,00
Saldo akhir 2025	2.621.503.482,00

Daftar rincian aset tidak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 24**

c. Aset Lain Lain

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp144.654.693.892,08 **Rp130.163.641.707,57**

Aset lain lain adalah Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional sehari hari oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai baik itu aset yang tidak bermanfaat, aset dalam penelusuran maupun aset dimanfaatkan oleh pihak lain. Saldo aset Lain Lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp144.654.693.892,08 Berikut ini adalah rincian aset lain lain:

Tabel 5.98
Saldo Aset Lain Lain TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Peningkatan/ Penurunan
1	Aset Lain-Lain Rusak Berat Peralatan dan Mesin	122.256.954.660,36	108.113.403.426,42	14.143.551.233,94
2	Aset Lain-Lain Rusak Berat Gedung dan Bangunan	11.979.579.930,37	9.761.415.062,13	2.218.164.868,24



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Peningkatan/ Penurunan
3	Aset Lain-Lain Rusak Berat Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.615.596.599,00	7.158.524.992,00	(542.928.393,00)
4	Aset Lain-Lain Rusak Berat Aset Tetap Lainnya	3.802.562.702,35	5.042.317.712,02	(1.239.755.009,67)
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	87.980.515,00	0,00
	Jumlah	144.654.693.892,08	130.163.641.707,57	14.239.583.316,36

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp87.980.515,57 merupakan nilai atas paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Pasar Traktir Kec. Datuk Bandar yang putus kontrak berdasarkan dokumen pemutusan kontrak Nomor 050/6336/PUTR/2024 tanggal 30 Desember 2024. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 25**

d. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Desember 2025
Rp0,00

31 Desember 2024
Rp358.130.000,00

Pada tahun 2025 TDF (Treasury Deposit Facility) Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp0,00

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2025
(2.284.089.349,63)

31 Desember 2024
(Rp4.445.276.342,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah proses pengakuan biaya amortisasi aset tidak berwujud secara sistematis dan konsisten selama umur ekonomis aset tersebut.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud TA 2025 sebesar (2.284.089.349,63) dan akumulasi ini masih pertama dibuat di tahun 2025 dengan rekapitulasi per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.99
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Nilai 2024	Berkurang	Berkurang	Nilai 2025
1	Dinas Pendidikan	(1.335.471.789,00)	(1.335.471.789,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	(365.067.500,00)	0,00	(48.007.500,00)	(413.075.000,00)
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	(230.000.000,00)	0,00	(115.000.000,00)	(345.000.000,00)
4	Dinas Sosial	(76.250.000,00)	(76.250.000,00)	(13.528.666,13)	(13.528.666,13)
5	Dinas Ketenagakerjaan	(9.000.000,00)	0,00	(5.950.000,00)	(14.950.000,00)
6	Dinas Kependudukan	(497.436.640,00)	(448.936.640,00)	0,00	(48.500.000,00)



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	OPD	Nilai 2024	Berkurang	Berkurang	Nilai 2025
	dan Pencatatan Sipil				
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	(26.461.442,00)	(3.784.121,00)	0,00	(22.677.321,00)
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(14.874.000,00)	0,00	(7.437.000,00)	(22.311.000,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(63.958.812,00)	(63.958.812,00)	0,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(201.707.601,00)	0,00	(100.853.800,50)	(302.561.401,50)
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(1.258.276.411,00)	(311.693.450,00)	0,00	(946.582.961,00)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(226.869.147,00)	(226.869.147,00)	0,00	0,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(30.000.000,00)	0,00	(15.000.000,00)	(45.000.000,00)
14	Sekretariat Daerah	(80.250.000,00)	0,00	0,00	(80.250.000,00)
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	(29.653.000,00)	0,00	0,00	(29.653.000,00)
	Jumlah	(4.445.276.342,00)	(2.466.963.959,00)	(305.776.966,63)	(2.284.089.349,63)

Daftar rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdapat pada **Lampiran 26**

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(Rp136.552.050.837,87) **(Rp120.744.673.004,11)**

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya. Maka, akumulasi penyusutan aset yang telah direklas tersebut sebagai pengurang nilai perolehan sehingga nilai aset yang ditampilkan sebesar nilai buku. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 sebesar Rp136.552.050.837,87 dan Rp120.744.673.004,11 dengan perhitungan bidang barang per 31 Desember 2024

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 27**

5.3.1.5 Properti Investasi

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp9.340.425.000,00 **Rp0,00**

Properti investasi adalah aset berupa tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan sewa, peningkatan nilai (capital gain), atau keduanya. Investasi ini bertujuan jangka panjang, tidak digunakan sendiri untuk



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

produksi/jasa, dan bukan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Contohnya meliputi apartemen sewa, rumah toko (ruko), dan tanah kosong.

Tabel 5.100 Properti Investasi

No	Properti Investasi	Nilai Perolehan TA.2025	Nilai Perolehan TA.2024
1	Properti Investasi Tanah	9.340.425.000,00	0,00
	Jumlah	9.340.425.000,00	0,00

Properti Investasi Tanah

31 Desember 2025
Rp9.340.425.000,00

31 Desember 2024
Rp0,00

Properti investasi tanah adalah aset berupa lahan kosong atau tanah yang dibeli dan dikuasai untuk jangka panjang, dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai atau disewakan, bukan untuk digunakan dalam operasional sehari-hari.

Investasi ini populer karena perawatannya mudah dan nilainya cenderung naik seiring keterbatasan lahan.

Tabel 5.101 Properti Investasi Tanah

No	Uraian	Alamat	Penggunaan	(Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	Komplek DPRD 1 s.d 25	8.372.700.000,00
2	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Jl. Pematang Pasir belakang SMP Negeri 3 Kec. Teluk Nibung	Tanah Pertapakan Lapangan Sepak Bola	967.725.000,00
	Jumlah			9.340.425.000,00

Daftar rincian Properti investasi Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 28**

5.3.2 Kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja, utang kelebihan penerimaan retribusi, utang transfer, dan utang jangka pendek lainnya.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2025
Rp40.082.979.504,23

31 Desember 2024
Rp52.364.843.878,61

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Tanjungbalai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.082.979.504,23 dan Rp52.364.843.878,61



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.102
Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.629.024.281,12	1.369.746.521,12	259.277.760,00
2	Utang Belanja	38.453.955.223,11	50.995.097.357,49	(12.541.142.134,38)
	Jumlah	40.082.979.504,23	52.364.843.878,61	(12.281.864.374,38)

a. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp1.369.024.281,12 **Rp1.369.746.521,12**

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.369.024.281,12 yang nilai tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka dari kelebihan penerimaan retribusi Jamkesmas tahun anggaran 2010 yang belum ditindaklanjuti untuk penyelesaiannya.

b. Utang Belanja

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp38.453.955.223,11 **Rp50.995.097.357,49**

Saldo utang belanja Pemerintah Kota Tanjung Balai per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.453.955.223,11 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 29**

Tabel 5.103 Utang Belanja TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan / (Penurunan)
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	5.021.727.480,00	(5.021.727.480,00)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	21.362.049.947,94	16.856.830.660,46	4.505.219.287,48
3	Utang Belanja Modal Tanah	4.482.390.639,52	45.762.843,61	4.436.627.795,91
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.940.733.010,00	3.622.544.559,85	(1.681.811.549,85)
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.300.087.475,12	1.585.122.976,12	(285.035.501,00)
6	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.368.694.150,53	23.863.108.837,45	(14.494.414.686,92)
	Jumlah	38.453.955.223,11	50.995.097.357,49	(12.541.142.134,38)

Penjelasan utang belanja sebagai berikut :

Saldo TA 2024 adalah saldo utang belanja pada awal tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp50.995.097.357,49. Nilai ini merupakan posisi utang yang dibawa dari tahun sebelumnya (2024) sebelum dilakukan penyesuaian.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Terdapat dua jenis koreksi yang mempengaruhi saldo awal yaitu koreksi kurang catat sebesar Rp29.413.275.051,72 Artinya, terdapat utang yang sebelumnya belum tercatat sehingga perlu ditambahkan ke saldo. Kemudian koreksi lebih catat sebesar Rp16.049.286.110,59 sehingga saldo utang TA 2025 sebesar Rp Rp38.453.955.223,11

5.3.3 Ekuitas

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp1.215.484.228.704,23	Rp1.402.411.873.208,44

Pada tahun 2025 ekuitas pada neraca sebesar Rp1.215.484.228.704,23 Sedangkan pada tahun 2024 ekuitas pada neraca sebesar Rp1.402.411.873.208,44 yang merupakan berasal dari perhitungan ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dari laporan perubahan ekuitas.

5.4 Penjelasan Laporan Operasional

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kota Tanjungbalai.

5.4.1 Pendapatan – LO

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp671.971.589.880,28	Rp638.300.742.686,30

Pendapatan – LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp671.971.589.880,28 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan surplus non operasional. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Pendapatan – LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	111.602.867.412,11	57.505.244.354,29	54.097.623.057,81
2	Pendapatan Transfer-LO	541.959.161.197,00	572.699.399.932,00	(30.740.238.735,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	18.409.561.271,17	8.096.098.400,00	10.313.462.871,17
	Jumlah	671.971.589.880,28	638.300.742.686,29	33.670.847.193,98

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp111.602.867.412,11	Rp57.505.244.354,30



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO Tahun 2025 sebesar Rp111.602.867.412,11 terdiri atas 4 (empat) jenis PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105
Rincian PAD– LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah-LO	37.736.409.335,60	25.456.050.040,40	12.280.359.295,20
2	Retribusi Daerah-LO	4.716.717.802,00	3.968.826.999,00	747.890.803,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.775.808.733,00	7.419.378.335,10	356.430.397,90
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	61.373.931.541,51	20.660.988.979,80	40.712.942.561,72
	Jumlah	111.602.867.412,11	57.505.244.354,30	54.097.623.057,82

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA, Jumlah pendapatan asli daerah-LO lebih tinggi sebesar Rp9.120.446.677,54 sebagaimana terlihat sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian selisih PAD– LO dengan LRA per 31 Desember 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 LRA (Rp)	Mutasi		Realisasi 2025 LO (Rp)	Selisih
			Tambah	Kurang		
1	Pendapatan Pajak Daerah	34.904.580.493,60	4.356.971.199,00	1.525.142.357,00	37.736.409.335,60	(2.831.828.842,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.402.402.302,00	352.437.500,00	38.122.000,00	4.716.717.802,00	(314.315.500,00)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.775.808.733,00	0,00	0,00	7.775.808.733,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.399.976.955,97	8.487.696.604,73	2.513.742.019,19	61.373.931.541,51	(5.973.954.585,54)
	Jumlah	102.482.768.484,57	13.197.105.303,73	4.077.006.376,19	111.602.867.412,11	(9.120.098.927,54)

Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, terdapat perbedaan antara realisasi berbasis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) yang dipengaruhi oleh adanya mutasi penambahan dan pengurangan pada masing-masing jenis pendapatan.

a. Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp37.736.409.335,60 **Rp25.456.050.040,40**

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp34.904.232.743,60 pada LRA. Setelah memperhitungkan mutasi penambahan sebesar Rp4.356.971.199,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.524.794.607,00, maka realisasi pada LO menjadi sebesar



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Rp37.736.409.335,60. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp2.832.176.592,00 antara realisasi LRA dan LO.

Adapun selisih mutasi tambah dan kurang terhadap pajak daerah disebabkan:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA 34.904.232.743,60

Tambah :

- penambahan piutang pajak hotel	49.046.000,00
- penambahan piutang pajak restoran dan sejenisnya	155.885.825,00
- penambahan piutang pajak parkir	25.613.182,00
- penambahan piutang PBBP2	3.849.064.192,00
- penambahan piutang pajak air tanah	17.459.000,00
- piutang pajak hiburan PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	259.403.000,00
- piutang pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000,00

Jumlah Tambah 4.356.971.199,00

Kurang :

- pembayaran piutang pajak hotel	60.060.000,00
- pembayaran piutang pajak restoran dan sejenisnya	22.703.142,00
- pembayaran piutang PBBP2	1.174.608.705,00
- Pembayaran piutang pajak air tanah	5.066.000,00
- Piutang Pajak Air Bawah Tanah Lebih catat (PT. Halindo Berjaya Mandiri)	3.079.000,00
- Kurang catat pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame	259.277.760,00

Jumlah Kurang : 1.524.794.607,00

Pajak Daerah-LO 37.736.409.335,60

b. Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2025
Rp4.716.717.802,00

31 Desember 2024
Rp3.968.826.999,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA tercatat sebesar Rp4.402.402.302,00. Setelah adanya mutasi penambahan sebesar



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Rp352.437.500,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp38.122.000,00, realisasi pendapatan pada LO menjadi Rp4.716.717.802,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp314.315.500,00.

Adapun selisih mutasi tambah dan kurang terhadap pendapatan retribusi daerah disebabkan:

Retribusi Daerah – LRA **4.402.402.302,00**

Tambah :

- Piutang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	9.710.000,00
- Piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada Dinas perukim	234.255.000,00
- Koreksi kurang catat piutang PDAM (Non PDAM)	5.930.000,00
- Koreksi Penambahan Piutang Kios	102.542.500,00
Jumlah Tambah	352.437.500,00

Kurang :

- Pembayaran piutang retribusi penyewaan tanah dan bangunan	37.389.000,00
- Koreksi pelunasan piutang Retribusi sampah	733.000,00
Jumlah Kurang :	38.122.000,00
Retribusi Daerah-LO	4.716.717.802,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp7.775.808.733,00	Rp7.419.378.335,10

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi pendapatan pada LRA dan LO sama-sama sebesar Rp7.775.808.733,00 karena tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan, sehingga tidak terdapat selisih.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp61.373.931.541,51	Rp20.660.988.979,80

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp55.399.976.955,97 pada LRA. Setelah memperhitungkan mutasi penambahan sebesar Rp8.487.696.604,73 dan mutasi



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

pengurangan sebesar Rp2.513.742.019,19, maka realisasi pada LO menjadi sebesar Rp61.373.931.541,51. Selisih yang timbul antara LRA dan LO adalah sebesar Rp5.973.954.585,54.

Adapun selisih mutasi tambah dan kurang terhadap Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disebabkan:

Lain-lain PAD yang Sah - LRA **55.399.976.955,97**

Tambah :

- penambahan TGR tahun 2025	1.025.808.504,41
penambahan piutang dengan PBB tahun	
- 2025	1.659.330.332,84
Koreksi piutang RSUD yang belum	
- dicatatkan	4.680.444.935,00
- Reklas Pendapatan TGR dengan	1.121.563.222,48
Pendapatan Pengembalian	
- Reklas Pendapatan denda PBB ke PBBP2	347.750,00

Jumlah Tambah **8.487.494.744,73**

Kurang :

pembayaran piutang dana bergulir tahun	
- 2025	120.979.217,00
- pembayaran TGR tahun 2025	1.177.953.894,71
- pembayaran Piutang Pendapatan Denda	93.043.825,00
(PBBP2) tahun 2025	
- Reklas Pendapatan TGR dengan	1.121.563.222,48
Pendapatan Pengembalian – LRA	

Jumlah Kurang : **2.513.540.159,19**

Lain-lain PAD yang Sah-LO **61.373.931.541,51**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp541.959.161.197,00	Rp572.699.399.932,00

Pendapatan transfer – LO merupakan penerimaan uang dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya berupa dana perimbangan seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, dan lain-lain. Pendapatan transfer Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sebesar Rp541.959.161.197,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.107
Rincian Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	511.776.727.122,00	532.701.402.928,00	(20.924.675.806,00)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	30.182.434.075,00	39.997.997.004,00	(9.815.562.929,00)
	Jumlah	541.959.161.197,00	572.699.399.932,00	(30.740.238.735,00)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA, Jumlah Pendapatan Transfer-LO lebih rendah sebesar Rp10.179.477.122,00 sebagaimana terlihat sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian selisih Pendapatan Transfer-LO dengan LRA per 31 Desember 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 LRA (Rp)	Mutasi		Realisasi 2025 LO (Rp)	Selisih
			Tambah	Kurang		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	512.134.857.122,00	0	358.130.000,00	511.776.727.122,00	358.130.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	40.003.781.197,00	23.253.062.480,00	33.074.409.602,00	30.182.434.075,00	9.821.347.122,00
	Jumlah	552.138.638.319,00	23.253.062.480,00	33.432.539.602,00	541.959.161.197,00	10.179.477.122,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp511.776.727.122,00 **Rp532.701.402.928,00**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk periode tahun 2025 secara total terealisasi sebesar Rp511.776.727.122,00 dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp532.701.402.928,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LRA terealisasi sebesar Rp512.134.857.122,00. Pada LO, pendapatan tersebut diakui sebesar Rp511.776.727.122,00 atau lebih kecil sebesar Rp358.130.000,00. Selisih tersebut disebabkan adanya mutasi pengurangan sebesar Rp358.130.000,00 tanpa adanya mutasi penambahan.

Adapun selisih mutasi tambah dan kurang terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disebabkan:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA 512.134.857.122,00
Kurang :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Penerimaan dana TDF Dalam Rangka	358.130.000,00
Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tunj. Hari	
Raya TA 2025	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	511.776.727.122,00

b. Pendapatan Tranfer Antar Daerah – LO

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp30.182.434.075,00	Rp39.997.997.004,00

Pendapatan transfer antar daerah – LO merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan bagi hasil pajak-LO yang di tahun 2025 sebesar Rp30.182.434.075,00 dan ditahun 2024 sebesar Rp39.997.997.004,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada LRA terealisasi sebesar Rp40.003.781.197,00, sedangkan pada LO diakui sebesar Rp30.182.434.075,00 atau lebih kecil sebesar Rp9.821.347.122,00.

Selisih tersebut berasal dari mutasi penambahan sebesar Rp23.253.062.480,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp33.074.409.602,00.

Adapun selisih mutasi tambah dan kurang terhadap Pendapatan Transfer Antar Daerah disebabkan:

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	40.003.781.197,00

Tambah :

- penambahan piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025	6.830.814.856,00
- penambahan piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2025	226.296.531,00
- penambahan piutang Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2025	4.522.275.253,00
- Koreksi kurang catat Piutang SK GUBSU 188.44/231/KPTS/2026 - PKB	22.088.510,00
- Koreksi kurang catat Piutang SK GUBSU 188.44/231/KPTS/2026 - BBNKB	23.485.888,00
- Koreksi kurang catat Piutang SK GUBSU 188.44/231/KPTS/2026 - PBBKB	10.844.216.976,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

- Koreksi kurang catat Piutang SK GUBSU 783.884.466,00
 188.44/231/KPTS/2026 - Pajak Air
 Permukaan

Jumlah Tambah 23.253.062.480,00

Kurang :

- pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak 5.304.462.220,00
 Kendaraan Bermotor tahun 2025
- pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik 3.821.415.204,00
 Nama Kendaraan Bermotor tahun 2025
- pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak 19.107.236.900,00
 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun
 2025
- pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Air 319.020.025,00
 Permukaan tahun 2025
- Koreksi lebih catat Piutang SK GUBSU 4.522.275.253,00
 188.44/231/KPTS/2026 - Pajak rokok

Jumlah Kurang : 33.074.409.602,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 30.182.434.075,00

5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp18.409.561.271,17 Rp8.096.098.400,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO merupakan pendapatan daerah dari sumber lain misalnya pendapatan hibah, sumbangan pihak ketiga kepada daerah, dan pendapatan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO yang diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.409.561.271,17

Tabel 5.109
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah-LO	9.929.127.195,17	0,00	9.929.127.195,17
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO	8.480.434.076,00	8.096.098.400,00	384.335.676,00
	Jumlah	18.409.561.271,17	8.096.098.400,00	10.313.462.871,17

a. Pendapatan Hibah

31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp9.929.127.195,17 Rp0,00



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Pendapatan Hibah dari pemerintah tahun 2025 sebesar Rp9.929.127.195,17 terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO dan sumbangan pihak ketiga/sejenis-LO dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.110
Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	9.388.388.195,17	0,00	9.388.388.195,17
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	540.739.000,00	0,00	540.739.000,00
	Jumlah	9.929.127.195,17	0,00	9.929.127.195,17

Berdasarkan rincian tabel di atas, untuk uraian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.388.388.195,17 dengan rincian sebagai berikut :

Tambah :

- Hibah masuk Alat pelindung di Satpol PP 277.074.783,00
- Hibah Masuk (KIB D) pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025 20.322.285.481,00
- Hibah Masuk (KIB D) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025 1.348.182.382,17
- Hibah Masuk (KIB A) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 1.966.658.500,00
- Hibah Masuk Tanah untuk Bangunan Jaringan (KIB A) pada Dinas Perumahan dan Permukiman 197.594.260,00
- Hibah Masuk KIB B Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Dinas Pendidikan 32.208.198,00
- Hibah (Masuk) KIB C pada Dinas Pendidikan 810.504.938,00
- Hibah Masuk Kib D pada Dinas Pendidikan 1.536.818.035,00
- Koreksi Kurang Catat Hibah dari BPPOM pada Pengelola BMD 381.027.000,00

Jumlah Tambah : **26.872.353.577,17**

Kurang :

- Koreksi nilai aset berdasarkan BAST PSU Perumahan Green Ratu dan Cemerlang Asri 2 17.235.198.982,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

- Koreksi Lebih catat Hibah dari BNN pada 248.766.400,00
Pengelola BMD

Jumlah Kurang : 17.483.965.382,00

Total Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 9.388.388.195,17

Sedangkan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp540.739.000,00 merupakan bantuan hibah CSR (Corporate Social Responsibility) dari PT. Inalum yang diberikan ke Dinas Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp170.000.000,00 berupa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (pengangkut sampah), Bak Amrol dan Racun bakteri pengurai sampah, Ke BLUD RSUD Dr. Tengku Mansyur sebesar Rp80.741.000,00 berupa alat kedokteran umum dan alat laboratorium umum serta bantuan hibah dari PT. Bank Sumut yang diberikan ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp290.598.000,00 berupa Kendaraan bermotor roda 3 (penyedot tinja), bak amrol, mesin pencacah kompos, dan mesin penyaring kompos.

b. Lain – Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan – LO

31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp8.480.434.076,00 Rp8.096.098.400,00

Pendapatan dari lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan – LO merupakan pendapatan hibah dana BOS dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO yang pada tahun 2025 realisasi pendapatan sebesar sebesar Rp8.480.434.076,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp384.335.676,00 atau 4,75% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.096.098.400,00

5.4.2 Beban

31 Desember 2025 31 Desember 2024
Rp680.279.944.694,98 Rp642.902.982.963,52

Jumlah beban pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp680.279.944.694,98** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Beban-LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	569.960.415.851,18	594.454.997.729,76	(24.494.581.878,58)
2	Beban penyusutan dan Amortisasi	110.311.911.383,80	47.795.466.233,76	62.516.445.150,04



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Beban Tidak Terduga	7.617.460,00	652.519.000,00	(644.901.540,00)
	Jumlah	680.279.944.694,98	642.902.982.963,52	37.376.961.731,46

5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp569.960.415.851,18 **Rp594.454.997.729,76**

Jumlah beban operasi pada tahun 2025 sebesar Rp569.960.415.851,18 dan tahun 2024 sebesar Rp594.454.997.729,76.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.112
Rincian Beban Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai	303.721.220.475,53	301.515.718.144,96	2.205.502.330,57
2	Beban Barang dan Jasa	243.277.583.691,54	251.173.272.223,36	(7.895.688.531,82)
3	Beban Hibah	13.032.646.312,00	32.850.295.398,00	(19.817.649.086,00)
4	Beban Bantuan Sosial	3.631.400.000,00	2.939.350.000,00	692.050.000,00
5	Beban Penyisihan Piutang	6.297.565.372,11	5.976.361.963,44	321.203.408,67
	Jumlah	569.960.415.851,18	594.454.997.729,76	(24.494.581.878,58)

a. Beban Pegawai

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp303.721.220.475,53 **Rp301.515.718.144,96**

Beban pegawai tahun 2025 adalah sebesar Rp303.721.220.475,53 dan tahun 2024 sebesar Rp301.515.718.144,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113
Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	182.728.538.154,00	176.171.185.584,00	6.557.352.570,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	110.929.211.677,53	86.664.416.391,96	24.264.795.285,57
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	28.844.962.282,00	(28.844.962.282,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.053.036.912,00	9.155.203.041,00	(102.166.129,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	315.575.381,00	121.740.846,00	193.834.535,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	384.958.351,00	263.160.000,00	121.798.351,00
7	Beban Pegawai BLUD	309.900.000,00	295.050.000,00	14.850.000,00
	Jumlah	303.721.220.475,53	301.515.718.144,96	2.205.502.330,57

Berdasarkan data Beban Pegawai Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar Rp11.205.532.930,57, dari Rp301.515.718.144,96 pada tahun 2024 menjadi Rp312.721.251.075,53 pada



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada beberapa komponen beban pegawai.

Beban Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp182.728.538.154,00, meningkat sebesar Rp6.557.352.570,00 dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp176.171.185.584,00. Selain itu, Beban Tambahan Penghasilan ASN juga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp24.264.795.285,57, dari Rp86.664.416.391,96 pada tahun 2024 menjadi Rp110.929.211.677,53 pada tahun 2025.

Pada beban tambahan penghasilan ASN terdapat selisih dengan belanja tambahan penghasilan ASN, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN 115.916.674.333,53

Kurang :

Pembayaran Utang Belanja Tambahan 4.987.462.656,00

Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

Beban Tambahan Penghasilan ASN 110.929.211.677,53

Di sisi lain, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengalami penurunan sebesar Rp19.844.931.682,00, dari Rp28.844.962.282,00 pada tahun 2024 menjadi Rp9.000.030.600,00 pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi pada Beban Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp102.166.129,00, dari Rp9.155.203.041,00 menjadi Rp9.053.036.912,00.

Sementara itu, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami peningkatan sebesar Rp193.834.535,00, dari Rp121.740.846,00 pada tahun 2024 menjadi Rp315.575.381,00 pada tahun 2025. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH juga meningkat sebesar Rp121.798.351,00, dari Rp263.160.000,00 menjadi Rp384.958.351,00.

Selanjutnya, Beban Pegawai BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp14.850.000,00, dari Rp295.050.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp309.900.000,00 pada tahun 2025.

b. Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2025
Rp243.277.583.691,54

31 Desember 2024
Rp251.173.272.223,36



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Beban barang dan jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp243.277.583.691,54 dan tahun 2024 sebesar Rp251.173.272.223,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114
Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang	39.863.242.161,32	44.077.984.653,83	(4.214.742.492,51)
2	Beban Jasa	104.675.709.053,00	93.717.388.217,40	10.958.320.835,60
3	Beban Pemeliharaan	20.463.223.118,41	11.279.503.210,02	9.183.719.908,39
4	Beban Perjalanan Dinas	28.587.458.690,00	44.404.668.082,00	(15.817.209.392,00)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.037.299.000,00	2.756.214.000,00	(718.915.000,00)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	13.233.596.092,36	(13.233.596.092,36)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	13.158.292.666,39	333.606.000,00	12.824.686.666,39
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	34.492.359.002,42	41.370.311.967,75	(6.877.952.965,33)
	Jumlah	243.277.583.691,54	251.173.272.223,36	(7.895.688.531,82)

1) Beban Barang

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp39.863.242.161,32 **Rp44.077.984.653,83**

Beban Barang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp39.863.242.161,32 atau menurun sebesar Rp4.214.742.492,51 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp44.077.984.653,83. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya belanja barang habis pakai dan pengadaan barang operasional pada perangkat daerah.

Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terealisasi sebesar Rp39.842.965.653,33, sedangkan Beban Barang berdasarkan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp39.863.242.161,32, sehingga terdapat selisih sebesar Rp20.276.507,99.

Selisih antara Belanja Barang pada LRA dan Beban Barang pada LO disebabkan oleh adanya penyesuaian akrual berupa transaksi yang menambah maupun mengurangi beban pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian tersebut terdiri dari mutasi debit sebesar Rp21.045.282.202,46 dan mutasi kredit sebesar Rp21.025.005.694,47.

Untuk rincian mutasi tambah dan kurang beban barang dapat dilihat pada **Lampiran 30**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

2) Beban Jasa

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp104.675.709.053,00	Rp93.717.388.217,40

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp104.675.709.053,00, meningkat sebesar Rp10.958.320.835,60 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp93.717.388.217,40. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya kebutuhan jasa kantor, jasa konsultasi, serta jasa pendukung operasional lainnya. Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terealisasi sebesar Rp108.738.377.900,00, sedangkan Beban Jasa berdasarkan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp104.675.709.053,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.062.668.847,00.

Selisih antara Belanja Jasa pada LRA dan Beban Jasa pada LO disebabkan oleh adanya penyesuaian akrual berupa transaksi yang menambah maupun mengurangi beban pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian tersebut terdiri dari mutasi debit sebesar Rp1.719.644.050,00 dan mutasi kredit sebesar Rp5.782.312.897,00.

Untuk rincian mutasi tambah dan kurang beban jasa dapat dilihat pada **Lampiran 31**

3) Beban Pemeliharaan

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp20.463.223.118,41	Rp11.279.503.210,02

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 sebesar Rp20.463.223.118,41 atau meningkat sebesar Rp9.183.719.908,39 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp11.279.503.210,02. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan aset tetap lainnya guna menjaga kondisi dan fungsi aset daerah.

Terdapat perbedaan antara belanja pemeliharaan-LRA dan beban pemeliharaan-LO yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Pemeliharaan - LRA	19.843.280.921,44

Tambah

- Belanja Modal yang tidak jadi aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.000.000,00



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

- Utang belanja pemeliharaan gedung dan kantor yang belum dibayarkan tahun 2025 pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	199.500.000,00
- Belanja modal tanah yang tidak jadi aset pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	700.000.000,00
Jumlah Tambah	921.500.000,00

Kurang

- Pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun 2024 Pakaian Dinas Beserta Atributnya Pada Badan Kesbangpol	29.970.000,00
- Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Lantai Bawah dan Lantai Atas pada Dinas Perpustakaan dan Arsip	40.000.000,00
- Pembayaran utang pemeliharaan jaringan listrik pada Dinas Pangan dan Pertanian	20.000.000,00
- Biaya Perolehan Belanja Modal Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.720.600,00
- Aset dari belanja barang dan jasa Gedung Bangunan KIB B pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan	62.300.000,00
- Pembayaran utang belanja modal tanah untuk taman pada Dinas Pendidikan	17.372.203,03
- Pembayaran utang bangunan gedung kantor pada Dinas Pendidikan	69.300.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.895.000,00
- Koreksi Pelunasan yang belum dicatatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00
Jumlah Kurang	301.557.803,03
Beban Pemeliharaan - LO	20.463.223.118,41



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

4) Beban Perjalanan Dinas

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp28.587.458.690,00	Rp44.404.668.082,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp28.587.458.690,00, menurun sebesar Rp15.817.209.392,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp44.404.668.082,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas dan optimalisasi kegiatan secara daring maupun hybrid.

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp2.037.299.000,00	Rp2.756.214.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.037.299.000,00 atau menurun sebesar Rp718.915.000,00 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.756.214.000,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat dikarenakan efisiensi anggaran.

6) Beban Barang dan Jasa BOS

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp0,00	Rp13.233.596.092,36

Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun 2025 tidak terealisasi, sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp13.233.596.092,36. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan klasifikasi dan mekanisme penganggaran program pendidikan pada Tahun 2025.

7) Beban Barang dan Jasa BOSP

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp13.158.292.666,39	Rp333.606.000,00

Beban Barang dan Jasa BOSP pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp13.158.292.666,39, meningkat sebesar Rp12.824.686.666,39 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp333.606.000,00. Peningkatan tersebut sejalan dengan implementasi kebijakan penganggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Tahun 2025.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

8) Beban Barang dan Jasa BLUD

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp34.492.359.002,42 **Rp41.370.311.967,75.**

Beban Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp34.492.359.002,42 atau menurun sebesar Rp6.877.952.965,33 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp41.370.311.967,75. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan belanja operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa BLUD-LRA dengan beban barang dan jasa BLUD-LO yang dijelaskan sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa BLUD **36.729.092.986,15**

Tambah :

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.666.382.360,17
Tahun 2025

Kurang :

Pelunasan Utang Belanja Barang dan 5.903.116.343,90
Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD **34.492.359.002,42**

c. Beban Hibah

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
Rp13.032.646.312,00 **Rp32.850.295.398,00.**

Beban hibah tahun 2025 adalah sebesar Rp13.032.646.312,00 dan tahun 2024 sebesar Rp32.850.295.398,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115
Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.728.929.722,00	19.861.904.000,00	(17.132.974.278,00)
2	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0	50.000.000,00	-50.000.000,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.655.894.390,00	6.090.619.798,00	(2.434.725.408,00)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	709.295.133,00	649.932.533,00	59.362.600,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	5.938.527.067,00	6.197.839.067,00	(259.312.000,00)
	JUMLAH	13.032.646.312,00	32.850.295.398,00	(19.817.649.086,00)

Pada beban hibah kepada pemerintah pusat terdapat selisih dengan belanja hibah kepada pemerintah pusat yang dijelaskan sebagai berikut:



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat-LRA 1.200.000.000,00

Tambah :

- Pemberian hibah tanah kepada BNN 612.909.113,00
- Pemberian hibah tanah kepada BPOM 916.020.609,00

Beban hibah kepada pemerintah pusat-LO 2.728.929.722,00

d. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2025
Rp3.631.400.000,00

31 Desember 2024
Rp2.939.350.000,00

Beban bantuan sosial tahun 2025 adalah sebesar Rp3.631.400.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp2.939.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	2.465.400.000,00	1.489.350.000,00	976.050.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	166.000.000,00	250.000.000,00	(84.000.000,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
	JUMLAH	3.631.400.000,00	2.939.350.000,00	692.050.000,00

e. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2025
Rp6.297.565.372,11

31 Desember 2024
Rp5.976.361.963,44

Beban penyisihan piutang tahun 2025 adalah sebesar Rp6.297.565.372,11 dan tahun 2024 sebesar Rp5.976.361.963,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.441.208.819,15	1.115.223.136,84	2.325.985.682,31
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	1.762.187,50	12.099.688,00	(10.337.500,50)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.694.550.878,18	4.524.933.763,00	(2.830.382.884,82)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.160.043.487,28	324.105.375,60	835.938.111,68



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

NO	Uraian	Saldo 2025(Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
	JUMLAH	6.297.565.372,11	5.976.361.963,44	321.203.408,67

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban penyisihan piutang pajak daerah merupakan beban yang timbul akibat pembentukan cadangan atas piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih seluruhnya.

Pada tahun 2025 beban penyisihan piutang pajak daerah terealisasi sebesar Rp3.441.208.819,15 yang mana beban penyisihan ini disisihkan dari pajak daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun beban penyisihan piutang pajak daerah diperoleh dari:

-	penyisihan piutang PBBP2	3.428.091.469,76
-	penyisihan piutang parkir tahun 2025	11.039.635,26
-	Koreksi Penambahan Penyisihan Piutang PBJT- Jasa Perhotelan-Hotel	245.230,00
-	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	774.429,13
-	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	104.675,00
-	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	5.000,00
-	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	876.480,00
-	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	71.900,00
	JUMLAH	3.441.208.819,15



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban penyisihan piutang retribusi daerah adalah biaya/akun beban yang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan piutang retribusi daerah tidak tertagih.

Pada tahun 2025, beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp3.441.208.819,15 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	512.712,50
- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	78.200,00
- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan (RUSUNAWA)	1.171.275,00
Jumlah	1.762.187,50

Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2025 beban penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.694.550.878,18 yang merupakan penyisihan atas penyisihan kerugian penyertaan modal Perumda Tirta Kualo Kota Tanjungbalai.

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2025 sebesar Rp1.160.043.487,28. Jumlah penyisihan ini merupakan pelunasan atas Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp120.979.217,00 dan penambahan penyisihan piutang atas Piutang Pendapatan Denda PBBP2 sebesar Rp1.281.022.704,28.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp110.311.911.383,80	Rp47.795.466.233,76

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp110.311.911.383,80 dan tahun 2024 sebesar Rp47.795.466.233,76 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Tabel 5.118
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.148.528.053,19	9.893.044.011,56	11.255.484.041,63
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.813.004.433,56	26.312.570.120,28	(2.499.565.686,72)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	65.019.751.930,34	7.144.575.759,92	57.875.176.170,42
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	330.626.966,71	4.445.276.342,00	(4.114.649.375,29)
	Jumlah	110.311.911.383,80	47.795.466.233,76	62.516.445.150,04

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban penyusutan peralatan dan mesin pada tahun 2025 adalah sebesar Rp21.148.068.053,19 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp9.893.044.011,56 terjadi peningkatan sebesar Rp11.255.024.041,63.

Adapun rincian beban penyusutan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	763.484.772,33	20.008.767,33	743.476.005,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	4.360.387.984,85	3.060.630.823,09	1.299.757.161,76
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	104.476.269,97	10.147.207,63	94.329.062,34
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	66.186.518,77	8.611.729,18	57.574.789,59
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.300.270.458,30	3.662.686.780,25	1.637.583.678,05
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	322.787.922,04	150.931.136,24	171.856.785,80
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.082.042.678,92	153.592.599,61	2.928.450.079,31
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	976.054.539,91	75.352.536,16	900.702.003,75
9	Beban Penyusutan Komputer	6.045.207.263,64	2.743.181.835,43	3.302.025.428,21
10	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	46.918.300,00	2.667.500,00	44.250.800,00
11	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	26.077.389,48	2.173.115,79	23.904.273,69
12	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	54.633.954,98	3.059.980,85	51.573.974,13
	JUMLAH	21.148.528.053,19	9.893.044.011,56	11.255.484.041,63

Beban Penyusutan Alat Besar pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp763.484.772,33 meningkat sebesar Rp743.476.005,00 atau 3.715,75% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp20.008.767,33. Beban Penyusutan Alat Angkutan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.360.387.984,85 meningkat sebesar Rp1.299.757.161,76 atau 42,47% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.060.630.823,09.

Selanjutnya, Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp104.476.269,97 meningkat sebesar



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Rp94.329.062,34 atau 929,61% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp10.147.207,63. Beban Penyusutan Alat Pertanian pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp66.186.518,77 meningkat sebesar Rp57.574.789,59 atau 668,56% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp8.611.729,18.

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5.300.270.458,30 meningkat sebesar Rp1.637.583.678,05 atau 44,71% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.662.686.780,25. Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp322.787.922,04 meningkat sebesar Rp171.856.785,80 atau 113,86% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp150.931.136,24.

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3.082.042.678,92 meningkat sebesar Rp2.928.450.079,31 atau 1.906,63% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp153.592.599,61. Beban Penyusutan Alat Laboratorium pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp976.054.539,91 meningkat sebesar Rp900.702.003,75 atau 1.195,312% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp75.352.536,16.

Beban Penyusutan Komputer pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.045.207.263,64 meningkat sebesar Rp3.302.025.428,21 atau 120,37% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.743.181.835,43. Selain itu, Beban Penyusutan Alat Keselamatan pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp46.918.300,00 meningkat sebesar Rp44.250.800,00 atau 1.658,89% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.667.500,00.

Beban Penyusutan Rambu-Rambu pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp26.077.389,48 meningkat sebesar Rp23.904.273,69 atau 1.100,0% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.173.115,79. Sementara itu, Beban Penyusutan Peralatan Olahraga pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp54.633.954,98 meningkat sebesar Rp51.573.974,13 atau 1.685,43% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.059.980,85.

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Beban penyusutan gedung dan bangunan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp23.813.004.433,56 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp26.312.570.120,28 terjadi penurunan sebesar Rp2.514.138.372,68.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Adapun rincian beban penyusutan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	22.657.821.407,76	26.251.900.256,08	(3.594.078.848,32)
2	Beban Penyusutan Monumen	268.689.843,11	31.079.106,51	237.610.736,60
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	10.231.591,75	0,00	10.231.591,75
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	876.261.590,94	29.590.757,69	846.670.833,25
	Jumlah	23.813.004.433,56	26.312.570.120,28	(2.499.565.686,72)

Beban Penyusutan Bangunan Gedung pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp22.657.821.407,76 mengalami penurunan sebesar Rp3.594.078.848,32 atau 13,69% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp26.251.900.256,08.

Beban Penyusutan Monumen pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp268.689.843,11 mengalami peningkatan sebesar Rp237.610.736,60 atau 764,54% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp31.079.106,51.

Beban Penyusutan Bangunan Menara pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp10.231.591,75, sedangkan pada Tahun 2024 tidak terdapat beban penyusutan.

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp876.261.590,94 mengalami peningkatan sebesar Rp846.670.833,25 atau 2.861,27% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp29.590.757,69.

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp65.019.751.930,34 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp7.144.575.759,92 terjadi peningkatan sebesar R57.867.868.034,90.

Adapun rincian beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29.755.984.163,67	7.124.207.729,45	22.631.776.434,22
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	31.079.103.136,01	(17.927.052,95)	31.097.030.188,96



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
3	Beban Penyusutan Instalasi	744.456.508,99	28.089.549,69	716.366.959,30
4	Beban Penyusutan Jaringan	3.440.208.121,67	10.205.533,73	3.430.002.587,94
	Jumlah	65.019.751.930,34	7.144.575.759,92	57.875.176.170,42

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp29.755.984.163,67 mengalami peningkatan sebesar Rp22.631.776.434,22 atau 317,67% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp7.124.207.729,45.

Beban Penyusutan Bangunan Air pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp31.079.103.136,01, sedangkan pada Tahun 2024 tercatat negatif sebesar Rp17.927.052,95. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan sebesar Rp31.097.030.188,96.

Perubahan yang signifikan tersebut mengindikasikan adanya koreksi pencatatan penyusutan pada tahun sebelumnya, penyesuaian akumulasi penyusutan, atau dimulainya pengakuan penyusutan atas aset bangunan air yang sebelumnya belum dilakukan secara memadai.

Beban Penyusutan Instalasi pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp744.456.508,99 mengalami peningkatan sebesar Rp716.366.959,30 atau 2.550,30% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp28.089.549,69.

Beban Penyusutan Jaringan pada Tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.440.208.121,67 mengalami peningkatan sebesar Rp3.430.002.587,94 atau 33.609,24% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp10.205.533,73.

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud pada tahun 2025 adalah sebesar Rp330.626.966,71 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp4.445.276.342,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.114.649.375,29.

Adapun rincian beban penyusutan aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	330.626.966,71	4.445.276.342,00	(4.114.649.375,29)
	JUMLAH	330.626.966,71	4.445.276.342,00	(4.114.649.375,29)



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penghapusan data Aset Tidak Berwujud (ATB) pada Tahun 2025 sehingga nilai aset yang menjadi dasar perhitungan amortisasi mengalami penurunan secara signifikan. Dampak dari penghapusan tersebut menyebabkan beban amortisasi yang diakui pada Tahun 2025 menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Penghapusan Aset Tidak Berwujud dilakukan berdasarkan hasil penelusuran dan penataan data aset sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

5.4.2.2 Beban Tidak Terduga

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp7.617.460,00	Rp652.519.000,00

Beban tidak terduga adalah pengeluaran yang tidak direncanakan dan terjadi di luar anggaran rutin. Beban tidak terduga pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.617.460,00 Sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp652.519.000,00.

5.4.3 Surplus / (Defisit) Dari Operasi

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
(Rp8.308.354.814,70)	(Rp4.602.240.277,22)

Surplus/ (Defisit) dari kegiatan operasional tahun 2025 adalah sebesar Rp(8.308.354.814,70) yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1	Pendapatan – LO	671.971.589.880,28
2	Beban _ LO	<u>680.279.944.694,98</u>
3	Surplus/(Defisit) Operasional	(8.308.354.814,70)

5.4.4 Surplus / Defisit – LO

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
(Rp8.308.354.814,70)	(Rp4.602.240.277,22)

Surplus / Defisit– LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.308.354.814,70

5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp30.886.610.798,58	Rp2.462.024.137,92

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp90.183.595.439,73	Rp54.251.686.795,18

Arus kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode tahun 2025 adalah sebesar Rp90.183.595.439,73 yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Arus Kas Masuk	Rp	662.971.780.438,57
2) Arus Kas Keluar	Rp	572.788.184.998,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	90.183.595.439,73

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivasi Investasi

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
(Rp61.756.530.280,06)	(Rp66.349.108.239,09)

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode tahun 2025 adalah sebesar (Rp61.756.530.280,06) yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Arus Kas Masuk	Rp	130.060.441,00
2) Arus Kas Keluar	Rp	61.886.590.721,06
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(61.756.530.280,06)



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

<u>Tahun 2025</u> <u>Rp0,00</u>	<u>Tahun 2024</u> <u>(Rp13.173.901,00)</u>

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan dan tambahan uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Masuk Kas	Rp	19.603.296.281,86
2) Arus Keluar Kas	Rp	19.603.296.281,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00

5.5.4. Peningkatan/ Penurunan Kas

<u>Tahun 2025</u> <u>Rp28.427.065.159,67</u>	<u>Tahun 2024</u> <u>(Rp12.110.595.344,91)</u>

Kenaikan Kas tahun 2025 adalah sebesar Rp28.427.065.159,67 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	90.183.595.439,73
2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(61.756.530.280,06)
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	Rp	28.427.065.159,67

5.5.5. Saldo Awal Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan

<u>01 Januari 2025</u> <u>Rp2.462.024.137,92</u>	<u>01 Januari 2024</u> <u>Rp14.572.619.482,83</u>

Saldo awal kas di BUD Tahun 2025 sebesar Rp2.462.024.137,92 merupakan saldo akhir kas Tahun 2024 yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab entitas pelaporan yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

5.5.6. Saldo Akhir Kas Di BUD, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan

<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Rp30.886.610.798,58	Rp2.462.024.137,92

Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2025 sebesar Rp30.886.610.798,58 merupakan saldo akhir kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab entitas pelaporan yang menyelenggarakan fungsi perbendaharaan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Kota Tanjungbalai yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Bank Sumut sebesar Rp21.569.182.724,90.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp110.232.779,00, saldo kas di BLUD sebesar Rp8.645.231.076,38, saldo kas dana kapitasi pada FKTP sebesar Rp128.479.790,76, saldo kas dana BOSP sebesar Rp50.100.037,54, saldo kas dana BOK Puskesmas sebesar Rp383.384.390,00.

Saldo akhir kas sebesar Rp30.886.610.798,58 ditambah dengan Potongan pajak double potong dan belum dipulihkan dan menjadi piutang sebesar Rp2.578.497,00, koreksi pembulatan angka dibelakang koma sebesar Rp0,01, koreksi saldo awal kas dana kapitasi pada FKTP sebesar Rp2,00 dan dikurangi koreksi atas saldo awal BOS (TK Negeri) sebesar Rp100.000,00.

Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp30.889.089.297,59

5.6 Penjelasan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Perubahan ekuitas dipengaruhi oleh Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO), koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, serta transaksi lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

5.6.1 Ekuitas Awal

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp1.402.411.873.208,44	Rp1.280.339.684.859,57



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.402.411.873.208,44 merupakan ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024.

5.6.2 Surplus / (Defisit) – LO

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
(Rp8.308.354.814,70)	(Rp4.602.240.277,22)

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat Defisit-LO sebesar Rp8.308.354.814,70 yang berasal dari selisih antara pendapatan-LO dan beban selama periode berjalan.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp(178.619.289.689,51)	Rp126.674.428.626,09

Pada Tahun Anggaran 2025 pada dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu koreksi nilai persediaan sebesar Rp130.900.000,00 dan koreksi lain lain sebesar Rp178.488.389.689,51. Koreksi ini dapat terdiri dari koreksi atas pencatatan aset tetap tahun sebelumnya, penyesuaian nilai persediaan dan Koreksi atas pengakuan kewajiban yang belum tercatat. Koreksi ini tidak melalui Laporan Operasional, melainkan langsung menyesuaikan ekuitas.

5.6.4 Ekuitas Akhir

<u>Tahun 2025</u>	<u>Tahun 2024</u>
Rp1.215.484.228.704,23	Rp1.402.411.873.208,44

Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Koreksi ekuitas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.215.484.228.704,23, yang terdiri dari:

- Koreksi atas pencatatan aset tetap tahun sebelumnya;
- Penyesuaian nilai persediaan;
- Koreksi atas pengakuan kewajiban yang belum tercatat.

Koreksi ini tidak melalui Laporan Operasional, melainkan langsung menyesuaikan ekuitas. Perhatikan tabel perhitungan berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp 1.402.411.873.208,44
2	Surplus/ (Defisit) – LO	Rp (8.308.354.814,70)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan	
3	Mendasar (Koreksi Belanja)	Rp (130.900.000,00)
	Koreksi Nilai Persediaan	
	Lain Lain	Rp (178.488.389.689,51)
4	Ekuitas Akhir	Rp 1.215.484.228.704,23



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Sejarah Perkembangan Kota Tanjungbalai

Dari tahun ke tahun Kota Tanjungbalai terus berkembang, para pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang, kemudian menetap di Tanjungbalai. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dari hanya 199 Ha (2 km²) menjadi 60 km², kota ini pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk ±40.000 jiwa dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km².

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, wilayah Kota Tanjungbalai diperluas menjadi ±60 km² dengan membawahi 5 (lima) kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 146.1/3372/SK/1993 tanggal 28 Oktober 1993, desa dan kelurahan di Kota Tanjungbalai dimekarkan sehingga bertambah 5 (lima) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan persiapan menjadi 19 (sembilan belas) Desa dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kota Tanjungbalai. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 seluruh desa yang ada telah berubah status menjadi kelurahan, sehingga saat itu Kota Tanjungbalai mempunyai 30 (tiga puluh) Kelurahan.

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar, menambah wilayah administratif Kota Tanjungbalai menjadi 6 (enam) Kecamatan, 31 (tiga puluh satu) Kelurahan, dan 187 Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Daftar Kecamatan di Kota Tanjungbalai

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Rasio terhadap Total (%)
1	Datuk Bandar	2.249	37.16
2	Datuk Bandar Timur	1.457	24.07
3	Tanjungbalai Selatan	198	3.27
4	Tanjungbalai Utara	84	1.39
5	Sei Tualang Raso	809	13.37
6	Teluk Nibung	1.255	20.74
Jumlah		6.052	100



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

6.2. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, menjadi 37 (tiga puluh tujuh) unit yang terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 1 (satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 1 (satu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 35 (tiga puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rincian Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. BLUD RSUD Dr. Tengku Mansyur
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial
9. Dinas Ketengakerjaan
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi dan UKM
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20. Dinas Perikanan
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

27. Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM
28. Inspektorat Kota
29. Kecamatan Datuk Bandar
30. Kecamatan Tanjungbalai Selatan
31. Kecamatan Tanjungbalai Utara
32. Kecamatan Sei Tualang Raso
33. Kecamatan Teluk Nibung
34. Kecamatan Datuk Bandar Timur
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2025, Jumlah pegawai Pemerintah Kota Tanjungbalai sebanyak 2.617 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.2
Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai
Menurut Golongan Dan Jabatan Tahun 2025

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON		
	ES.I	ES.II	ES.III	ES.IV	FUNGSIONAL	STAF	PPPK
IV/e	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	1	0	0	0	0	0
IV/c	0	19	0	0	2	0	0
IV/b	0	4	22	1	117	5	0
IV/a	0	4	56	13	189	6	0
TOTAL	0	28	78	14	308	11	0
III/d	0	0	33	67	469	20	0
III/c	0	0	3	89	238	51	0
III/b	0	0	0	43	124	128	0
III/a	0	0	0	6	234	97	0
TOTAL	0	0	36	205	1065	296	0
II/d	0	0	0	0	63	140	0
II/c	0	0	0	0	8	84	0
II/b	0	0	0	0	7	40	0
II/a	0	0	0	0	2	18	0
TOTAL	0	0	0	0	80	282	0
I/d	0	0	0	0	0	11	0
I/c	0	0	0	0	0	7	0



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
 (dinyatakan dalam rupiah)

GOLONGAN/ RUANG	ESELON				NON ESELON		
	ES.I	ES.II	ES.III	ES.IV	FUNGSIONAL	STAF	PPPK
I/b	0	0	0	0	0	1	0
I/a	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	19	0
IX	0	0	0	0	0	0	195
TOTAL	0	0	0	0	0	0	195

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tanjungbalai

Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 telah memperoleh penghargaan dari berbagai instansi sebagai berikut :

6.3. Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Tabel 6.3
Daftar Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025

NO	TANGGAL	NAMA PENGHARGAAN	YANG MENYERAHKAN	YANG MENERIMA	TEMPAT	FOTO
1	2	3	4	5	6	
1	16/09/2025	Rekonsiliasi Tercepat Semester I Sewilayah Kerja KPPN Tanjungbalai	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungbalai Kementerian Keuangan RI	Mahyaruddin Salim	Ruang Kerja Wali Kota Tanjungbalai	
2	27/01/2026	Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Pratama	Direktur Utama BPJS Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc. Ph.D	Mahyaruddin Salim	Jakarta International Expo (JIE expo) Kemayoran	



BAB VII

PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun kesimpulan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang kami susun diantaranya adalah terkait laporan realisasi anggaran. Pendapatan Daerah Tahun 2025 mencapai Rp663,10 miliar atau sebesar 97,85% dari target Rp677,63 miliar. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu 110,99%, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah yang melampaui target. Sementara itu, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 96,35%, sedikit di bawah target, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya mencapai 68,94%, yang menjadi faktor utama tidak tercapainya total target pendapatan secara keseluruhan.

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp634,67 miliar atau 93,15% dari anggaran Rp681,28 miliar. Belanja Operasi terealisasi 93,10%, sedangkan Belanja Modal mencapai 95,42%, menunjukkan penyerapan anggaran yang cukup optimal, terutama pada belanja pembangunan. Namun, Belanja Tidak Terduga sangat rendah, hanya 0,63%, menandakan minimnya penggunaan anggaran darurat. Secara keseluruhan, kondisi ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp28,43 miliar, berbanding terbalik dengan target defisit yang direncanakan, sehingga mencerminkan kinerja fiskal yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa komponen yang belum optimal.

Jumlah aset tahun 2025 pada Neraca tercatat sebesar Rp1,26 triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,45 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya nilai aset tetap dari Rp1,33 triliun menjadi Rp1,12 triliun, yang dipengaruhi oleh akumulasi penyusutan yang cukup besar. Sementara itu, aset lancar mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp49,95 miliar, didorong oleh kenaikan kas dan piutang, khususnya piutang pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada sisi lain, aset lainnya dan investasi jangka panjang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa komponen.



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

Dari sisi kewajiban, total kewajiban tahun 2025 sebesar Rp40,08 miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp52,36 miliar. Kewajiban tersebut seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek, dengan komponen terbesar berasal dari utang belanja. Penurunan kewajiban ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan utang pemerintah daerah.

Pada laporan operasional pendapatan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp671,97 miliar, meningkat 5,28% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD-LO) yang melonjak signifikan sebesar 94,07%, dengan kontribusi terbesar dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat tajam sebesar 127,39%, termasuk adanya pendapatan hibah. Namun demikian, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 5,37%, khususnya dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah, sehingga sedikit menahan laju pertumbuhan total pendapatan.

Beban daerah tahun 2025 mencapai Rp680,28 miliar atau meningkat 5,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan beban terutama disebabkan oleh lonjakan beban penyusutan dan amortisasi yang meningkat signifikan sebesar 130,80%, meskipun beban operasi justru mengalami penurunan. Beberapa komponen seperti beban hibah dan barang/jasa juga menurun, sementara beban pegawai relatif stabil.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan yang cukup baik, dengan capaian pendapatan yang optimal dan pengendalian belanja yang relatif efektif. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam optimalisasi pendapatan, pengendalian beban operasional, serta pengelolaan aset agar dapat mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Namun, kami menyadari belum sepenuhnya permasalahan yang timbul selama tahun 2025 dapat terselesaikan, untuk itu akan kami berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melakukan perbaikan yang menyeluruh sehingga permasalahan yang ada dapat segera teratasi.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kami susun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good goverment* serta



PEMERNTAH KOTA TANJUNGBALAI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(dinyatakan dalam rupiah)

dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tanjungbalai, 26 Mei 2026

WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD FADLY ABDINA

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PENERIMA HIBAH TA 2025

PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	8.524.600.000,00	8.278.848.457,00	97,12
2	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	95.573.000,00	63,72
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.929.423.974,00	1.929.295.133,00	99,99
	Jumlah	11.804.023.974,00	11.503.716.590,00	97,46

No	Nama OPD	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	Politeknik Tanjungbalai 2025	2.000.000.000,00	1.770.321.390,00	88,52
2	Dinas Pendidikan	Politeknik Tanjungbalai 2024 (Utang Pihak ketiga)	570.000.000,00	570.000.000,00	100,00
3	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS			
		SDS IT NURUL HIKMAH	83.700.000,00	83.700.000,00	100,00
		SDS METHODIST 1	162.000.000,00	161.949.500,00	99,97
		SDS ISLAM ATH THOHIRIYAH	92.700.000,00	92.700.000,00	100,00
		SDS ISLAM SEI MERBAU	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00
		SDS METHODIST II	335.700.000,00	335.700.000,00	100,00
		SDS ROM KATHOLIK I	344.700.000,00	344.700.000,00	100,00
		SDS SISINGAMANGARAJA 1	569.700.000,00	569.700.000,00	100,00
		SDS SUWARDI SALIM	95.400.000,00	95.373.000,00	99,97
		SDS HARAPAN MUHAMMADIYAH	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00
		SDS ISLAM TERPADU DARUL FIKRI	467.100.000,00	467.100.000,00	100,00
		SDS IT AL BADARIAH	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
		SDS IT FARIDHATUL FATHANAH	69.300.000,00	69.300.000,00	100,00

No	Nama OPD	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
		SDS IT NURUL QURAN	124.200.000,00	124.200.000,00	100,00
		SMPS PESANTREN TAHFIDZ DAARUL MUKHLASIN	41.800.000,00	41.476.000,00	99,22
		SMPS DAR ALFALAH	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00
		SMPS METHODIST II	209.000.000,00	209.000.000,00	100,00
		SMPS MUHAMMADIYAH	47.300.000,00	47.300.000,00	100,00
		SMPS SISINGAMANGARAJA	482.900.000,00	482.762.447,00	99,97
		SMPS TRITUNG GAL	216.700.000,00	216.700.000,00	100,00
		SMPS IT DARUL FIKRI	288.200.000,00	288.200.000,00	100,00
4	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD			
		TK AL BARKAH	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00
		TK AL MUSTANIR	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
		TK ANGELS	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
		TK ARAFAH	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
		TK BINA ANAPRASA PKBI	15.600.000,00	15.480.000,00	99,23
		TK DHARMA WANITA PERSATUAN	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
		TK IT AL HUDA	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00
		TK KATOLIK ASSISI	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		TK KEMALA BHAYANGKARI	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
		TK MELATI	9.600.000,00	4.800.000,00	50,00
		TK METHODIST 1	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
		TK METHODIST BUKIT SION	35.400.000,00	35.100.000,00	99,15
		TK RAUDHOTUL ILMI	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
		TK SHOPY	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
		TK SISINGAMANGARAJA	101.400.000,00	101.396.000,00	100,00
		TK TAHFIDZ DAARUL MUKHLASIN	4.200.000,00	4.140.000,00	98,57
		TK XAVIER KIDS	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00

No	Nama OPD	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
		TK YMPI	21.000.000,00	20.778.000,00	98,94
		TK ISLAM AUNILLAH	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00
		AISYIYAH	7.800.000,00	3.900.000,00	50,00
		AL-HIKMAH	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
		AMALIYAH	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
		AR RAHMAN	15.600.000,00	15.342.000,00	98,35
		ARJUNA	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		AS-SABIL	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
		AWALIYAH MUKARROMAH	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
		AZ ZAHRA DB	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
		AZKIA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
		AZ-ZAHRA TBS	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
		AZ-ZUUMAR	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
		AL BARKAH	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
		BINA INSANI	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00
		BUDI LUHUR	51.000.000,00	50.604.000,00	99,22
		DARMA	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
		DARUL FIKRI	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
		FAHMI	9.000.000,00	4.500.000,00	50,00
		IDOLA CILIK	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00
		ISTIFANI	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
		KB AMANAH	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00
		KB AN NISA TBU	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
		KB ANNISA TN	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
		AL FAHIRA	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
		KB AR RAHMA	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
		KB ASSALAM	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00

No	Nama OPD	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
		KB AZ ZAHRA STR	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		KB AZ ZAKIYAH	30.600.000,00	30.228.000,00	98,78
		KB BAITUL ILMI	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		KB IT AL HUDA	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
		KB IT NURUL FIKRI	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00
		KB METHODIST BUKIT SION	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00
		KB MUZDALIFAH BINA BERSAMA	20.400.000,00	20.310.000,00	99,56
		KB PONDOK DAUD	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
		AL HIDAYAH	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
		KB RIZKIKHA	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
		KB SISINGAMANGARAJA	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00
		KEMUNING	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
		KURNIA	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00
		MAWAR	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
		MAWAR TERPAUD	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
		SEMELUR INDAH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
		SOFWATUR ROHMA	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
		TABERNACLE KIDS	8.400.000,00	8.322.000,00	99,07
		TUNAS BANGSA	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
		AL IKHSAN	13.800.000,00	13.684.120,00	99,16
		YMPI	10.800.000,00	10.686.000,00	98,94
		AL IKHWAN	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
		AL KHOIRI	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
		AL MUNAWWAROH	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
		AL-HABIB	19.800.000,00	19.596.000,00	98,97
5	Dinas Pendidikan	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan			

No	Nama OPD	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
		PKBM AL FARIZKI	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
		PKBM AL MUSTANIR	36.600.000,00	36.600.000,00	100,00
		PKBM BAHAGIA	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00
		PKBM BINA TARUNA	116.800.000,00	116.800.000,00	100,00
		PKBM DATUK BANDAR	46.200.000,00	46.200.000,00	100,00
		PKBM HARAPAN	99.900.000,00	99.900.000,00	100,00
		PKBM MATAHALASAN	114.800.000,00	114.800.000,00	100,00
		PKBM PERWIRA	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00
		PKBM SRIWIJAYA MANDIRI	205.500.000,00	205.500.000,00	100,00
		PKBM SYAKINAH	101.700.000,00	101.700.000,00	100,00
		PKBM TUNAS KARYA	94.600.000,00	94.600.000,00	100,00
		PKBM VIJAYA LEARNING CENTRE	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
6	Dinas Kesehatan	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tanjungbalai	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
8	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tanjungbalai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
9	Sekretariat Daerah	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	100.000.000,00	95.573.000,00	95,57
10	Sekretariat Daerah	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	68.991.372	68.991.372	100,00
		DPC HANURA	45.540.144	45.540.144	100,00
		PARTAI AMANAT NASIONAL	27.173.259	27.137.260	99,87
		DPC PDI PERJUANGAN	80.295.318	80.295.318	100,00
		DPC PPP	38.087.973	37.995.133	99,76

No	Nama OPD	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi	%
		DPD PKS	79.581.726	79.581.726	100,00
		PARTAI GERINDRA	67.312.809	67.312.809	100,00
		DPD GOLKAR	204.557.634	204.557.634	100,00
		DPC PARTAI DEMOKRAT	47.275.470	47.275.470	100,00
		DPD PARTAI NASDEM	30.822.309	30.822.310	100,00
		DPD PARTAI PERINDO	19.785.960	19.785.957	100,00
		KEPOLISIAN RESOR TANJUNGBALAI	800.000.000	800.000.000	100,00
		LANAL TANJUNGBALAI ASAHAN	400.000.000	400.000.000	100,00
		DPD IKATAN WARTAWAN ONLINE INDONESIA (IWOI) KOTA TANJUNGBALAI	20.000.000	20.000.000	100,00
	Jumlah		11.804.023.974,00	11.503.716.590,00	97,46

LAMPIRAN 2

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2025

No.	Tanggal STS	Nomor STS	Unit SKPD	Nama Penyeter	Uraian	Jenis STS	Nilai STS (Rp)	Pengembalian	Tanggal Setor	Bukti Setor di RK
1	31 Desember 2025	12.74/07.0/000007/T U/2.14.0.00.0.00.01.0 000/PR/1/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bend. Dispen KB	Pengembalian Tambahan Uang (TU) 7 DAKNF - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota -MKJP-KB-DPPKB Kota Tanjungbalai TA.2025	TU	95.504.700,00	95.504.700,00	05 Januari 2026	95.504.700,00
2	31 Desember 2025	12.74/07.0/000008/T U/2.14.0.00.0.00.01.0 000/PR/1/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bend. Dispen KB	Pengembalian (TU) 8 DAKNF-Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk-KS- DPPKB Kota Tanjungbalai TA.2025	TU	1.489.700,00	1.489.700,00	05 Januari 2026	1.489.700,00
3	31 Desember 2025	12.74/07.0/000009/T U/2.14.0.00.0.00.01.0 000/PR/1/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bend. Dispen KB	Pengembalian (TU) 9 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Bidang DALDUK (DAKNF) Tahun 2025	TU	300.000,00	300.000,00	05 Januari 2026	300.000,00
4	31 Desember 2025	12.74/06.0/000004/U P- NIHIL/2.14.0.00.0.00. 01.0000/PR/1/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bend. Dispen KB	Pengembalian Dana GU 3 DPP dan KB Tahun 2025	UP	12.941.579,00	1.288.000,00	02 Januari 2026	1.288.000,00
5	31 Desember 2025	12.74/06.0/000004/U P- NIHIL/2.14.0.00.0.00. 01.0000/PR/1/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bend. Dispen KB	Pengembalian Dana GU 3 DPP dan KB Tahun 2025	UP		1.443.609,00	07 Januari 2026	2.166.808,00
6	31 Desember 2025	12.74/06.0/000004/U P- NIHIL/2.14.0.00.0.00. 01.0000/PR/1/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bend. Dispen KB	Pengembalian Dana GU 3 DPP dan KB Tahun 2025	UP		10.206.770,00	06 Januari 2026	10.206.770,00
TOTAL							110.235.979,00	110.232.779,00		

LAMPIRAN 3

KAS DI BLUD

PER 31 DESEMBER 2025

NO	BULAN	SALDO AWAL 2025	TANGGAL SP2B	NOMOR SP2B	TANGGAL SPB	NOMOR SPB	PENDAPATAN	REALISASI						SALDO AKHIR 2025
								BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA	BELANJA MODAL PERALATAN UMUM	BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN LAINNYA	TOTAL BELANJA	
Saldo Awal :		1.013.820.739,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013.820.739,53
1	JAN	1.013.820.739,53	31-01-2025	002/386/RSUD/ 2025	03-02-2025	0001/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	6.148.728.848,00	-	105.979.988,00	-		-	105.979.988,00	7.056.569.599,53
2	FEB	7.056.569.599,53	03-03-2025	002/828/RSUD/ 2025	05-03-2025	0002/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	658.858.413,00	-	5.238.248.929,36	-		-	5.238.248.929,36	2.477.179.083,17
3	MAR	2.477.179.083,17	08-04-2025	002/1312/RSUD/ 2025	09-04-2025	0003/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	6.292.065.710,00	43.500.000,00	3.126.303.330,61	-		-	3.169.803.330,61	5.599.441.462,56
4	APR	5.599.441.462,56	02-05-2025	002/1660/RSUD/ 2025	05-05-2025	0004/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	698.619.773,00	-	200.486.530,00	-		-	200.486.530,00	6.097.574.705,56
5	MEI	6.097.574.705,56	02-06-2025	002/1987/RSUD/ 2025	03-06-2025	0005/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	3.386.652.186,00	-	3.257.857.250,00	-		-	3.257.857.250,00	6.226.369.641,56
6	JUN	6.226.369.641,56	02-07-2025	002/2450/RSUD/ 2025	03-07-2025	0006/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	3.300.314.796,00	-	1.621.393.642,33	-		800.000,00	1.622.193.642,33	7.904.490.795,23
7	JUL	7.904.490.795,23	01-08-2025	002/2739/RSUD/ 2025	04-08-2025	0007/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	6.731.257.544,00	-	4.561.266.508,94	-		-	4.561.266.508,94	10.074.481.830,29
8	AUG	10.074.481.830,29	01-09-2025	002/3913/RSUD/ 2025	02-09-2025	0008/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	1.405.367.634,00	-	2.871.443.493,61	48.196.200,00		-	2.919.639.693,61	8.560.209.770,68
9	SEPT	8.560.209.770,68	01-10-2025	002/4619/RSUD/ 2025	02-10-2025	0009/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	3.298.360.725,00	72.500.000,00	3.313.461.005,58	-		7.682.000,00	3.393.643.005,58	8.464.927.490,10
10	OKT	8.464.927.490,10	03-11-2025	002/5685/RSUD/ 2025	04-11-2025	0010/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	3.010.628.278,00		3.305.655.819,31				3.305.655.819,31	8.169.899.948,79
11	NOP	8.169.899.948,79	03-12-2025	002/6023/RSUD/ 2025	04-12-2025	0011/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	3.329.943.080,00		5.411.726.176,21			13.819.500,00	5.425.545.676,21	6.074.297.352,58
12	DES	6.074.297.352,58	31-12-2025	900/6675/RSUD/ 2025	31-12-2025	0012/SPB/BLUD/ BPKPD/2025	6.509.189.366,00	193.900.000,00	3.715.270.312,20	-	29.085.330,00	-	3.938.255.642,20	8.645.231.076,38
JUMLAH KESELURUHAN							44.769.986.353,00	309.900.000,00	36.729.092.986,15	48.196.200,00		22.301.500,00	37.138.576.016,15	8.645.231.076,38

LAMPIRAN 4

KAS DANA KAPITASI PADA FKTP

PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	SALDO 2024	PENDAPATAN 2025	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN TA 2025	REALISASI BELANJA		TOTAL BELANJA	SALDO 2025
					BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	PUSKESMAS DATUK BANDAR	258.587,00	1.930.025.769,00	0,00	1.783.304.362,00	146.934.030,00	1.930.238.392,00	45.964,00
2	PUSKESMAS TELUK NIBUNG	100.800.908,00	1.012.345.770,00	0,00	1.005.872.471,00	84.459.900,00	1.090.332.371,00	22.814.307,00
3	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN	358,00	519.059.514,00	0,00	497.089.949,00	21.406.750,00	518.496.699,00	563.173,00
4	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO	1.612.343,00	1.257.854.530,00	0,00	1.157.668.368,00	79.353.500,00	1.237.021.868,00	22.445.005,00
5	PUSKESMAS KAMPUNG BARU	916.313,76	696.613.257,00	0,00	636.720.852,00	0,00	636.720.852,00	60.808.718,76
6	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI	31.344,00	824.429.672,00	2.642.284,00	759.660.893,00	67.133.000,00	826.793.893,00	309.407,00
7	PUSKESMAS MAYOR UMAR DAMANIK	8.711.143,00	853.674.596,00	0,00	787.833.765,00	53.080.200,00	840.913.965,00	21.471.774,00
8	PUSKESMAS SEMULA JADI	22.063,00	1.383.788.684,00	0,00	1.233.774.805,00	150.014.500,00	1.383.789.305,00	21.442,00
JUMLAH KESELURUHAN		112.353.059,76	8.477.791.792,00	2.642.284,00	7.861.925.465,00	602.381.880,00	8.464.307.345,00	128.479.790,76

Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2024	:	112.353.059,76
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 2025	:	128.479.790,76

LAMPIRAN 5

KAS DANA BOSP

PER 31 DESEMBER 2025

NO	KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	SUMBER DATA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	SIKD NG	21.144.800.000,00	21.107.825.970,00	99,83
2	4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	SIKD NG	586.000.000,00	586.000.000,00	100,00
3	4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	SIKD NG	936.700.000,00	936.700.000,00	100,00
4	4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	SIKD NG	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
5	4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	SIKD NG	1.306.800.000,00	1.291.266.120,00	98,81
Jumlah Keseluruhan :				24.064.300.000,00	24.011.792.090,00	99,78

NO	KODE REKENING	URAIAN BELANJA	SUMBER DATA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	LRA SIPD	12.724.509.012,00	12.695.123.054,39	99,77
2	5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	LRA SIPD	373.278.612,00	373.169.612,00	99,97
3	5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	LRA SIPD	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
4	5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	LRA SIPD	1.974.592.688,00	1.967.492.688,00	99,64
5	5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	LRA SIPD	105.549.388,00	105.549.388,00	100,00
6	5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	LRA SIPD	2.726.172.300,00	2.712.767.200,00	99,51
7	5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	LRA SIPD	107.172.000,00	107.172.000,00	100,00
8	5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	LRA SIPD	8.426.000,00	8.426.000,00	100,00
9	5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	LRA SIPD	3.844.900.000,00	3.844.360.947,00	99,99
10	5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	LRA SIPD	1.173.000.000,00	1.157.466.120,00	98,68
11	5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	LRA SIPD	936.700.000,00	936.700.000,00	100,00
Jumlah Keseluruhan :				24.064.300.000,00	23.998.227.009,39	99,73

Selisih Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 :			13.565.080,61	
Saldo Kas di BOSP 2024 :			36.434.956,93	
Koreksi Saldo Awal 2024 :			100.000,00	
Saldo Kas di BOSP 2025 :			50.100.037,54	

LAMPIRAN 6

KAS DANA BOK PUSKESMAS

PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	SALDO 2024	PENDAPATAN 2025	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN TA 2025	REALISASI BELANJA		TOTAL BELANJA	SALDO 2025
					BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PUSKESMAS DATUK BANDAR	8.298.700	358.873.900	0,00	329.569.925	0,00	329.569.925,00	37.602.675,00
2	PUSKESMAS TELUK NIBUNG	99.743.087	263.480.913	0,00	350.678.090	0,00	350.678.090,00	12.545.910,00
3	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN	146.990.722	213.998.278	0,00	325.433.014	0,00	325.433.014,00	35.555.986,00
4	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO	3.587.500	363.554.700	0,00	334.097.911	0,00	334.097.911,00	33.044.289,00
5	PUSKESMAS KAMPUNG BARU	142.549.271	279.195.729	0,00	334.786.152	0,00	334.786.152,00	86.958.848,00
6	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI	179.109.522	183.870.878	0,00	317.207.828	0,00	317.207.828,00	45.772.572,00
7	PUSKESMAS MAYOR UMAR DAMANIK	106.969.808	259.484.992	0,00	247.816.655	0,00	247.816.655,00	118.638.145,00
8	PUSKESMAS SEMULA JADI	119.562.350	279.234.665	0,00	385.531.050	0,00	385.531.050,00	13.265.965,00
JUMLAH KESELURUHAN		806.810.960,00	2.201.694.055,00	0,00	2.625.120.625,00	0,00	2.625.120.625,00	383.384.390,00

Kas Dana BOK 2024 :	806.810.960,00
Kas Dana BOK 2025 :	383.384.390,00

LAMPIRAN 7

PIUTANG PAJAK DAERAH - AIR TANAH

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
1	PT. GUNUNG SALJU	2.500.000,00	2.500.000,00	Des-25	2.500.000,00	2.500.000,00
2	PT. SUMATRA BARU	800.000,00	-	Des-25	800.000,00	1.600.000,00
3	PT. IJS SYNDICAAT	4.041.000,00	1.066.000,00	Des-25	1.066.000,00	4.041.000,00
4	PT. SALJU ASAHAN	1.500.000,00	1.500.000,00	2023	-	-
5	PT ASA	0,00	-	Des-25	2.222.000,00	2.222.000,00
6	KILANG MINYAK PELITA	0,00	-	Des-25	1.813.000,00	1.813.000,00
7	CV PUTRA HARAPAN	0,00	-	Des-25	300.000,00	300.000,00
8	CV INDAH SARI	0,00	-	Des-25	1.500.000,00	1.500.000,00
9	AGUSMEN SUFRANDY SITORUS	0,00	-	Nov-25	400.000,00	800.000,00
				Des-25	400.000,00	
10	NEGOLAND WATERPARK	0,00	-	Des-25	300.000,00	300.000,00
11	PT HALINDO BERJAYA MANDIRI	0,00	-	Des-25	3.079.000,00	3.079.000,00
	JUMLAH	8.841.000,00	5.066.000,00		14.380.000,00	18.155.000,00

LAMPIRAN 8

PIUTANG PBJT - MAKANAN DAN/ ATAU MINUMAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
1	Taufiq	475.000	250.000	Des-25	250.000	475.000
2	B. Sihaloho	40.000	-	2015	-	40.000
3	Tina	90.000	-	2015	-	90.000
4	Kang Le	150.000	-	2015	-	150.000
5	Razi Kesuma	60.000	-	2015	-	60.000
6	Hj. Delima	60.000	-	2015	-	60.000
7	Tanth	100.000	-	2015	-	100.000
8	Haidir	424.000	-	2015	-	424.000
9	Amiruddin	75.000	-	2015	-	75.000
10	Ayen	440.000	-	2015	-	440.000
11	Aulia	50.000	-	2015	-	50.000
12	Syahrani	175.000	-	2015	-	175.000
13	Azhar	840.100	-	2015	-	840.100
14	Tuminah	210.000	-	2015	-	210.000
15	Zakir Zein	60.000	-	2015	-	60.000
16	T. Pancong	20.000	-	2015	-	20.000
17	K. Zufa	20.000	-	2015	-	20.000
18	Ame	40.000	-	2015	-	40.000
19	Seri	10.000	-	2015	-	10.000
20	Halimah	10.000	-	2015	-	10.000
21	Riduan Mrp	10.000	-	2015	-	10.000
22	Izah	70.000	-	2015	-	70.000
23	Bengawan	200.000	-	2015	-	200.000
24	Azhar/RM. Azhar	1.000.000	2.000.000	Agu-25	3.137.993	20.634.792
				Sep-25	4.152.945	
				Okt-25	4.596.644	
				Nov-25	4.663.015	
				Des-25	5.084.195	

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
25	PT. Singgje Rekreasi Jaya	13.564.000	13.564.000	Des-25	8.570.000	8.570.000
26	RM. Holat	150.000	150.000	Des-25	150.000	150.000
27	D'Mango	1.000.000	-	Des-25	300.000	1.300.000
28	RM. Haidir	400.000	-	Okt-25	400.000	1.600.000
				Nov-25	400.000	
				Des-25	400.000	
29	Resto Tresya	1.000.000	1.000.000	Okt-25	500.000	1.500.000
				Nov-25	500.000	
				Des-25	500.000	
30	RM. Hasan	200.000	200.000	Jan-25	200.000	2.000.000
				Feb-25	200.000	
				Mar-25	200.000	
				Apr-25	200.000	
				Mei-25	200.000	
				Jun-25	200.000	
				Jul-25	200.000	
				Agu-25	200.000	
				Sep-25	200.000	
				Okt-25	200.000	
31	Point Coffee	5.539.142	5.539.142	Des-25	8.542.406	8.542.406
32	ARTERI GARDEN SWIMMING POOL	-	-	Des-25	1.500.000	1.500.000
33	AYAM BAKAR MAKSEI	-	-	Nov-25	500.000	500.000
				Des-25	500.000	500.000
34	AYAM PENYET PAKDE	-	-	Des-25	300.000	300.000
35	AYAM PRESTO CABE IJO	-	-	Des-25	800.000	800.000
36	BAKSO BENGAWAN SOLO	-	-	Des-25	150.000	150.000
37	BAKSO MEKAR SARI	-	-	Agu-25	150.000	150.000
38	BAKSO RAHAYU	-	-	Des-25	150.000	150.000
39	CAPTAIN FRIED CHICKEN	-	-	Des-25	300.000	300.000
40	JANJI JIWA	-	-	Des-25	150.000	150.000
41	KAFE AINI	-	-	Des-25	250.000	250.000
42	MIE GACOAN	-	-	Des-25	70.386.702	70.386.702
43	MIE PANGSIT ASENG	-	-	Des-25	150.000	150.000

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
44	MIXUE ICE CREAM	-	-	Des-25	410.000	410.000
45	MOMOYO ICE CREAM	-	-		-	-
46	NADYNE CAFE	-	-	Des-25	864.000	864.000
47	RM CAP GO CAN	-	-	Des-25	100.000	100.000
48	RM GAOK	-	-	Des-25	600.000	600.000
49	RM MIE ACEH CITA RASA I	-	-	Des-25	150.000	150.000
50	RM SEDERHANA	-	-	Des-25	600.000	600.000
51	RM SELERA KITA	-	-	Feb-25	200.000	2.000.000
				Mar-25	200.000	
				Apr-25	200.000	
				Mei-25	200.000	
				Jun-25	200.000	
				Jul-25	200.000	
				Sep-25	200.000	
				Okt-25	200.000	
				Nov-25	200.000	
				Des-25	200.000	
52	RM SOTO NIRWANA	-	-	Des-25	150.000	150.000,00
53	RM WARUNG STEAK	-	-	Des-25	150.000	150.000,00
54	S&G CAFE	-	-	Des-25	350.000	350.000,00
55	SS FRIED CHICKEN	-	-	Des-25	4.888.000	4.888.000,00
56	STRONG CAFE BILYARD	-	-	Des-25	1.000.000	1.000.000,00
57	TERAS ATOK	-	-	Des-25	400.000	400.000,00
58	TITIK TUJU	-	-	Agu-25	750.000	3.750.000,00
				Sep-25	750.000	
				Okt-25	750.000	
				Nov-25	750.000	
				Des-25	750.000	
59	WARKOP AGAM CABANG MEDAN	-	-	Jul-25	1.974.065	11.699.775,00
				Agu-25	2.011.525	
				Sep-25	1.886.060	
				Okt-25	1.936.050	
				Nov-25	1.891.525	

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
				Des-25	2.000.550	
60	WBF (WARUNG BUK FENNY)	-	-	Des-25	300.000	300.000,00
61	TOKO KOPI SOEAKA	-	-	Nov-25	4.138.100	9.040.150,00
				Des-25	4.902.050	
	TOTAL	26.482.242,00	22.703.142,00		155.885.825,00	159.664.925,00

LAMPIRAN 9

PIUTANG PBJT - PERHOTELAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
1	2	3	4	5	7	8=3-4+7
1	Hotel Bengawan	2.100.000,00	-	Des-25	560.000,00	2.660.000,00
2	Hayani	900.000,00	-	2016	-	900.000,00
3	Ananda	241.481,00	-	2016	-	241.481,00
4	Wisma Al Karim	7.100.000,00	-	2016	-	7.100.000,00
5	Penginapan Azizi	250.000,00	-	2016	-	250.000,00
6	Hotel Tresya	8.000.000,00	6.000.000	Okt-25	2.000.000,00	10.000.000,00
				Nov-25	2.500.000,00	
				Des-25	3.500.000,00	
7	Hotel Suranta	3.986.000,00	3.386.000	Des-25	3.569.000,00	4.169.000,00
8	Hotel Assyifa	1.500.000,00	-	2018	-	1.500.000,00
9	Hotel Malahayati	350.000,00	300.000	Des-25	250.000,00	300.000,00
10	Hotel Wisata	500.000,00	250.000	Des-25	350.000,00	600.000,00
11	Hotel Asahan	2.710.000,00	310.000		-	2.400.000,00
12	Hotel Jaya	150.000,00	-	2018	-	150.000,00
13	Grand Singgie Hotel	48.884.000,00	48.884.000	Des-25	35.817.000,00	35.817.000,00
14	KM. 7 Hotel	930.000,00	930.000		-	-
15	MUSSAFA HOTEL	0,00	-	Des-25	400.000	400.000,00
16	PENGINAPAN DSITINJAK	0,00	-	Des-25	100.000	100.000,00
	TOTAL	77.601.481,00	60.060.000,00		49.046.000,00	66.587.481,00

LAMPIRAN 10

PIUTANG PBJT - PARKIR

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
1	2	3	4	5	7	8=3-4+7
1	Zulfikar Hasril	800.000	0,00	2015	0,00	800.000,00
2	Kerpai Singh	30.500.000	0,00	2014	0,00	30.500.000,00
3	Parkir Family	0,00	0,00		0,00	-
4	PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk	0,00	0,00	Okt-25	1.050.000,00	3.150.000,00
				Nov-25	1.050.000,00	
				Des-25	1.050.000,00	
5	AGUSMEN SUFRANDY SITORUS	0,00	0,00	Des-25	100.000,00	100.000,00
6	BANK BCA CABANG TANJUNGBALAI	0,00	0,00	Des-25	250.000,00	250.000,00
7	BANK BSI TANJUNGBALAI	0,00	0,00	Des-25	250.000,00	250.000,00
8	BANK SUMUT	0,00	0,00	Des-25	200.000,00	200.000,00
9	DOORSMEER FAMILY	0,00	0,00	Des-25	75.000,00	75.000,00
10	DOORSMEER PELANGI	0,00	0,00	Des-25	160.000,00	160.000,00
11	YONANTA KUSUMA	0,00	0,00	Mar-25	350.000	14.350.000,00
				Apr-25	350.000	
				Mei-25	350.000	
				Jun-25	4.550.000,00	
				Jul-25	350.000	
				Nov-25	4.200.000,00	
				Des-25	4.200.000,00	
12	BANK BRI CABANG TANJUNGBALAI	0,00	0,00	Des-25	1.050.000,00	1.050.000,00
13	PARKIR MIE GACUAN	0,00	0,00	Des-25	1.500.000,00	1.500.000,00
14	PARKIR PT KAI	0,00	0,00	Des-25	1.228.182,00	1.228.182,00
15	UD YENNI	0,00	0,00	Des-25	150.000,00	150.000,00
16	PT ASTHA BERIBIS GRAFIKA	0,00	0,00	Nov-25	350.000,00	3.150.000,00
17				Des-25	2.800.000,00	
	TOTAL	31.300.000,00	-		25.613.182,00	56.913.182,00

LAMPIRAN 11

PIUTANG PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
1	2	3	4	5	7	8=3-4+7
1	ARTERI GARDEN SWIMMING POOL - KOLAM			Des-25	500.000,00	500.000,00
3	GALAXY HALL			Agu-24	7.274.000	7.274.000,00
				Sep-24	9.332.000	9.332.000,00
				Okt-24	12.178.000	12.178.000,00
				Nov-24	17.421.000	17.421.000,00
				Des-24	10.875.000	10.875.000,00
				Jan-25	12.603.000	12.603.000,00
				Mar-25	9.745.000	9.745.000,00
				Apr-25	12.654.000	12.654.000,00
				Mei-25	11.751.000	11.751.000,00
				Jun-25	12.840.000	12.840.000,00
				Jul-25	8.561.000	8.561.000,00
4	LUCKY GYM			Des-25	500.000	500.000,00
				Nov-25	7.500.000	7.500.000,00
				Des-25	11.250.000	11.250.000,00
6	NADYNE GYM			Des-25	1.685.000	1.685.000,00
7	NEGO LAND WATERPARK			Apr-25	500.000	500.000,00
8	PLANET KTV			Agu-24	10.154.000	10.154.000,00
				Sep-24	10.791.000	10.791.000,00
				Okt-24	8.941.000	8.941.000,00
				Nov-24	7.216.000	7.216.000,00
				Des-24	11.492.000	11.492.000,00
				Jan-25	9.850.000	9.850.000,00
				Mar-25	8.296.000	8.296.000,00
				Apr-25	10.220.000	10.220.000,00
				Mei-25	9.935.000	9.935.000,00

NO	NAMA WAJIB PAJAK	SALDO 2024 (Rp)	PEMBAYARAN DI TAHUN 2025	PENAMBAHAN PIUTANG TA 2025		SALDO 2025 (Rp)
				Masa Pajak (Tanggal SPTPD)	Jumlah Tagihan	
1	2	3	4	5	7	8=3-4+7
				Jun-25	10.846.000	10.846.000,00
				Jul-25	13.693.000	13.693.000,00
	TOTAL	-	-		258.603.000,00	258.603.000,00

LAMPIRAN 12

PIUTANG HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN

PER 31 DESEMBER 2025

Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan :	153.645.340,00
Terdiri dari :	
Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	92.894.000,00
Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	43.296.340,00
Piutang Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	17.455.000,00
	<u>153.645.340,00</u>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Hasil Penjualan Tanah

PER 31 DESEMBER 2025

NO	KELURAHAN	NAMA	NOMOR PERSIL	LUAS TANAH	SALDO 2024	PEMBAYARAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
1	P. Simardan	Surya darma	13	175	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
2	Semula Jadi	Ahmad	13	101	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00
3	Semula Jadi	Amran Marpaung	39	35	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Tanjungbalai kota I	Idham	7	82	3.813.000,00	0,00	0,00	3.813.000,00
5	Tanjungbalai kota II	Darwin	30	307	53.075.000,00	0,00	0,00	53.075.000,00
6	Tanjungbalai kota III	Amrah jafar	138	138	30.190.000,00	0,00	0,00	30.190.000,00
	JUMLAH	-	240	838	92.894.000,00	0,00	0,00	92.894.000,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan

PER 31 DESEMBER 2025

NO	PENGELOLA	SUMBER	URAIAN	TAGIHAN	SALDO 2024	PEMBAYARAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
1	Dinas Perukim	Rusunawa I	Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Perukim	Rusunawa II	Tagihan Listrik	618.940,00	618.940,00	0,00	0,00	618.940,00
3	Dinas Perukim	Rusunawa III	Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Perukim	Rusunawa IV	Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perukim	Rusunawa V	Tagihan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PENGELOLA	SUMBER	URAIAN	TAGIHAN	SALDO 2024	PEMBAYARAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
6	Dinas Perukim	Rusunawa I	Tagihan Air	6.778.200,00	6.778.200,00	0,00	0,00	6.778.200,00
7	Dinas Perukim	Rusunawa II	Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perukim	Rusunawa III	Tagihan Air	21.173.200,00	21.173.200,00	0,00	0,00	21.173.200,00
9	Dinas Perukim	Rusunawa IV	Tagihan Air	6.953.200,00	6.953.200,00	0,00	0,00	6.953.200,00
10	Dinas Perukim	Rusunawa V	Tagihan Air	7.772.800,00	7.772.800,00	0,00	0,00	7.772.800,00
Jumlah :				43.296.340,00	43.296.340,00	0,00	0,00	43.296.340,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud

PER 31 DESEMBER 2025

No	PENGELOLA	KECAMATAN	KELURAHAN	TAGIHAN	SALDO 2024	PEMBAYARAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
1	Dinas Sosial	Tanjungbalai Selatan	Perwira	Raskin Madani	12.040.000,00	0,00	0,00	12.040.000,00
2	Dinas Sosial	Sei Tualang Raso	Muara Sentosa	Raskin Madani	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00
3	Dinas Sosial	Teluk Nibung	Perjuangan	Raskin Madani	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
JUMLAH :					17.455.000,00	0,00	0,00	17.455.000,00

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	PLAFOND DANA BERGULIR	PIUTANG TAHUN 2024	KUALITAS PIUTANG	PIUTANG TAK TERTAGIH	PIUTANG TAHUN 2025	KENAIKAN/ PENURUNAN
I	Penyaluran Pinjaman melalui PT. Bank Muamalat Cabang Tanjungbalai						
	- Tahun 2003	580.000.000,00	185.748.112,00	Macet	1	184.298.112,00	1.450.000,00
	- Tahun 2004	988.000.000,00	367.881.774,00	Macet	1	363.711.777,00	4.169.997,00
	- Tahun 2005	500.000.000,00	259.445.043,00	Macet	1	254.863.543,00	4.581.500,00
	- Tahun 2006	1.000.000.000,00	426.631.483,00	Macet	1	420.431.483,00	6.200.000,00
Jumlah		3.068.000.000,00	1.239.706.412,00		1	1.223.304.915,00	16.401.497,00
II	Penyaluran Pinjaman melalui PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai						
	- Tahun 2007	1.000.000.000,00	212.686.362,00	Macet	1	209.864.529,00	2.821.833,00
	- Tahun 2008	1.000.000.000,00	269.333.411,00	Macet	1	261.762.856,00	7.570.555,00
	- Tahun 2009	1.000.000.000,00	329.649.667,00	Macet	1	321.774.667,00	7.875.000,00
	- Tahun 2010	1.000.000.000,00	260.554.666,00	Macet	1	255.099.666,00	5.455.000,00
	- Tahun 2011	1.500.000.000,00	545.472.582,00	Macet	1	528.343.416,00	17.129.166,00
	- Tahun 2012	1.500.000.000,00	468.094.417,00	Macet	1	429.506.917,00	38.587.500,00
	- Tahun 2013	1.500.000.000,00	330.579.589,00	Macet	1	305.440.923,00	25.138.666,00
Jumlah		8.500.000.000,00	2.416.370.694,00		1	2.311.792.974,00	104.577.720,00
JUMLAH (I+II)		11.568.000.000,00	3.656.077.106,00			3.535.097.889,00	120.979.217,00

PIUTANG PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

Rincian Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Nilai Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Telah Dilunasi dengan Penyetoran Ke Kas Daerah

No	SKPD	Paket Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Ketidaksesuaian Pekerjaan (Rp)	Penyetoran ke Kas Daerah (Rp)	Sisa (Rp)	No Bukti Setoran	Tanggal Setoran
1	Dinas PUTR	Peningkatan Rekonstruksi Jalan Gaharu	050/1164/SPK/PJ-PUTR/APBD/2025 tanggal 21 Juli 2025	1.730.449.500,00	145.561.265,77	145.561.265,77	0,00	b409400079	19 Mei 2026
2	Dinas PUTR	Rehabilitasi Jalan Sipori-Pori Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung	050/1386/SPP/PJ-PUTR/APBD/2025 tanggal 29 Agustus 2025	985.633.000,00	66.076.183,61	66.076.183,61	0,00	b409400078	19 Mei 2026
3	Dinas PUTR	Rehabilitasi Jalan Anwar Idris Kecamatan Datuk Bandar	050/1166/SPP/PJ-PUTR/APBD/2025 tanggal 21 Juli 2025	1.030.200.000,00	32.083.671,07	32.083.671,07	0,00	b409400077	19 Mei 2026
4	Dinas PUTR	Pembangunan Jalan H.M Nur Ujung Menuju TPA Kecamatan Datuk Bandar	050/1168/SPP/PJ-PUTR/APBD/2025 tanggal 21 Juli 2025	2.967.665.000,00	3.498.103,13	3.498.103,13	0,00	b409400080	19 Mei 2026
5	Dinas PUTR	Rehabilitasi Jalan Bougenvil Lk. I Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur	050/1864/SPK/PJ-PUTR/P.APBD/2025 tanggal 1 Desember 2025	297.052.900,00	61.543.228,21	61.543.228,21	0,00	b196500019	8 Mei 2026
6	Dinas Perkim	Peningkatan Jalan di Jalan Amaliyah Kelurahan Pantai Johor	000.3.2/04/PPK/4023/PERKIM/2025 tanggal 20 November 2025	199.320.000,00	7.797.830,30	7.797.830,30	0,00	b409400095 b409400042	13 Mei 2026 20 Mei 2026
7	Dinas Perkim	Lanjutan Pembangunan Jalan Anwar Idris Gg. Suka Damai	000.3.2/04/PPK/4011/PERKIM/2025 tanggal 24 Oktober 2025	199.650.000,00	5.704.991,88	5.704.991,88	0,00	2504681125	12 Mei 2026
8	Dinas Perkim	Peningkatan Jalan di Jalan Anwar Idris Gg. Jati Lk. VII Kel. Gading	000.3.2/04/PPK/4024/PERKIM/2025 tanggal 16 Oktober 2025	99.700.000,00	3.218.851,48	3.218.851,48	0,00	2504681116	12 Mei 2026
9	Dinas Perkim	Rehab Jalan Setia Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kec. TBU	000.3.2/04/PPK/4046/PERKIM/2025 tanggal 20 November 2025	199.528.000,00	2.821.377,80	2.821.377,80	0,00	2504681126	12 Mei 2026
Jumlah				7.709.198.400,00	328.305.503,25	328.305.503,25	0,00		

Rincian Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan Nilai Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Telah Dilunasi dengan Penyetoran Ke Kas Daerah

No	SKPD	Paket Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Ketidaksesuaian Pekerjaan (Rp)	Penyetoran ke Kas Daerah (Rp)	Sisa (Rp)	No Bukti Setoran	Tanggal Setoran
1	Dinas Pendidikan	Belanja Revitalisasi SDN 135563	050/1085/SP/DISDIK-SEKRT/2025 tanggal 14 Juli 2025	1.482.849.000,00	4.748.187,57	4.748.187,57	0,00	2504685271	6 Mei 2026
2	Dinas Pendidikan	Belanja Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri 138435	050/1505/SP/DISDIK-SEKRT/2025 tanggal 19 Agustus 2025	444.660.958,00	1.955.551,28	1.955.551,28	0,00	b409400065	6 Mei 2026

No	SKPD	Paket Pekerjaan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Ketidaksesuaian Pekerjaan (Rp)	Penyetoran ke Kas Daerah (Rp)	Sisa (Rp)	No Bukti Setoran	Tanggal Setoran
3	Dinas Pendidikan	Belanja Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 132411	050/1222/SPK/DISDIK-SEKRT/2025z tanggal 28 Juli 2025	149.640.000,00	1.075.352,86	1.075.352,86	0,00	b409400067	6 Mei 2026
4	Dinas Pendidikan	Belanja Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 10	050/1133/SPK/DISDIK-SEKRT/2025 tanggal 17 Juli 2025	149.750.000,00	1.139.755,18	1.139.755,18	0,00	b409400008	11 Mei 2026
5	Dinas Pendidikan	Belanja Pembangunan Toilet (Jamban) SMPN 8	050/1319/SPK/DISDIK-SEKRT/2025 tanggal 7 Agustus 2025	74.780.909,94	773.107,87	773.107,87	0,00	b409400066	6 Mei 2026
6	Dinas PUTR	Pembangunan Balairung Pedagang di Lokasi Eks Damkar	050/1689/SPK/PBG-PUTR/P.APBD/2025 tanggal 14 November 2025	397.500.000,00	797.760,48	797.760,48	0,00	2504681117	12 Mei 2026
Jumlah				2.699.180.867,94	10.489.715,24	10.489.715,24	0,00		

TOTAL KESELURUHAN				10.408.379.267,94	338.795.218,49	338.795.218,49	0,00		

PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN

PER 31 DESEMBER 2025

Piutang Pendapatan dari Pengembalian :		299.970.557,00
Terdiri dari :		
Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21		2.578.497,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		127.500,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		297.264.560,00
		299.970.557,00

Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terdapat double pemotongan pajak yang belum dipulihkan dan dicatat sebagai piutang pajak	2.578.497,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	Keterangan	Nominal (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengembalian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	127.500,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum

PER 31 DESEMBER 2025

NO	PENGELOLA	SUMBER	URAIAN	TAGIHAN	SALDO 2024	PEMBAYARAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa I	Tagihan Listrik	79.354.879,00	79.354.879,00	0,00	0,00	79.354.879,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa II	Tagihan Listrik	58.877.570,00	58.877.570,00	0,00	0,00	58.877.570,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa III	Tagihan Listrik	60.214.086,00	60.214.086,00	0,00	0,00	60.214.086,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa IV	Tagihan Listrik	41.554.800,00	41.554.800,00	0,00	0,00	41.554.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa V	Tagihan Listrik	2.371.640,00	2.371.640,00	0,00	0,00	2.371.640,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa I	Tagihan Air	19.020.270,00	19.020.270,00	0,00	0,00	19.020.270,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa II	Tagihan Air	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa III	Tagihan Air	14.086.755,00	14.086.755,00	0,00	0,00	14.086.755,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa IV	Tagihan Air	16.708.160,00	16.708.160,00	0,00	0,00	16.708.160,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rusunawa V	Tagihan Air	5.076.400,00	5.076.400,00	0,00	0,00	5.076.400,00
Jumlah :				297.264.560,00	297.264.560,00	0,00	0,00	297.264.560,00

LAMPIRAN 13

PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

No	URAIAN	Alokasi tahun 2025	Realisasi bagi hasil 2025	Jumlah Kurang salur 2025
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.088.510,00	-	22.088.510,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.485.888,00	-	23.485.888,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.175.031.832,00	500.000.000,00	17.675.031.832,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.951.646.848,00	10.951.646.848,00	-
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.010.180.997,00		1.010.180.997,00
JUMLAH		30.182.434.075,00		18.730.787.227,00

No	URAIAN	Alokasi tahun 2024	Realisasi bagi hasil 2024	Jumlah Kurang salur 2024
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.148.446.778,00	5.148.446.778,00	-
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.697.197.900,00	3.697.197.900,00	-
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.214.850.598,00	16.214.850.598,00	-
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	308.404.606,00	308.404.606,00	-
JUMLAH		25.368.899.882,00	25.368.899.882,00	-

No	URAIAN	Alokasi tahun 2023	Realisasi bagi hasil 20203	Jumlah Kurang salur 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	156.015.442,00	156.015.442,00	-
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	124.217.304,00	124.217.304,00	-
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.892.386.302,00	2.892.386.302,00	-
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	10.615.419,00	10.615.419,00	-
JUMLAH		3.183.234.467,00	3.183.234.467,00	-

LAMPIRAN 14

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

1. Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	Keterangan
				LANCAR 0.50%	KURANG LANCAR 10%	RAGU-RAGU 50%	MACET 100%		
	PAJAK REKLAME								
1	PT Indofood Sukses Makmur	2022	1.100.000			550.000,00		550.000,00	
2	PT BNI Cabang Tanjungbalai	2022	3.430.000			1.715.000,00		1.715.000,00	
JUMLAH			4.530.000,00	-	-	2.265.000,00	-	2.265.000,00	

2. Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	Keterangan
				LANCAR 0.50%	KURANG LANCAR 10%	RAGU-RAGU 50%	MACET 100%		
	Pajak Air Bawah Tanah								
1	PT. GUNUNG SALJU	2025	2.500.000,00	12.500,00				12.500,00	
2	PT. SUMATRA BARU	2024	800.000,00		80.000,00			80.000,00	
		2025	800.000,00	4.000,00				4.000,00	
3	PT. IJS SYNDICAAT	2022	2.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
		2023	975.000,00	-	97.500,00			97.500,00	
		2025	1.066.000,00	5.330,00				5.330,00	
4	PT ASA	2025	2.222.000,00	11.110,00				11.110,00	
5	KILANG MINYAK PELITA	2025	1.813.000,00	9.065,00				9.065,00	
6	CV PUTRA HARAPAN	2025	300.000,00	1.500,00				1.500,00	
7	CV INDAH SARI	2025	1.500.000,00	7.500,00				7.500,00	
8	AGUSMEN SUFRANDY SITORUS	2025	800.000,00	4.000,00				4.000,00	
9	NEGOLAND WATERPARK	2025	300.000,00	1.500,00				1.500,00	
10	PT HALINDO BERJAYA MANDIRI	2025	3.079.000,00	15.395,00				15.395,00	
JUMLAH			18.155.000,00	71.900,00	177.500,00	1.000.000,00	-	1.321.300,00	

3. Penyisihan Piutang PBBP2

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	Keterangan
				LANCAR 0,50%	KURANG LANCAR 10%	RAGU-RAGU 50%	MACET 100%		
1	Pajak Bumi dan Bagunan								
2	Pajak Bumi dan Bagunan	1996	1.683.696,00				1.683.696,00	1.683.696,00	
3	Pajak Bumi dan Bagunan	1997	175.609.226,00				175.609.226,00	175.609.226,00	
4	Pajak Bumi dan Bagunan	1998	116.915.751,00				116.915.751,00	116.915.751,00	
5	Pajak Bumi dan Bagunan	1999	123.002.539,00				123.002.539,00	123.002.539,00	
6	Pajak Bumi dan Bagunan	2000	273.387.309,00				273.387.309,00	273.387.309,00	
7	Pajak Bumi dan Bagunan	2001	543.436.132,00				543.436.132,00	543.436.132,00	
8	Pajak Bumi dan Bagunan	2002	259.855.280,00				259.855.280,00	259.855.280,00	
9	Pajak Bumi dan Bagunan	2003	529.076.923,00				529.076.923,00	529.076.923,00	
10	Pajak Bumi dan Bagunan	2004	290.738.461,00				290.738.461,00	290.738.461,00	
11	Pajak Bumi dan Bagunan	2005	430.325.305,00				430.325.305,00	430.325.305,00	
12	Pajak Bumi dan Bagunan	2006	327.725.246,00				327.725.246,00	327.725.246,00	
13	Pajak Bumi dan Bagunan	2007	184.363.263,00				184.363.263,00	184.363.263,00	
14	Pajak Bumi dan Bagunan	2008	890.808.403,00				890.808.403,00	890.808.403,00	
15	Pajak Bumi dan Bagunan	2009	639.505.090,00				639.505.090,00	639.505.090,00	
16	Pajak Bumi dan Bagunan	2010	646.429.184,00				646.429.184,00	646.429.184,00	
17	Pajak Bumi dan Bagunan	2011	581.490.089,00				581.490.089,00	581.490.089,00	
18	Pajak Bumi dan Bagunan	2012	675.566.907,00				675.566.907,00	675.566.907,00	
19	Pajak Bumi dan Bagunan	2013	954.659.948,00				954.659.948,00	954.659.948,00	
20	Pajak Bumi dan Bagunan	2014	1.194.862.365,00				1.194.862.365,00	1.194.862.365,00	
21	Pajak Bumi dan Bagunan	2015	1.305.884.834,00				1.305.884.834,00	1.305.884.834,00	
22	Pajak Bumi dan Bagunan	2016	1.315.392.287,00				1.315.392.287,00	1.315.392.287,00	
23	Pajak Bumi dan Bagunan	2017	1.431.575.189,00				1.431.575.189,00	1.431.575.189,00	
24	Pajak Bumi dan Bagunan	2018	1.658.093.809,00				1.658.093.809,00	1.658.093.809,00	
25	Pajak Bumi dan Bagunan	2019	1.959.091.327,00				1.959.091.327,00	1.959.091.327,00	
26	Pajak Bumi dan Bagunan	2020	2.418.762.216,00				2.418.762.216,00	2.418.762.216,00	
27	Pajak Bumi dan Bagunan	2021	2.259.816.806,00			1.129.908.403,00		1.129.908.403,00	
28	Pajak Bumi dan Bagunan	2022	2.364.459.397,00			1.182.229.698,50		1.182.229.698,50	
29	Pajak Bumi dan Bagunan	2023	2.625.914.437,00			1.312.957.218,50		1.312.957.218,50	
30	Pajak Bumi dan Bagunan	2024	3.646.881.187,00		364.688.118,70			364.688.118,70	
31	Pajak Bumi dan Bagunan	2025	3.849.064.192,00	19.245.320,96				19.245.320,96	
JUMLAH			33.674.376.798,00	19.245.320,96	364.688.118,70	3.625.095.320,00	18.928.240.779,00	22.937.269.538,66	

4. Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru

NO	KECAMATAN KELURAHAN	NAMA	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
					LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
					0.50%	10%	50%	100%	
	BPHTB-Pemberian Hak Baru								
A	Datuk Bandar							-	-
1	Sijambi	Rudiyanto	2010	1.187.142,00				1.187.142,00	1.187.142,00
2	Sijambi	Fatimah Sari Nasution	2010	2.040.000,00				2.040.000,00	2.040.000,00
3	Sijambi	Hisar Marhusip	2010	2.040.000,00				2.040.000,00	2.040.000,00
4	Sijambi	Ujang Rusli	2010	2.040.000,00				2.040.000,00	2.040.000,00
5	Sijambi	Laju Sinaga	2010	2.040.000,00				2.040.000,00	2.040.000,00
6	Sijambi	Ayu Andania	2010	2.040.000,00				2.040.000,00	2.040.000,00
7	Sijambi	Elly Kasmira	2010	896.000,00				896.000,00	896.000,00
8	Sijambi	Andriano Silaen	2010	2.176.000,00				2.176.000,00	2.176.000,00
9	Sijambi	M. Daulad	2010	740.214,00				740.214,00	740.214,00
10	Sijambi	Sahat Maruli Butar-Butar	2010	2.040.000,00				2.040.000,00	2.040.000,00
11	Sijambi	Herlina Siregar	2010	682.515,00				682.515,00	682.515,00
12	Gading	Bambang Syahputra	2010	276.640,00				276.640,00	276.640,00
13	Gading	Bujurkin Br. Barus	2010	800.400,00				800.400,00	800.400,00
14	Gading	Adlin Lubis	2010	878.700,00				878.700,00	878.700,00
15	Gading	Wan Rusli Manurung	2010	227.940,00				227.940,00	227.940,00
16	Pahang	Liben Sirait	2010	506.880,00				506.880,00	506.880,00
17	Pahang	Zulfinah Tanjung	2010	610.740,00				610.740,00	610.740,00
18	Pahang	Abdul Hakim Marpaung	2010	4.007.214,00				4.007.214,00	4.007.214,00
19	Sirantau	Suharni	2010	363.000,00				363.000,00	363.000,00
								-	
B	Datuk Bandar Timur							-	
1	Selat Lancang	Agustina	2010	4.864.170,00				4.864.170,00	4.864.170,00
2	Selat Tanjung Medan	Khoiruddin	2010	1.696.860,00				1.696.860,00	1.696.860,00
3	Selat Tanjung Medan	Ridwan	2010	1.192.464,00				1.192.464,00	1.192.464,00
4	Pulau Simardan	Syarifah Ainun	2010	202.710,00				202.710,00	202.710,00
								-	
C	Tanjungbalai Selatan							-	
1	Indra Sakti	Daniel Boi P	2010	2.829.312,00				2.829.312,00	2.829.312,00
2	Indra Sakti	Dokter Paraboy	2010	6.932.046,00				6.932.046,00	6.932.046,00

3	Indra Sakti	Djoil Tanarion	2010	10.890.563,00				10.890.563,00	10.890.563,00
4	Indra Sakti	Abdul Aziz	2010	7.307.820,00				7.307.820,00	7.307.820,00
5	Karya	Lie Su Hwa	2010	4.852.895,00				4.852.895,00	4.852.895,00
								-	
D	Tanjungbalai Utara							-	
1	Tanjungbalai Kota IV	Yan Dari	2010	187.110,00				187.110,00	187.110,00
2	Tanjungbalai Kota IV	Daniat	2010	4.939.850,00				4.939.850,00	4.939.850,00
3	Matahalasan	Nani Herlina Situmorang	2010	966.394,00				966.394,00	966.394,00
4	Matahalasan	Siti Hafizon/Alm. Hamda Char	2010	696.768,00				696.768,00	696.768,00
								-	
E	Sei Tualang Raso							-	
1	Keramah Kubah	Neneng Khadijah	2010	1.635.684,00				1.635.684,00	1.635.684,00
								-	
F	Teluk Nibung							-	
1	Sei Merbau	Rudy Suharjo	2010	1.574.400,00				1.574.400,00	1.574.400,00
2	Perjuangan	Yopi Susanto	2010	280.728,00				280.728,00	280.728,00
3	Perjuangan	Buchori Ginting Suka	2010	65.520,00				65.520,00	65.520,00
JUMLAH				76.708.679,00	-	-	-	76.708.679,00	76.708.679,00

5. Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	Keterangan
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET		
				0-1	10%	50%	100%		
				0-1	>1-2	>2-5	>5		
	Pajak Barang dan Jasa Atas Jasa Makanan dan Minuman (Restoran)								
1	Taufiq	2015	225.000				225.000,00	225.000,00	
		2025	250.000,00	1.250,00				1.250,00	
2	B. Sihaloho	2016	40.000,00				40.000,00	40.000,00	
3	Tina	2015	90.000				90.000,00	90.000,00	
4	Kang Le	2015	150.000				150.000	150.000,00	
5	Razi Kesuma	2015	60.000				60.000	60.000,00	
6	Hj. Delima	2015	60.000				60.000	60.000,00	
7	Tanth	2015	100.000				100.000	100.000,00	
8	Haidir	2015	424.000				424.000	424.000,00	
9	Amiruddin	2015	75.000				75.000	75.000,00	

10	Ayen	2015	440.000				440.000	440.000,00	
11	Aulia	2015	50.000				50.000	50.000,00	
12	Syahroni	2015	175.000				175.000	175.000,00	
13	Azhar	2015	840.100				840.100	840.100,00	
14	Tuminah	2015	210.000				210.000	210.000,00	
15	Zakir Zein	2015	60.000				60.000	60.000,00	
16	T. Pancong	2015	20.000				20.000	20.000,00	
17	K. Zufa	2015	20.000				20.000	20.000,00	
18	Ame	2015	40.000				40.000	40.000,00	
19	Seri	2015	10.000				10.000	10.000,00	
20	Halimah	2015	10.000				10.000	10.000,00	
21	Riduan Mrp	2015	10.000				10.000	10.000,00	
22	Izah	2015	70.000				70.000	70.000,00	
23	Bengawan	2024	200.000		20.000,00			20.000,00	
24	Azhar/RM. Azhar	2025	20.634.792	103.173,96				103.173,96	
25	PT. Singgie Rekreasi Jaya	2025	8.570.000	42.850,00				42.850,00	
26	RM. Holat	2025	150.000,00	750,00				750,00	
27	D'Mango	2024	1.000.000,00		100.000,00			100.000,00	
		2025	300.000,00	1.500,00				1.500,00	
28	RM. Haidir	2023	400.000,00	-		200.000,00		200.000,00	
		2025	1.200.000,00	6.000,00				6.000,00	
29	Resto Tresya	2025	1.500.000,00	7.500,00				7.500,00	
30	RM. Hasan	2025	2.000.000,00	10.000,00				10.000,00	
31	Point Coffee	2025	8.542.406	42.712,03				42.712,03	
32	Arteri Garden Swimming Pool	2025	1.500.000,00	7.500,00				7.500,00	
33	Ayam Bakar Maksei	2025	1.000.000,00	5.000,00				5.000,00	
34	Ayam Penyet Pak De	2025	300.000,00	1.500,00				1.500,00	
35	Ayam Presto Cabe Ijo	2025	800.000,00	4.000,00				4.000,00	
36	Bakso Bengawan Solol	2025	150.000,00	750,00				750,00	
37	Bakso Mekar Sari	2025	150.000,00	750,00				750,00	
38	Bakso Rahayu	2025	150.000,00	750,00				750,00	
39	Captain Fried Chicken	2025	300.000,00	1.500,00				1.500,00	
40	Janji Jiwa	2025	150.000,00	750,00				750,00	
41	Kafe Aini	2025	250.000,00	1.250,00				1.250,00	
42	Mie Gacoan	2025	70.386.702,00	351.933,51				351.933,51	

43	Mie Pangsit Aseng	2025	150.000,00	750,00			750,00	
44	Mixue Ice Cream	2025	410.000,00	2.050,00			2.050,00	
45	Momoyo Ice Cream	2025	-	-			-	
46	Nadyne Cafe	2025	864.000,00	4.320,00			4.320,00	
47	RM. Cap Go Can	2025	100.000,00	500,00			500,00	
48	RM. Gaok	2025	600.000,00	3.000,00			3.000,00	
49	RM. Mie Aceh Cita Rasa I	2025	150.000,00	750,00			750,00	
50	RM. Sederhana	2025	600.000,00	3.000,00			3.000,00	
51	RM. Selera Kita	2025	2.000.000,00	10.000,00			10.000,00	
52	RM SOTO NIRWANA	2025	150.000,00	750,00			750,00	
53	RM WARUNG STEAK	2025	150.000,00	750,00			750,00	
54	S&G CAFE	2025	350.000,00	1.750,00			1.750,00	
55	SS FRIED CHICKEN	2025	4.888.000,00	24.440,00			24.440,00	
56	STRONG CAFE BILYARD	2025	1.000.000,00	5.000,00			5.000,00	
57	TERAS ATOK	2025	400.000,00	2.000,00			2.000,00	
58	TITIK TUJU	2025	3.750.000,00	18.750,00			18.750,00	
59	WARKOP AGAM CABANG MEDAN	2025	11.699.775	58.498,88			58.498,88	
60	WBF (WARUNG BUK FENNY)	2025	300.000,00	1.500,00			1.500,00	
61	TOKO KOPI SOEAKA	2025	9.040.150	45.200,75			45.200,75	
							-	
JUMLAH			159.664.925,00	774.429,13	120.000,00	200.000,00	3.179.100,00	4.273.529,13

6. Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel

[illegible]

5	Penginapan Azizi	2016	250.000				250.000	250.000,00	
6	Hotel Tresya	2018	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	
		2025	8.000.000,00	40.000,00				40.000,00	
7	Hotel Suranta	2018	600.000,00				600.000,00	600.000,00	
		2025	3.569.000,00	17.845,00				17.845,00	
8	Hotel Assyifa	2018	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00	
9	Hotel Malahayati	2024	50.000,00		5.000,00			5.000,00	
		2025	250.000,00	1.250,00				1.250,00	
10	Hotel Wisata	2018	250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		2025	350.000,00	1.750,00				1.750,00	
11	Hotel Asahan	2018	2.400.000,00				2.400.000,00	2.400.000,00	
12	Hotel Jaya	2018	150.000,00				150.000,00	150.000,00	
13	Grand Singgie Hotel	2025	35.817.000,00	179.085,00				179.085,00	
14	Musyaffa Hotel	2025	400.000,00	2.000,00				2.000,00	
15	Penginapan D Sitinjak	2025	100.000,00	500,00				500,00	
JUMLAH			66.587.481,00	245.230,00	5.000,00	-	17.491.281,00	17.741.511,00	

7. Penyisihan Piutang Pajak Parkir

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	Keterangan
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET		
				0.50%	10%	50%	100%		
	Pajak Barang dan Jasa Atas Jasa Parkir								
1	Zulfikar Hasril	2015	800.000				800.000,00	800.000,00	
2	Kerpai Singh	2014	30.500.000				30.500.000,00	30.500.000,00	
3	PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk	2025	3.150.000,00	15.750,00				15.750,00	
4	AGUSMEN SUFRANDY SITORUS	2025	100.000,00	500,00				500,00	

5	BANK BCA CABANG TANJUNGBALAI	2025	250.000,00	1.250,00				1.250,00	
6	BANK BSI TANJUNGBALAI	2025	250.000,00	1.250,00				1.250,00	
7	BANK SUMUT	2025	200.000,00	1.000,00				1.000,00	
8	DOORSMEER FAMILY	2025	75.000,00	375,00				375,00	
9	DOORSMEER PELANGI	2025	160.000,00	800,00				800,00	
10	YONANTA KUSUMA	2025	14.350.000,00	71.750,00				71.750,00	
11	BANK BRI CABANG TANJUNGBALAI	2025	1.050.000,00	5.250,00				5.250,00	
12	PARKIR MIE GACOAN	2025	1.500.000,00	7.500,00				7.500,00	
13	PARKIR PT KAI	2025	1.228.182,00	6.140,91				6.140,91	
14	UD YENNI	2025	150.000,00	750,00				750,00	
15	PT ASTHA BERIBIS GRAFIKA	2025	3.150.000,00	15.750,00				15.750,00	
JUMLAH			56.913.182,00	128.065,91	-	-	31.300.000,00	31.428.065,91	

8. Penyisihan PBJT Hiburan

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN	Keterangan
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET		
				0.50% 0-1	10% >1-2	50% >2-5	100% >5		
A	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan			-				-	
1	LUCKY GYM	2025	19.250.000,00	96.250,00				96.250,00	
2	NADYNE GYM	2025	1.685.000,00	8.425,00				8.425,00	
	JUMLAH		20.935.000,00	104.675,00	-	-	-	104.675,00	
								-	
B	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang							-	
1	ARTERI GARDEN SWIMMING POOL - KOLAM	2025	500.000,00	2.500,00				2.500,00	
2	NEGO LAND WATERPARK	2025	500.000,00	2.500,00				2.500,00	
	JUMLAH		1.000.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	
								-	
C	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa							-	
5	GALAXY HALL	2024	46.205.000,00		4.620.500,00			4.620.500,00	
		2025	79.029.000,00	395.145,00				395.145,00	
6	PLANET KTV	2024	37.102.000,00		3.710.200,00			3.710.200,00	
		2025	74.332.000,00	371.660,00				371.660,00	
	JUMLAH		111.434.000,00	766.805,00	8.330.700,00	-	-	9.097.505,00	
	TOTAL		133.369.000,00	876.480,00	8.330.700,00	-	-	9.316.855,00	

[illegible]

PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI

PER 31 DESEMBER 2025

1. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	Retribusi Pelayanan Persampahan							
1	Dinas Lingkungan Hidup	2025	15.640.000,00	78.200,00				78.200,00
	JUMLAH		15.640.000,00	78.200,00	-	-	-	78.200,00

2. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)							
1	Pasar Bengawan	2020	30.201.000,00				30.201.000,00	30.201.000,00
		2025	7.762.500,00	38.812,50				38.812,50
2	Pasar Meja Babi	2019	1.467.000,00				1.467.000,00	1.467.000,00
		2025	6.917.500,00	34.587,50				34.587,50
3	Pasar Bahagia (Kios)	2020	28.651.000,00				28.651.000,00	28.651.000,00
4	Pasar Bahagia (Meja)	2019	14.687.500,00				14.687.500,00	14.687.500,00
		2025	1.201.500,00	6.007,50				6.007,50
5	Pasar Bahagia (Meja Ikan)	2019	3.494.000,00				3.494.000,00	3.494.000,00
6	Pasar Merdeka (Kios)	2020	76.870.500,00				76.870.500,00	76.870.500,00
		2025	20.310.000,00	101.550,00				101.550,00
7	Pasar Deli (kios)	2020	9.807.500,00				9.807.500,00	9.807.500,00
		2025	1.825.000,00	9.125,00				9.125,00
8	Pasar Kawat I	2020	90.177.500,00				90.177.500,00	90.177.500,00
		2025	10.987.500,00	54.937,50				54.937,50
9	Pasar Kawat II	2020	88.738.500,00				88.738.500,00	88.738.500,00

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
		2025	2.990.000,00	14.950,00				14.950,00
10	Pasar Kawat III	2020	60.637.000,00				60.637.000,00	60.637.000,00
		2025	6.387.500,00	31.937,50				31.937,50
11	Pasar Surapto (Kios Lantai I)	2020	24.435.500,00				24.435.500,00	24.435.500,00
		2025	17.800.000,00	89.000,00				89.000,00
12	Pasar Suprapto (Kios Unggas)	2020	147.000,00				147.000,00	147.000,00
13	Pasar Suprapto (Kios Permanen)	2020	3.668.000,00				3.668.000,00	3.668.000,00
14	Pasar Suprapto (Meja Daging)	2020	2.895.000,00				2.895.000,00	2.895.000,00
15	Pasar Suprapto (Meja Ikan)	2020	5.569.500,00				5.569.500,00	5.569.500,00
		2025	810.000,00	4.050,00				4.050,00
16	Pasar Suprapto (Gelaran)	2020	18.380.000,00				18.380.000,00	18.380.000,00
		2025	12.815.000,00	64.075,00				64.075,00
17	Pasar TPO	2020	541.924.000,00				541.924.000,00	541.924.000,00
18	Pasar Beringin	2020	156.232.000,00				156.232.000,00	156.232.000,00
		2025	1.975.000,00	9.875,00				9.875,00
19	Pasar Sejahtera	2020	4.701.000,00				4.701.000,00	4.701.000,00
		2025	8.233.500,00	41.167,50				41.167,50
20	Depan SMA Negeri 2 (Kios)	2025	1.992.500,00	9.962,50				9.962,50
21	Jalan Masjid (Kios)	2025	535.000,00	2.675,00				2.675,00
JUMLAH			1.265.226.000,00	512.712,50	-	-	1.162.683.500,00	1.163.196.212,50

3. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0-1 Tahun	>1-2 Tahun	>2-5 Tahun	>5 Tahun	
				0,50%	10%	50%	100%	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah							
1	RUSUNAWA I	2015	45.525.000			45.525.000,00	45.525.000,00	
		2016	38.895.000			38.895.000,00	38.895.000,00	
		2017	13.965.000			13.965.000,00	13.965.000,00	

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
		2018	22.565.000				22.565.000,00	22.565.000,00
		2019	8.735.000				8.735.000,00	8.735.000,00
		2020	1.215.000				1.215.000,00	1.215.000,00
	1	2021	15.600.000			7.800.000,00		7.800.000,00
	2	2022	21.190.000			10.595.000,00		10.595.000,00
	3	2023	17.730.000		1.773.000,00			1.773.000,00
	4	2024	33.555.000		3.355.500,00			3.355.500,00
	5	2025	41.925.000	209.625,00				209.625,00
	JUMLAH		260.900.000,00	209.625,00	5.128.500,00	18.395.000,00	130.900.000,00	154.633.125,00
	RUSUNAWA II	2015	38.520.000				38.520.000,00	38.520.000,00
		2016	42.625.000				42.625.000,00	42.625.000,00
		2017	14.740.000				14.740.000,00	14.740.000,00
		2018	19.855.000				19.855.000,00	19.855.000,00
		2019	8.755.000				8.755.000,00	8.755.000,00
		2020	2.905.000				2.905.000,00	2.905.000,00
		2021	12.545.000			6.272.500,00		6.272.500,00
		2022	22.090.000			11.045.000,00		11.045.000,00
		2023	33.935.000		3.393.500,00			3.393.500,00
		2024	35.490.000		3.549.000,00			3.549.000,00
		2025	32.545.000	162.725,00				162.725,00
	JUMLAH		264.005.000,00	162.725,00	6.942.500,00	17.317.500,00	127.400.000,00	151.822.725,00
	RUSUNAWA III	2015	52.578.000				52.578.000,00	52.578.000,00
		2016	47.488.000				47.488.000,00	47.488.000,00
		2017	25.985.000				25.985.000,00	25.985.000,00
		2018	26.176.000				26.176.000,00	26.176.000,00
		2019	20.986.000				20.986.000,00	20.986.000,00
		2020	5.063.000				5.063.000,00	5.063.000,00
		2021	40.294.000			20.147.000,00		20.147.000,00
		2022	34.008.000			17.004.000,00		17.004.000,00
		2023	41.706.000		4.170.600,00			4.170.600,00

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
		2024	42.526.000		4.252.600,00			4.252.600,00
		2025	45.346.000	226.730,00				226.730,00
	JUMLAH		382.156.000,00	226.730,00	8.423.200,00	37.151.000,00	178.276.000,00	224.076.930,00
	RUSUNAWA IV	2015	50.701.000				50.701.000,00	50.701.000,00
		2016	44.486.000				44.486.000,00	44.486.000,00
		2017	32.893.000				32.893.000,00	32.893.000,00
		2018	23.261.000				23.261.000,00	23.261.000,00
		2019	10.529.000				10.529.000,00	10.529.000,00
		2020	2.619.000				2.619.000,00	2.619.000,00
		2021	23.398.000			11.699.000,00		11.699.000,00
		2022	18.771.000			9.385.500,00		9.385.500,00
		2023	19.582.000		1.958.200,00			1.958.200,00
		2024	23.267.000		2.326.700,00			2.326.700,00
		2025	34.026.000	170.130,00				170.130,00
	JUMLAH		283.533.000,00	170.130,00	4.284.900,00	21.084.500,00	164.489.000,00	190.028.530,00
	RUSUNAWA V	2017	21.972.000				21.972.000,00	21.972.000,00
		2018	24.222.000				24.222.000,00	24.222.000,00
		2019	7.860.000				7.860.000,00	7.860.000,00
		2020	3.565.000				3.565.000,00	3.565.000,00
		2021	28.101.000			14.050.500,00		14.050.500,00
		2022	22.114.000			11.057.000,00		11.057.000,00
		2023	29.944.000		2.994.400,00			2.994.400,00
		2024	36.613.000		3.661.300,00			3.661.300,00
		2025	36.733.000	183.665,00				183.665,00
	JUMLAH		211.124.000,00	183.665,00	6.655.700,00	25.107.500,00	57.619.000,00	89.565.865,00
							-	-
							-	-
	RUSUNAWA VI	2023			-			-
		2024	15.240.000		1.524.000,00			1.524.000,00
		2025	43.680.000	218.400,00				218.400,00

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	JUMLAH		58.920.000,00	218.400,00	1.524.000,00	-	-	1.742.400,00
							-	-
TOTAL			1.460.638.000,00	1.171.275,00	32.958.800,00	119.055.500,00	658.684.000,00	811.869.575,00

1.975.143.987,50

PENYISIHAN PIUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH

PER 31 DESEMBER 2025

1. Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	Penjualan Raskin							
1	Kelurahan Perwira	2016	12.040.000,00				12.040.000,00	12.040.000,00
2	Kelurahan Muara Sentosa	2016	3.540.000,00				3.540.000,00	3.540.000,00
3	Kelurahan Perjuangan	2016	1.875.000,00				1.875.000,00	1.875.000,00
JUMLAH			17.455.000,00	-	-	-	17.455.000,00	17.455.000,00

2. Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN							
A	Tunggakan Air dan Listrik Rusunawa (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)							
1	Rusunawa I	2019	98.375.149,00				98.375.149,00	98.375.149,00
2	Rusunawa II	2019	58.877.570,00				58.877.570,00	58.877.570,00
3	Rusunawa III	2019	74.300.841,00				74.300.841,00	74.300.841,00
4	Rusunawa IV	2019	58.262.960,00				58.262.960,00	58.262.960,00
5	Rusunawa V	2019	7.448.040,00				7.448.040,00	7.448.040,00
JUMLAH			297.264.560,00	-	-	-	297.264.560,00	297.264.560,00
B	Tunggakan Air dan Listrik Rusunawa (Dinas Perumahan dan Pemukiman)							
1	Rusunawa I	2019	6.778.200				6.778.200,00	6.778.200,00
2	Rusunawa II	2019	618.940				618.940,00	618.940,00
3	Rusunawa III	2019	21.173.200				21.173.200,00	21.173.200,00
4	Rusunawa IV	2019	6.953.200				6.953.200,00	6.953.200,00

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
5	Rusunawa V	2019	7.772.800				7.772.800,00	7.772.800,00
JUMLAH			43.296.340,00	-	-	-	43.296.340,00	43.296.340,00
TOTAL			340.560.900,00	-	-	-	340.560.900,00	340.560.900,00

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir							
1	Penyaluran Pinjaman melalui PT. Bank Muamalat Cabang Tanjungbalai	2003	184.298.112,00				184.298.112,00	184.298.112,00
		2004	363.711.777,00				363.711.777,00	363.711.777,00
		2005	254.863.543,00				254.863.543,00	254.863.543,00
		2006	420.431.483,00				420.431.483,00	420.431.483,00
2	Penyaluran Pinjaman melalui PT Bank Sumut Cabang Tanjungbalai	2007	209.864.529,00				209.864.529,00	209.864.529,00
		2008	261.762.856,00				261.762.856,00	261.762.856,00
		2009	321.774.667,00				321.774.667,00	321.774.667,00
		2010	255.099.666,00				255.099.666,00	255.099.666,00
		2011	528.343.416,00				528.343.416,00	528.343.416,00
		2012	429.506.917,00				429.506.917,00	429.506.917,00
		2013	305.440.923,00				305.440.923,00	305.440.923,00
JUMLAH			3.535.097.889,00	-	-	-	3.535.097.889,00	3.535.097.889,00

4. Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
	Denda Pajak Bumi dan Bagunan							

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
		1996	808.174				808.174,08	808.174,08
		1997	84.292.428				84.292.428,48	84.292.428,48
		1998	56.119.560				56.119.560,48	56.119.560,48
		1999	59.041.219				59.041.218,72	59.041.218,72
		2000	131.225.908				131.225.908,32	131.225.908,32
		2001	260.849.343				260.849.343,36	260.849.343,36
		2002	124.730.534				124.730.534,40	124.730.534,40
		2003	253.956.923				253.956.923,04	253.956.923,04
		2004	139.554.461				139.554.461,28	139.554.461,28
		2005	206.556.146				206.556.146,40	206.556.146,40
		2006	157.308.118				157.308.118,08	157.308.118,08
		2007	88.494.366				88.494.366,24	88.494.366,24
		2008	427.588.033				427.588.033,44	427.588.033,44
		2009	306.962.443				306.962.443,20	306.962.443,20
		2010	310.286.008				310.286.008,32	310.286.008,32
		2011	279.115.243				279.115.242,72	279.115.242,72
		2012	324.272.115				324.272.115,36	324.272.115,36
		2013	458.236.775				458.236.775,04	458.236.775,04
		2014	573.533.935				573.533.935,20	573.533.935,20
		2015	626.824.720				626.824.720,32	626.824.720,32
		2016	631.388.298				631.388.297,76	631.388.297,76
		2017	687.156.091				687.156.090,72	687.156.090,72
		2018	795.885.028				795.885.028,32	795.885.028,32
		2019	940.363.837				940.363.836,96	940.363.836,96
		2020	1.161.005.864				1.161.005.863,68	1.161.005.863,68
		2021	1.084.712.067			542.356.033,44		542.356.033,44
		2022	1.134.940.511			567.470.255,28		567.470.255,28
		2023	1.260.438.930			630.219.464,88		630.219.464,88
		2024	510.563.366		51.056.336,62			51.056.336,62
		2025	-	-				-
JUMLAH			13.076.210.447,30	-	51.056.336,62	1.740.045.753,60	9.085.555.573,92	10.876.657.664,14

PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA - BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

PER 31 DESEMBER 2025

1. Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,50%	10%	50%	100%	
A	Hasil Penjualan Ganti Rugi Tanah							
1	Surya darma	2016	4.550.000,00				4.550.000,00	4.550.000,00
2	Ahmad	2016	966.000,00				966.000,00	966.000,00
3	Amran Marpaung	2016	300.000,00				300.000,00	300.000,00
4	Idham	2016	3.813.000,00				3.813.000,00	3.813.000,00
5	Darwin	2016	53.075.000,00				53.075.000,00	53.075.000,00
6	Amrah jafar	2016	30.190.000,00				30.190.000,00	30.190.000,00
JUMLAH			92.894.000,00	-	-	-	92.894.000,00	92.894.000,00
B	Kendaraan Roda Dua							
1	M. Husni	2010	673.000,00				673.000,00	673.000,00
2	Arifin Ibrahim	2010	1.040.000,00				1.040.000,00	1.040.000,00
3	Suhaimi Nasution	2010	1.204.720,00				1.204.720,00	1.204.720,00
4	Hj. Juita Usman	2010	1.134.240,00				1.134.240,00	1.134.240,00
5	OK. Anwar	2010	1.152.000,00				1.152.000,00	1.152.000,00
6	Siswady	2010	817.200,00				817.200,00	817.200,00
7	Drs. Burhanuddin Pjt	2010	918.960,00				918.960,00	918.960,00
8	Khairida	2010	750.050,00				750.050,00	750.050,00
9	Agus Salim	2010	703.230,00				703.230,00	703.230,00
10	Ratna Hairani	2010	1.440.000,00				1.440.000,00	1.440.000,00
JUMLAH			9.833.400,00	-	-	-	9.833.400,00	9.833.400,00
C	Kendaraan Roda Empat							
1	M. Husni	2010	17.960.000,00				17.960.000,00	17.960.000,00
JUMLAH			17.960.000,00	-	-	-	17.960.000,00	17.960.000,00
TOTAL			120.687.400,00	-	-	-	120.687.400,00	120.687.400,00

PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR			KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
						LANCAR 0,50%	KURANG LANCAR 10%	RAGU-RAGU 50%	MACET 100%	
			Setelah Penetapan	Informasi	JUMLAH					
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2005	-	20.520.750,00	20.520.750,00				20.520.750,00	20.520.750,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2006	104.025.159,25	294.065.556,23	398.090.715,48				398.090.715,48	398.090.715,48
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2007	-	224.574.500,00	224.574.500,00				224.574.500,00	224.574.500,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2008	38.511.700,00	2.464.095.249,80	2.502.606.949,80				2.502.606.949,80	2.502.606.949,80
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2009	825.427.383,00	1.687.337.240,66	2.512.764.623,66				2.512.764.623,66	2.512.764.623,66
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2010	-	231.844.771,82	231.844.771,82				231.844.771,82	231.844.771,82
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2011	166.991.000,00	126.062.000,00	293.053.000,00				293.053.000,00	293.053.000,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2012	833.057.682,47	6.475.471.450,46	7.308.529.132,93				7.308.529.132,93	7.308.529.132,93
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2013	899.210.100,00	2.111.860.170,40	3.011.070.270,40				3.011.070.270,40	3.011.070.270,40
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2014	-	694.946.593,48	694.946.593,48				694.946.593,48	694.946.593,48
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2015	-	4.057.739.913,44	4.057.739.913,44				4.057.739.913,44	4.057.739.913,44
12	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2016	-	99.493.217,00	99.493.217,00				99.493.217,00	99.493.217,00
13	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2017	-	445.020.058,38	445.020.058,38				445.020.058,38	445.020.058,38
14	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2018	1.502.946.200,00	3.011.149.337,15	4.514.095.537,15				4.514.095.537,15	4.514.095.537,15
15	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2019	549.039.400,00	503.784.321,75	1.052.823.721,75				1.052.823.721,75	1.052.823.721,75
16	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2020	-	120.159.962,80	120.159.962,80				120.159.962,80	120.159.962,80
17	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2021	-	220.406.255,00	220.406.255,00			110.203.127,50		110.203.127,50
18	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2022	-	218.501.183,37	218.501.183,37			109.250.591,69		109.250.591,69
19	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2023	-	62.487.466,82	62.487.466,82			31.243.733,41		31.243.733,41
20	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2024	11.646.666,67	55.105.180,00	66.751.846,67		6.675.184,67			6.675.184,67
21	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2025	-	-	-					-
JUMLAH			4.930.855.291,39	23.124.625.178,56	28.055.480.469,95	-	6.675.184,67	250.697.452,60	27.487.333.718,09	27.744.706.355,35

LAMPIRAN 15

PERSEDIAAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	ISI TABUNG GAS	BAHAN BIBIT TANAMAN	BAHAN ALAT TULIS KANTOR	BAHAN KERTAS DAN COVER	BAHAN BENDA POS	BAHAN KOMPUTER	PERALATAN PERABOT KANTOR	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	BAHAN ALAT LISTRIK	BAHAN OBAT-OBATAN	BAHAN OBAT-OBATAN LAINYA	BARANG YANG AKAN DI SERAHKAN KE PADA MASYARAKAT	BARANG YANG AKAN DI SERAHKAN KE PADA LAINNYA	NATURA	PERLENGKAPAN DINAS	SUKU CADANG LABORATORIUM	BAHAN KIMIA	BAHAN PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA	BAHAN-BAHAN LAINNYA	JUMLAH
1	SETDA	787.238,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.238,00
2	SETWAN	0,00	0,00	5.267.865,00	556.110,00	0,00	749.250,00	1.216.227,00	0,00	263.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052.522,00
3	INSPEKTORAT	0,00	0,00	2.444.392,00	7.127.080,00	0,00	2.024.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595.478,00
4	PUTR	0,00	38.167.300,00	256.186,00	634.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.220.107,63	492.249.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.527.399,21
5	PERUKIM	0,00	0,00	256.950,00	607.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.650,00
6	SATPOL PP	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
7	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	895.916,00	2.701.153,00	0,00	479.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076.757,00
8	DISNAKER	0,00	0,00	0,00	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
9	DINAS KOPERASI	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00
10	DISPEN KB	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395.979,00
11	DPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DINAS LH	0,00	0,00	20.057.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.057.188,00
13	DISDUKCAPIL	0,00	0,00	341.889.540,01	8.272.000,00	0,00	392.708.173,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	4.480.000,00	0,00	751.009.713,01
14	DP3A PMK	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
15	DISHUB	0,00	0,00	43.727.000,00	393.000,00	0,00	258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.378.200,00
16	DISKOMINFO	0,00	0,00	1.998.000,00	179.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.990,00
17	DPMTSP	0,00	0,00	0,00	129.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.648,00
18	DISPORAPAR	0,00	0,00	126.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	30.727.300,00

NO	OPD	ISI TABUNG GAS	BAHAN BIBIT TANAMAN	BAHAN ALAT TULIS KANTOR	BAHAN KERTAS DAN COVER	BAHAN BENDA POS	BAHAN KOMPUTER	PERALATAN PERABOT KANTOR	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	BAHAN ALAT LISTRIK	BAHAN OBAT-OBATAN	BAHAN OBAT-OBATAN LAINYA	BARANG YANG AKAN DI SERAHKAN KE PADA MASYARAKAT	BARANG YANG AKAN DI SERAHKAN KE PADA LAINNYA	NATURA	PERLENGKAPAN DINAS	SUKU CADANG LABORATORIUM	BAHAN KIMIA	BAHAN PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAH RAGA	BAHAN-BAHAN LAINNYA	JUMLAH
19	DISPERPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DISDAGPER	0,00	0,00	480.721.000,00	635.475,00	0,00	371.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.727.770,00
22	BAPPERIDA	0,00	0,00	2.582.195,00	445.347,00	0,00	4.159.840,00	2.423.847,00	0,00	133.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744.305,00
23	BPKPD	0,00	0,00	673.326,00	3.118.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.241.802,00
24	BKPSDM	0,00	0,00	1.236.415,00	1.076.724,00	1.000.000,00	1.785.000,00	187.462,00	0,00	144.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.819,00
25	BPBD	0,00	0,00	1.203.104,00	248.500,00	0,00	1.271.636,00	6.574.011,00	0,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	19.850.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902.571,00
26	KESBANGPOL	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
27	KEC. TBS	0,00	0,00	510.000,00	464.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.000,00
28	KEC. TBU	0,00	0,00	165.000,00	130.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
29	KEC. DB	0,00	0,00	138.500,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
30	KEC. STR	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.800,00
31	KEC. TN	0,00	0,00	140.500,00	260.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.500,00
32	KEC. DBT	0,00	0,00	21.000,00	133.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
33	BLUD	0,00	0,00	418.330.836,60	8.276.160,00	0,00	0,00	57.571.000,00	0,00	283.500,00	2.632.881.775,48	3.932.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.275.292,08
34	SE-DISDIK	0,00	0,00	6.386.875,00	11.334.860,00	0,00	10.140.170,00	843.720,00	0,00	990.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.696.300,00
35	SE-DINKES	0,00	0,00	73.415.352,00	45.895.945,00	500.000,00	10.341.385,00	55.949.985,00	1.438.600,00	19.915.117,00	2.771.374.626,93	274.999.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	681.834,00	0,00	285.623.989,00	3.540.165.237,93
JUMLAH		787.238,00	38.167.300,00	1.402.528.740,61	94.522.491,00	1.920.000,00	426.513.443,00	124.766.252,00	1.438.600,00	22.824.856,00	5.417.522.381,41	278.931.384,00	196.566.407,63	557.699.117,58	560.000,00	22.610.120,00	29.040,00	5.161.834,00	125.000,00	285.623.989,00	8.878.298.194,23

LAMPIRAN 16

ASET TETAP TANAH

PER 31 DESEMBER 2025

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)	REKLAS KE PROPERTI INVESTASI	SALDO 2025 (Rp) (Setelah Reklas)
1	Pengelola BMD	188.195.980.596,00	14.829.730.600,00	2.671.564.609,00	200.354.146.587,00	9.340.425.000,00	191.013.721.587,00
2	Dinas Pendidikan	34.540.664.839,42	0,00	0,00	34.540.664.839,42	0,00	34.540.664.839,42
3	Dinas Kesehatan	2.186.602.000,00	0,00	67.050.000,00	2.119.552.000,00	0,00	2.119.552.000,00
4	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	6.856.500.000,00	0,00	0,00	6.856.500.000,00	0,00	6.856.500.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.348.136.216,00	0,00	0,00	142.348.136.216,00	0,00	142.348.136.216,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74.355.722.653,00	6.864.252.760,00	5.312.909.113,00	75.907.066.300,00	0,00	75.907.066.300,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	666.479.000,00	0,00	0,00	666.479.000,00	0,00	666.479.000,00
9	Dinas Sosial	124.800.000,00	0,00	0,00	124.800.000,00	0,00	124.800.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	433.500.000,00	0,00	0,00	433.500.000,00	0,00	433.500.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	2.073.562.555,00	0,00	0,00	2.073.562.555,00	0,00	2.073.562.555,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.879.010.669,00	0,00	0,00	3.879.010.669,00	0,00	3.879.010.669,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	525.000.000,00	0,00	0,00	525.000.000,00	0,00	525.000.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	438.900.000,00	0,00	0,00	438.900.000,00	0,00	438.900.000,00
16	Dinas Perhubungan	236.000.000,00	0,00	0,00	236.000.000,00	0,00	236.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	480.680.000,00	0,00	0,00	480.680.000,00	0,00	480.680.000,00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	78.750.000,00	0,00	0,00	78.750.000,00	0,00	78.750.000,00
22	Dinas Perikanan	1.892.065.900,00	0,00	0,00	1.892.065.900,00	0,00	1.892.065.900,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29.279.695.680,00	0,00	0,00	29.279.695.680,00	0,00	29.279.695.680,00
24	Sekretariat Daerah	40.459.744.399,00	700.000.000,00	0,00	41.159.744.399,00	0,00	41.159.744.399,00
25	Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat DPRD	645.397.000,00	0,00	0,00	645.397.000,00	0,00	645.397.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)	REKLAS KE PROPERTI INVESTASI	SALDO 2025 (Rp) (Setelah Reklas)
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Datuk Bandar	511.506.000,00	0,00	0,00	511.506.000,00	0,00	511.506.000,00
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	723.810.000,00	0,00	0,00	723.810.000,00	0,00	723.810.000,00
34	Kecamatan Tanjungbalai Utara	401.065.000,00	0,00	0,00	401.065.000,00	0,00	401.065.000,00
35	Kecamatan Sei Tualang Raso	524.597.574,00	0,00	0,00	524.597.574,00	0,00	524.597.574,00
36	Kecamatan Teluk Nibung	434.267.360,00	0,00	0,00	434.267.360,00	0,00	434.267.360,00
37	Kecamatan Datuk Bandar Timur	493.000.869,00	0,00	0,00	493.000.869,00	0,00	493.000.869,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	198.720.000,00	0,00	0,00	198.720.000,00	0,00	198.720.000,00
	JUMLAH	532.984.158.310,42	22.393.983.360,00	8.051.523.722,00	547.326.617.948,42	9.340.425.000,00	537.986.192.948,42

LAMPIRAN 17

ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2025

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
1	Pengelola BMD	284.385.999,99	0,00	284.385.999,99	0,00
2	Dinas Pendidikan	54.814.323.437,65	3.752.440.185,00	1.901.471.393,80	56.665.292.228,85
3	Dinas Kesehatan	37.822.974.986,47	5.426.120.245,00	1.019.088.455,00	42.230.006.776,47
4	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	61.543.190.659,44	3.485.304.340,00	8.912.580.715,75	56.115.914.283,69
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.132.296.788,32	2.922.637.808,00	6.958.001.014,42	18.096.933.581,90
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.933.791.018,86	280.222.045,00	169.767.000,00	4.044.246.063,86
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.679.180.045,31	56.736.260,00	67.030.175,00	3.668.886.130,31
8	Satuan Polisi Pamong Praja	8.403.771.951,01	418.552.958,00	498.000,00	8.821.826.909,01
9	Dinas Sosial	2.425.541.346,00	111.257.390,00	110.808.200,00	2.425.990.536,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	971.943.730,70	122.926.173,00	56.999.815,89	1.037.870.087,81
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.430.884.354,33	9.650.000,00	850.000,00	1.439.684.354,33
12	Dinas Pangan dan Pertanian	2.454.920.562,00	200.000,00	25.361.486,00	2.429.759.076,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	14.822.496.004,51	8.616.470.491,00	2.140.047.750,00	21.298.918.745,51
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.321.290.445,83	257.523.300,00	52.252.900,00	4.526.560.845,83
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.913.804.112,31	85.069.800,00	146.392.100,00	4.852.481.812,31
16	Dinas Perhubungan	5.211.672.670,42	12.200.000,00	73.176.208,58	5.150.696.461,84
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.112.775.183,44	522.131.326,00	154.892.020,50	7.480.014.488,94
18	Dinas Koperasi dan UKM	865.306.402,00	297.680.000,00	158.324.500,00	1.004.661.902,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.143.310.887,73	33.847.230,00	9.993.284,00	1.167.164.833,73
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.654.504.929,67	287.466.400,00	720.529.108,02	2.221.442.221,65
21	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	2.010.360.983,85	538.540.799,99	586.168.747,00	1.962.733.036,84
22	Dinas Perikanan	3.702.166.574,50	180.935.042,00	69.828.080,00	3.813.273.536,50
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.541.669.001,00	41.819.250,00	10.889.070,00	2.572.599.181,00
24	Sekretariat Daerah	27.235.056.263,00	2.407.307.832,00	1.735.990.773,00	27.906.373.322,00
25	Walikota	4.813.190.421,00	362.686.948,00	2.196.690,00	5.173.680.679,00
26	Wakil Walikota	2.244.270.417,00	986.276.070,00	20.249.730,00	3.210.296.757,00
27	Sekretariat DPRD	5.956.678.487,73	107.150.001,00	976.115.450,00	5.087.713.038,73
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.262.156.667,43	202.390.000,00	277.514.485,20	3.187.032.182,23
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.386.811.077,00	207.302.202,00	490.126.082,00	9.103.987.197,00

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.500.915.008,64	51.115.500,00	0,00	1.552.030.508,64
31	Inspektorat	2.189.791.552,00	315.921.844,00	41.111.464,00	2.464.601.932,00
32	Kecamatan Datuk Bandar	1.909.691.921,00	125.711.000,00	455.660.845,00	1.579.742.076,00
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	2.041.357.293,68	128.325.000,00	448.836.666,68	1.720.845.627,00
34	Kecamatan Tanjungbalai Utara	1.781.697.434,00	201.880.001,00	340.154.307,00	1.643.423.128,00
35	Kecamatan Sei Tualang Raso	1.929.053.310,00	252.202.851,00	444.318.763,00	1.736.937.398,00
36	Kecamatan Teluk Nibung	1.805.381.049,00	8.000.000,00	386.296.000,00	1.427.085.049,00
37	Kecamatan Datuk Bandar Timur	1.894.141.268,00	26.362.500,00	495.111.957,00	1.425.391.811,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.370.295.428,54	15.950.700,00	31.987.000,00	1.354.259.128,54
	JUMLAH	318.517.049.673,36	32.858.313.491,99	29.775.006.236,83	321.600.356.928,52

LAMPIRAN 18

DAFTAR HIBAH PERALATAN DIGITALISASI DARI KEMENDIKDASMEN

PER 31 DESEMBER 2025

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
1	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 130010	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424599	30-Okt-25	Baik
2	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 130010	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424599	30-Okt-25	Baik
3	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 130010	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64570	14-Jan-26	Baik
4	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 130010	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64570	14-Jan-26	Baik
5	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 134633	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424596	30-Okt-25	Baik
6	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 134633	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424596	30-Okt-25	Baik
7	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 134633	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64572	13-Jan-26	Baik
8	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 134633	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64572	13-Jan-26	Baik
9	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 135911	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020878	06-Nov-25	Baik
10	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 135911	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020878	06-Nov-25	Baik
11	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 135911	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64578	14-Jan-26	Baik
12	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 135911	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64578	14-Jan-26	Baik
13	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 136541	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424595	30-Okt-25	Baik
14	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 136541	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424595	30-Okt-25	Baik
15	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 136541	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64573	14-Jan-26	Baik
16	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 136541	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64573	14-Jan-26	Baik
17	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 137958	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424624	30-Okt-25	Baik
18	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 137958	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424624	30-Okt-25	Baik
19	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 137958	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64571	14-Jan-26	Baik
20	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 137958	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64571	14-Jan-26	Baik
21	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138429	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424597	30-Okt-25	Baik
22	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138429	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424597	30-Okt-25	Baik
23	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138429	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64581	13-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
24	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138429	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64581	13-Jan-26	Baik
25	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138433	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424600	30-Okt-25	Baik
26	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138433	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424600	30-Okt-25	Baik
27	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138433	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64569	12-Jan-26	Baik
28	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138433	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64569	12-Jan-26	Baik
29	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138434	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020876	06-Nov-25	Baik
30	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138434	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020876	06-Nov-25	Baik
31	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138434	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64575	13-Jan-26	Baik
32	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138434	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64575	13-Jan-26	Baik
33	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138434	Internet Satelit	Starlink V4 Gen 3	1	6277/SD/KEMENDIKDAS MEN-SIP/XII/2025	06-Jan-26	Baik
34	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138437	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020875	06-Nov-25	Baik
35	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138437	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020875	06-Nov-25	Baik
36	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138437	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64577	14-Jan-26	Baik
37	Kec. Datuk Bandar	SD Negeri	SD Negeri 138437	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64577	14-Jan-26	Baik
38	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424601	30-Okt-25	Baik
39	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424601	30-Okt-25	Baik
40	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201110082116	16-Dec-25	Baik
41	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Bracket TV	WH3309-LK	1		16-Dec-25	Baik
42	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/65090	14-Jan-26	Baik
43	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/65090	14-Jan-26	Baik
44	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/65434	14-Jan-26	Baik
45	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Darul Fikri	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1		14-Jan-26	Baik
46	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Faridhatul Fathanah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201024124625	30-Okt-25	Baik
47	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Faridhatul Fathanah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201024124625	30-Okt-25	Baik
48	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Faridhatul Fathanah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64580	14-Jan-26	Baik
49	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Faridhatul Fathanah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64580	14-Jan-26	Baik
50	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Nurul Hikmah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424602	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
51	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Nurul Hikmah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424602	30-Okt-25	Baik
52	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Nurul Hikmah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64579	13-Jan-26	Baik
53	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD IT Nurul Hikmah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64579	13-Jan-26	Baik
54	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD Suwardi Salim	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424598	30-Okt-25	Baik
55	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD Suwardi Salim	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424598	30-Okt-25	Baik
56	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD Suwardi Salim	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64574	14-Jan-26	Baik
57	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SD Suwardi Salim	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64574	14-Jan-26	Baik
58	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SDI Ath Thohiriyah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020877	06-Nov-25	Baik
59	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SDI Ath Thohiriyah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020877	06-Nov-25	Baik
60	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SDI Ath Thohiriyah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/645	13-Jan-26	Baik
61	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SDI Ath Thohiriyah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/645	13-Jan-26	Baik
62	Kec. Datuk Bandar	SD Swasta	SDI Ath Thohiriyah	Internet Satelit	Starlink V4 Gen 3	1	6767/SD/KEMENDIKDAS MEN-SIP/XII/2025	06-Jan-26	Baik
63	Kec. Datuk Bandar	SMP Negeri	SMP Negeri 5	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424643	30-Okt-25	Baik
64	Kec. Datuk Bandar	SMP Negeri	SMP Negeri 5	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424643	30-Okt-25	Baik
65	Kec. Datuk Bandar	SMP Negeri	SMP Negeri 5	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19484	14-Jan-26	Baik
66	Kec. Datuk Bandar	SMP Negeri	SMP Negeri 5	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19484	14-Jan-26	Baik
67	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP IT Darul Fikri	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424648	30-Okt-25	Baik
68	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP IT Darul Fikri	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424648	30-Okt-25	Baik
69	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP IT Darul Fikri	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/19491	13-Jan-26	Baik
70	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP IT Darul Fikri	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/19491	13-Jan-26	Baik
71	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP Modern AW Gading	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301102020870	06-Nov-25	Baik
72	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP Modern AW Gading	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301102020870	06-Nov-25	Baik
73	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP Pesantren Tahfidz Daarul Mukhlisin	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424649	30-Okt-25	Baik
74	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP Pesantren Tahfidz Daarul Mukhlisin	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424649	30-Okt-25	Baik
75	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP Pesantren Tahfidz Daarul Mukhlisin	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19492	12-Jan-26	Baik
76	Kec. Datuk Bandar	SMP Swasta	SMP Pesantren Tahfidz Daarul Mukhlisin	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19492	12-Jan-26	Baik
77	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 132416	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424665	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
78	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 132416	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424665	30-Okt-25	Baik
79	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 132416	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64583	09-Jan-26	Baik
80	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 132416	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64583	09-Jan-26	Baik
81	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133889	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424666	30-Okt-25	Baik
82	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133889	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424666	30-Okt-25	Baik
83	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133889	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64582	12-Jan-26	Baik
84	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133889	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64582	12-Jan-26	Baik
85	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133890	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424664	30-Okt-25	Baik
86	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133890	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424664	30-Okt-25	Baik
87	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133890	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64586	12-Jan-26	Baik
88	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 133890	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64586	12-Jan-26	Baik
89	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 134415	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424663	30-Okt-25	Baik
90	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 134415	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424663	30-Okt-25	Baik
91	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 134415	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64585	09-Jan-26	Baik
92	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 134415	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64585	09-Jan-26	Baik
93	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136467	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424675	30-Okt-25	Baik
94	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136467	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424675	30-Okt-25	Baik
95	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136467	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64587	09-Jan-26	Baik
96	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136467	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64587	09-Jan-26	Baik
97	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136539	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424662	30-Okt-25	Baik
98	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136539	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424662	30-Okt-25	Baik
99	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136539	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64584	09-Jan-26	Baik
100	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 136539	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64584	09-Jan-26	Baik
101	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138428	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020874	06-Nov-25	Baik
102	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138428	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020874	06-Nov-25	Baik
103	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138428	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64589	12-Jan-26	Baik
104	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138428	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64589	12-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
105	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138436	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424676	30-Okt-25	Baik
106	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138436	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424676	30-Okt-25	Baik
107	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138436	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64588	13-Jan-26	Baik
108	Kec. Datuk Bandar Timur	SD Negeri	SD Negeri 138436	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64588	13-Jan-26	Baik
109	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 2	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424678	31-Okt-25	Baik
110	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 2	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424678	31-Okt-25	Baik
111	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 2	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19481	10-Jan-26	Baik
112	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 2	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19481	10-Jan-26	Baik
113	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 4	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424679	30-Okt-25	Baik
114	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 4	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424679	30-Okt-25	Baik
115	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 4	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19483	10-Jan-26	Baik
116	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 4	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19483	10-Jan-26	Baik
117	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 12	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424681	31-Okt-25	Baik
118	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 12	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424681	31-Okt-25	Baik
119	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 12	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19489	09-Jan-26	Baik
120	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 12	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19489	09-Jan-26	Baik
121	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 13	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424682	31-Okt-25	Baik
122	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 13	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424682	31-Okt-25	Baik
123	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 13	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19493	13-Jan-26	Baik
124	Kec. Datuk Bandar Timur	SMP Negeri	SMP Negeri 13	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19493	13-Jan-26	Baik
125	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132402	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424556	31-Okt-25	Baik
126	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132402	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424556	31-Okt-25	Baik
127	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132402	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64610	12-Jan-26	Baik
128	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132402	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64610	12-Jan-26	Baik
129	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132403	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424554	31-Okt-25	Baik
130	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132403	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424554	31-Okt-25	Baik
131	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132403	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64626	12-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
132	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132403	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64626	12-Jan-26	Baik
133	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132404	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424553	30-Okt-25	Baik
134	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132404	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424553	30-Okt-25	Baik
135	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132404	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64609	10-Jan-26	Baik
136	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132404	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64609	10-Jan-26	Baik
137	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132405	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424552	31-Okt-25	Baik
138	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132405	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424552	31-Okt-25	Baik
139	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132405	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64607	09-Jan-26	Baik
140	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132405	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64607	09-Jan-26	Baik
141	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132406	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424561	31-Okt-25	Baik
142	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132406	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424561	31-Okt-25	Baik
143	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132406	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64601	08-Jan-26	Baik
144	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132406	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64601	08-Jan-26	Baik
145	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132407	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424546	31-Okt-25	Baik
146	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132407	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424546	31-Okt-25	Baik
147	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132407	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64612	10-Jan-26	Baik
148	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132407	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64612	10-Jan-26	Baik
149	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132408	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424551	31-Okt-25	Baik
150	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132408	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424551	31-Okt-25	Baik
151	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132408	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64625	10-Jan-26	Baik
152	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132408	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64625	10-Jan-26	Baik
153	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132409	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424548	31-Okt-25	Baik
154	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132409	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424548	31-Okt-25	Baik
155	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132409	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64608	12-Jan-26	Baik
156	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132409	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64608	12-Jan-26	Baik
157	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132411	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424549	30-Okt-25	Baik
158	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132411	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424549	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
159	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132411	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64605	13-Jan-26	Baik
160	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132411	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64605	13-Jan-26	Baik
161	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132412	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424550	31-Okt-25	Baik
162	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132412	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424550	31-Okt-25	Baik
163	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132412	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64615	13-Jan-26	Baik
164	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132412	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64615	13-Jan-26	Baik
165	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132413	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424551	30-Okt-25	Baik
166	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132413	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424551	30-Okt-25	Baik
167	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132413	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64614	10-Jan-26	Baik
168	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 132413	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64614	10-Jan-26	Baik
169	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134409	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424545	30-Okt-25	Baik
170	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134409	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424545	30-Okt-25	Baik
171	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134409	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64617	10-Jan-26	Baik
172	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134409	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64617	10-Jan-26	Baik
173	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134410	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424542	30-Okt-25	Baik
174	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134410	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424542	30-Okt-25	Baik
175	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134410	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64623	10-Jan-26	Baik
176	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134410	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64623	10-Jan-26	Baik
177	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134411	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020872	06-Nov-25	Baik
178	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134411	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020872	06-Nov-25	Baik
179	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134411	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64622	10-Jan-26	Baik
180	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134411	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64622	10-Jan-26	Baik
181	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134412	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020871	06-Nov-25	Baik
182	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134412	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020871	06-Nov-25	Baik
183	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134412	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64621	10-Jan-26	Baik
184	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134412	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64621	10-Jan-26	Baik
185	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134416	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424543	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
186	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134416	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424543	30-Okt-25	Baik
187	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134416	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64616	13-Jan-26	Baik
188	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134416	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64616	13-Jan-26	Baik
189	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134417	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424544	31-Okt-25	Baik
190	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134417	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424544	31-Okt-25	Baik
191	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134417	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64611	13-Jan-26	Baik
192	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 134417	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64611	13-Jan-26	Baik
193	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137101	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201102020873	07-Nov-25	Baik
194	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137101	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201102020873	07-Nov-25	Baik
195	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137101	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64620	08-Jan-26	Baik
196	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137101	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64620	08-Jan-26	Baik
197	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137524	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424540	30-Okt-25	Baik
198	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137524	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424540	30-Okt-25	Baik
199	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137524	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64618	08-Jan-26	Baik
200	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137524	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64618	08-Jan-26	Baik
201	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137698	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424541	30-Okt-25	Baik
202	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137698	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424541	30-Okt-25	Baik
203	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137698	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64613	08-Jan-26	Baik
204	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Negeri	SD Negeri 137698	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64613	08-Jan-26	Baik
205	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Harapan Muhammadiyah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424559	31-Okt-25	Baik
206	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Harapan Muhammadiyah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424559	31-Okt-25	Baik
207	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Harapan Muhammadiyah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64619	13-Jan-26	Baik
208	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Harapan Muhammadiyah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64619	13-Jan-26	Baik
209	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD IT Al badariah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424562	30-Okt-25	Baik
210	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD IT Al badariah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424562	30-Okt-25	Baik
211	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD IT Al badariah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64624	08-Jan-26	Baik
212	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD IT Al badariah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64624	08-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
213	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist II	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424558	31-Okt-25	Baik
214	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist II	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424558	31-Okt-25	Baik
215	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist II	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64604	12-Jan-26	Baik
216	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist II	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64604	12-Jan-26	Baik
217	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Rom Katholik 1	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424555	31-Okt-25	Baik
218	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Rom Katholik 1	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424555	31-Okt-25	Baik
219	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Rom Katholik 1	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64603	12-Jan-26	Baik
220	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Rom Katholik 1	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64603	12-Jan-26	Baik
221	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Sisingamangaraja	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424560	31-Okt-25	Baik
222	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Sisingamangaraja	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424560	31-Okt-25	Baik
223	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Sisingamangaraja	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64602	09-Jan-26	Baik
224	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Sisingamangaraja	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64602	09-Jan-26	Baik
225	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist 1	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424557	31-Okt-25	Baik
226	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist 1	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424557	31-Okt-25	Baik
227	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist 1	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64606	12-Jan-26	Baik
228	Kec. Tanjung Balai Selatan	SD Swasta	SD Methodist 1	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64606	12-Jan-26	Baik
229	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 1	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424575	31-Okt-25	Baik
230	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 1	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424575	31-Okt-25	Baik
231	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 1	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	2	ZMB/03/19869	08-Jan-26	Baik
232	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 1	Hard Disk Eksternal	Zyrex	2	ZMB/03/19869	08-Jan-26	Baik
233	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 10	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424571	30-Okt-25	Baik
234	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 10	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424571	30-Okt-25	Baik
235	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 10	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19477	10-Jan-26	Baik
236	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Negeri	SMP Negeri 10	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19477	10-Jan-26	Baik
237	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Dar Alfalah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424574	31-Okt-25	Baik
238	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Dar Alfalah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424574	31-Okt-25	Baik
239	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Dar Alfalah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19480	08-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
240	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Dar Alfalah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19480	08-Jan-26	Baik
241	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Methodist II	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424569	30-Okt-25	Baik
242	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Methodist II	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424569	30-Okt-25	Baik
243	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Methodist II	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19475	12-Jan-26	Baik
244	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Methodist II	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19475	12-Jan-26	Baik
245	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Muhammadiyah	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424570	31-Okt-25	Baik
246	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Muhammadiyah	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424570	31-Okt-25	Baik
247	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Muhammadiyah	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19476	13-Jan-26	Baik
248	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Muhammadiyah	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19476	13-Jan-26	Baik
249	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Sisingamangaraja	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424572	31-Okt-25	Baik
250	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Sisingamangaraja	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424572	31-Okt-25	Baik
251	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Sisingamangaraja	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19478	09-Jan-26	Baik
252	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Sisingamangaraja	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19478	09-Jan-26	Baik
253	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Tritunggal	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424573	31-Okt-25	Baik
254	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Tritunggal	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424573	31-Okt-25	Baik
255	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Tritunggal	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19479	12-Jan-26	Baik
256	Kec. Tanjung Balai Selatan	SMP Swasta	SMP Tritunggal	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19479	12-Jan-26	Baik
257	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132410	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424673	31-Okt-25	Baik
258	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132410	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424673	31-Okt-25	Baik
259	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132410	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64629	13-Jan-26	Baik
260	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132410	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64629	13-Jan-26	Baik
261	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132414	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424674	31-Okt-25	Baik
262	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132414	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424674	31-Okt-25	Baik
263	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132414	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64630	13-Jan-26	Baik
264	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 132414	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64630	13-Jan-26	Baik
265	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134408	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424672	31-Okt-25	Baik
266	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134408	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424672	31-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
267	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134408	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64628	13-Jan-26	Baik
268	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134408	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64628	13-Jan-26	Baik
269	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134418	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424669	31-Okt-25	Baik
270	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134418	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424669	31-Okt-25	Baik
271	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134418	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64633	13-Jan-26	Baik
272	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 134418	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64633	13-Jan-26	Baik
273	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 135561	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424670	31-Okt-25	Baik
274	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 135561	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424670	31-Okt-25	Baik
275	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 135561	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64632	13-Jan-26	Baik
276	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 135561	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64632	13-Jan-26	Baik
277	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136916	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424667	31-Okt-25	Baik
278	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136916	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424667	31-Okt-25	Baik
279	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136916	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64627	13-Jan-26	Baik
280	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136916	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64627	13-Jan-26	Baik
281	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136917	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424668	31-Okt-25	Baik
282	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136917	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424668	31-Okt-25	Baik
283	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136917	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64631	13-Jan-26	Baik
284	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 136917	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64631	13-Jan-26	Baik
285	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 137957	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424671	31-Okt-25	Baik
286	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 137957	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424671	31-Okt-25	Baik
287	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 137957	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64634	14-Jan-26	Baik
288	Kec. Tanjung Balai Utara	SD Negeri	SD Negeri 137957	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64634	14-Jan-26	Baik
289	Kec. Tanjung Balai Utara	SMP Negeri	SMP Negeri Satu Atas	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424680	30-Okt-25	Baik
290	Kec. Tanjung Balai Utara	SMP Negeri	SMP Negeri Satu Atas	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424680	30-Okt-25	Baik
291	Kec. Tanjung Balai Utara	SMP Negeri	SMP Negeri Satu Atas	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19488	13-Jan-26	Baik
292	Kec. Tanjung Balai Utara	SMP Negeri	SMP Negeri Satu Atas	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19488	13-Jan-26	Baik
293	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130001	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424609	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
294	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130001	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424609	30-Okt-25	Baik
295	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130001	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64592	13-Jan-26	Baik
296	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130001	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64592	13-Jan-26	Baik
297	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130002	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424626	30-Okt-25	Baik
298	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130002	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424626	30-Okt-25	Baik
299	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130002	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64600	13-Jan-26	Baik
300	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130002	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64600	13-Jan-26	Baik
301	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130003	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424610	01-Nov-25	Baik
302	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130003	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424610	01-Nov-25	Baik
303	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130003	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64594	13-Jan-26	Baik
304	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 130003	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64594	13-Jan-26	Baik
305	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 133888	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424608	01-Nov-25	Baik
306	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 133888	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424608	01-Nov-25	Baik
307	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 133888	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64590	13-Jan-26	Baik
308	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 133888	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64590	13-Jan-26	Baik
309	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135562	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424606	31-Okt-25	Baik
310	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135562	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424606	31-Okt-25	Baik
311	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135562	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64597	13-Jan-26	Baik
312	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135562	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64597	13-Jan-26	Baik
313	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135563	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424605	31-Okt-25	Baik
314	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135563	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424605	31-Okt-25	Baik
315	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135563	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64599	13-Jan-26	Baik
316	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135563	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64599	13-Jan-26	Baik
317	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135564	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424604	30-Okt-25	Baik
318	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135564	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424604	30-Okt-25	Baik
319	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135564	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64595	13-Jan-26	Baik
320	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 135564	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64595	13-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
321	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 136263	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424603	30-Okt-25	Baik
322	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 136263	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424603	30-Okt-25	Baik
323	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 136263	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64596	13-Jan-26	Baik
324	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 136263	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64596	13-Jan-26	Baik
325	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 137984	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424607	01-Nov-25	Baik
326	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 137984	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424607	01-Nov-25	Baik
327	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 137984	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64591	14-Jan-26	Baik
328	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 137984	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64591	14-Jan-26	Baik
329	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 138435	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424611	01-Nov-25	Baik
330	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 138435	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424611	01-Nov-25	Baik
331	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 138435	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64593	13-Jan-26	Baik
332	Kec. Sei Tualang Raso	SD Negeri	SD Negeri 138435	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64593	13-Jan-26	Baik
333	Kec. Sei Tualang Raso	SD Swasta	SD IT Nurul Quran	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424612	01-Nov-25	Baik
334	Kec. Sei Tualang Raso	SD Swasta	SD IT Nurul Quran	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424612	01-Nov-25	Baik
335	Kec. Sei Tualang Raso	SD Swasta	SD IT Nurul Quran	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64598	13-Jan-26	Baik
336	Kec. Sei Tualang Raso	SD Swasta	SD IT Nurul Quran	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64598	13-Jan-26	Baik
337	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 6	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424644	01-Nov-25	Baik
338	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 6	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424644	01-Nov-25	Baik
339	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 6	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19485	14-Jan-26	Baik
340	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 6	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19485	14-Jan-26	Baik
341	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 7	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19310211424641	31-Okt-25	Baik
342	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 7	Bracket TV	WH3309-LK	1	19310211424641	31-Okt-25	Baik
343	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 7	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19474	14-Jan-26	Baik
344	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 7	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19474	14-Jan-26	Baik
345	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 9	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424646	30-Okt-25	Baik
346	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 9	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424646	30-Okt-25	Baik
347	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 9	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19487	14-Jan-26	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
348	Kec. Sei Tualang Raso	SMP Negeri	SMP Negeri 9	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19487	14-Jan-26	Baik
349	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130004	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424627	30-Okt-25	Baik
350	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130004	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424627	30-Okt-25	Baik
351	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130004	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64641	14-Jan-26	Baik
352	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130004	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64641	14-Jan-26	Baik
353	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130005	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424622	30-Okt-25	Baik
354	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130005	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424622	30-Okt-25	Baik
355	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130005	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64637	15-Jan-26	Baik
356	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130005	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64637	15-Jan-26	Baik
357	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130012	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424620	30-Okt-25	Baik
358	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130012	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424620	30-Okt-25	Baik
359	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130012	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64636	08-Jan-26	Baik
360	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 130012	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64636	08-Jan-26	Baik
361	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 132415	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424623	30-Okt-25	Baik
362	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 132415	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424623	30-Okt-25	Baik
363	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 132415	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64646	10-Jan-26	Baik
364	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 132415	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64646	10-Jan-26	Baik
365	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 134634	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424616	30-Okt-25	Baik
366	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 134634	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424616	30-Okt-25	Baik
367	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 134634	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64635	14-Jan-26	Baik
368	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 134634	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64635	14-Jan-26	Baik
369	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135909	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424615	30-Okt-25	Baik
370	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135909	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424615	30-Okt-25	Baik
371	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135909	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64644	10-Jan-26	Baik
372	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135909	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64644	10-Jan-26	Baik
373	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135910	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424614	30-Okt-25	Baik
374	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135910	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424614	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
375	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135910	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64638	09-Jan-26	Baik
376	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 135910	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64638	09-Jan-26	Baik
377	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 136537	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424613	30-Okt-25	Baik
378	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 136537	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424613	30-Okt-25	Baik
379	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 136537	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64639	08-Jan-26	Baik
380	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 136537	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64639	08-Jan-26	Baik
381	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138318	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424617	30-Okt-25	Baik
382	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138318	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424617	30-Okt-25	Baik
383	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138318	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64642	14-Jan-26	Baik
384	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138318	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64642	14-Jan-26	Baik
385	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138339	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424618	30-Okt-25	Baik
386	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138339	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424618	30-Okt-25	Baik
387	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138339	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64640	10-Jan-26	Baik
388	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138339	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64640	10-Jan-26	Baik
389	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138430	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424620	30-Okt-25	Baik
390	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138430	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424620	30-Okt-25	Baik
391	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138430	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64647	14-Jan-26	Baik
392	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138430	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64647	14-Jan-26	Baik
393	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138432	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424619	30-Okt-25	Baik
394	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138432	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424619	30-Okt-25	Baik
395	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138432	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64643	09-Jan-26	Baik
396	Kec. Teluk Nibung	SD Negeri	SD Negeri 138432	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64643	09-Jan-26	Baik
397	Kec. Teluk Nibung	SD Swasta	SD Islam Sei Merbau	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19201021424621	30-Okt-25	Baik
398	Kec. Teluk Nibung	SD Swasta	SD Islam Sei Merbau	Bracket TV	WH3309-LK	1	19201021424621	30-Okt-25	Baik
399	Kec. Teluk Nibung	SD Swasta	SD Islam Sei Merbau	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/02/64645	09-Jan-26	Baik
400	Kec. Teluk Nibung	SD Swasta	SD Islam Sei Merbau	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/02/64645	09-Jan-26	Baik
401	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 3	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424642	30-Okt-25	Baik

No	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah	Nomor BAST	Tanggal BAST	Kondisi
402	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 3	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424642	30-Okt-25	Baik
403	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 3	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19482	11-Jan-26	Baik
404	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 3	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19482	11-Jan-26	Baik
405	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 8	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424645	30-Okt-25	Baik
406	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 8	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424645	30-Okt-25	Baik
407	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 8	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19486	08-Jan-26	Baik
408	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 8	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19486	08-Jan-26	Baik
409	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 11	Smartboard Interactive Flat Panel	Hisense 75WM61FE	1	19301021424647	31-Okt-25	Baik
410	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 11	Bracket TV	WH3309-LK	1	19301021424647	31-Okt-25	Baik
411	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 11	Laptop	Zyrex Notebook Cruiser 22 A82 (57U-P-ES5)	1	ZMB/03/19490	08-Jan-26	Baik
412	Kec. Teluk Nibung	SMP Negeri	SMP Negeri 11	Hard Disk Eksternal	Zyrex	1	ZMB/03/19490	08-Jan-26	Baik

LAMPIRAN 19

ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2025

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
1	Pengelola BMD	74.495.750.686,18	0,00	4.398.473.204,57	70.097.277.481,61
2	Dinas Pendidikan	174.081.568.920,31	5.323.878.935,57	494.436.216,97	178.911.011.638,91
3	Dinas Kesehatan	44.799.714.978,33	0,00	0,00	44.799.714.978,33
4	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	7.298.753.475,00	277.440.000,00	0,00	7.576.193.475,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.125.874.205,00	1.183.924.482,52	741.874.915,52	39.567.923.772,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.983.626.301,59	163.772.500,00	0,00	21.147.398.801,59
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.924.604,00	0,00	0,00	405.924.604,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.807.835.891,01	470.520.000,00	107.500.000,00	4.170.855.891,01
9	Dinas Sosial	1.522.420.241,00	0,00	0,00	1.522.420.241,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	611.286.000,00	0,00	0,00	611.286.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	7.139.055.619,84	0,00	0,00	7.139.055.619,84
13	Dinas Lingkungan Hidup	6.378.431.042,20	306.900.000,00	209.700.000,00	6.475.631.042,20
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.890.043.065,14	320.900.000,00	22.000.000,00	2.188.943.065,14
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.364.848.504,00	0,00	0,00	2.364.848.504,00
16	Dinas Perhubungan	1.380.646.115,67	0,00	89.957.684,00	1.290.688.431,67
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.582.618.427,45	0,00	0,00	9.582.618.427,45
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.009.079.641,00	4.176.215.412,00	0,00	8.185.295.053,00
21	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	2.390.136.062,00	0,00	0,00	2.390.136.062,00
22	Dinas Perikanan	2.732.621.708,00	27.438.000,00	27.438.000,00	2.732.621.708,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	28.667.853.298,05	0,00	2.012.256.725,00	26.655.596.573,05
24	Sekretariat Daerah	39.829.353.510,98	0,00	0,00	39.829.353.510,98
25	Walikota	4.955.607.643,49	0,00	0,00	4.955.607.643,49
26	Wakil Walikota	886.436.364,00	0,00	0,00	886.436.364,00
27	Sekretariat DPRD	5.978.346.256,00	0,00	0,00	5.978.346.256,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.711.454.343,86	0,00	0,00	7.711.454.343,86

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat	670.294.281,00	0,00	0,00	670.294.281,00
32	Kecamatan Datuk Bandar	4.191.150.043,00	0,00	0,00	4.191.150.043,00
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	3.376.992.862,45	62.300.000,00	0,00	3.439.292.862,45
34	Kecamatan Tanjungbalai Utara	4.371.614.753,34	0,00	0,00	4.371.614.753,34
35	Kecamatan Sei Tualang Raso	3.639.970.297,46	0,00	0,00	3.639.970.297,46
36	Kecamatan Teluk Nibung	3.673.723.963,52	0,00	0,00	3.673.723.963,52
37	Kecamatan Datuk Bandar Timur	5.340.418.761,61	0,00	0,00	5.340.418.761,61
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	865.843.437,41	0,00	0,00	865.843.437,41
	JUMLAH	519.159.295.303,89	12.313.289.330,09	8.103.636.746,06	523.368.947.887,92

LAMPIRAN 20

ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

PER 31 DESEMBER 2025

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
1	Pengelola BMD	79.750.000,00	0,00	0,00	79.750.000,00
2	Dinas Pendidikan	9.564.524.902,17	2.305.399.381,46	79.132.600,00	11.790.791.683,63
3	Dinas Kesehatan	3.739.975.908,00	9.987.050,00	9.987.050,00	3.739.975.908,00
4	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	1.418.013.270,00	0,00	0,00	1.418.013.270,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	804.511.190.570,53	27.037.032.981,98	4.158.527.802,55	827.389.695.749,96
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	334.744.443.819,80	10.985.123.826,71	1.565.746.115,00	344.163.821.531,51
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.727.756.043,00	0,00	0,00	7.727.756.043,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	456.258.552,00	0,00	0,00	456.258.552,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	1.663.101.510,00	0,00	0,00	1.663.101.510,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.790.165.457,00	744.097.312,67	-559.898.993,00	5.094.161.762,67
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	163.177.000,00	0,00	0,00	163.177.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	239.377.459,00	0,00	16.970.600,00	222.406.859,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.476.689,00	0,00	0,00	37.476.689,00
18	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	43.782.342,00	0,00	0,00	43.782.342,00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	52.389.000,00	0,00	0,00	52.389.000,00
21	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
22	Dinas Perikanan	4.881.831.986,00	0,00	0,00	4.881.831.986,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.062.364.066,00	0,00	0,00	1.062.364.066,00
24	Sekretariat Daerah	1.046.559.777,00	0,00	0,00	1.046.559.777,00
25	Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wakil Walikota	21.003.961,00	0,00	0,00	21.003.961,00
27	Sekretariat DPRD	158.032.000,00	0,00	0,00	158.032.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	220.984.000,00	0,00	0,00	220.984.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat	16.738.663,00	0,00	0,00	16.738.663,00
32	Kecamatan Datuk Bandar	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
34	Kecamatan Tanjungbalai Utara	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
35	Kecamatan Sei Tualang Raso	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
36	Kecamatan Teluk Nibung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Datuk Bandar Timur	6.476.082,00	0,00	0,00	6.476.082,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.175.765.373.057,50	41.081.640.552,82	5.270.465.174,55	1.211.576.548.435,77

LAMPIRAN 21

ASET TETAP LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2025

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
1	Pengelola BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	57.576.546.293,81	2.908.089.832,00	2.099.171.375,35	58.385.464.750,46
3	Dinas Kesehatan	7.567.739,97	0,00	0,00	7.567.739,97
4	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	27.538.000,00	0,00	0,00	27.538.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	546.054.935,00	0,00	0,00	546.054.935,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	750.133.200,00	0,00	0,00	750.133.200,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.975.000,00	0,00	0,00	9.975.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	11.209.320,00	0,00	0,00	11.209.320,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	26.080.000,00	0,00	0,00	26.080.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	47.785.000,00	0,00	0,00	47.785.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7.128.000,00	0,00	0,00	7.128.000,00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.517.159,00	44.810.700,00	44.810.700,00	4.517.159,00
21	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	1.959.299.053,98	24.475.000,00	0,00	1.983.774.053,98
22	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	180.048.000,00	0,00	0,00	180.048.000,00
24	Sekretariat Daerah	418.059.100,00	35.286.900,00	35.286.900,00	418.059.100,00
25	Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wakil Walikota	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
27	Sekretariat DPRD	3.774.600,00	0,00	0,00	3.774.600,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	824.804.000,00	0,00	0,00	824.804.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat	32.996.000,07	0,00	0,00	32.996.000,07
32	Kecamatan Datuk Bandar	81.067.000,00	0,00	0,00	81.067.000,00
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	36.890.000,00	0,00	0,00	36.890.000,00
34	Kecamatan Tanjungbalai Utara	152.043.025,00	0,00	0,00	152.043.025,00
35	Kecamatan Sei Tualang Raso	38.677.000,00	0,00	0,00	38.677.000,00
36	Kecamatan Teluk Nibung	44.130.000,00	0,00	0,00	44.130.000,00
37	Kecamatan Datuk Bandar Timur	38.973.000,00	0,00	0,00	38.973.000,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	62.837.770.426,83	3.012.662.432,00	2.179.268.975,35	63.671.163.883,48

LAMPIRAN 22

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

PER 31 DESEMBER 2025

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
1	Pengelola BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.510.608.123,69	452.077.628,90	12.714.313.523,69	15.248.372.228,90
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	NAMA OPD	SALDO 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 2025 (Rp)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Datuk Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tanjungbalai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Sei Tualang Raso	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Teluk Nibung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Datuk Bandar Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	27.510.608.123,69	452.077.628,90	12.714.313.523,69	15.248.372.228,90

LAMPIRAN 23

AKUMULASI PENYUSUTAN

PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	Saldo Per 31 Des 2024	Koreksi Saldo awal (Kesalahan Sistem)	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan	Saldo Per 31 Des 2025
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.257.964.496,32	192.709.346,87	11.450.673.843,19	78.522.514,51	11.529.196.357,70
2	Badan Perencanaan Pembangunan Risaet dan Inovasi Daerah	4.651.273.786,81	164.705.288,74	4.815.979.075,55	403.640.735,36	5.219.619.810,91
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.081.133.532,44	481.108.511,13	4.562.242.043,57	375.552.772,25	4.937.794.815,82
4	Dinas Kesehatan	39.932.867.161,07	1.028.308.369,27	40.961.175.530,34	4.559.429.877,10	45.520.605.407,44
5	Dinas Pendidikan	123.540.063.652,71	27.155.489.510,45	150.695.553.163,16	10.500.328.344,27	161.195.881.507,43
6	Sekretariat DPRD	7.648.344.099,82	(210.544.346,45)	7.437.799.753,37	(159.163.354,10)	7.278.636.399,27
7	Pengelola BMD	24.732.603.515,71	38.806.155.074,41	63.538.758.590,12	1.136.939.205,53	64.675.697.795,65
8	Dinas Sosial	2.805.268.970,68	427.457.104,53	3.232.726.075,21	87.890.070,77	3.320.616.145,98
9	Dinas Koperasi dan UKM	629.331.532,48	-	629.331.532,48	218.102.438,56	847.433.971,04
10	Walikota	6.974.240.014,92	(611.823.095,84)	6.362.416.919,08	231.569.742,06	6.593.986.661,14
11	Wakil Walikota	2.668.702.194,51	(64.829.941,32)	2.603.872.253,19	149.107.105,23	2.752.979.358,42
12	Sekretariat Daerah	44.154.851.362,74	(2.950.271.515,40)	41.204.579.847,34	2.655.869.109,86	43.860.448.957,20
13	Inspektorat Kota	2.045.339.055,76	(10.936.526,72)	2.034.402.529,04	180.905.439,83	2.215.307.968,87
14	Kecamatan Datuk Bandar	3.463.189.463,55	135.945.124,91	3.599.134.588,46	85.458.686,42	3.684.593.274,88
15	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	3.199.391.693,57	533.250.319,94	3.732.642.013,51	66.162.903,40	3.798.804.916,91
16	Kecamatan Tanjungbalai Utara	3.337.134.561,01	(381.829.257,13)	2.955.305.303,88	172.084.501,44	3.127.389.805,32
17	Kecamatan Sei Tualang Raso	3.245.523.981,30	235.480.506,86	3.481.004.488,16	158.025.376,69	3.639.029.864,85
18	Kecamatan Teluk Nibung	2.774.517.616,74	178.536.296,30	2.953.053.913,04	181.361.979,25	3.134.415.892,29
19	Kecamatan Datuk Bandar Timur	3.809.048.371,51	220.532.610,68	4.029.580.982,19	149.119.683,13	4.178.700.665,32
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.642.300.729,85	526.060.067,10	3.168.360.796,95	109.055.537,45	3.277.416.334,40
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	655.984.458.954,33	27.909.163.942,90	683.893.622.897,23	19.832.666.019,59	703.726.288.916,82
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	213.174.722.575,78	51.736.541.073,83	264.911.263.649,61	39.598.267.733,44	304.509.531.383,05
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.385.345.537,83	(31.394.838,25)	1.353.950.699,58	115.584.192,61	1.469.534.892,19
24	Satuan Polisi Pamong Praja	6.380.945.176,49	438.075.967,30	6.819.021.143,79	1.079.132.209,21	7.898.153.353,00
25	Dinas Ketenagakerjaan	1.202.638.014,16	172.602.518,74	1.375.240.532,90	17.560.487,64	1.392.801.020,54
26	Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.165.327.869,23	-	1.165.327.869,23	96.604.664,87	1.261.932.534,10
27	Dinas Lingkungan Hidup	17.784.748.813,44	610.070.750,04	18.394.819.563,48	1.124.312.414,42	19.519.131.977,90
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	5.619.525.482,52	(91.490.977,58)	5.528.034.504,94	160.020.548,88	5.688.055.053,82
29	Dinas Perhubungan	5.781.425.667,61	379.185.271,64	6.160.610.939,25	18.471.375,50	6.179.082.314,75

NO	OPD	Saldo Per 31 Des 2024	Koreksi Saldo awal (Kesalahan Sistem)	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penambahan	Saldo Per 31 Des 2025
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.684.954.162,05	44.360.703,50	6.729.314.865,55	162.774.076,42	6.892.088.941,97
31	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.774.434.565,65	1.507.991.689,29	4.282.426.254,94	3.296.506.480,81	7.578.932.735,75
32	Dinas Perikanan	7.407.859.791,30	1.161.457.826,49	8.569.317.617,79	369.067.505,41	8.938.385.123,20
33	Dinas Pangan dan Pertanian	7.214.895.914,37	294.257.112,49	7.509.153.026,86	669.601.260,76	8.178.754.287,62
34	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13.527.757.339,17	3.761.574.459,60	17.289.331.798,77	693.270.448,02	17.982.602.246,79
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.270.245.018,69	3.119.118.735,87	5.389.363.754,56	492.507.967,31	5.881.871.721,87
36	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.928.682.799,60	110.000,00	7.928.792.799,60	91.792.786,95	8.020.585.586,55
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.041.453.581,17	-	1.041.453.581,17	140.685.793,14	1.182.139.374,31
38	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	56.407.133.001,66	2.023.252.736,23	58.430.385.737,89	(4.140.037.688,13)	54.290.348.049,76
	Jumlah	1.311.329.644.058,55	158.890.380.420,42	1.470.220.024.478,97	85.158.750.945,86	1.555.378.775.424,83

LAMPIRAN 24

ASET TIDAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA OPD	TAHUN 2024	Biaya Umum	Mutasi Bidang Barang		Kurang Catat	Lebih Catat	JUMLAH		TAHUN 2025
				Masuk (Belanja Modal)	Keluar (Penghapusan)			Tambah	Kurang	
1	Badan Perencana Pembangunan Daerah	29.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.653.000,00
2	Badan Kepegawaian Daerah & Diklat	226.869.147,00	0,00	0,00	226.869.147,00	0,00	0,00	0,00	226.869.147,00	0,00
3	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	1.307.976.411,00	0,00	0,00	336.543.450,00	0,00	0,00	0,00	336.543.450,00	971.432.961,00
4	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	497.436.640,00	0,00	0,00	448.936.640,00	0,00	0,00	0,00	448.936.640,00	48.500.000,00
5	Dinas Sosial	76.250.000,00	0,00	49.951.998,00	76.250.000,00	0,00	0,00	49.951.998,00	76.250.000,00	49.951.998,00
6	Dinas Ketenagakerjaan	18.000.000,00	0,00	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,00	52.800.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	26.461.442,00	0,00	0,00	3.784.121,00	0,00	0,00	0,00	3.784.121,00	22.677.321,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu	63.958.812,00	0,00	0,00	63.958.812,00	0,00	0,00	0,00	63.958.812,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	403.415.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.415.202,00
11	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	29.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.748.000,00
12	Sekretariat Daerah	80.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.250.000,00
13	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00
14	Dinas Kesehatan	413.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.075.000,00
15	Se Dinas Pendidikan	1.335.471.789,00	0,00	0,00	1.335.471.789,00	0,00	0,00	0,00	1.335.471.789,00	0,00
	JUMLAH	5.028.565.443,00	0,00	84.751.998,00	2.491.813.959,00	0,00	0,00	84.751.998,00	2.491.813.959,00	2.621.503.482,00

LAMPIRAN 25

ASET LAIN LAIN - ASET RUSAK BERAT/ USANG

PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	Saldo Awal 2024	Koreksi	Saldo Awal 2024 Hasil Koreksi	Kenaikan/Penurunan	Saldo Awal 2025
1	Badan Perencana Pembangunan Daerah	288.872.170,60		288.872.170,60	56.019.802,20	344.891.972,80
2	Badan Kepegawaian Daerah & Diklat	1.008.981.502,36		1.008.981.502,36	(29.939.000,00)	979.042.502,36
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.323.653.322,69		1.323.653.322,69	-	1.323.653.322,69
4	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	2.129.877.390,91		2.129.877.390,91	150.231.028,10	2.280.108.419,01
5	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	1.128.826.246,14		1.128.826.246,14	(144.032.494,97)	984.793.751,17
6	Dinas Sosial	308.723.911,85	87.980.516,85	220.743.395,00	108.608.200,00	329.351.595,00
7	Dinas Perhubungan	4.832.881.568,42		4.832.881.568,42	44.059.720,95	4.876.941.289,37
8	Dinas Ketenagakerjaan	593.423.524,32		593.423.524,32	44.025.802,89	637.449.327,21
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.309.482.026,18		1.309.482.026,18	192.892.167,62	1.502.374.193,80
10	Inspektorat	962.575.540,02		962.575.540,02	1.532.857,00	964.108.397,02
11	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.183.389.596,68		1.183.389.596,68	53.459.725,00	1.236.849.321,68
12	Kecamatan Datuk Bandar	590.569.469,00		590.569.469,00	106.331.975,00	696.901.444,00
13	Kecamatan Datuk Bandar Timur	793.910.683,00		793.910.683,00	(10.965.024,00)	782.945.659,00
14	Kecamatan Sei. Tualang Raso	521.817.597,00		521.817.597,00	25.139.532,00	546.957.129,00
15	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	395.014.046,66		395.014.046,66	(34.535.178,66)	360.478.868,00
16	Kecamatan Tanjungbalai Utara	544.734.606,00		544.734.606,00	(152.805.189,98)	391.929.416,02
17	Kecamatan Teluk Nibung	737.981.650,00		737.981.650,00	(63.848.569,00)	674.133.081,00
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.179.910.872,00		1.179.910.872,00	(206.946.699,00)	972.964.173,00
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika	473.991.136,56		473.991.136,56	112.451.468,00	586.442.604,56
20	Dinas Lingkungan Hidup	17.436.639.370,65		17.436.639.370,65	806.840.664,00	18.243.480.034,65
21	DP3A PMK	173.818.200,00		173.818.200,00	-	173.818.200,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.327.681.020,00		1.327.681.020,00	1.940.878.206,00	3.268.559.226,00
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	924.012.591,23		924.012.591,23	(218.204.630,97)	705.807.960,26
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	541.656.567,44		541.656.567,44	221.465.519,00	763.122.086,44
25	Dinas Pangan Dan Pertanian	3.648.670.236,00		3.648.670.236,00	(51.665.514,00)	3.597.004.722,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3.261.358.493,67		3.261.358.493,67	(241.796.810,92)	3.019.561.682,75
27	Sekretariat DPRD	2.944.253.295,15		2.944.253.295,15	(22.737.252,42)	2.921.516.042,73
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	636.709.289,04		636.709.289,04	158.324.501,00	795.033.790,04
29	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.752.407.275,90		6.752.407.275,90	6.310.979.664,44	13.063.386.940,34

NO	OPD	Saldo Awal 2024	Koreksi	Saldo Awal 2024 Hasil Koreksi	Kenaikan/Penurunan	Saldo Awal 2025
1	Badan Perencana Pembangunan Daerah	288.872.170,60		288.872.170,60	56.019.802,20	344.891.972,80
2	Badan Kepegawaian Daerah & Diklat	1.008.981.502,36		1.008.981.502,36	(29.939.000,00)	979.042.502,36
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.323.653.322,69		1.323.653.322,69	-	1.323.653.322,69
30	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	5.132.669.079,14		5.132.669.079,14	(201.455.744,74)	4.931.213.334,40
31	Sekretariat Daerah	6.637.303.901,67		6.637.303.901,67	182.824.997,00	6.820.128.898,67
32	Walikota	-		-	-	0,00
33	Wakil Walikota	-		-	-	0,00
34	Pengelola BMD	2.274.547.249,44		2.274.547.249,44	187.257.792,57	2.461.805.042,01
35	Dinas Perikanan & Kelautan	1.196.621.756,00		1.196.621.756,00	33.828.080,00	1.230.449.836,00
36	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	19.354.272.344,59		19.354.272.344,59	8.015.697.735,75	27.369.970.080,34
37	Dinas Kesehatan	14.895.580.152,91		14.895.580.152,91	350.347.092,10	15.245.927.245,01
38	Se Dinas Pendidikan	22.716.824.024,35		22.716.824.024,35	(3.145.231.720,60)	19.571.592.303,75
	JUMLAH	130.163.641.707,57	87.980.516,85	130.075.661.190,72	14.579.032.701,36	144.654.693.892,08

LAMPIRAN 26

AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO 2024	Penambahan	Pengurangan	SALDO 2025
1	Dinas Pendidikan	1.335.471.789,00	0,00	1.335.471.789,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	365.067.500,00	48.007.500,00		413.075.000,00
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	230.000.000,00	115.000.000,00		345.000.000,00
4	Dinas Sosial	76.250.000,00	0,00	62.721.333,87	13.528.666,13
5	Dinas Ketenagakerjaan	9.000.000,00	5.950.000,00		14.950.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	497.436.640,00		448.936.640,00	48.500.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.461.442,00		3.784.121,00	22.677.321,00
8	Dinas Koperasi dan UKM	14.874.000,00	7.437.000,00		22.311.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	63.958.812,00		63.958.812,00	0,00
10	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	201.707.601,00	100.853.800,50		302.561.401,50
11	Sekretariat Daerah	80.250.000,00	0,00		80.250.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.653.000,00	0,00		29.653.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.258.276.411,00		311.693.450,00	946.582.961,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	226.869.147,00		226.869.147,00	0,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	15.000.000,00		45.000.000,00
	JUMLAH	4.445.276.342,00	292.248.300,50	2.453.435.292,87	2.284.089.349,63

LAMPIRAN 27

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN - ASET RUSAK BERAT/ USANG

PER 31 DESEMBER 2025

NO	OPD	Saldo Awal 2024	Koreksi	Saldo Awal 2024 Hasil Koreksi	Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025	Kenaikan / (Penurunan)	Saldo Akhir 2025
1	BKPSDM	0,00	(1.005.970.009,96)	(1.005.970.009,96)	0,00	28.433.253,80	(977.536.756,16)
2	BPBD	0,00	(1.245.878.847,44)	(1.245.878.847,44)	0,00	(11.210.497,25)	(1.257.089.344,69)
3	BAPPERIDA	(288.872.170,60)	0,00	(288.872.170,60)	0,00	(56.019.802,20)	(344.891.972,80)
4	BLUD RSUD T. Mansyur	(10.378.498.083,78)	(8.935.878.066,42)	(19.314.376.150,20)	(7.818.991.180,11)	(195.365.433,96)	(27.328.732.764,27)
5	BPKPD	(109.559.736.692,73)	107.433.059.301,82	(2.126.677.390,91)	(172.731.028,10)	22.500.000,00	(2.276.908.419,01)
6	Dinas Kesehatan	(304.217.645,00)	(14.054.004.688,35)	(14.358.222.333,35)	(895.197.783,90)	375.602.307,69	(14.877.817.809,56)
7	Dinas Koperasi	0,00	(636.709.289,04)	(636.709.289,04)	(158.324.500,00)	0,00	(795.033.789,04)
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(15.866.902.416,88)	(15.866.902.416,88)	(1.886.563.950,00)	963.062.492,91	(16.790.403.873,97)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	(6.582.034.630,65)	(6.582.034.630,65)	(6.886.806.040,42)	535.278.562,60	(12.933.562.108,47)
10	Dinas Pendidikan	(213.348.412,00)	(18.162.621.530,10)	(18.375.969.942,10)	(99.449.147,00)	2.118.567.950,50	(16.356.851.138,60)
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	(1.267.590.947,50)	(1.267.590.947,50)	(702.568.635,58)	(26.297.581,81)	(1.996.457.164,89)
12	Dinas Perikanan	0,00	(1.050.231.213,37)	(1.050.231.213,37)	(33.828.080,00)	(17.984.444,88)	(1.102.043.738,25)
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	(330.280.039,48)	(330.280.039,48)	(403.774.547,00)	0,00	(734.054.586,48)
14	Dinas Perumahan dan KP	0,00	(4.414.659.425,94)	(4.414.659.425,94)	0,00	(138.215.597,46)	(4.552.875.023,40)
15	Dinas PMPTSP	0,00	(924.012.591,23)	(924.012.591,23)	(9.993.284,00)	228.197.914,97	(705.807.960,26)
16	Dinas Sosial	0,00	(216.543.395,00)	(216.543.395,00)	(108.608.200,00)	(4.200.000,00)	(329.351.595,00)
17	Disdukcapil	0,00	(1.128.826.246,14)	(1.128.826.246,14)	(42.057.099,99)	186.089.594,96	(984.793.751,17)
18	Dishub	0,00	(4.826.238.370,99)	(4.826.238.370,99)	(149.660.768,71)	121.281.712,73	(4.854.617.426,97)
19	Diskominfo	0,00	(468.679.774,36)	(468.679.774,36)	0,00	(113.371.522,20)	(582.051.296,56)
20	Disnaker	0,00	(585.787.524,32)	(585.787.524,32)	(43.645.802,93)	(4.197.999,96)	(633.631.327,21)
21	Dispen KB	0,00	(1.183.389.596,68)	(1.183.389.596,68)	(145.402.100,00)	91.942.375,00	(1.236.849.321,68)
22	Disporapar	0,00	(934.937.871,34)	(934.937.871,34)	(206.821.016,52)	(20.472.636,12)	(1.162.231.523,98)
23	DP3A PMK	0,00	(168.818.200,00)	(168.818.200,00)	0,00	(2.190.000,00)	(171.008.200,00)
24	DPP	0,00	(3.130.458.299,86)	(3.130.458.299,86)	(25.161.486,00)	3.590.063,86	(3.152.029.722,00)
25	Inspektorat	0,00	(962.575.540,02)	(962.575.540,02)	(14.113.600,00)	12.580.743,00	(964.108.397,02)
26	Kec. Datuk Bandar	0,00	(588.628.603,80)	(588.628.603,80)	(121.552.785,71)	22.792.663,82	(687.388.725,69)
27	Kec. Datuk Bandar Timur	0,00	(778.410.683,00)	(778.410.683,00)	(33.329.457,00)	43.794.481,00	(767.945.659,00)

NO	OPD	Saldo Awal 2024	Koreksi	Saldo Awal 2024 Hasil Koreksi	Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025	Kenaikan / (Penurunan)	Saldo Akhir 2025
28	Kec. STR	0,00	(518.931.721,29)	(518.931.721,29)	(65.708.982,00)	37.683.574,29	(546.957.129,00)
29	Kec. Tanjungbalai Utara	0,00	(544.734.606,00)	(544.734.606,00)	0,00	152.805.189,98	(391.929.416,02)
30	Kec. TBS	0,00	(395.014.046,66)	(395.014.046,66)	(98.395.476,14)	141.919.226,23	(351.490.296,57)
31	Kec. Teluk Nibung	0,00	(733.307.774,29)	(733.307.774,29)	(9.000.000,00)	68.174.693,29	(674.133.081,00)
32	Kesbangpol	0,00	(1.074.662.882,00)	(1.074.662.882,00)	(31.987.000,00)	229.650.429,00	(876.999.453,00)
33	Satpol PP	0,00	(3.261.358.493,67)	(3.261.358.493,67)	0,00	241.796.810,92	(3.019.561.682,75)
34	Sekretariat Daerah	0,00	(6.518.334.767,96)	(6.518.334.767,96)	(316.659.983,33)	82.909.452,62	(6.752.085.298,67)
35	Sekretariat DPRD	0,00	(2.942.755.095,14)	(2.942.755.095,14)	(151.443.000,00)	173.182.052,42	(2.921.016.042,72)
36	Walikota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wakil Walikota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengelola BMD		(2.274.547.249,44)	(2.274.547.249,44)	(222.257.792,57)	35.000.000,00	(2.461.805.042,01)
		(120.744.673.004,11)	(280.655.136,50)	(121.025.328.140,61)	(20.854.032.727,01)	5.327.310.029,75	(136.552.050.837,87)

LAMPIRAN 28

ASET PROPERTI INVESTASI TANAH

PER 31 DESEMBER 2025

No	Jenis Barang/ Nama Barang Nama Barang	Kode barang	Register	Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga
							Hak	Sertifikat				
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	13	45		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 1	APBD	37.527.042,00
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	14	63		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 2	APBD	52.537.859,00
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	15	84		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 3	APBD	70.050.478,00
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	16	60		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 4	APBD	50.036.056,00
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	17	45		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 5	APBD	37.527.042,00
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	18	65		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 6	APBD	54.205.727,00
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	19	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 7	APBD	168.788.295,00
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	20	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 8	APBD	168.788.295,00
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	21	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 9	APBD	168.788.295,00
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	22	405		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 10	APBD	337.576.590,00
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	23	405		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 11	APBD	337.576.590,00
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	24	405		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 12	APBD	337.576.590,00
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	25	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 13	APBD	168.788.295,00
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	26	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 14	APBD	168.788.295,00
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	27	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 15	APBD	168.788.295,00
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	28	607		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 16	APBD	506.364.884,00
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	29	405		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 17	APBD	337.576.590,00
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	30	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 18	APBD	168.788.295,00
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	31	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 19	APBD	168.788.295,00
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	32	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 20	APBD	168.788.295,00
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	33	405		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 21	APBD	337.576.590,00
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	131010101004	34	202		Jl. Jend Sudirman Kel. Pahang	HAK PAKAI	04/11/2020	47	Komplek DPRD 22	APBD	168.788.295,00

[illegible]

LAMPIRAN 29

UTANG BELANJA BERDASARKAN OPD dan KODE REKENING

PER 31 DESEMBER 2025

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Pendidikan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	440.664.228,00	0,00	0,00	440.664.228,00	440.664.228,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	80.301.162,00	0,00	0,00	80.301.162,00	80.301.162,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.292.150,00	0,00	0,00	80.292.150,00	80.292.150,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.240.000,00	0,00	0,00	67.240.000,00	0,00	0,00	67.240.000,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.01.0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	94.145.000,00	0,00	0,00	94.145.000,00	0,00	0,00	94.145.000,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.01.0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.881.000,00	0,00	0,00	21.881.000,00	0,00	0,00	21.881.000,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.01.0035	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.544.000,00	0,00	0,00	5.544.000,00	5.544.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	100.200.000,00	0,00	0,00	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	55.965.000,00	0,00	0,00	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.02.0896	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	112.357.200,00	0,00	0,00	112.357.200,00	12.990.000,00	0,00	99.367.200,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.02.03.0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	69.300.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.06.01.0004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.735.279,26	0,00	0,00	1.735.279,26	0,00	0,00	1.735.279,26
Dinas Pendidikan	2.1.06.06.01.0029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman	44.027.563,29	0,00	0,00	44.027.563,29	17.372.203,03	0,00	26.655.360,26

Dinas Pendidikan	2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	59.600.000,00	0,00	0,00	59.600.000,00	0,00	0,00	59.600.000,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.09.02.0033	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	49.135.000,00	0,00	0,00	49.135.000,00	0,00	0,00	49.135.000,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.09.02.0045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	156.356.347,00	0,00	0,00	156.356.347,00	0,00	0,00	156.356.347,00
Dinas Pendidikan	2.1.06.09.02.0046	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	79.132.600,00	0,00	0,00	79.132.600,00	79.132.600,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			1.569.676.529,55	0,00	0,00	1.569.676.529,55	973.161.343,03	0,00	596.515.186,52

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Kesehatan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.447.676.711,00	0,00	0,00	1.447.676.711,00	1.447.676.711,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	294.405.000,00	0,00	0,00	294.405.000,00	294.405.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	122.593.900,00	0,00	0,00	122.593.900,00	122.593.900,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	120.700.000,00	0,00	0,00	120.700.000,00	120.700.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.400.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			2.043.975.611,00	0,00	0,00	2.043.975.611,00	2.043.975.611,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
BLUD RSUD T. Mansyur	2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	850.998.321,73	0,00	850.998.321,73	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD T. Mansyur	2.1.06.02.99.9999	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.810.639.593,38	5.535.616.165,35	0,00	17.346.255.758,73	5.903.116.343,90	3.666.382.360,17	15.109.521.775,00
BLUD RSUD T. Mansyur	2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	402.127.400,00	0,00	402.127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD T. Mansyur	2.1.06.07.07.0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	721.903.659,85	0,00	721.903.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD RSUD T. Mansyur	2.1.06.07.08.0129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik	910.839.500,00	0,00	910.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Kedoteran-Alat Kedokteran Umum			0,00	2.034.870.559,85	2.447.799,85	2.032.422.760,00	874.955.550,00	0,00	1.157.467.210,00
JUMLAH UTANG BELANJA			14.696.508.474,96	7.570.486.725,20	2.888.316.681,43	19.378.678.518,73	6.778.071.893,90	3.666.382.360,17	16.266.988.985,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas PUTR	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	162.568.297,00	0,00		162.568.297,00	162.568.297,00		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	73.700.750,00		73.700.750,00	26.385.167,00		47.315.583,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.01.0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	603.502.699,54		603.502.699,54	166.220.107,63		437.282.591,91
Dinas PUTR	2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	1.636.097.058,61		1.636.097.058,61	492.249.117,58		1.143.847.941,03
Dinas PUTR	2.1.06.02.01.0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	26.600.000,00		26.600.000,00			26.600.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	167.805.000,00			167.805.000,00	167.805.000,00		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0021	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air	31.185.000,00			31.185.000,00	31.185.000,00		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	38.610.000,00			38.610.000,00	38.610.000,00		0,00

Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	3.948.000,00		3.948.000,00			3.948.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0	707.695.100,00		707.695.100,00	212.308.530,00		495.386.570,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	28.215.000,00			28.215.000,00	28.215.000,00		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	13.365.000,00			13.365.000,00	13.365.000,00		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0896	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0	198.085.050,00		198.085.050,00	59.425.515,00		138.659.535,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0902	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0	24.950.000,00		24.950.000,00	7.485.000,00		17.465.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.02.02.0904	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	688.965.900,00		688.965.900,00	206.689.770,00		482.276.130,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.01.0022	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	4.300.000,00		4.300.000,00	0,00	0,00		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.02.0002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	150.000.000,00		150.000.000,00	60.200.000,00		89.800.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.05.0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0			0,00			0,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.05.0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.200.000,00			23.200.000,00	8.120.000,00		15.080.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.05.0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	59.200.000,00		59.200.000,00	0,00			0,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	7.700.000,00		7.700.000,00	2.695.000,00		5.005.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.08.0107	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	33.400.000,00			33.400.000,00	11.690.000,00		21.710.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.08.0112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0			0,00			0,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.10.0004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	6.900.000,00		6.900.000,00	0,00			0,00
Dinas PUTR	2.1.06.07.11.0005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	0	62.700.000,00		62.700.000,00	18.810.000,00		43.890.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.321.521.169,00		396.845.169,00	924.676.000,00	277.402.800,00		647.273.200,00
Dinas PUTR	2.1.06.08.01.0012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0,00		0,00		71.550.000,00	71.550.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.08.01.0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0	99.580.000,00		99.580.000,00	29.874.000,00		69.706.000,00

Dinas PUTR	2.1.06.08.01.0036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0	297.265.169,00		297.265.169,00	89.179.551,00		208.085.618,00
Dinas PUTR	2.1.06.08.04.0004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	4.501.807,12			4.501.807,12			4.501.807,12
Dinas PUTR	2.1.06.09.01.0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	12.762.781.075,75		7.040.113.605,12	5.722.667.470,63	2.423.013.499,42	79.188.942,54	3.378.842.913,75
Dinas PUTR	2.1.06.09.01.0014	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	0	99.190.000,00		99.190.000,00	29.757.000,00		69.433.000,00
Dinas PUTR	2.1.06.09.02.0004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	809.221.874,23		809.221.874,23	0,00			0,00
Dinas PUTR	2.1.06.09.02.0008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0	277.684.120,00		277.684.120,00	83.305.236,00		194.378.884,00
Dinas PUTR	2.1.06.09.02.0025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	74.624.000,00		74.624.000,00	22.387.200,00		52.236.800,00
Dinas PUTR	2.1.06.09.02.0042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0	641.722.827,33		641.722.827,33	572.382.790,33	19.939.500,00	89.279.537,00
Dinas PUTR	2.1.06.09.02.0048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0	1.096.535.016,88		1.096.535.016,88	328.960.505,06	11.694.188,00	779.268.699,82
Dinas PUTR	2.1.06.09.04.0007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	9.531.985,01			9.531.985,01	9.531.985,01		0,00
Dinas PUTR	2.1.06.09.04.0008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	1.441.883.553,31		1.441.883.553,31	444.610.369,35		997.273.183,96
JUMLAH UTANG BELANJA			15.476.306.208,11	8.216.929.244,67	8.316.580.648,35	15.376.654.804,43	6.024.431.440,38	182.372.630,54	9.534.595.994,59

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Perukim	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	105.777.836,00	0,00	0,00	105.777.836,00	105.777.836,00		-
Dinas Perukim	2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.843.414.250,00	0,00	1.843.414.250,00	552.484.275,00		1.290.929.975,00
Dinas Perukim	2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	296.630.750,00	0,00	296.630.750,00	88.989.225,00		207.641.525,00
Dinas Perukim	2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	48.535.200,00	0,00	48.535.200,00	14.560.560,00		33.974.640,00
Dinas Perukim	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	137.800.000,00	0,00	0,00	137.800.000,00	137.800.000,00		-

Dinas Perukim	2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	0,00	470.706.960,00	0,00	470.706.960,00	141.212.088,00		329.494.872,00
Dinas Perukim	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.700.000,00		6.300.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.02.03.0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0,00	199.650.000,00	0,00	199.650.000,00	59.895.000,00		139.755.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.06.01.0004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	8.454.000.000,00	0,00	8.454.000.000,00	4.000.000.000,00		4.454.000.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.02.0001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	48.796.000,00	0,00	48.796.000,00	14.638.800,00		34.157.200,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.05.0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	2.730.000,00		6.370.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.05.0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	2.970.000,00		6.930.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.440.000,00	0,00	0,00	28.440.000,00	8.532.000,00		19.908.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1.860.000,00		4.340.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.06.0001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00	2.685.000,00		6.265.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	429.000.000,00	0,00	0,00	429.000.000,00	128.700.000,00		300.300.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.10.0004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	3.840.000,00		8.960.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.07.10.0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	61.500.000,00	0,00	0,00	61.500.000,00	18.450.000,00		43.050.000,00
Dinas Perukim	2.1.06.08.01.0008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	-		89.870.850,00	89.870.850,00
Dinas Perukim	2.1.06.09.01.0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	4.690.739.550,00	0,00	0,00	4.690.739.550,00	1.425.184.865,00	3.992.500,00	3.269.547.185,00
Dinas Perukim	2.1.06.09.01.0010	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	8.299.600,00	0,00	3.333.250,00	4.966.350,00			4.966.350,00
Dinas Perukim	2.1.06.09.02.0048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	468.537.500,00	0,00	0,00	468.537.500,00	140.561.250,00		327.976.250,00
JUMLAH UTANG BELANJA			5.977.044.486,00	11.370.733.160,00	3.333.250,00	17.344.444.396,00	6.853.570.899,00	93.863.350,00	10.584.736.847,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
BPBD	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	78.348.866,00	0,00	0,00	78.348.866,00	78.348.866,00	0,00	0,00
BPBD	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	81.700.000,00	0,00	0,00	81.700.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			160.048.866,00	0,00	0,00	160.048.866,00	160.048.866,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Satpol PP	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	148.330.507,00	0,00	0,00	148.330.507,00	148.330.507,00	0,00	0,00
Satpol PP	2.1.06.02.02.0018	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	239.200.000,00	0,00	0,00	239.200.000,00	239.200.000,00	0,00	0,00
Satpol PP	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	181.800.000,00	0,00	0,00	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	0,00
Satpol PP	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
Satpol PP	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Satpol PP	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Satpol PP	2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			674.730.507,00	0,00	0,00	674.730.507,00	674.730.507,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Sosial	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.029.968,00	0,00	0,00	86.029.968,00	86.029.968,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	2.1.06.02.02.0020	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00

Dinas Sosial	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			168.189.968,00	0,00	0,00	168.189.968,00	168.189.968,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Ketenagakerjaan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.675.505,00	0,00	0,00	65.675.505,00	65.675.505,00	0,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Ketenagakerjaan	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			86.475.505,00	0,00	0,00	86.475.505,00	86.475.505,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Pangan dan Pertanian	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	121.822.124,00	0,00	0,00	121.822.124,00	121.822.124,00	0,00	0,00
Dinas Pangan dan Pertanian	2.1.06.01.02.0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	9.680.708,00	0,00	0,00	9.680.708,00	9.680.708,00	0,00	0,00
Dinas Pangan dan Pertanian	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Pangan dan Pertanian	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.100.800,00	0,00	0,00	1.100.800,00	1.100.800,00	0,00	0,00
Dinas Pangan dan Pertanian	2.1.06.02.03.0761	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

JUMLAH UTANG BELANJA	172.103.632,00	0,00	0,00	172.103.632,00	172.103.632,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.01.0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	381.400.000,00	0,00	0,00	381.400.000,00	381.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	38.200.000,00	0,00	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	50.900.000,00	0,00	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.02.02.0995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			586.500.000,00	0,00	0,00	586.500.000,00	586.500.000,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025

Disdukcapil	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.320.100,00	0,00	0,00	93.320.100,00	93.320.100,00	0,00	0,00
Disdukcapil	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	113.800.000,00	0,00	0,00	113.800.000,00	113.800.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			207.120.100,00	0,00	0,00	207.120.100,00	207.120.100,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dispen KB	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	76.049.197,00	0,00	0,00	76.049.197,00	76.049.197,00	0,00	0,00
Dispen KB	2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Dispen KB	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.300.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			102.349.197,00	0,00	0,00	102.349.197,00	102.349.197,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Perhubungan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	103.023.846,00	0,00	0,00	103.023.846,00	103.023.846,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.741.550,00	0,00	0,00	29.741.550,00	29.741.550,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan	94.500.000,00	0,00	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			248.565.396,00	0,00	0,00	248.565.396,00	248.565.396,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Diskominfo	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.054.302,00	0,00	0,00	65.054.302,00	65.054.302,00	0,00	0,00
Diskominfo	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
Diskominfo	2.1.06.02.02.0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Diskominfo	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Diskominfo	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00	0,00	0,00	45.400.000,00
Diskominfo	2.1.06.07.06.0006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
Diskominfo	2.1.06.07.10.0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	12.500.000,00	0,00	7.800.000,00
	2.1.06.02.03.0445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	2.1.06.02.03.0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	2.1.06.02.03.0439	Utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Komputer-Komputer Jaringan	0,00	19.175.000,00	0,00	19.175.000,00	0,00	0,00	19.175.000,00
		Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	35.000.000,00	0,00	45.000.000,00
		Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	9.000.000,00	0,00	21.000.000,00
		Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	199.975.000,00	0,00	199.975.000,00	59.992.500,00	0,00	139.982.500,00
		Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	60.025.000,00	0,00	60.025.000,00	8.132.500,00	0,00	51.892.500,00
		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00
		Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	3.375.000,00	0,00	7.875.000,00
		Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00		7.500.000,00

JUMLAH UTANG BELANJA	186.554.302,00	417.490.000,00	0,00	604.044.302,00	249.854.302,00	0,00	354.190.000,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Koperasi dan UKM	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	54.264.824,00	0,00	0,00	54.264.824,00	54.264.824,00		0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			54.264.824,00	0,00	0,00	54.264.824,00	54.264.824,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Disporapar	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	100.432.942,00		0,00	100.432.942,00	100.432.942,00	0,00	0,00
Disporapar	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00		13.689.600,00	13.689.600,00		0,00	13.689.600,00
Disporapar	2.1.06.02.03.0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0,00		199.500.000,00	199.500.000,00		0,00	199.500.000,00
Disporapar	2.1.06.07.19.0001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	31.510.000,00		0,00	31.510.000,00	31.510.000,00	0,00	0,00
Disporapar	2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	149.500.000,00		0,00	149.500.000,00		0,00	149.500.000,00
JUMLAH UTANG BELANJA			281.442.942,00	0,00	213.189.600,00	494.632.542,00	131.942.942,00	0,00	362.689.600,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Perpustakaan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.692.464,00	0,00	0,00	86.692.464,00	86.692.464,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00

Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.02.0044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan	19.200.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.02.03.0761	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.05.0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27.800.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.05.0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	36.852.000,00	0,00	0,00	36.852.000,00	36.852.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.004.000,00	0,00	0,00	30.004.000,00	30.004.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.05.0019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.06.0001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.850.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	46.650.000,00	0,00	0,00	46.650.000,00	46.650.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			316.598.464,00	0,00	0,00	316.598.464,00	316.598.464,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Perikanan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.444.227,00	0,00	0,00	90.444.227,00	90.444.227,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.1.06.02.01.0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	42.613.000,00	0,00	0,00	42.613.000,00	0,00	0,00	42.613.000,00
Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Dinas Perikanan	2.1.06.07.05.0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Dinas Perikanan	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Dinas Perikanan	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	2.1.06.07.10.0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
JUMLAH UTANG BELANJA			209.557.227,00	0,00	0,00	209.557.227,00	142.844.227,00	0,00	66.713.000,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Dinas Perindag	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.586.395,00	0,00	0,00	93.586.395,00	93.586.395,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			93.586.395,00	0,00	0,00	93.586.395,00	93.586.395,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Sekretariat Daerah	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	364.450.098,00	37.739.738,00	0,00	402.189.836,00	402.189.836,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.02.02.0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.400.000,00	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	55.300.000,00	0,00	0,00	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	114.650.000,00	0,00	0,00	114.650.000,00	114.650.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.02.02.0043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

Sekretariat Daerah	2.1.06.07.05.0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.999.000,00	0,00	0,00	4.999.000,00	1.499.700,00	0,00	3.499.300,00
Sekretariat Daerah	2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	207.799.000,00	0,00	0,00	207.799.000,00	62.339.700,00	0,00	145.459.300,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	104.900.000,00	0,00	104.900.000,00	31.470.000,00	0,00	73.430.000,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Barang pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	25.979.400,00	0,00	25.979.400,00	7.793.820,00	0,00	18.185.580,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan Gedung kantor	0,00	7.783.000,00	0,00	7.783.000,00	2.334.900,00	0,00	5.448.100,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I	0,00	249.750.000,00	0,00	249.750.000,00	64.543.000,00	0,00	185.207.000,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	33.836.830,00	0,00	33.836.830,00	10.151.000,00	0,00	23.685.830,00
Sekretariat Daerah		Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	289.675.000,00	0,00	289.675.000,00	86.902.500,00	0,00	202.772.500,00
JUMLAH UTANG BELANJA			783.598.098,00	779.463.968,00	0,00	1.563.062.066,00	875.574.456,00	0,00	687.487.610,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Sekretariat DPRD	2.1.06.02.01.0217	Utang Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	146.962.000,00	0,00	0,00	146.962.000,00	146.962.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			176.462.000,00	0,00	0,00	176.462.000,00	176.462.000,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Bapperida	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	122.874.305,00	0,00	0,00	122.874.305,00	122.874.305,00	0,00	0,00

Bapperida	2.1.06.07.10.0001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.162.000,00	0,00	38.000,00
Bapperida	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	134.090.000,00	0,00	0,00	134.090.000,00	134.090.000,00	0,00	0,00
Bapperida	2.1.06.07.10.0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	36.900.000,00	0,00	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			314.064.305,00	0,00	0,00	314.064.305,00	314.026.305,00	0,00	38.000,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
BPKPD	2.1.06.02.02.0995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.682.225,35	0,00	11.682.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKPD	2.1.06.09.01.0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	4.829.373.305,46	0,00	4.829.373.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			4.841.055.530,81	0,00	4.841.055.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
BKPSDM	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	115.374.702,00	0,00	0,00	115.374.702,00	115.374.702,00	0,00	0,00
BKPSDM	2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			124.374.702,00	0,00	0,00	124.374.702,00	124.374.702,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Inspektorat	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	245.922.689,00	0,00	0,00	245.922.689,00	245.922.689,00	0,00	0,00

Inspektorat	2.1.06.02.02.0046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			281.922.689,00	0,00	0,00	281.922.689,00	281.922.689,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Kec. Datuk Bandar	2.1.06.07.02.0010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar	2.1.06.07.03.0010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar	2.1.06.07.04.0010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	13.810.000,00	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar	2.1.06.07.05.0008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			28.480.000,00	0,00	0,00	28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Kec. Tanjungbalai Selatan	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	139.562.432,00	0,00	0,00	139.562.432,00	139.562.432,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Selatan	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.250.000,00	0,00	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Selatan	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			195.212.432,00	0,00	0,00	195.212.432,00	195.212.432,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	105.390.035,00	0,00	0,00	105.390.035,00	105.390.035,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	47.650.000,00	0,00	0,00	47.650.000,00	47.650.000,00	0,00	0,00

Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.07.05.0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.07.05.0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.850.000,00	0,00	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	54.450.000,00	0,00	0,00	54.450.000,00	54.450.000,00	0,00	0,00
Kec. Tanjungbalai Utara	2.1.06.07.10.0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			267.040.035,00	0,00	0,00	267.040.035,00	267.040.035,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Kec. Teluk Nibung	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	101.054.330,00	0,00	0,00	101.054.330,00	101.054.330,00	0,00	0,00
Kec. Teluk Nibung	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
Kec. Teluk Nibung	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	63.900.000,00	0,00	0,00	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00
Kec. Teluk Nibung	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.842.920,00	0,00	0,00	2.842.920,00	2.842.920,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			181.597.250,00	0,00	0,00	181.597.250,00	181.597.250,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	126.433.135,00	0,00	0,00	126.433.135,00	126.433.135,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00

Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00	74.550.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Kec. Datuk Bandar Timur	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			216.843.135,00	0,00	0,00	216.843.135,00	216.843.135,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Kec. Sei Tualang Raso	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	116.074.640,00	0,00	0,00	116.074.640,00	116.074.640,00	0,00	0,00
Kec. Sei Tualang Raso	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
Kec. Sei Tualang Raso	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.182.000,00	0,00	0,00	9.182.000,00	9.182.000,00	0,00	0,00
Kec. Sei Tualang Raso	2.1.06.02.01.0053	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.295.000,00	0,00	0,00	11.295.000,00	11.295.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			138.831.640,00	0,00	0,00	138.831.640,00	138.831.640,00	0,00	0,00

SKPD	KODE REKENING	NAMA REKENING	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
Badan Kesbangpol	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	74.846.905,00	0,00	0,00	74.846.905,00	74.846.905,00	0,00	0,00
Badan Kesbangpol	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
Badan Kesbangpol	2.1.06.02.02.0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00

Badan Kesbangpol	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Badan Kesbangpol	2.1.06.02.03.0571	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	29.970.000,00	0,00	0,00	29.970.000,00	29.970.000,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA			134.016.905,00	0,00	0,00	134.016.905,00	134.016.905,00	0,00	0,00
JUMLAH UTANG BELANJA KESELURUHAN			50.995.097.356,43						38.453.955.223,11
JUMLAH UTANG BELANJA KESELURUHAN DI APLIKASI SIPD			50.995.097.357,49						38.453.955.223,11
SELISIH			-1,06						0,00

UTANG BELANJA PER OPD

PER 31 DESEMBER 2025

No	NAMA OPD	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
1	Dinas Pendidikan	1.569.676.529,55	0,00	0,00	1.569.676.529,55	973.161.343,03	0,00	596.515.186,52
2	Dinas Kesehatan	2.043.975.611,00	0,00	0,00	2.043.975.611,00	2.043.975.611,00	0,00	0,00
3	BLUD RSUD Tengku Mansyur	14.696.508.474,96	8.415.469.079,05	2.888.316.681,43	20.223.660.872,58	12.307.550.958,75	8.350.879.071,17	16.266.988.985,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15.476.306.208,11	8.216.929.244,67	8.316.580.648,35	15.376.654.804,43	6.024.431.440,38	182.372.630,54	9.534.595.994,59
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.977.044.486,00	11.370.733.160,00	3.333.250,00	17.344.444.396,00	6.853.570.899,00	93.863.350,00	10.584.736.847,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.048.866,00	0,00	0,00	160.048.866,00	160.048.866,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	674.730.507,00	0,00	0,00	674.730.507,00	674.730.507,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	168.189.968,00	0,00	0,00	168.189.968,00	168.189.968,00	0,00	0,00
9	Dinas Ketenagakerjaan	86.475.505,00	0,00	0,00	86.475.505,00	86.475.505,00	0,00	0,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	172.103.632,00	0,00	0,00	172.103.632,00	172.103.632,00	0,00	0,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	586.500.000,00	0,00	0,00	586.500.000,00	586.500.000,00	0,00	0,00
12	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	207.120.100,00	0,00	0,00	207.120.100,00	207.120.100,00	0,00	0,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	102.349.197,00	0,00	0,00	102.349.197,00	102.349.197,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	248.565.396,00	0,00	0,00	248.565.396,00	248.565.396,00	0,00	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informasi	186.554.302,00	417.490.000,00	0,00	604.044.302,00	249.854.302,00	0,00	354.190.000,00
16	Dinas Koperasi dan UKM	54.264.824,00	0,00	0,00	54.264.824,00	54.264.824,00	0,00	0,00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	281.442.942,00	213.189.600,00	0,00	494.632.542,00	131.942.942,00	0,00	362.689.600,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	316.598.464,00	0,00	0,00	316.598.464,00	316.598.464,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	209.557.227,00	0,00	0,00	209.557.227,00	142.844.227,00	0,00	66.713.000,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93.586.395,00	0,00	0,00	93.586.395,00	93.586.395,00	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	783.598.098,00	779.463.968,00	0,00	1.563.062.066,00	875.574.456,00	0,00	687.487.610,00
22	Sekretariat DPRD	176.462.000,00	0,00	0,00	176.462.000,00	176.462.000,00	0,00	0,00
23	Bapperida	314.064.305,00	0,00	0,00	314.064.305,00	314.026.305,00	0,00	38.000,00
24	BPKPD	4.841.055.530,81	0,00	4.841.055.530,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BKPSDM	124.374.702,00	0,00	0,00	124.374.702,00	124.374.702,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	281.922.689,00	0,00	0,00	281.922.689,00	281.922.689,00	0,00	0,00
27	Kec. Datuk Bandar	28.480.000,00	0,00	0,00	28.480.000,00	28.480.000,00	0,00	0,00
28	Kec. Tanjungbalai Selatan	195.212.432,00	0,00	0,00	195.212.432,00	195.212.432,00	0,00	0,00
29	Kec. Tanjungbalai Utara	267.040.035,00	0,00	0,00	267.040.035,00	267.040.035,00	0,00	0,00
30	Kec. Teluk Nibung	181.597.250,00	0,00	0,00	181.597.250,00	181.597.250,00	0,00	0,00

No	NAMA OPD	SALDO 2024	KOREKSI KURANG CATAT 2024	KOREKSI LEBIH CATAT 2024	SALDO 2024 (Setelah dikoreksi)	PELUNASAN 2025	PENAMBAHAN 2025	SALDO 2025
31	Kec. Datuk Bandar Timur	216.843.135,00	0,00	0,00	216.843.135,00	216.843.135,00	0,00	0,00
32	Kec. Sei Tualang Raso	138.831.640,00	0,00	0,00	138.831.640,00	138.831.640,00	0,00	0,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.016.905,00	0,00	0,00	134.016.905,00	134.016.905,00	0,00	0,00
	JUMLAH UTANG BELANJA	50.995.097.356,43	29.413.275.051,72	16.049.286.110,59	64.359.086.297,56	34.532.246.126,16	8.627.115.051,71	38.453.955.223,11

LAMPIRAN 30

MUTASI TAMBAH DAN KURANG BEBAN BARANG PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Rekening	Belanja Barang - LRA	Tambah	Kurang	Beban Barang - LO	Selisih
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	186.187.263,46	0,00	0,00	186.187.263,46	0,00
2	Bahan-Bahan Kimia	69.495.713,00	1.523.168,00	681.834,00	70.337.047,00	(841.334,00)
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.762.041.497,00	87.390.350,00	77.166.717,00	1.772.265.130,00	(10.223.633,00)
4	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	406.922.700,00	0,00	38.167.300,00	368.755.400,00	38.167.300,00
5	Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	787.238,00	787.238,00	0,00	0,00
6	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.201.500,00	47.466.300,00	0,00	114.667.800,00	(47.466.300,00)
7	Bahan-Bahan Lainnya	1.342.460.863,00	192.488.325,00	580.028.989,00	954.920.199,00	387.540.664,00
8	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	116.160,00	29.040,00	87.120,00	(87.120,00)
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.821.840,00	0,00	0,00	4.821.840,00	0,00
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	999.999,00	0,00	0,00	999.999,00	0,00
12	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.041.400,00	0,00	0,00	3.041.400,00	0,00
13	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.973.800,00	0,00	0,00	3.973.800,00	0,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.036.597.490,00	970.796.543,01	1.141.874.384,61	3.865.519.648,40	171.077.841,60
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.119.468.054,00	112.557.905,00	94.212.491,00	1.137.813.468,00	(18.345.414,00)
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	293.187.350,00	480.721.000,00	(187.533.650,00)	187.533.650,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	314.334.595,00	420.000,00	1.920.000,00	312.834.595,00	1.500.000,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.374.206.392,00	546.820.045,00	429.600.728,00	1.491.425.709,00	(117.219.317,00)

No	Nama Rekening	Belanja Barang - LRA	Tambah	Kurang	Beban Barang - LO	Selisih
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	972.188.100,00	481.537.200,00	313.008.252,00	1.140.717.048,00	(168.528.948,00)
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.473.967.898,00	116.357.304,00	21.733.280,00	1.568.591.922,00	(94.624.024,00)
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	270.499.576,00	283.363.686,00	43.638.132,00	510.225.130,00	(239.725.554,00)
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	191.976.961,00	109.340.000,00	31.510.000,05	269.806.960,95	(77.829.999,95)
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	691.873.627,00	1.400.000,00	3.375.000,00	689.898.627,00	1.975.000,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.260.903.867,00	5.085.800,00	66.975.100,00	2.199.014.567,00	61.889.300,00
25	Obat-Obatan-Obat	2.022.232.121,00	7.064.581.955,27	5.609.190.629,41	3.477.623.446,86	(1.455.391.325,86)
26	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	207.506.175,00	357.665.778,69	278.931.384,00	286.240.569,69	(78.734.394,69)
27	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.780.799.535,63	684.802.499,54	915.395.790,26	3.550.206.244,91	230.593.290,72
28	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.239.840.712,24	1.636.097.058,61	1.073.487.460,16	4.802.450.310,69	(562.609.598,45)
29	Natura dan Pakan-Natura	6.604.000,00	51.998.800,00	51.998.800,00	6.604.000,00	0,00
30	Natura dan Pakan-Pakan	57.832.000,00	0,00	0,00	57.832.000,00	0,00
31	Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	756.368.096,00	21.911.000,00	560.000,00	777.719.096,00	(21.351.000,00)
32	Makanan dan Minuman Rapat	6.073.599.748,00	0,00	14.560.560,00	6.059.039.188,00	14.560.560,00
33	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.354.206.062,00	0,00	11.295.000,00	3.342.911.062,00	11.295.000,00
34	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.912.196.619,00	0,00	0,00	1.912.196.619,00	0,00
35	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
36	Pakaian Sipil Harian (PSH)	121.545.000,00	0,00	0,00	121.545.000,00	0,00
37	Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.778.492,00	0,00	0,00	90.778.492,00	0,00
38	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.644.632,00	26.600.000,00	0,00	76.244.632,00	(26.600.000,00)
39	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	25.794.590,00	0,00	0,00	25.794.590,00	0,00
40	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	28.720.000,00	0,00	0,00	28.720.000,00	0,00

No	Nama Rekening	Belanja Barang - LRA	Tambah	Kurang	Beban Barang - LO	Selisih
41	Pakaian Siaga	56.848.650,00	0,00	0,00	56.848.650,00	0,00
42	Pakaian Pelatihan Kerja	29.588.008,00	0,00	0,00	29.588.008,00	0,00
43	Pakaian KORPRI	19.980.000,00	0,00	0,00	19.980.000,00	0,00
44	Pakaian Adat Daerah	114.725.000,00	0,00	0,00	114.725.000,00	0,00
45	Pakaian Batik Tradisional	60.850.607,00	0,00	0,00	60.850.607,00	0,00
46	Pakaian Olahraga	108.045.800,00	0,00	0,00	108.045.800,00	0,00
47	Pakaian Paskibraka	142.222.350,00	0,00	0,00	142.222.350,00	0,00
48	Komponen-Komponen Lainnya	124.320,00	0,00	0,00	124.320,00	0,00
49	Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	4.000.000,00	4.300.000,00	(300.000,00)	300.000,00
50	Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	14.638.800,00	(14.638.800,00)	14.638.800,00
51	Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	150.000.000,00	60.200.000,00	89.800.000,00	(89.800.000,00)
52	Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	25.141.042,00	(25.141.042,00)	25.141.042,00
53	Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
54	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	943.500,00	0,00	943.500,00	(943.500,00)
55	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
56	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	0,00	8.410.200,00	0,00	8.410.200,00	(8.410.200,00)
57	Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
58	Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	(152.000,00)
59	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	(420.000,00)
60	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	115.118.347,50	23.200.000,00	91.918.347,50	(91.918.347,50)
61	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	29.001.400,00	0,00	29.001.400,00	(29.001.400,00)
62	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	1.596.548.805,74	59.200.000,00	1.537.348.805,74	(1.537.348.805,74)

No	Nama Rekening	Belanja Barang - LRA	Tambah	Kurang	Beban Barang - LO	Selisih
63	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	22.359.883,00	4.500.000,00	17.859.883,00	(17.859.883,00)
64	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	155.501.800,00	86.900.000,00	68.601.800,00	(68.601.800,00)
65	Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.420.800,00	0,00	1.420.800,00	(1.420.800,00)
66	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	(29.500.000,00)
67	Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	4.794.098,00	0,00	4.794.098,00	(4.794.098,00)
68	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	619.504.452,00	0,00	619.504.452,00	(619.504.452,00)
69	Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	601.703.700,00	(601.703.700,00)	601.703.700,00
70	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)
71	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	(33.400.000,00)
72	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	33.400.000,00	(33.400.000,00)	33.400.000,00
73	Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	273.251.850,00	273.251.850,00	0,00	0,00
74	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	6.900.000,00	(6.900.000,00)	6.900.000,00
75	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)
76	Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	8.905.030,00	7.800.000,00	1.105.030,00	(1.105.030,00)
77	Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric	0,00	62.700.000,00	0,00	62.700.000,00	(62.700.000,00)
78	Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	31.510.000,00	(31.510.000,00)	31.510.000,00
79	Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	(705.000,00)
80	Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	228.692.803,04	396.906.463,63	(168.213.660,59)	168.213.660,59
81	Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	200.000.000,00	110.129.150,00	89.870.850,00	(89.870.850,00)
82	Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	71.550.000,00	0,00	71.550.000,00	(71.550.000,00)
83	Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	99.580.000,00	0,00	99.580.000,00	(99.580.000,00)
84	Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	297.265.169,00	0,00	297.265.169,00	(297.265.169,00)

No	Nama Rekening	Belanja Barang - LRA	Tambah	Kurang	Beban Barang - LO	Selisih
85	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	159.188.942,54	7.116.121.105,12	(6.956.932.162,58)	6.956.932.162,58
86	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	0,00	99.190.000,00	0,00	99.190.000,00	(99.190.000,00)
87	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	809.221.874,23	(809.221.874,23)	809.221.874,23
88	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	277.684.120,00	0,00	277.684.120,00	(277.684.120,00)
89	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	174.275.400,00	0,00	174.275.400,00	(174.275.400,00)
90	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	661.662.327,33	0,00	661.662.327,33	(661.662.327,33)
91	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	79.132.600,00	(79.132.600,00)	79.132.600,00
92	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	1.108.229.204,88	0,00	1.108.229.204,88	(1.108.229.204,88)
93	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	9.987.050,00	0,00	9.987.050,00	(9.987.050,00)
94	Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	1.441.883.553,31	0,00	1.441.883.553,31	(1.441.883.553,31)
JUMLAH		39.842.965.653,33	21.045.282.202,46	21.025.005.694,47	39.863.242.161,32	(20.276.507,99)

LAMPIRAN 31

MUTASI TAMBAH DAN KURANG BEBAN JASA PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Rekening	Belanja Jasa - LRA	Tambah	Kurang	Beban Jasa - LO	Selisih
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.085.700.000,00	0,00	0,00	1.085.700.000,00	0,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.682.690.000,00	0,00	674.499.132,00	2.008.190.868,00	674.499.132,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	0,00
4	Honorarium Rohaniwan	28.200.000,00	0,00	0,00	28.200.000,00	0,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	21.360.000,00	0,00	0,00	21.360.000,00	0,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	46.560.000,00	0,00	0,00	46.560.000,00	0,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	185.400.000,00	0,00	0,00	185.400.000,00	0,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	510.000.000,00	0,00	0,00	510.000.000,00	0,00
9	Jasa Tenaga Pendidikan	273.600.000,00	0,00	0,00	273.600.000,00	0,00
10	Jasa Tenaga Kesehatan	11.018.212.178,00	0,00	120.700.000,00	10.897.512.178,00	120.700.000,00
11	Jasa Tenaga Laboratorium	146.380.500,00	0,00	1.000.000,00	145.380.500,00	1.000.000,00
12	Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.936.899.442,00	0,00	188.205.000,00	1.748.694.442,00	188.205.000,00
13	Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.540.732.000,00	0,00	239.200.000,00	2.301.532.000,00	239.200.000,00
14	Jasa Tenaga Penanganan Sosial	495.900.000,00	0,00	34.500.000,00	461.400.000,00	34.500.000,00
15	Jasa Tenaga Sumber Daya Air	340.541.500,00	0,00	31.185.000,00	309.356.500,00	31.185.000,00
16	Jasa Tenaga Perhubungan	880.500.000,00	0,00	94.500.000,00	786.000.000,00	94.500.000,00
17	Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	263.377.241,00	0,00	0,00	263.377.241,00	0,00
18	Jasa Tenaga Administrasi	6.261.231.500,00	0,00	443.910.000,00	5.817.321.500,00	443.910.000,00

No	Nama Rekening	Belanja Jasa - LRA	Tambah	Kurang	Beban Jasa - LO	Selisih
19	Jasa Tenaga Operator Komputer	576.610.000,00	0,00	39.100.000,00	537.510.000,00	39.100.000,00
20	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.785.740.688,00	3.948.000,00	883.212.000,00	10.906.476.688,00	879.264.000,00
21	Jasa Tenaga Ahli	6.497.890.947,00	707.695.100,00	484.177.618,00	6.721.408.429,00	(223.517.482,00)
22	Jasa Tenaga Kebersihan	6.875.210.210,00	0,00	575.625.000,00	6.299.585.210,00	575.625.000,00
23	Jasa Tenaga Keamanan	2.900.899.008,00	0,00	102.465.000,00	2.798.434.008,00	102.465.000,00
24	Jasa Tenaga Caraka	26.100.000,00	0,00	0,00	26.100.000,00	0,00
25	Jasa Tenaga Supir	889.146.000,00	0,00	79.300.000,00	809.846.000,00	79.300.000,00
26	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	97.494.000,00	0,00	13.600.000,00	83.894.000,00	13.600.000,00
27	Jasa Audit/Surveillance ISO	1.704.775.000,00	0,00	0,00	1.704.775.000,00	0,00
28	Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	145.100.000,00	0,00	0,00	145.100.000,00	0,00
29	Jasa Tata Rias	279.151.500,00	0,00	0,00	279.151.500,00	0,00
30	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	31.410.000,00	0,00	0,00	31.410.000,00	0,00
31	Jasa Penulisan dan Penerjemahan	31.300.000,00	0,00	1.500.000,00	29.800.000,00	1.500.000,00
32	Jasa Pelayanan Perpustakaan	139.053.000,00	0,00	19.200.000,00	119.853.000,00	19.200.000,00
33	Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	247.897.000,00	0,00	36.000.000,00	211.897.000,00	36.000.000,00
34	Jasa Penyelenggaraan Acara	78.373.500,00	0,00	0,00	78.373.500,00	0,00
35	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	428.712.276,00	0,00	0,00	428.712.276,00	0,00
36	Jasa Kalibrasi	88.084.050,00	0,00	0,00	88.084.050,00	0,00
37	Jasa Pengolahan Sampah	553.807.600,00	0,00	50.900.000,00	502.907.600,00	50.900.000,00
38	Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.493.750,00	0,00	0,00	1.493.750,00	0,00
39	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	294.183.330,00	0,00	9.000.000,00	285.183.330,00	9.000.000,00
40	Tagihan Air	702.679.347,00	0,00	3.943.720,00	698.735.627,00	3.943.720,00

No	Nama Rekening	Belanja Jasa - LRA	Tambah	Kurang	Beban Jasa - LO	Selisih
41	Tagihan Listrik	8.573.721.355,00	0,00	0,00	8.573.721.355,00	0,00
42	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.271.242.500,00	0,00	0,00	1.271.242.500,00	0,00
43	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.158.655.264,00	0,00	37.700.000,00	2.120.955.264,00	37.700.000,00
44	Paket/Pengiriman	52.386.000,00	0,00	0,00	52.386.000,00	0,00
45	Registrasi/Keanggotaan	64.500.000,00	0,00	0,00	64.500.000,00	0,00
46	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.321.216,00	0,00	0,00	12.321.216,00	0,00
47	Rekening Penerangan Jalan Umum	492.061.262,00	0,00	0,00	492.061.262,00	0,00
48	Lembur	149.916.000,00	0,00	0,00	149.916.000,00	0,00
49	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1.462.029.000,00	0,00	94.709.400,00	1.367.319.600,00	94.709.400,00
50	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	52.428.000,00	0,00	3.400.000,00	49.028.000,00	3.400.000,00
51	jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	640.200.000,00	0,00	0,00	640.200.000,00	0,00
52	jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
53	Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	69.600.000,00	0,00	0,00	69.600.000,00	0,00
54	jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	4.251.213.500,00	0,00	0,00	4.251.213.500,00	0,00
55	jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	218.209.000,00	0,00	0,00	218.209.000,00	0,00
56	jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	1.814.697.500,00	0,00	0,00	1.814.697.500,00	0,00
57	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.055.130.000,00	0,00	0,00	16.055.130.000,00	0,00
58	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.385.200.000,00	0,00	0,00	1.385.200.000,00	0,00
59	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	83.862.490,10	0,00	0,00	83.862.490,10	0,00
60	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	100.960.011,90	0,00	0,00	100.960.011,90	0,00
61	Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	53.022.900,00	0,00	0,00	53.022.900,00	0,00
62	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	82.800.000,00	0,00	0,00	82.800.000,00	0,00

No	Nama Rekening	Belanja Jasa - LRA	Tambah	Kurang	Beban Jasa - LO	Selisih
63	Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	56.304.000,00	0,00	0,00	56.304.000,00	0,00
64	Sewa Tanah Persil Lainnya	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00
65	Sewa Electric Generating Set	19.485.000,00	0,00	0,00	19.485.000,00	0,00
66	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	573.951.440,00	0,00	0,00	573.951.440,00	0,00
67	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
68	Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
69	Sewa Alat Kantor Lainnya	1.152.276.000,00	0,00	0,00	1.152.276.000,00	0,00
70	Sewa Mebel	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
71	Sewa Alat Studio Lainnya	207.833.750,00	0,00	0,00	207.833.750,00	0,00
72	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	133.460.000,00	0,00	0,00	133.460.000,00	0,00
73	Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.106.000,00	0,00	0,00	5.106.000,00	0,00
74	Sewa Bangunan Terbuka	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
75	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
76	Sewa Bangunan Parkir	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
77	Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.700.000,00	0,00	0,00	36.700.000,00	0,00
78	Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
79	Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	(66.000.000,00)
80	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	88.206.000,00	0,00	0,00	88.206.000,00	0,00
81	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.149.707.260,00	198.085.050,00	537.635.293,00	810.157.017,00	339.550.243,00
82	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	607.174.200,00	0,00	0,00	607.174.200,00	0,00
83	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	597.574.100,00	0,00	248.995.250,00	348.578.850,00	248.995.250,00
84	Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	7.485.000,00	24.950.000,00	7.485.000,00	24.950.000,00	(17.465.000,00)

No	Nama Rekening	Belanja Jasa - LRA	Tambah	Kurang	Beban Jasa - LO	Selisih
85	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	206.689.770,00	688.965.900,00	206.689.770,00	688.965.900,00	(482.276.130,00)
86	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	219.124.700,00	0,00	25.386.714,00	193.737.986,00	25.386.714,00
87	Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	398.589.000,00	0,00	398.589.000,00	0,00	398.589.000,00
88	Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
89	Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	129.803.400,00	0,00	0,00	129.803.400,00	0,00
90	Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	137.872.250,00	0,00	0,00	137.872.250,00	0,00
91	Kursus Singkat/Pelatihan	110.780.000,00	0,00	0,00	110.780.000,00	0,00
92	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	74.921.000,00	0,00	0,00	74.921.000,00	0,00
93	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	62.933.640,00	0,00	0,00	62.933.640,00	0,00
94	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	8.990.520,00	0,00	0,00	8.990.520,00	0,00
95	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.990.520,00	0,00	0,00	8.990.520,00	0,00
96	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.996.840,00	0,00	0,00	2.996.840,00	0,00
97	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.488.940,00	0,00	0,00	10.488.940,00	0,00
98	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.798.104,00	0,00	0,00	1.798.104,00	0,00
99	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.251.349,00	0,00	0,00	2.251.349,00	0,00
100	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.388.851,00	0,00	0,00	96.388.851,00	0,00
101	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	52.444.700,00	0,00	0,00	52.444.700,00	0,00
102	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	191.000.000,00	0,00	0,00	191.000.000,00	0,00
103	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
104	Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
	JUMLAH	108.738.377.900,00	1.719.644.050,00	5.782.312.897,00	104.675.709.053,00	4.062.668.847,00